



Kementerian Koordinator
Bidang Kesejahteraan Rakyat



SENSUS INFRASTRUKTUR

Laporan tentang Kesiapan Suplai
Infrastruktur di Indonesia –
Capaian dan Kesenjangan yang
Masih Terjadi



Sensus Infrastruktur PODES 2011

Tata Letak dan Design Sampul

Ardhi Yudho

Dipublikasikan oleh

*Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
bekerjasama dengan TNP2K dan PNPM Support Facility*

*Segala pandangan yang disampaikan dalam karya tulis ini adalah
milik penulis dan tidak mencerminkan pandangan PNPM Support
Facility atau pihak-pihak manapun yang tercantum di sini.*

SENSUS INFRASTRUKTUR

Laporan tentang Kesiapan Suplai
Infrastruktur di Indonesia –
Capaian dan Kesenjangan yang
Masih Terjadi

Disusun oleh
Robert Sparrow
Marc Vothknecht

2011

Singkatan, Akronim dan Istilah

BPS Badan Pusat Statistik

D3 Diploma 3

KDP Program Pembangunan Kecamatan (*Kecamatan Development Program*)

NTB Nusa Tenggara Barat

NTT Nusa Tenggara Timur

OLS *Ordinary Least Squares*

PCA Analisis Komponen Prinsipal (*Principal Components Analysis*)

PSF (*PNPM Support Facility*)

PAUD Pendidikan Anak Usia Dini

PNPM Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat

PODES Potensi Desa

Polindes Pondok Bersalin Desa

Poskesdes Pos Kesehatan Desa

Posyandu Pos Pelayanan Kesehatan Terpadu

Puskesmas Pusat Kesehatan Masyarakat

Puskesmas Pembantu Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu

S1 Sarjana 1

SD Sekolah Dasar

SLB Sekolah Luar Biasa

SMA Sekolah Menengah Atas

SMK Sekolah Menengah Kejuruan

SMP Sekolah Menengah Pertama

Susenar Survei Sosial Ekonomi Nasional

TK Taman Kanak-Kanak

WHO Organisasi Kesehatan Dunia (*World Health Organization*)

DAFTAR ISI

Daftar Isi **iii**

Ringkasan Eksekutif **iv**

I. Pendahuluan **1**

II. Data dan Metodologi **3**

- II.1. PODES Utama 2011 dan Sensus Infrastruktur **4**
- II.2. Metodologi **8**

III. Infrastruktur Kesehatan **11**

- III.1. Seleksi Indikator-indikator Kesiapan Suplai **12**
- III.2. Deskripsi Pola Nasional Ketersediaan Infrastruktur **15**
- III.3. Indeks-indeks Komposit Kesiapan Suplai Kesehatan **21**
- III.4. Menghitung Kebutuhan Investasi **26**

IV. Infrastruktur Pendidikan **31**

- IV.1. Seleksi Indikator-indikator Kesiapan Suplai **32**
- IV.2. Deskripsi Pola Nasional Ketersediaan Infrastruktur **34**
- IV.3. Sebuah Indeks Komposit Kesiapan Suplai Pendidikan **40**
- IV.4. Menghitung Kebutuhan Investasi **45**

V. Infrastruktur Transportasi **49**

- V.1. Seleksi Indikator-indikator Kesiapan Suplai **50**
- V.2. Pola Nasional Ketersediaan Infrastruktur **52**
- V.3. Menghitung Kebutuhan Investasi **54**
- V.4. Perbandingan dengan Kesiapan Suplai Kesehatan dan Pendidikan **55**

VI. Rangkuman dan Rekomendasi Kebijakan **57**

- VI.1. Pola Nasional Kesiapan Suplai Infrastruktur **58**
- VI.2. Rekomendasi Kebijakan **60**

Referensi **62**

Lampiran **63**

RINGKASAN EKSEKUTIF

Atas permintaan Wakil Presiden dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), dalam sensus pedesaan tingkat nasional tahun 2011 atau yang dikenal dengan nama PODES, telah dilakukan pendataan infrastruktur dasar pedesaan khususnya fasilitas kesehatan dan pendidikan. Analisis atas informasi dari hasil sensus infrastruktur maupun sensus utama PODES ini memiliki dua tujuan. Pertama, menggunakan informasi terperinci yang ada mengenai kualitas dan kuantitas infrastruktur, untuk menilai secara komprehensif ketersediaan fasilitas dan layanan-layanan dasar di tingkat lokal. Indikator-indikator khusus dibuat untuk mengukur ketersediaan suplai pelayanan kesehatan dan pendidikan di semua kabupaten dan kecamatan di Indonesia. Kedua, analisis atas pola lokal ketersediaan infrastruktur ini akan digunakan untuk menghitung kebutuhan investasi di sektor kesehatan, pendidikan dan infrastruktur transportasi.

Sensus infrastruktur menghasilkan informasi yang detil mengenai level fasilitas publik di sektor kesehatan dan pendidikan, meliputi 166.506 fasilitas kesehatan dan 164.561 sekolah di seluruh Indonesia. Data mengenai ketersediaan fisik fasilitas kesehatan dan pendidikan (negeri dan swasta) yang diperoleh dari sensus infrastruktur dan dari sensus utama PODES, diolah untuk mendapatkan sebuah gambaran mengenai kesiapan suplai pelayanan kesehatan dan pendidikan di Indonesia. Tujuh indikator bagi masing-masing sektor kesehatan dan pendidikan telah diseleksi untuk kepentingan analisis ini, dibagi dalam tiga dimensi: (i) ketersediaan dan aksesibilitas fasilitas-fasilitas; (ii) kehadiran dan kualifikasi pekerja, dan (iii) karakter fisik fasilitas.

Semua indikator mewakili satu norma atau target kesiapan suplai, dan dihitung pada level Kecamatan. Kesenjangan dalam hal suplai dikuantifikasi berdasarkan indikator-indikator tersebut. Untuk sektor kesehatan dan

pendidikan, semua indikator digabung menjadi indeks komposit kesiapan suplai. Beberapa indikator kesiapan suplai juga tersedia untuk infrastruktur transportasi, meskipun data mengenai infrastruktur transportasi dari PODES tidak selengkap data untuk sektor kesehatan dan pendidikan.

Temuan-temuan utama dari analisis ini adalah:

- Secara umum, ditemukan gambaran yang konsisten mengenai kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar yang tersedia di Indonesia. Kami menemukan pola spasial yang sama mengenai kesiapan suplai di semua dimensi pada sektor kesehatan maupun pendidikan. Lebih jauh, hasil lengkap di semua sektor menunjukkan ada korelasi positif yang signifikan antara berbagai indikator infrastruktur kesehatan, pendidikan, dan transportasi.
- Kesenjangan terbesar dalam hal kesiapan suplai infrastruktur ditemukan di wilayah Papua, kepulauan Maluku, NTT, juga pedalaman Kalimantan dan Sulawesi. Ada perbedaan yang substansial antara daerah perkotaan dan pedesaan, tidak hanya dalam hal aksesibilitas, tapi juga menyangkut kualitas pelayanan-pelayanan yang tersedia.
- Skor rata-rata terendah untuk sektor kesehatan ditemukan di provinsi Kalimantan Barat (75%), NTT (71%), Maluku Utara (69%), Maluku (66%), Papua Barat (50%), dan Papua (39%). Adapun skor rata-rata tertinggi untuk tingkat kesiapan suplai kesehatan ditemukan di seluruh provinsi di Jawa (dari 99% di DI Yogyakarta hingga 92% di Banten), Bali (99%), Bangka Belitung (95%), Sumatera Barat (92%), dan NTB (90%).
- Pola serupa muncul pada peringkat rata-rata kesiapan suplai pendidikan, di mana DKI Jakarta (98%) dan DI Yogyakarta (97%) merupakan yang terbaik, sementara Papua

Barat (40%) dan Papua (26%) terburuk. Pola semacam ini secara umum juga tampak pada indikator-indikator infrastruktur transportasi.

- Disamping tren umum yang konsisten tersebut, kami menemukan adanya variasi yang substansial di dalam setiap wilayah dan provinsi. Identifikasi atas disparitas di tingkat lokal semacam ini bisa dilakukan lantaran data untuk indikator-indikator yang dikaji tersedia hingga level kecamatan.
- Untuk sektor pendidikan, kami menemukan bahwa 9 juta penduduk tinggal di wilayah yang tidak memiliki SMP. Jumlah tersebut meningkat menjadi 16,6 juta penduduk, manakala yang diukur adalah fasilitas pendidikan usia dini.
- Investasi yang dibutuhkan serta besarnya ketimpangan daerah dihitung berdasarkan pada indikator-indikator kesiapan suplai. Perhitungan ini secara khusus dilakukan atas – namun tidak terbatas pada – jumlah penduduk yang tidak memiliki akses mudah ke fasilitas kesehatan dan pendidikan. Diperkirakan lebih dari 6 juta penduduk di Indonesia tidak memiliki akses (yang mudah) ke layanan kesehatan dasar, dan sekitar 36 juta penduduk tidak memiliki akses ke layanan rawat jalan di rumah-rumah sakit. Kami juga menemukan lebih dari 9 juta orang tinggal di daerah-daerah yang tidak memiliki sekolah menengah pertama. Lebih dari itu, ada 16,6 juta anak tinggal di daerah yang jauh dari fasilitas pendidikan usia dini.

Singkatnya, analisis sensus infrastruktur PODES 2011 memberikan detail dan penilaian terbaru mengenai ketersediaan infrastruktur dasar di Indonesia. Berikut hal-hal yang bisa dilakukan oleh pemerintah nasional dan lokal, organisasi internasional, lembaga swadaya masyarakat, dan komunitas ilmuwan:

- Indikator yang tersedia hingga pada level kecamatan dapat digunakan untuk merumuskan intervensi kebijakan yang perlu dilakukan dan program-program infrastruktur yang lebih tepat sasaran.
- Data-data ini perlu disebarluaskan secara aktif agar dapat digunakan secara luas oleh para pemangku kepentingan, pemerintah maupun swasta, yang terlibat dalam penyediaan layanan sosial di Indonesia. Dengan adanya data-data ini, para pemangku kepentingan barangkali tidak perlu lagi mengeluarkan biaya untuk mengumpulkan informasi sejenis.
- Sosialisasi indikator-indikator ini kepada masyarakat luas – terutama jika ditemukan ada ketidaksetaraan antara lokal dan regional – mungkin dapat membantu meningkatkan transparansi, dan dengan demikian meningkatkan akuntabilitas politik di tingkat lokal.
- Penilaian atas suplai layanan-layanan dasar di tingkat lokal membuka peluang bagi banyak analisis lanjutan, termasuk kombinasi dengan: (i) sensus terkait infrastruktur kesehatan dan pendidikan lokal untuk perbandingan dan pelengkap; (ii) set data sosial-ekonomi lain untuk meriset faktor-faktor penentu suplai, permintaan, dan hasil pelayanan di tingkat lokal; dan (iii) data atau informasi tentang biaya-biaya, untuk memperkirakan ketimpangan keuangan dalam upaya mengatasi kekurangan infrastruktur di tingkat nasional, regional dan lokal.

Akhirnya, penting untuk melakukan sensus utama PODES secara reguler, dan mengulangi sensus infrastruktur di masa depan, sehingga memungkinkan pengawasan yang berkelanjutan atas kualitas dan kuantitas infrastruktur desa.



I. PENDAHULUAN



PENDAHULUAN

Selama dekade lalu pemerintah Indonesia telah menginvestasikan sumber daya dalam jumlah yang signifikan melalui berbagai pendekatan pembangunan berbasis komunitas. Tujuannya adalah mengurangi kemiskinan dan menyediakan infrastruktur berskala kecil di daerah pedesaan. Berawal dari kecamatan-kecamatan yang paling miskin – sebagaimana *Kecamatan Development Program* atau Program Pembangunan Kecamatan (KDP) yang terdahulu – Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)-Perdesaan diperluas hingga menjangkau setiap kecamatan dan desa di Indonesia. PNPM-Perdesaan telah menggunakan sebagian besar dari anggarannya yang mencapai miliaran dolar, untuk membantu komunitas-komunitas di pedesaan membangun infrastruktur skala kecil di daerahnya. Bantuan diberikan dalam bentuk hibah. Beberapa penelitian menyimpulkan program-program ini memberikan hasil dan pengaruh yang positif (Olken et al., 2011; Bank Dunia, 2011), namun tetap saja masih ada banyak hal yang belum diketahui menyangkut: kekurangan infrastruktur di berbagai daerah, biaya untuk mengatasi kekurangan tersebut melalui program PNPM yang berkelanjutan atau program lainnya, dan bagaimana cara yang paling efisien untuk mengatasinya. Hingga saat ini pendekatan-pendekatan yang dikembangkan Pemerintah Indonesia ternyata kurang komprehensif dan tak sepenuhnya berdasarkan pada fakta, dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan utama seperti: apakah dan seberapa besar infrastruktur tersier berpengaruh pada upaya pemberantasan kemiskinan; kapan dan di mana perawatan dibutuhkan; dan bagaimana menentukan jumlah dana hibah. Alasan terjadinya digunakan pendekatan-pendekatan yang kurang komprehensif adalah tidak tersedianya data yang lengkap dan komprehensif mengenai infrastruktur-infrastruktur yang ada saat ini. Sulit mengembangkan sebuah pendekatan yang sistematis, terfokus dan berdasarkan fakta, untuk mengatasi kesenjangan melalui PNPM dan program-program lainnya, jika tak ada data lengkap mengenai di mana dan sejauh mana terjadi kesenjangan infrastruktur.

Memenuhi permintaan Wakil Presiden dan TNP2K, tim Monitoring dan Evaluasi Fasilitas Pendukung PNPM (*PNPM Support Facility/PSF*) melakukan sebuah sensus infrastruktur dasar di 76.000 desa Indonesia dalam PODES 2011. Tujuan utama dari sensus tersebut adalah menghitung secara kuantitatif kesenjangan pada infrastruktur dasar yang masih bisa dipergunakan, dengan kualitas yang dapat diterima, di seluruh pedesaan di Indonesia (jalan utama, jembatan, sekolah, klinik kesehatan). Data ini nantinya menjadi masukan bagi upaya pengembangan strategi yang lebih baik untuk pendanaan, penetapan kerangka waktu, penyusunan program dan manajemen seluruh sumber daya dari dalam maupun luar negeri untuk program-program PNPM. Diharapkan, data yang terkumpul serta hasil analisis ini dapat membantu pemerintah menemukan sebuah mekanisme yang tepat untuk memperkirakan dan menelusuri kesenjangan infrastruktur yang masih ada, dan untuk mengatasi defisit infrastruktur desa di level nasional, regional dan lokal. Data yang sama juga bisa digunakan sebagai acuan dalam merancang sebuah pendekatan yang lebih sistematis dan faktual, guna menentukan kebutuhan dan prioritas PNPM selanjutnya (termasuk penetapan target, perawatan dan penentuan besaran dana hibah), mengukur dampak dari program-program pengurangan kemiskinan berbasis komunitas, dan menentukan alokasi bagi pemerintahan lokal. Laporan ini memberikan gambaran yang detil mengenai analisis dan hasil-hasil utamanya. Bagian II menjelaskan mengenai data dan metodologi yang digunakan. Bagian III dan IV menerangkan tentang pemilihan indikator-indikator dan kelengkapannya, serta distribusi indikator-indikator tersebut pada sektor kesehatan dan pendidikan, secara berurutan. Kami memaparkan hasil analisis mengenai infrastruktur transportasi pada Bagian V, dan menutup laporan ini dengan sebuah ringkasan, serta beberapa catatan kesimpulan dan saran menyangkut kebijakan-kebijakan yang bisa dilakukan.

II. DATA DAN METODOLOGI



II.1. PODES Utama 2011 dan Sensus Infrastruktur

Pada 2011, tim Monitoring dan Evaluasi PNPM Support Facility/PSF melakukan sebuah sensus atas infrastruktur dasar di pedesaan, termasuk di sektor kesehatan dan pendidikan, bersamaan dengan sensus Potensi Desa (PODES 2011). PODES adalah sensus yang dilakukan oleh BPS, tiga kali setiap 10 tahun, untuk mengumpulkan informasi tentang kondisi sosial-ekonomi masyarakat di pedesaan maupun perkotaan di Indonesia.¹ Sensus utama PODES menggunakan berbagai indikator, dari karakteristik penduduk hingga infrastruktur, aktivitas ekonomi, dan kehidupan sosial. Menggunakan informasi yang telah tersedia dari PODES menyangkut infrastruktur kesehatan, pendidikan dan transportasi, analisis ini bertujuan untuk memberikan gambaran terbaru yang akurat mengenai suplai layanan dan infrastruktur dasar di tingkat lokal.

Data PODES untuk setiap desa mengandung informasi mengenai (i) jenis dan jumlah fasilitas pendidikan dan kesehatan yang ada; (ii) jarak ke fasilitas terdekat jika di desa tersebut tidak tersedia fasilitas dimaksud;² (iii) jumlah dokter, perawat dan bidan; dan (iv) jenis dan kondisi jalan serta jembatan yang tersedia. Informasi mengenai jumlah fasilitas kesehatan dan pendidikan dari PODES utama ini, kami lengkapi dengan informasi tentang kualitas fasilitas-fasilitas tersebut dari sensus infrastruktur. Menggunakan daftar fasilitas kesehatan dan pendidikan dari sensus utama PODES, sensus infrastruktur mengumpulkan informasi yang mendalam, langsung dari fasilitas-fasilitas tersebut, mengenai fasilitas kesehatan publik (termasuk sampel utuh dari 9.212 Puskesmas, 22.883 Puskesmas Pembantu,

28.672 Poskesdes dan 14.408 Polindes, dan sebuah sub sampel dari 91.331 Posyandu), juga fasilitas pendidikan di sekolah-sekolah negeri (termasuk 134.517 sekolah dasar (SD), 21.530 sekolah menengah pertama (SMP), dan sekolah menengah atas (6.224 SMA / 2.589 SMK).

Data yang saling melengkapi dari kedua sumber tersebut memungkinkan dilakukan sebuah penilaian yang komprehensif atas kuantitas maupun kualitas infrastruktur kesehatan dan pendidikan di Indonesia. Dan sejauh data yang ada memungkinkan, kami juga mengevaluasi tingkat reliabilitas sensus tersebut. Informasi pada PODES utama disusun berdasarkan respon para pemimpin desa, karena itu bukan tidak mungkin ada laporan dari penguasa lokal yang berbeda dengan keadaan sebenarnya. Jika para responden berharap jawaban mereka akan mempengaruhi alokasi dana publik untuk desa atau secara umum, ada keraguan atas tujuan sensus, maka keadaan fasilitas dan pelayanan publik di desa tersebut mungkin tidak dilaporkan secara akurat. Selain itu, responden tunggal bisa menimbulkan masalah manakala dia tidak sepenuhnya memahami berbagai aspek kehidupan desa.

Reliabilitas data dinilai melalui beberapa cara. Pertama, BPS dan PSF menerapkan serangkaian kontrol kualitas dalam proses pengumpulan data, di antaranya dengan mengirim konsultan independen untuk memverifikasi data, mengecek di tempat (hingga ke daerah pedalaman), dan kembali ke lokasi jika ditemukan banyak kesalahan data inkonsistensi data menyangkut daerah tersebut. Kedua, selama proses analisis kami

1 PODES 2011 meliputi 78.600 desa/pemukiman.

2 Untuk fasilitas kesehatan, PODES menyediakan informasi tambahan mengenai seberapa mudah satu jenis fasilitas tertentu dapat dicapai dari desa yang disurvei.

mengevaluasi konsistensi informasi-informasi hasil sensus tersebut (lihat Bagian II.2 untuk pendekatan secara metodologi). Selanjutnya, informasi mengenai infrastruktur kesehatan dan pendidikan yang tersedia dari set data PODES Utama dan Sensus Infrastruktur disajikan secara lebih terperinci.

Informasi Mengenai Infrastruktur Kesehatan

Informasi mengenai layanan kesehatan yang tersedia dari data PODES dapat dikategorikan dalam empat dimensi: (i) ketersediaan dan mampu diakses secara fisik; (ii) tenaga kerja kesehatan; (iii) layanan dan peralatan; dan (iv) karakteristik bangunan. Tabel II.1 memberikan gambaran mengenai variabel yang telah tersedia untuk masing-masing dimensi tersebut.

Data PODES utama berisi informasi tentang berbagai jenis fasilitas kesehatan di desa, seperti rumah sakit, rumah sakit bersalin, Poliklinik, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Poskesdes, Polindes, dan Posyandu, juga tempat praktek dokter dan dokter kandungan. Jika fasilitas yang disebutkan tidak tersedia di sebuah desa/lingkungan, PODES menyertakan informasi tambahan mengenai a) jarak ke; dan b) kemudahan mencapai fasilitas serupa terdekat.

Baik PODES dan sensus infrastruktur menyertakan informasi mengenai jumlah dokter, dokter gigi, bidan, perawat dan petugas kesehatan lain yang bekerja pada fasilitas-fasilitas kesehatan di desa.³ Sensus infrastruktur juga berisi informasi mengenai layanan serta peralatan yang tersedia di fasilitas yang disensus. Variabel-variabel ini tidak tersedia untuk fasilitas-fasilitas yang tidak termasuk dalam sensus (misalnya rumah sakit, poliklinik, tempat praktek dokter dan bidan). Karena itu penggabungan informasi ini pada level desa atau kecamatan, hanya akurat untuk kecamatan-kecamatan yang tidak memiliki

poliklinik dan rumah sakit (ini berlaku pada sekitar 60% dari 6.771 kecamatan). Terakhir, sensus infrastruktur menyediakan informasi mengenai karakteristik bangunan-bangunan, namun kondisi fisiknya lebih tepat dinilai berdasarkan ketersediaan arus listrik, suplai air bersih, serta kualitas atap dan lantai.

Informasi Mengenai Infrastruktur Pendidikan

Data mengenai suplai pendidikan dan infrastruktur dari PODES dan sensus infrastruktur juga dikategorikan ke dalam tiga dimensi: (i) ketersediaan fisik; (ii) jumlah pelajar dan karakteristik guru; dan (iii) karakteristik fasilitas dan ruangan yang tersedia. Tabel II.2 memberikan sebuah gambaran.

Informasi mengenai sekolah negeri SD, SMP, SMA dan SMK tersedia dari hasil sensus PODES dan sensus infrastruktur. Tapi PODES menyediakan informasi tambahan tentang fasilitas pendidikan usia dini (PAUD dan TK), juga informasi mengenai jumlah fasilitas swasta untuk semua tipe sekolah, termasuk akademi, sekolah khusus (SLB), pesantren, dan madrasah diniyah. Juga dapat ditemukan pada PODES informasi mengenai jarak ke sekolah terdekat untuk setiap jenis sekolah, jika fasilitas tersebut tidak tersedia di sebuah desa atau lingkungan pemukiman.

Sensus infrastruktur menyediakan informasi menyangkut jumlah murid (menurut jenis kelamin dan jenjang), jumlah guru, jenis kontrak mereka (tetap atau sementara), dan tingkat pendidikan mereka (lulusan S1 atau lebih tinggi *versus* D3 atau yang lebih rendah) di sekolah-sekolah negeri. Berdasarkan informasi ini dihitung rata-rata murid per kelas, rasio guru-murid dan jumlah guru tetap dan/atau guru yang memiliki gelar sarjana di setiap sekolah.

³ Sebagian angka dari kedua survei tersebut berbeda secara substansial. Ini karena fokus data PODES yang lebih luas (termasuk rumah sakit, poliklinik, tempat praktek dokter dan bidan).

Sebagaimana pada sensus fasilitas kesehatan, sensus atas sekolah pun mendata informasi tentang karakteristik bangunan, khususnya menyangkut ketersediaan listrik dan air pada fasilitas tersebut, juga kualitas material serta kondisi atap dan lantainya. Sensus tersebut juga mengumpulkan informasi mengenai ruangan yang tersedia, termasuk jumlah kelas, laboratorium, perpustakaan, kamar mandi, lapangan olahraga, ruang UKS dan ruang pegawai.

Sama dengan hasil sensus fasilitas kesehatan, sensus atas sekolah pun memberikan informasi menyangkut karakteristik bangunan. Tapi kami hanya fokus pada informasi mengenai ketersediaan listrik dan air dalam setiap fasilitas, serta jenis bahan dan kualitas atap maupun lantai. Laporan tersebut juga berisi informasi tentang ketersediaan ruangan, termasuk jumlah ruang sekolah, laboratorium, perpustakaan, kamar mandi, lapangan olahraga, ruangan UKS dan ruang guru dan kepala sekolah.

Tabel II.1: Informasi Mengenai Infrastruktur Kesehatan dari PODES

Dimensi	Indikator-indikator
1. Ketersediaan dan Aksesibilitas Fisik	<p>Tersedia tiga indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Jumlah fasilitas per 10.000 penduduk · Persentase masyarakat yang dapat mencapai fasilitas dengan mudah · Jarak ke fasilitas terdekat <p>Untuk tipe fasilitas berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Rumah Sakit · Poliklinik · Rumah Bersalin · Puskesmas · Puskesmas Pembantu · Poskesdes · Polindes · Tempat praktek dokter · Tempat praktek bidan
2. Tenaga kerja Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> · Dokter: jumlah dalam desa dan jarak ke/kemudahan menjangkau tempat praktek berikut. · Bidan: jumlah dalam desa dan jarak ke/kemudahan menjangkau tempat praktek terdekat. · Dokter gigi: jumlah dalam desa · Perawat dan tenaga kesehatan lainnya: jumlah dalam desa
3. Pelayanan dan Peralatan	<p>Sensus infrastruktur memberikan informasi menyangkut ketersediaan layanan-layanan berikut (pada fasilitas-fasilitas yang disensus):</p> <ul style="list-style-type: none"> · layanan rawat inap · layanan dokter gigi · pemeriksaan kehamilan · kelahiran dengan bantuan dokter/bidan · layanan imunisasi · layanan KB · laboratorium · layanan timbang · penyediaan vitamin A · penyediaan pil zat besi · ketersediaan inkubator · perlengkapan penyimpanan vaksin
4. Karakteristik Bangunan	<p>Aliran listrik</p> <p>Sumber air</p> <p>Jenis serta kondisi atap dan tembok</p>

Table II.2: Informasi Mengenai Infrastruktur Pendidikan dari PODES

Dimensi	Indikator-indikator
Ketersediaan Fisik (negeri dan swasta)	<ul style="list-style-type: none"> · Jumlah fasilitas per 10.000 penduduk · Jarak ke fasilitas berikut
Murid dan Guru (untuk sekolah negeri)	<ul style="list-style-type: none"> · Rasio guru-murid · Jumlah murid per kelas · Persentase guru tetap/S1
Karakteristik Fasilitas dan Ruang yang Tersedia (untuk sekolah negeri)	<ul style="list-style-type: none"> · Perpustakaan · Laboratorium · Aliran listrik · Sumber air · Jenis serta kondisi atap dan tembok



II.2. Metodologi

Bagian ini secara umum menjelaskan langkah-langkah utama yang dilakukan dalam analisis, yakni metodologi dan implementasinya. Penjelasan yang lebih terperinci ada pada apendiks-apendiks yang bersifat teknis, sementara bab-bab dalam laporan ini hanya akan berisi temuan-temuan utama.

Tujuan pokok, sekaligus tantangan dari analisis ini adalah sedapat mungkin menggunakan informasi yang berlimpah dari PODES, untuk memberikan sebuah penjelasan yang terpercaya dan dapat dijangkau luas mengenai keadaan infrastruktur di pedesaan Indonesia. Di satu pihak, kami ingin memberikan penjelasan yang komprehensif atas berbagai aspek suplai pelayanan di tingkat lokal. Di pihak lain, kami bermaksud memadatkan informasi yang tersedia ke dalam indikator-indikator yang ringkas agar memudahkan orang memahami laporan ini. Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, analisis kesiapan suplai infrastruktur dilakukan dalam tiga fase utama: (i) menentukan indikator-indikator utama dan menganalisis distribusi indikator-indikator tersebut secara geografis; (ii) membuat sebuah indeks komposit berdasarkan indikator-indikator terpilih; dan (iii) menghitung kesenjangan suplai.

Seleksi indikator-indikator utama

Data hasil sensus desa dari PODES utama dan sensus infrastruktur digabungkan agar semua informasi yang tersedia dapat dimanfaatkan. Agar menjadi satu set data yang tunggal, sebelum digabungkan dengan data PODES, terlebih dahulu informasi dari sensus infrastruktur mengenai level fasilitas diubah ke dalam indikator-indikator tingkat desa. Indikator-indikator infrastruktur kesehatan, pendidikan dan transformasi di tingkat lokal ini juga disatukan pada level kecamatan, kabupaten dan provinsi. Studi ini mengutamakan analisis atas data-data pada level kecamatan, dengan tiga alasan utama: (i) banyak institusi kesehatan dan pendidikan, seperti Puskesmas atau sekolah

menengah pertama, tersedia di tingkat kecamatan; (ii) program-program pembangunan berbasis komunitas yang menonjol di Indonesia menjadikan wilayah kecamatan sebagai target; dan (iii) lebih besar kemungkinan untuk mendapatkan informasi yang akurat dan detil pada tingkat kecamatan.

Informasi yang tersedia dari kedua sensus, berdasarkan pada set data kecamatan, dieksplorasi guna mendapatkan indikator yang paling cocok untuk menggambarkan kesiapan suplai kesehatan dan pendidikan. Seleksi atas indikator-indikator juga mengacu pada perangkat statistik yang digunakan, seperti variasi indikator-indikator secara nasional dan korelasi di antara indikator yang berbeda. Kami berkonsultasi dengan ahli dan mempertimbangkan target resmi Pemerintah ketika menentukan realitas lokal dan prioritas kebijakan yang paling diwakili oleh indikator-indikator tersebut. Aturan umumnya: indikator-indikator kesiapan suplai mendapatkan bobot nilai antara 0 dan 1, yang menggambarkan tingkat penyebaran penduduk, fasilitas atau wilayah geografis yang memenuhi ketentuan atau batas kesiapan suplai. Kami memilih sedikitnya dua indikator untuk setiap dimensi pada sektor kesehatan dan pendidikan. Hasilnya, secara keseluruhan kami mendapatkan tujuh indikator untuk masing-masing sektor tersebut. Dan meskipun data mengenai infrastruktur transportasi dari PODES tidak selengkap informasi untuk sektor kesehatan dan pendidikan, data-data tersebut tetap bisa dipakai untuk mendapatkan beberapa indikator kesiapan suplai.

Analisis atas perangkat statistik indikator-indikator tersebut, hingga batas tertentu, memungkinkan adanya pengujian validitas data. Secara khusus kami mengevaluasi korelasi antar indikator, baik pada sektor yang sama atau pun lintas sektor, untuk menemukan pola-pola umum dalam data. Evaluasi ini memberikan kami sebuah ukuran mengenai konsistensi data, sekaligus sebuah indikator tingkat kepercayaan dari peringkat relatif infrastruktur pedesaan di seluruh negeri. Kemudian, kami menghubungkan indikator-

indikator kesiapan suplai yang terpilih dengan *output-output* aktual dari sistem kesehatan dan pendidikan --- ini cara kami (yang agak kasar) untuk menguji validasi eksternal data PODES. Tapi untuk mengukur akurasi tingkat absolut kesiapan suplai, data PODES tetap saja perlu dibandingkan dengan data mengenai infrastruktur dasar pedesaan hasil sensus kuantitatif lain, atau dengan kajian kualitatif di lapangan. Meski tidak masuk dalam analisis ini, perbandingan dengan data yang sedang dikumpulkan oleh Pemerintah Indonesia dan pihak lain akan menjadi pelengkap yang sangat bermanfaat bagi studi ini.

Penyusunan indeks-indeks komposit untuk kesehatan dan pendidikan

Indeks komposit kesiapan suplai untuk setiap sektor pada dasarnya menunjukkan bobot rata-rata dari indikator-indikator terpilih. Karena itu bobot untuk indeks ini pun dibatasi antara 0 dan 1. Nilai lebih tinggi menunjukkan tingkat kesiapan suplai yang lebih tinggi, meski sebenarnya interpretasi atas nilai itu juga tergantung pada bobot yang melekat pada setiap indikator. Indeks komposit, dengan demikian, lebih cocok digunakan untuk membandingkan performa relatif, daripada performa absolut kabupaten-kabupaten. Perlu dicatat bahwa kami tidak membuat indeks komposit untuk infrastruktur transportasi, karena terbatasnya jumlah indikator.

Memilih metode untuk menentukan bobot merupakan sebuah langkah yang krusial, dan diakui bersifat arbitrer, dalam menyusun indeks komposit kesiapan infrastruktur di Indonesia. Hal ini penting lantaran bobot menentukan pengaruh relatif dari setiap indikator utama indeks komposit. Dan dikatakan arbitrer karena pemberian bobot mau tidak mau melibatkan sebuah proses penentuan nilai. Karena itu argumentasi dan metode yang digunakan dalam pembobotan harus transparan. Kami mempertimbangkan tiga metode yang berbeda untuk menetapkan bobot, masing-masing dengan pilihan, argumentasi dan intuisi yang secara implisit berbeda. Tentu saja kami juga bertekad untuk menjaga agar metode-metode tersebut tidak terlalu berbelit-belit.

Pertama, bobot-bobot kami dasarkan pada preferensi kebijakan yang eksplisit. Skema pembobotan yang demikian memang sangat arbitrer, namun hal ini menguntungkan karena pilihan-pilihan yang tersedia secara eksplisit merefleksikan prioritas kebijakan yang berbeda dan terbuka untuk diselidiki dan didebat. Di sini, kami mengusulkan tiga skema pembobotan yang secara prinsip bersifat arbitrer:

- i. Bobot yang relatif lebih besar bagi indikator-indikator pada dimensi ketersediaan fisik, untuk memberikan tekanan pada pentingnya peran ketersediaan fasilitas bagi pelayanan kesehatan dan pendidikan.
- ii. Bobot yang seimbang bagi semua dimensi aksesibilitas. Karena jumlah indikator di masing-masing dimensi bisa berbeda, bobot setiap indikator pun tak akan sama.
- iii. Bobot yang sama untuk tujuh indikator kesiapan suplai.

Kedua, bobot ditentukan menggunakan Analisis Komponen Prinsipal (*Principal Components Analysis/PCA*), sebuah metode statistik untuk merangkum informasi dari sejumlah besar variabel yang saling terhubung.⁴ Kami menentukan komponen prinsipal pertama, yakni kombinasi linear dari indikator-indikator terpilih yang paling menggambarkan variasi dalam data, dan menggunakan *eigenvectors* komponen pertama tersebut sebagai bobot pembanding untuk indeks komposit. Keunggulan PCA, dia tidak begitu arbitrer karena itu kami membiarkan kovarian dalam data menentukan prioritas-prioritas kebijakan. Meski demikian, bobot-bobot yang ditentukan melalui PCA sulit untuk diinterpretasi dan dikaitkan dengan prioritas-prioritas kebijakan.

4 Aplikasi PCA yang terkenal adalah indeks aset, di mana informasi mengenai kepemilikan sejumlah item diringkas menjadi indeks tunggal.

Ketiga, dalam menilai hasil aktual sistem kesehatan dan pendidikan, seperti pemanfaatan layanan kesehatan oleh mereka yang berpotensi menjadi pasien atau rata-rata nilai Ujian Nasional (UN), kami menghubungkan skema pembobotan untuk indikator-indikator kesiapan suplai dengan tujuan-tujuan eksplisit dari setiap kebijakan. Dua metode digunakan untuk mengukur nilai penting relatif dari indikator suplai yang berbeda untuk hasil-hasil sektor kesehatan dan pendidikan:

- i. Bobot ditentukan berdasarkan kontribusi indikator-indikator suplai terhadap nilai absolut dari output sektor pendidikan dan kesehatan, dengan menggunakan regresi OLS atas indikator-indikator terpilih pada variabel hasil di tingkat kabupaten. Koefisien-koefisien yang dihitung kemudian digunakan untuk menentukan bobot-bobot tersebut.
- ii. Penetapan bobot didasarkan pada kontribusi indikator-indikator suplai terhadap ketidakseimbangan variabel-variabel hasil sektor kesehatan atau pendidikan. Kami menghitung ketidakseimbangan dengan menggunakan sebuah indeks terpadu, yang kami urai menjadi indeks-indeks individual yang menjelaskan kontribusi ketujuh indikator suplai. Kontribusi-kontribusi individual ini merupakan produk dari (i) daya tanggap (elastisitas) dari variabel-variabel hasil dengan memperhatikan indikator-indikator suplai, dan (ii) ketidaksetaraan dalam distribusi indikator-indikator suplai antar kabupaten. Uraian detail mengenai ketidaksetaraan ada di Appendix 1.

Menghitung kesenjangan yang ada

Kekurangan-kekurangan dalam kesiapan suplai infrastruktur saat ini dan kebutuhan akan suplai yang berhubungan dengan itu, kemudian dihitung berdasarkan indikator-indikator utama. Kesenjangan suplai ditunjukkan oleh selisih dari nilai maksimum 1. Akhirnya, nilai biaya diberikan

pada kesenjangan yang teridentifikasi untuk menghitung ketimpangan dalam pembiayaan, demi memastikan suplai infrastruktur di seluruh Indonesia berada pada tingkatan yang bisa diterima. Kami membuat beberapa skenario berbeda dengan menggunakan asumsi dan acuan yang tidak sama. Secara khusus, kami membedakan antara level kekurangan absolut dan kekuangan relatif dalam hal akses ke infrastruktur-infrastruktur dasar.

Secara umum, dua pendekatan yang berbeda mungkin digunakan untuk mengidentifikasi prioritas-prioritas yang menjadi target. Pertama, intervensi kebijakan dapat tertuju pada wilayah-wilayah yang sebagian besar penduduk, fasilitas, atau desa-desanya kekurangan infrastruktur tertentu. Salah satu target kebijakan yang mungkin dibuat dengan pendekatan ini, adalah meningkatkan kesiapan suplai di semua kecamatan di Indonesia hingga mencapai sebuah nilai, katakanlah 0,75. Karena daerah kecamatan yang paling tertinggal kebanyakan terletak di pedesaan dengan tingkat kepadatan penduduk yang rendah, relatif hanya sedikit penduduk yang akan mendapat manfaat dari perbaikan infrastruktur di daerah-daerah ini.

Pilihan lain, prioritas investasi dapat ditentukan berdasarkan jumlah absolut penduduk yang memiliki akses terbatas ke layanan-layanan dasar. Dengan pendekatan kedua ini, fokus akan beralih, setidaknya sebagian, dari daerah pedalaman berpenduduk jarang yang hanya memiliki sedikit infrastruktur, ke daerah yang lebih ramai dengan penduduk yang lebih padat dan secara umum memiliki tingkat kesiapan suplai yang lebih tinggi, tapi secara absolut jumlah penduduk yang tidak memiliki akses kepada pelayanan tertentu lebih besar. Kami akan mengidentifikasi luasnya kesenjangan, juga menentukan daerah-daerah yang paling tepat untuk mendapatkan investasi infrastruktur berdasarkan kedua pendekatan tersebut.

III. INFRASTRUKTUR KESEHATAN



III.1. Seleksi Indikator-indikator Kesiapan Suplai

PODES Utama dan Sensus Infrastruktur memungkinkan pengkategorian informasi yang tersedia ke dalam empat dimensi utama. Kami menggunakan tujuh indikator untuk menggambarkan aspek-aspek yang beragam dari suplai perawatan kesehatan. Berikut penjelasan mengenai pemilihan indikator-indikator tersebut.

Ketersediaan dan Aksesibilitas Fisik

Ketiga indikator yang telah ada (jumlah fasilitas per kapita ("berdasarkan jumlah penduduk"), berdasarkan jarak, berdasarkan akses) memberikan gambaran yang berbeda-beda mengenai ketersediaan fasilitas kesehatan. Indikator berdasarkan jumlah penduduk cenderung bernilai lebih rendah di daerah yang padat penduduk dan lebih tinggi di daerah yang penduduknya jarang, dan karena itu tidak menggambarkan ketersediaan layanan yang sesungguhnya. Korelasi antara indikator-indikator ini dengan indikator-indikator kesiapan infrastruktur lainnya biasanya rendah bahkan negatif, terutama disebabkan oleh besarnya pengaruh jumlah penduduk yang menjadi faktor penentu pada indikator-indikator tersebut. Lantaran bisa menyebabkan bias dalam pemetaan ketersediaan infrastruktur, indikator-indikator yang berdasarkan pada jumlah penduduk tidak disertakan pada sektor kesehatan maupun sektor pendidikan. Meski demikian, kami menghitung kepadatan penduduk manakala mengukur tingkat kesenjangan infrastruktur yang ada.

Indikator yang lebih terpercaya untuk mengukur aksesibilitas perawatan kesehatan adalah "jarak ke fasilitas terdekat". Akan tetapi, cukup banyak nilai yang tidak tersedia pada indikator ini (Data Tidak Tersedia untuk sejumlah kecamatan, bisa sampai

1.000). Oleh sebab itu, dibuat sebuah indikator "mudah dijangkau", berdasarkan penilaian para kepala desa tentang seberapa mudah sebuah fasilitas kesehatan dapat dicapai dari desa.⁵ Model indikator "mudah dijangkau" di tingkat desa bernilai 1 jika sebuah fasilitas a) ditemukan ada di dalam desa atau b) "sangat mudah" atau "mudah" dicapai (menurut pendapat kepala desa/responden utama). Mengukur persentase penduduk kecamatan yang dapat menjangkau fasilitas tertentu dengan mudah, indikator ini secara tidak langsung turut menentukan penilaian atas jarak dan infrastruktur transportasi. Korelasi indikator-indikator ini dengan indikator-indikator berbasis jarak yang umumnya sangat tinggi, sekitar 0,60, mengkonfirmasi tingginya tingkat kehandalan indikator ini.

Kami mengelompokkan sembilan jenis fasilitas yang dimaksud ke dalam tiga indikator untuk menangkap berbagai fungsi yang berbeda dari sistem layanan kesehatan:

- **Akses ke Layanan Tingkat Primer:** Persentase penduduk yang dapat dengan mudah mencapai sebuah poliklinik, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, atau tempat praktek dokter.
- **Akses ke Layanan Tingkat Sekunder:** Persentase penduduk yang dapat dengan mudah mencapai sebuah rumah sakit.
- **Akses ke Fasilitas Melahirkan:** Persentase penduduk yang dapat dengan mudah mencapai rumah sakit, rumah sakit bersalin, Puskesmas, Polindes atau tempat praktek bidan.

5 Bagi kesembilan jenis fasilitas kesehatan, kepala desa/responden PODES utama memberikan penilaiannya apakah "sangat mudah", "mudah", "sulit", atau "sangat sulit" untuk mencapai fasilitas sejenis yang terdekat (jika fasilitas tersebut tak tersedia di desanya).

Indikator pertama dimaksudkan untuk mengukur tingkat akses ke layanan kesehatan dasar, khususnya fasilitas-fasilitas kesehatan yang dipilih untuk diikuti dalam analisis. Untuk perbandingan kami menyiapkan definisi alternatif yang lebih luas dari perawatan tingkat primer, yakni semua jenis fasilitas selain rumah sakit (fasilitas pelayanan tingkat kedua) dan Posyandu (tidak menyediakan pelayanan kesehatan utama).

Tenaga Kerja Kesehatan

Kami memiliki informasi mengenai jumlah dokter, bidan dan pelayan di setiap desa dan jumlah masing-masing mereka di setiap jenis fasilitas. Kami mengusulkan dua indikator untuk mengukur tingkat pencapaian target-target yang ditetapkan Pemerintah Indonesia.

- **Dokter di Puskesmas:** Pada setiap Puskesmas, setidaknya harus ada satu orang dokter. Kami menghitung jumlah Puskesmas dalam sebuah kecamatan yang memenuhi persyaratan ini.
- **Bidan di Desa:** Kehadiran bidan sangat penting untuk pelayanan ibu hamil dan persalinan. Kami menghitung jumlah penduduk kecamatan yang tinggal di desa-desa yang memiliki setidaknya seorang bidan.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengusulkan indikator jumlah tenaga ahli kesehatan per 10.000 penduduk, untuk mengukur kepadatan tenaga kesehatan (WHO, 2011). Bagaimanapun juga, penggunaan indikator-indikator berdasarkan jumlah penduduk masih memiliki masalah, untuk alasan yang telah disebutkan di atas. Performa indikator yang diusulkan WHO ternyata buruk, lantaran (i) korelasi yang sangat rendah atau bahkan negatif dengan semua indikator kesiapan suplai lain; dan (ii) tidak dapat memberikan penjelasan yang meyakinkan, manakala indikator tersebut dipakai untuk menilai faktor-faktor yang menentukan pemanfaatan suatu layanan kesehatan. Performa sedikit lebih baik ditunjukkan oleh indikator yang berbasis jumlah dokter per 10.000 penduduk – digunakan juga sebagai indikator alternatif untuk menilai kondisi tenaga kerja kesehatan (lihat Apendiks 2 untuk deskripsi yang lebih detil mengenai indikator-indikator tenaga kerja kesehatan berdasarkan jumlah penduduk).

Layanan dan Peralatan

Informasi yang tersedia dari Sensus Infrastruktur mengenai layanan dan peralatan, bermasalah untuk tiga alasan. Pertama, informasi ini hanya mengenai fasilitas-fasilitas yang dijangkau oleh Sensus Infrastruktur, indikator-indikator ini pun tidak memasukkan layanan yang tersedia di

Tabel III.1: Gambaran Umum Mengenai Indikator-indikator Kesehatan yang Terpilih

Indikator	Deskripsi
Akses ke Layanan Tingkat Primer	Persentase penduduk yang dapat dengan mudah mencapai sebuah poliklinik, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, atau tempat praktek dokter.
Akses ke Layanan Tingkat Kedua	Persentase penduduk yang dapat dengan mudah mencapai sebuah rumah sakit.
Akses ke Fasilitas Melahirkan	Persentase penduduk yang dengan mudah dapat mencapai rumah sakit, rumah sakit bersalin, Puskesmas, Polindes, atau tempat praktek bidan.
Dokter di Puskesmas	Persentase Puskesmas yang setidaknya memiliki satu orang dokter.
Bidan di Desa	Persentase penduduk yang tinggal di desa yang ada bidannya.
Suplai Air Bersih di Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang memiliki instalasi air bersih sendiri, atau jaraknya ke instalasi air bersih terdekat paling jauh 10 menit jalan kaki.
Aliran Listrik	Jumlah fasilitas kesehatan yang memiliki aliran listrik (tidak termasuk Posyandu)

rumah sakit atau poliklinik juga di tempat-tempat praktek dokter dan bidan. Kedua, bila ada layanan yang tidak tersedia di dalam sebuah desa, namun tidak ada informasi mengenai fasilitas terdekat yang menawarkan pelayanan serupa. Ketiga, kategori-kategori layanan dan informasi mengenai peralatan yang tersedia didefinisikan secara relatif lebih luas, dan dengan demikian tidak begitu cocok untuk menilai kualitas suplai (contohnya, pengaruh sebuah laboratorium secara krusial bergantung kepada peralatan dan jenis pemeriksaan yang tersedia). Oleh karena itu kami tidak memasukkan informasi mengenai layanan dan peralatan ke dalam indeks.

Karakteristik Bangunan

Sebagai gantinya, kualitas fasilitas kesehatan diukur menggunakan dua indikator yang berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan dasar

- **Suplai Air Bersih di Puskesmas:** Salah satu target resmi untuk Puskesmas adalah

memiliki akses ke air bersih dalam lingkungan Puskesmas itu sendiri, atau paling jauh 500 meter dari pusat layanan kesehatan itu. Lantaran informasi mengenai jarak ke sumber air terdekat tidak tersedia, kami menggunakan sebuah model yang memberikan bobot 1 bagi Puskesmas yang jaraknya ke jaringan air bersih terdekat dapat dicapai dalam waktu 10 menit berjalan kaki atau kurang dari itu.

- **Aliran Listrik:** Indikator kedua mengukur level fasilitas kesehatan di kecamatan (tidak termasuk Posyandu) dari sisi ketersediaan aliran listrik.

Kami tidak menggunakan indikator bahan bangunan, karena indikator ini juga dapat menggambarkan perbedaan gaya bangunan antar daerah, dan bukannya kualitas infrastruktur antar wilayah. Tabel III.1 memberikan sebuah gambaran umum mengenai indikator-indikator yang dipilih untuk mengukur kesiapan suplai kesehatan.



III.2. Deskripsi Pola Nasional Ketersediaan Infrastruktur

Statistik Deskriptif untuk ketujuh indikator tersebut ditampilkan pada Tabel III.2. Bobot ketujuh indikator itu dibatasi antara 0 dan 1, di mana nilai yang lebih besar menunjukkan tingkat kesiapan suplai yang lebih tinggi. Secara rata-rata, 92,6% penduduk di 6.771 kecamatan memiliki akses ke layanan kesehatan tingkat primer sebagaimana dijelaskan dalam Tabel III.1. Namun bila akses ke Polindes, Poskesdes dan tempat praktek bidan ikut dipertimbangkan, rata-rata ini akan naik menjadi 95,5%. Meski secara umum layanan kesehatan dasar telah tersedia di banyak daerah di Indonesia, ada perbedaan tingkat layanan yang cukup signifikan antar wilayah. Hal ini akan didiskusikan kemudian.

Akses ke layanan kesehatan tingkat kedua lebih terbatas. Hanya dua per tiga penduduk kecamatan

yang dengan mudah dapat mencapai rumah sakit dari desa-desa tempat mereka tinggal. Fasilitas melahirkan, secara umum, sulit dijangkau oleh sekitar 10% penduduk kecamatan. Nilai rata-rata Indikator-indikator tenaga kesehatan dan karakteristik bangunan, hampir sama di seluruh kecamatan, yakni 0,81 untuk fasilitas kesehatan yang memiliki aliran listrik dan 0,86 untuk Puskesmas yang memiliki seorang dokter.

Tabel III.3 memperlihatkan korelasi antar indikator, yang nilainya berkisar antara 0,30 dan 0,62 (kecuali akses ke fasilitas melahirkan dan akses ke pelayanan tingkat primer yang nilai korelasinya mencapai: 0,78). Korelasi positif yang signifikan dan seragam ini menunjukkan adanya pola kesiapan suplai yang hampir sama di semua dimensi. Hal ini sekaligus mengkonfirmasi konsistensi dari

15 |

Tabel III.2: Indikator-indikator Kesehatan: Statistik Deskriptif

Statistik Deskriptif	Obs.	Nilai Tengah	SD	Min	Maks
Akses ke Pelayanan Primer	6771	0,926	0,173	0	1
Akses ke Pelayanan Sekunder	6771	0,673	0,407	0	1
Akses ke Fasilitas Melahirkan	6771	0,899	0,22	0	1
Dokter di Puskesmas	6771	0,858	0,339	0	1
Bidan di Desa	6771	0,848	0,251	0	1
Suplai Air Bersih di Puskesmas	6771	0,848	0,345	0	1
Aliran Listrik	6771	0,814	0,267	0	1

Tabel III.3: Indikator-indikator Kesehatan: Korelasi-korelasi

Korelasi-korelasi	Tingkat Primer	Tingkat Sekunder	Melahirkan	Dokter	Bidan	Air Bersih
Akses ke Layanan Tingkat Sekunder	0,54	1				
Akses ke Fasilitas Melahirkan	0,78	0,62	1			
Dokter di Puskesmas	0,42	0,36	0,47	1		
Bidan di Desa	0,6	0,53	0,65	0,5	1	
Suplai Air Bersih di Puskesmas	0,37	0,3	0,4	0,49	0,43	1
Aliran Listrik	0,47	0,45	0,51	0,44	0,54	0,38

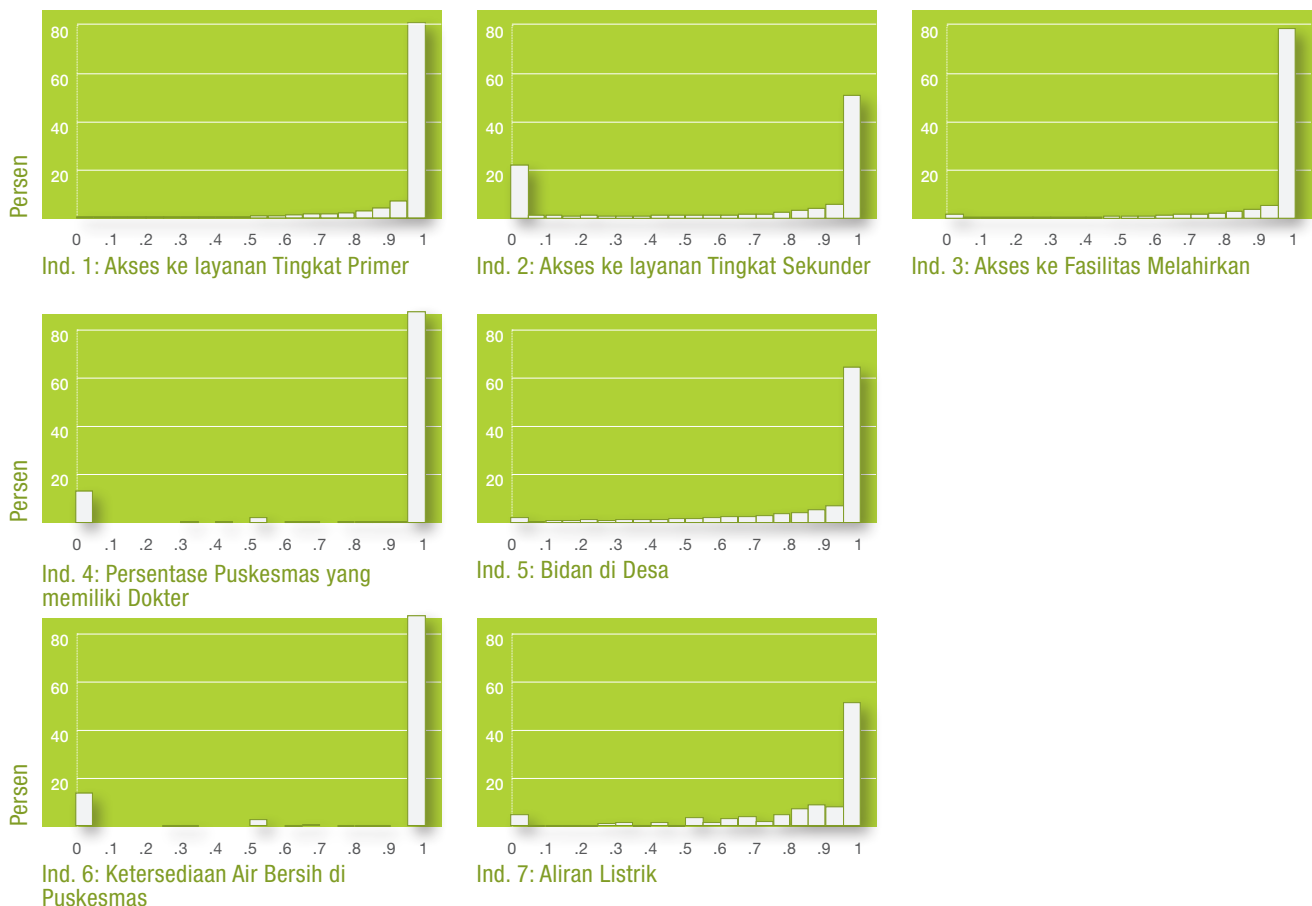
indikator-indikator terpilih. Adanya variasi-variasi yang substansial dari indikator-indikator tersebut di seluruh kecamatan, juga menguatkan bahwa perangkat statistik ini mampu menghasilkan penilaian yang cukup lengkap mengenai ketersediaan infrastruktur kesehatan dasar pada tingkat lokal di Indonesia.

Sebelum beralih ke pola spasial suplai layanan kesehatan, sebuah penjelasan grafis mengenai distribusi ketujuh indikator terpilih diberikan dalam Gambar III.1. Ada kesenjangan yang amat besar antara akses ke layanan rumah sakit dan akses layanan kesehatan tingkat primer seperti Puskesmas. Layanan kesehatan tingkat primer tersedia di hampir semua daerah, tapi akses ke layanan rumah sakit masih sangat terbatas, hanya tersedia bagi penduduk yang tinggal di sekitar 20% dari total kecamatan. Baiknya, lebih dari 80 kecamatan memiliki Puskesmas yang dilayani

oleh setidaknya satu orang dokter. Di tingkat desa, keragaman yang tinggi tampak pada indikator ketersediaan bidan. Tingkat ketersediaan bidan amat rendah di 1.136 kecamatan. Tidak sampai 50% desa di masing-masing kecamatan itu yang memiliki bidan. Gambaran yang kurang lebih sama terlihat pada dua indikator fasilitas-fasilitas dasar. Suplai air bersih tersedia di hampir semua Puskesmas, namun ada masalah dengan aliran listrik di fasilitas-fasilitas. Secara umum, hanya sekitar 45% dari seluruh kecamatan di Indonesia yang seluruh fasilitas kesehatannya memiliki akses ke aliran listrik.

Berikut ini, peta ketujuh indikator menampilkan pola regional kesiapan suplai infrastruktur. Klasifikasi yang sama digunakan untuk semua peta indikator (juga peta indeks komposit di bagian berikut) untuk menyederhanakan perbandingan di antara aspek-aspek suplai kesehatan yang berbeda.⁶

Gambar III.1: Distribusi Indikator-indiator Kesiapan Suplai Kesehatan



⁶ Data dari PODES 2011 tidak (belum) sepenuhnya cocok dengan sistem pengkodean yang digunakan untuk membuat peta-peta kecamatan terbaru. Karena itu ada 38 kecamatan yang tidak dapat diwakili oleh peta-peta yang dibuat berdasarkan data PODES tersebut. Di luar sedikit ketidakcocokan antara kode-kode PODES dan perangkat pemetaan terbaru, data untuk semua indikator yang dipakai dalam analisis ini, tersedia bagi seluruh kecamatan yang masuk dalam survei PODES 2011.

Dimensi 1: Aksesibilitas Dan Ketersediaan Fisik

Gambar III.2 menunjukkan adanya akses yang luas ke layanan kesehatan tingkat primer di sebagian besar pulau Jawa (akses tersedia bagi rata-rata 98% penduduk kecamatan), Bali (100%) dan NTB (98%). Tingkat ketersediaan layanan kesehatan yang lebih rendah terlihat di daerah-daerah pedesaan⁷ Kalimantan, Sumatera dan Sulawesi. Secara berurutan, rata-rata 10%, 7% dan 7% dari penduduk kecamatan di ketiga pulau tersebut tidak memiliki akses mudah ke layanan kesehatan

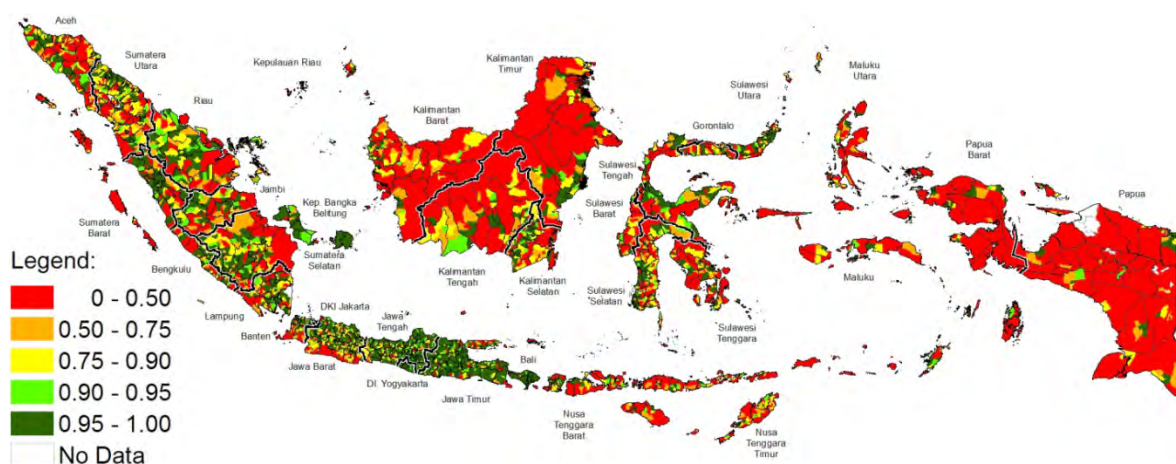
tingkat primer. Kesenjangan yang amat besar dalam hal akses ke layanan kesehatan dasar terjadi pada kecamatan-kecamatan di pedalaman Papua (rata-rata tingkat akses kecamatan hanya 62%) dan, sedikit lebih baik, di Papua Barat (77%) serta Maluku (87%). Lampiran 3 memberikan gambaran umum mengenai semua indikator di tingkat kabupaten.

Kontras dengan akses ke layanan kesehatan tingkat primer yang secara umum tergolong baik, akses ke layanan tingkat sekunder di rumah sakit ternyata tidak tersedia secara mudah bagi warga

Gambar III.2: Peta – Persentase Penduduk yang Memiliki Akses ke Layanan Tingkat Primer



Gambar III.3: Peta – Persentase Penduduk yang Memiliki Akses ke Layanan Tingkat Sekunder



⁷ Sebuah kecamatan diklasifikasikan sebagai daerah perkotaan jika setidaknya ada satu desa/pemukiman dalam kecamatan tersebut dikodekan sebagai daerah perkotaan (total ada 2.763 kecamatan). Sebaliknya sebuah kecamatan (secara eksklusif) digolongkan sebagai daerah pedesaan bila semua desa di kecamatan tersebut dikodekan sebagai daerah pedesaan (4.008 kecamatan).

di sebagian besar wilayah negara ini. Selain Papua dan Papua Barat (rata-rata tingkat akses di kecamatan 18%) dan kepulauan Maluku (37%), tingkat akses yang rendah juga teramati di NTB dan NTT (51%), Kalimantan (53%), Sulawesi (62%) dan Sumatera (71%). Perbedaan kota-desa sangat besar. Prosentase penduduk kecamatan di daerah perkotaan yang memiliki akses mudah ke rumah sakit mencapai 91%. Sebaliknya, hanya 51% penduduk kecamatan yang terletak jauh dari kota, di seluruh Indonesia, yang memiliki akses mudah ke rumah sakit.

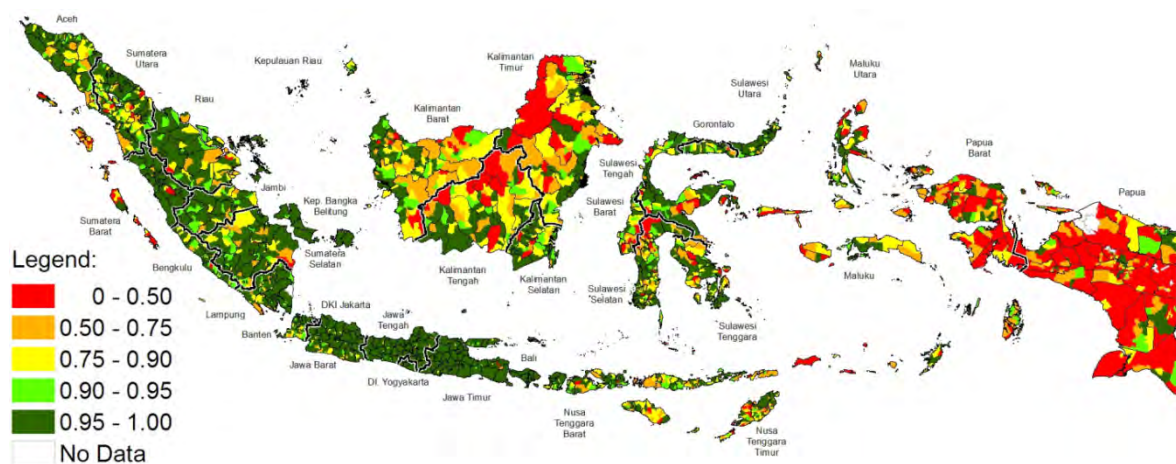
Ketersediaan fasilitas melahirkan sedikit banyak mengikuti pola yang teramati dalam hal akses ke layanan kesehatan. Khususnya di daerah pedesaan luar Jawa, sejumlah besar penduduk

memiliki akses terbatas ke fasilitas melahirkan. Rata-rata 19% penduduk di 3.377 kecamatan di luar Jawa yang masuk klasifikasi daerah pedesaan, tidak memiliki akses yang mudah ke fasilitas melahirkan. Sementara, penduduk yang sulit mengakses fasilitas melahirkan di 631 kecamatan di pulau Jawa yang masuk kategori pedesaan, hanya 2%.

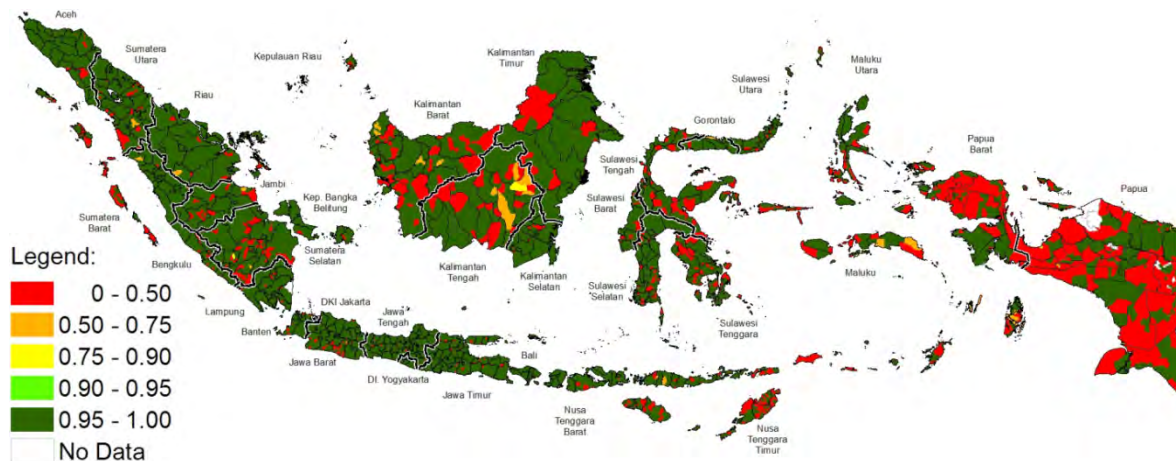
Dimensi 2: Tenaga Kerja Kesehatan

Karena kebanyakan kecamatan di Indonesia hanya memiliki satu Puskesmas, data mengenai jumlah Puskesmas yang memiliki minimal seorang dokter hampir merupakan sebuah indikator biner. Lagi, kesenjangan sangat nyata terlihat di wilayah Papua. Banyak kecamatan bahkan sama sekali

Gambar III.4: Peta – Persentase Penduduk yang Memiliki Akses ke Fasilitas Bersalin



Gambar III.5: Peta – Persentase Puskesmas yang Memiliki Sedikitnya Seorang Dokter



tidak memiliki Puskesmas. Secara umum, satu perempat dari kecamatan-kecamatan di daerah pedesaan luar Jawa tidak menyediakan dokter di Puskesmas. Angka ini meningkat menjadi 40% di kepulauan Maluku dan 69% di Papua/Papua Barat.

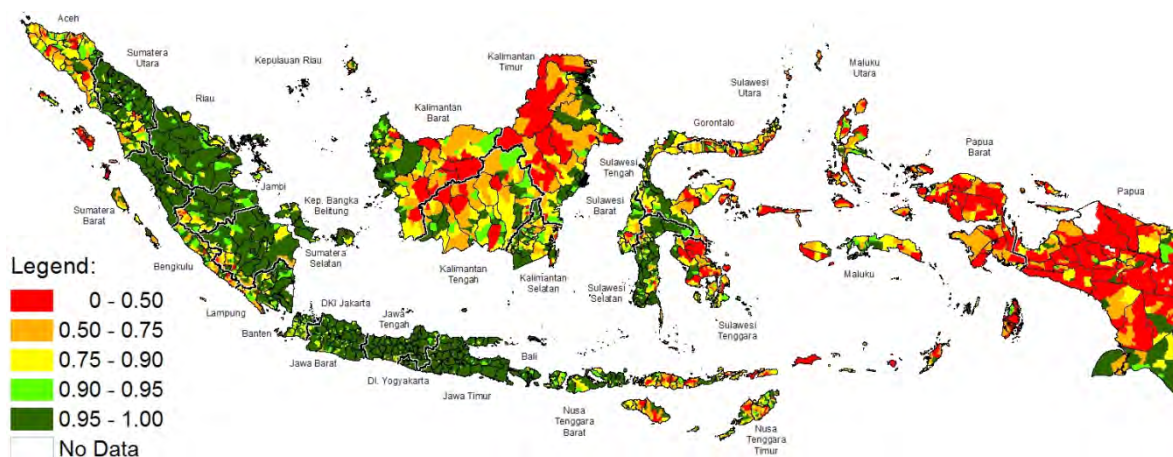
Sama dengan pola umum ketersediaan layanan kesehatan, ketersediaan bidan pun terbatas bagi daerah pedesaan dan pedalaman. Secara keseluruhan bidan tersedia di 96% komunitas perkotaan, namun prosentase ketersediaan bidan di pedesaan hanya di 78%. Angka akses daerah pedesaan ini terendah di provinsi Sulawesi Utara (61%), Maluku (54%), Kalimantan Timur (51%), Maluku Utara (50%), Papua (30%) dan Papua Barat (27%). Penting untuk dicatat

bahwa dalam definisi kami, dukun beranak bukan seorang bidan. Bila dukun beranak atau dukun bayi dihitung sebagai bidan, maka jumlah desa di daerah pedesaan yang tidak memiliki bidan berkurang menjadi rata-rata hanya 11% – kecuali di Papua/Papua Barat yang masih jauh di atas 10% (47%).

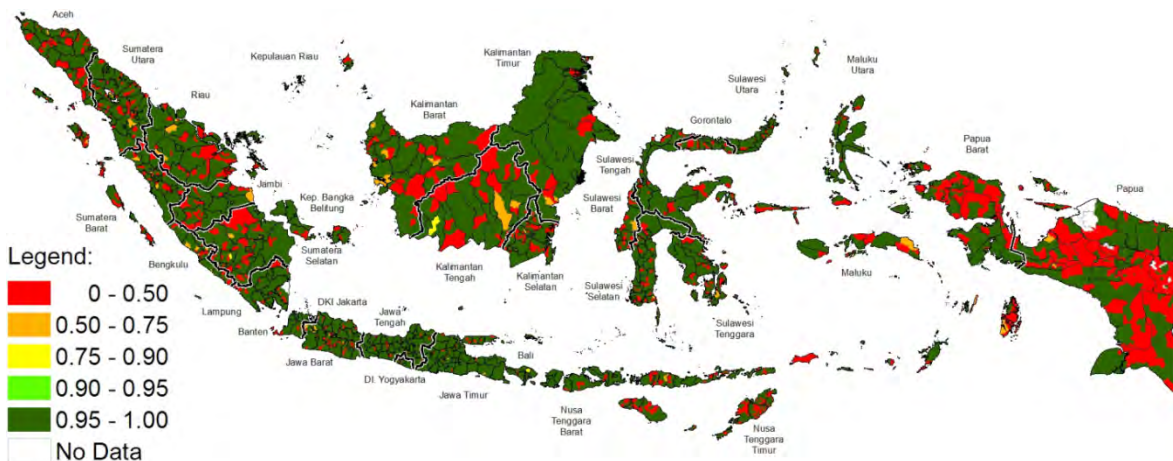
Dimensi 3: Karakteristik Bangunan

Mirip dengan indikator ketersediaan dokter di Puskesmas, indikator menyangkut jumlah Puskesmas yang memiliki suplai air bersih, baik di dalam fasilitas itu maupun dalam jarak 10 menit berjalan kaki dari fasilitas tersebut, hampir merupakan sebuah distribusi biner. Di luar Jawa dan Bali, dengan mengecualikan Papua/

Gambar III.6: Peta – Persentase Penduduk di Desa yang Memiliki Bidan



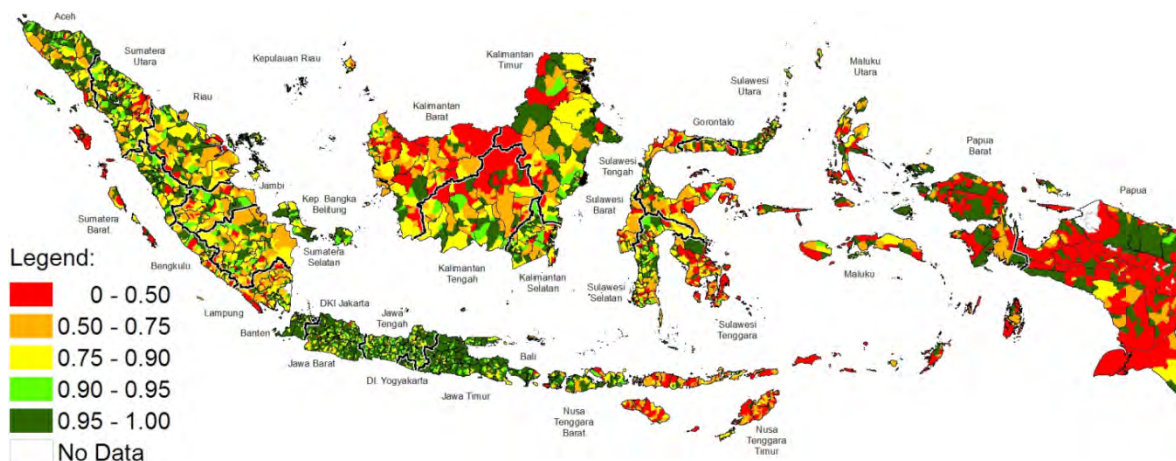
Gambar III.7: Peta – Persentase Puskesmas yang Memiliki Instalasi Air Bersih



Papua Barat, tampak gambaran yang seragam: Puskesmas di sekitar 10% kecamatan di daerah perkotaan dan 20% kecamatan di pedesaan, tidak memiliki instalasi air bersih. Di Papua/Papua Barat, jumlah Puskesmas di kecamatan pada daerah perkotaan yang tidak memiliki instalasi air bersih hampir sama dengan kebanyakan daerah lain, yakni 12%. Tapi angka ini meningkat tajam menjadi 61% bagi kecamatan-kecamatan di daerah pedesaan.

Ketersediaan aliran listrik pada fasilitas kesehatan sangat bervariasi baik antar wilayah maupun antar jenis fasilitas. Fasilitas kesehatan di Papua/Papua Barat (52%), kepulauan Maluku (66%), dan NTT/NTB (70%) tampaknya tidak memiliki akses ke aliran listrik. Sebaliknya aliran listrik menjangkau hampir seluruh fasilitas kesehatan di Jawa (97%) dan Bali (96%). Pada Tabel III.4, angka-angka ini dipisahkan menurut jenis fasilitas kesehatan. Dengan mengabaikan Papua/Papua Barat, rata-rata Puskesmas yang teraliri listrik di seluruh Indonesia mencapai 90%. Akses ke aliran listrik di Puskesmas Pembantu, Poskesdes, dan Polindes jauh kecil, dengan rata-rata tingkat keteraliran yang hampir sama di dalam setiap wilayah.

Gambar III.8: Peta – Persentase Fasilitas Kesehatan yang Memiliki Aliran Listrik (tidak termasuk Posyandu)



Tabel III.4: Persentase Fasilitas Kesehatan yang Memiliki Aliran Listrik – Menurut Wilayah dan Jenis Fasilitas

Region	Puskesmas	P. Pembantu	Poskesdes	Polindes
Sumatera	97,4	83,3	82,2	85,5
Jawa & Bali	100	96,4	95,3	97,4
NTT & NTB	94,2	69,1	70,5	61,4
Kalimantan	98,1	75	74,8	73,1
Sulawesi	94,7	80,4	69,8	68,8
Maluku & Maluku Utara	90,5	64,3	60,6	53,6
Papua & Papua Barat	72,3	50,3	30	39

III.3. Indeks-indeks Komposit Kesiapan Suplai Kesehatan

Informasi dari ketujuh indikator, selanjutnya disatukan ke dalam (i) sub indeks untuk setiap dimensi, juga (ii) indeks-indeks komposit berdasarkan pada semua indikator. Dengan data yang amat padat ini, dapat dilakukan penilaian umum atas kesiapan suplai di tingkat lokal, dan identifikasi wilayah-wilayah perlu diprioritaskan untuk mendapat intervensi kebijakan di waktu mendatang. Secara umum pulau Jawa dan provinsi Bali adalah yang terbaik, sementara kesenjangan terbesar dalam hal kesiapan suplai infrastruktur ditemukan di wilayah Papua, kepulauan Maluku, NTT, juga di pedalaman Kalimantan. Hanya sekitar 19% kecamatan di Indonesia yang boleh dibilang siap memberikan pelayanan dengan skor maksimum 100%. Sedangkan ketimpangan yang cukup besar ditemukan pada satu per empat dari seluruh kecamatan, ditunjukkan oleh skor mereka yang tidak mencapai 75%.⁸ Sebelum membahas lebih jauh mengenai pola-pola spasial suplai pelayanan kesehatan dasar, pada bagian ini akan dijelaskan konstruksi berbagai indeks komposit.

Sebagai permulaan, Tabel III.5 menunjukkan nilai tengah dan korelasi *pairwise* setiap sub indeks pada tiga dimensi utama: ketersediaan fisik, tenaga kesehatan, dan karakteristik bangunan. Sub-sub indeks tersebut dihitung sebagai rata-rata sederhana dari setiap indikator dari masing-masing dimensi. Nilai tengah yang mirip dan

korelasi positif, antara 0,55 dan 0,65, memperkuat dugaan bahwa ada pola yang cukup konsisten mengenai kesiapan suplai, di semua dimensi infrastruktur kesehatan.

Setelah itu, kami menggabungkan informasi dari ketujuh indikator tersebut ke dalam satu indeks global mengenai kesiapan suplai kesehatan. Sebagaimana didiskusikan dalam bagian II.2, kami mengajukan enam skema pembobotan yang berbeda untuk indeks komposit, agar bisa diperbandingkan dan supaya mendapatkan hasil yang lebih terpercaya. Pertama, bobot ditentukan berdasarkan pada preferensi kebijakan, dengan memberikan (i) bobot total 60% untuk ketiga indikator ketersediaan fisik; (ii) bobot yang sama untuk ketiga dimensi yakni aksesibilitas, tenaga kerja, dan karakteristik bangunan; dan (iii) bobot yang sama untuk ketujuh indikator kesiapan suplai.

Kedua, PCA digunakan untuk menentukan bobot bagi ketujuh indikator. Tabel III.6 menampilkan nilai *eigenvectors* dan bobot untuk setiap indikator yang merupakan hasil analisis PCA. Tampak ketujuh indikator kesiapan suplai kesehatan memiliki bobot yang cukup seimbang.

Ketiga, kami menghubungkan indikator-indikator

21 |

Tabel III.5: Sub-sub Indeks Kesehatan – Nilai Tengah dan Korelasi

Sub-Indeks	Nilai Tengah	Korelasi		
		Ketersediaan	Tengah Kerja	Bangunan
Ketersediaan Fisik	0,833	1		
Tenaga Kerja Kesehatan	0,853	0,63	1	
Karakteristik Bangunan	0,831	0,55	0,65	1

⁸ These statistics are based on version A of the composite health index, where particular weight is given to the indicators of physical availability.

kesiapan suplai dengan hasil aktual dari sistem kesehatan, yakni pemanfaatan layanan kesehatan oleh calon pasien. Angka pemanfaatan fasilitas rawat jalan – yang merupakan variabel dependen dalam model regresi kami – mengukur jumlah penduduk yang menggunakan layanan rawat jalan selama satu bulan terakhir, dari antara para responden yang dilaporkan sakit. Karena data variabel yang diturunkan dari Susenas 2010 ini hanya tersedia untuk tingkat kabupaten, kami menggabungkan ketujuh indikator kesiapan suplai pada tingkat kabupaten. Tabel III.7 menampilkan korelasi antara angka pemanfaatan fasilitas rawat jalan dan ketujuh indikator, juga perkiraan regresi

OLS dan bobot yang dihasilkan untuk indeks komposit.

Kolom 1 menunjukkan bahwa tingkat pemanfaatan rawat jalan berkorelasi positif dan kuat dengan semua indikator kesiapan suplai. Ini menguatkan validitas eksternal indikator-indikator terpilih. Untuk menilai korelasi-korelasi ini lebih jauh, kami menjalankan regresi OLS sederhana atas angka pemanfaatan rawat jalan, dan mendapatkan koefisien regresi yang positif untuk tiga indikator akses dan dua indikator karakteristik bangunan (kolom 2). Sebagai pembandingan, kami mengganti “Dokter di Puskesmas” dengan indikator “Skor

Tabel III.6: Analisis Komponen Prinsipal Indikator-indikator Kesehatan

Indikator	Eigenvector	Bobot
Akses ke Layanan Tingkat Primer	0,408	0,155
Akses ke Layanan Tingkat Sekunder	0,366	0,139
Akses ke Fasilitas Melahirkan	0,432	0,164
Dokter di Puskesmas	0,345	0,131
Bidan di Desa	0,41	0,156
Suplai Air Bersih di Puskesmas	0,31	0,118
Aliran Listrik	0,361	0,137
	2,631	1,000

Tabel III.7: Hasil Regresi OLS: Faktor-faktor Penentu Tingkat Pemanfaatan Fasilitas Rawat Jalan

Indikator	j Korelasi	k OLS I	l OLS II	m Bobot
Akses ke Layanan Tingkat Primer	0,47	0,02 -0,867	0,02 -0,854	0,031
Akses ke layanan Tingkat Sekunder	0,51	0,09*** -0,002	0,09*** -0,002	0,169
Akses ke Fasilitas Melahirkan	0,52	0,24** -0,015	0,24** -0,016	0,438
Dokter di Puskesmas	0,37	0 -0,917		
Bidan di Desa	0,41	-0,09* -0,061	-0,09* -0,053	
Ketenagaan: Skor Dokter	0,13		0 -0,949	
Suplai Air Bersih di Puskesmas	0,43	0,09* -0,093	0,09* -0,093	0,158
Aliran Listrik	0,49	0,11*** -0,006	0,11*** -0,005	0,204
	Pengamatan:	497	497	
	R2:	0,319	0,319	
	Nilai-P di dalam kurung. Signifikansi statistik: pada 10%; ** pada 5%; *** pada 1%. Termasuk konstanta.			

Dokter” (untuk detil lihat Apendiks 2). Karena hasil regresi tidak meningkat (kolom 3), kami memutuskan untuk tetap menggunakan ketujuh indikator utama. Bobot untuk indeks komposit diturunkan dari koefisien regresi OLS I, di mana indikator-indikator yang memiliki koefisien negatif mendapatkan bobot kosong dan lima indikator yang tersisa diskala ulang sehingga bobot-bobot mereka berjumlah 1 (kolom 4). Selain merupakan cara sederhana untuk menilai faktor-faktor utama yang menentukan pemanfaatan layanan kesehatan, hasil-hasil yang diperoleh dari perhitungan ini bisa menjadi sebuah pendekatan alternatif untuk menentukan bobot indikator-indikator.

Alternatif kedua untuk menentukan bobot dengan bantuan variabel output kesehatan adalah: menilai kontribusi indikator-indikator suplai terhadap ketidakseimbangan dalam pemanfaatan layanan kesehatan, dengan menggunakan indeks konsentrasi (deskripsi yang lebih detil mengenai metode ini lihat Apendiks 1). Tabel III.8 menunjukan hasil dari pendekatan ini. Kami memulai dengan regresi OLS I atas tujuh indikator suplai pada angka pemanfaatan fasilitas rawat jalan. Indeks konsentrasi untuk angka pemanfaatan rawat jalan adalah 0,029. Data ini mengindikasikan adanya distribusi pro orang kaya dalam pemanfaatan fasilitas ini oleh mereka yang dilaporkan sakit. Adapun indeks konsentrasi semua kovarian

bernilai positif (kolom 2), menunjukkan bahwa suplai pelayanan kesehatan relatif berlimpah di kabupaten yang lebih makmur.

Lantaran semua indeks konsentrasi bernilai positif, kontribusi setiap kovarian terhadap kesenjangan secara umum ditentukan oleh tanda koefisien regresi dan elastisitas yang mengikutinya. Adanya komponen residual yang sangat besar menunjukan bahwa indeks suplai hanya menjelaskan sebagian kecil dari ketidakseimbangan pada tingkat pemanfaatan fasilitas. Meski demikian, ini bukanlah sesuatu yang tidak terduga mengingat nilai R-kuadrat regresi OLS yang relatif rendah. Ketika mentransfer hasil-hasil ini menjadi bobot, indikator-indikator dengan kontribusi negatif diberikan bobot kosong, sementara semua kontribusi yang lain dinilai ulang sehingga jumlah mereka menjadi 1.

Ini memberikan kami enam alternatif skema pembobotan untuk indeks komposit kesiapan suplai infrastruktur kesehatan. Tabel III.9 merangkum bobot tujuh indikator untuk keenam indeks alternatif tersebut. Berbeda dengan indeks komposit A hingga D yang menggunakan ketujuh indikator secara penuh, versi E dan F hanya berdasarkan pada regresi angka pemanfaatan rawat jalan, sehingga mengesampingkan indikator tenaga kesehatan.

Tabel III.10 dan III.11 memaparkan statistik

Tabel III.8: Indikator-indikator Kesehatan: Dekomposisi Indeks Konsentrasi

Indikator	j Koefisien	k CI	l Kontribusi	m Persen	n Bobot
Akses ke Layanan Tingkat Primer	0,017	0,028	0,001	3,8	0,019
Akses ke Layanan Tingkat Sekunder	0,094	0,099	0,017	56,9	0,286
Akses ke Fasilitas Melahirkan	0,242	0,038	0,021	71,3	0,36
Dokter di Puskesmas	-0,004	0,042	0	-1,4	
Bidan di Desa	-0,087	0,053	-0,01	-33,4	
Instalasi Air Bersih	0,087	0,03	0,006	19,6	0,098
Aliran Listrik	0,113	0,061	0,014	46,8	0,236
Residual			-0,048	-163,6	
Total		0,029		100	1

deskriptif dan korelasi *pairwise* ketujuh indikator indeks komposit, secara berurutan. Seperti indikator-indikator utama, bobot indeks komposit dibatasi antara 0 dan 1, di mana nilai lebih tinggi menunjukkan kesiapan suplai yang lebih tinggi. Rata-rata kecamatan di Indonesia mendapat skor sekitar 0,84 atau 84%, tergantung pada skema pembobotan yang digunakan. Menggunakan indeks komposit A sebagai referensi, perolehan skor tertinggi 1 (1.291 kecamatan) maupun skor terendah 0 (35 kecamatan) sama-sama diamati.

Cukup menarik, skema pembobotan alternatif ternyata hanya memiliki sedikit pengaruh terhadap

distribusi indeks komposit. Ini ditunjukkan oleh korelasi yang amat tinggi antara indeks-indeks komposit yang berbeda. Versi A hingga D hampir identik, lantaran bobot yang mirip dan korelasi positif di antara ketujuh sub-indikator. Meski pada saat indikator-indikator tenaga kesehatan disingkirkan, dalam skema pembobotan berdasarkan regresi (versi E dan F), angka korelasi tetap di atas 0,95 (dengan pengecualian pada versi B dan E).

Akhirnya, kemiripan di antara indikator komposit yang berbeda dikuatkan oleh distribusi mereka

Tabel III.9: Gambaran Umum Mengenai Bobot Indeks-indeks Komposit Kesehatan

Indeks	Primer	Sekunder	Melahirkan	Dokter	Bidan	Air	Listrik
A Fokus pada Akses	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1
B Dimensi Seimbang	0,111	0,111	0,111	0,166	0,166	0,166	0,166
C Indikator Seimbang	0,143	0,143	0,143	0,143	0,143	0,143	0,143
D PCA	0,155	0,139	0,164	0,131	0,156	0,118	0,137
E Pemanfaatan OLS	0,031	0,169	0,438			0,158	0,204
F Pemanfaatan CI	0,019	0,286	0,36			0,098	0,236

Tabel III.10: Indeks Komposit Kesehatan: Statistik Deskriptif

Deskriptif	N	Nilai Tengah	SD	Min	Maks
Indeks A: Fokus pada Akses	6771	0,836	0,212	0	1
Indeks B: Bobot Dimensi-dimensi yang Berimbang	6771	0,839	0,214	0	1
Indeks C: Bobot Indikator-indikator yang Berimbang	6771	0,838	0,212	0	1
Indeks D: PCA	6771	0,841	0,209	0	1
Indeks E: Pemanfaatan OLS	6771	0,836	0,218	0	1
Indeks F: Pemanfaatan CI	6771	0,809	0,235	0	1,00

Tabel III.11: Indeks Komposit Kesehatan: Korelasi-korelasi

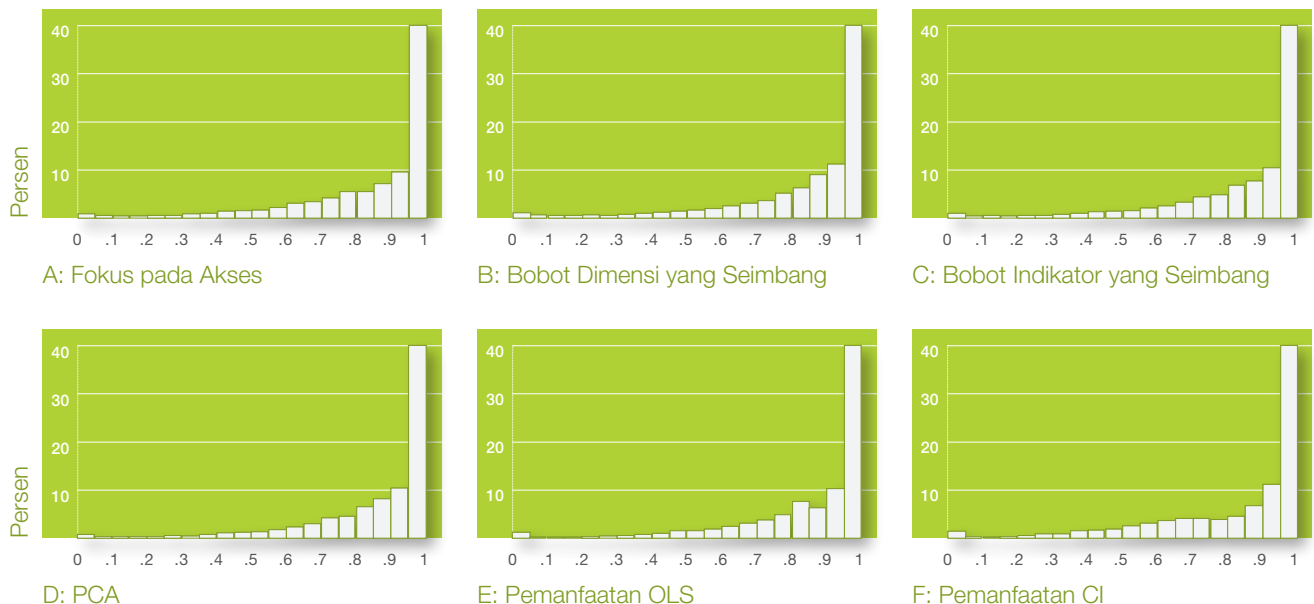
Korelasi-Korelasi	A	B	C	D	E
Indeks B: Bobot Dimensi yang Seimbang	0.97	1.00			
Index C: Bobot Indikator yang Seimbang	0.99	1.00	1.00		
Indeks D: PCA	0.99	0.99	1.00	1.00	
Indeks E: Pemanfaatan OLS	0.98	0.95	0.96	0.97	1.00
Indeks F: Pemanfaatan CI	0.97	0.92	0.95	0.95	0.99

yang nyaris identik (Gambar III.9). Calon pengguna indeks-indeks tersebut dapat memilih skema pembobotan mana saja yang diinginkan, tapi pilihan tersebut tidak akan mengubah hasil analisis secara substansial.

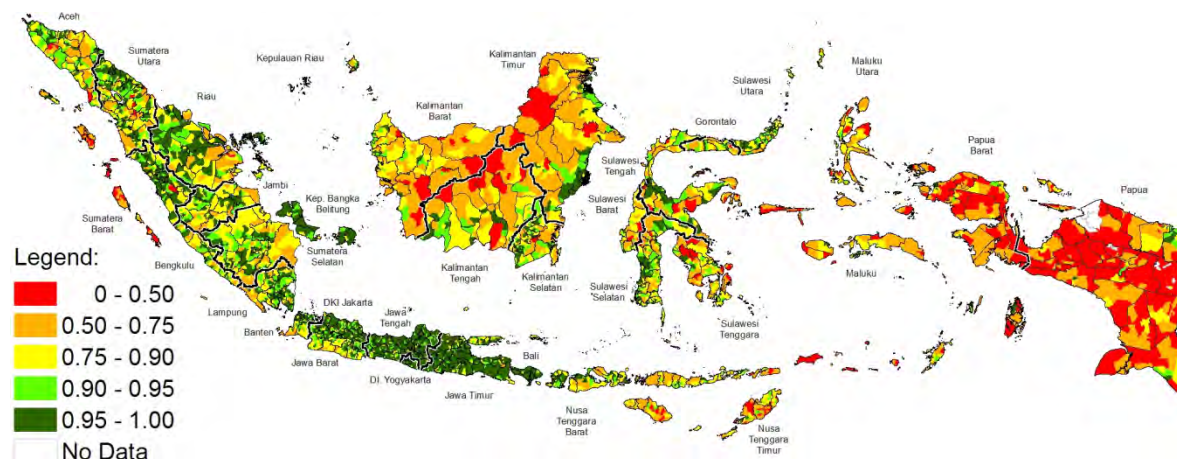
Kemiripan indeks-indeks komposit yang berbeda menyebabkan terbentuknya pola spasial yang hampir sama. Gambar III.10 memetakan distribusi spasial indeks A, yang mewakili distribusi pada semua indeks komposit. Kecamatan-kecamatan di Bali (0,99) dan Jawa (0,96) telah

mencapai level kesiapan suplai kesehatan yang sangat tinggi. Sedangkan skor rata-rata yang lebih rendah teramati untuk Sumatera (0,87), Sulawesi (0,82), Kalimantan (0,80), dan NTT/NTB (0,77), kepulauan Maluku (0,68). Papua/Papua Barat (0,42) tetap tertinggal jauh di belakang. Secara umum kesenjangan antara kecamatan di perkotaan (0,96) dan di pedesaan (0,75) sangat besar, khususnya di wilayah-wilayah dengan tingkat kesiapan suplai infrastruktur yang rendah.

Gambar III.9: Distribusi Indeks Komposit Alternatif untuk Kesiapan Suplai Kesehatan



Gambar III.10: Peta – Indeks Komposit Kesiapan Suplai Kesehatan (Indeks A)



III.4. Menghitung Kebutuhan Investasi

Investasi yang dibutuhkan untuk mencapai level paling bawah ketersediaan infrastruktur kesehatan di seluruh Indonesia, dihitung berdasarkan ketujuh indikator kesiapan suplai kesehatan. Jarak nilai setiap indikator ke nilai maksimalnya, yakni 1, dihitung per kecamatan dan diinterpretasikan sebagai kesenjangan. Tabel III.12 memberikan gambaran mengenai kesenjangan secara nasional untuk setiap indikator, diperoleh dengan cara menjumlahkan kesenjangan-kesenjangan yang terjadi di setiap kecamatan.

1. Aksesibilitas dan Ketersediaan Fisik

Untuk ketiga indikator ketersediaan fisik, dihitung jumlah penduduk yang tidak memiliki akses mudah ke layanan tertentu. Diperkirakan 6,2 juta orang di Indonesia tidak memiliki akses mudah ke layanan kesehatan tingkat primer. Sebanyak 80% dari mereka tinggal di kecamatan yang terletak di daerah pedesaan. Total 383 atau 6% dari seluruh kecamatan tidak memiliki sebuah

Tabel III.12: Kesenjangan Kesiapan Suplai Kesehatan secara Keseluruhan, per Indikator

Indikator	Jenis Kesenjangan	Total Kesenjangan Nasional
Akses ke Layanan Tingkat Primer	Jumlah penduduk tanpa akses Jumlah kecamatan tanpa Puskesmas	6,23 Juta 383 (populasi: 1,41 Juta)
Akses ke Layanan Tingkat Sekunder	Jumlah penduduk tanpa akses Jumlah kabupaten tanpa rumah sakit	35,97 Juta 42 (populasi: 4,73 Juta)
Akses ke Fasilitas Melahirkan	Jumlah penduduk tanpa akses Jumlah kecamatan tanpa fasilitas melahirkan	6,77 Juta 222
Dokter di Puskesmas	Jumlah Puskesmas tanpa dokter	732 (8%)
Bidan di Desa	Jumlah desa tanpa bidan	14,842 (populasi: 11,82 Juta)
Suplai Air Bersih di Puskesmas	Jumlah Puskesmas tanpa instalasi air bersih	852 (9%)
Aliran Listrik	Jumlah fasilitas kesehatan tanpa aliran listrik	10.629 (14%)
	Puskesmas	305 (3%)
	Puskesmas Pembantu	3.855 (17%)
	Poskesdes	4.229 (15%)
	Polindes	2.198 (15%)

Kesenjangan relatif di tingkat fasilitas dinyatakan dalam kurung.

Puskesmas pun. Kecamatan-kecamatan ini sebagian besar (60%) terdapat di Papua atau Papua Barat, dan 40% lainnya tersebar merata di daerah-daerah pedesaan luar Jawa. Angka-angka ini menunjukkan betapa secara umum level suplai pelayanan kesehatan di Indonesia masih amat rendah. Namun di balik itu ada fakta lain: kebanyakan kecamatan tanpa Puskesmas tampaknya muncul baru-baru ini sebagai implikasi dari pemekaran wilayah kabupaten dan kecamatan selama proses desentralisasi.

Pada 694 kecamatan, penduduk dapat dengan mudah mencapai layanan kesehatan tingkat primer yang tersedia tidak sampai 75%. Kebijakan yang bertujuan untuk menaikkan tingkat minimum akses ke layanan kesehatan tingkat primer di semua kecamatan menjadi 75%, mesti menyediakan akses ke layanan tersebut bagi 1,31

juta penduduk. Tabel III.13 memberikan sebuah gambaran umum mengenai distribusi regional dari (i) kecamatan dengan tingkat akses di bawah 75%; dan (ii) jumlah penduduk yang tidak memiliki akses mudah ke layanan tingkat primer, layanan tingkat sekunder dan layanan bersalin. Angka-angka tersebut mengungkapkan distribusi kesenjangan relatif dan absolut yang berbeda-beda. Dari 694 kecamatan dengan tingkat akses di bawah 75%, 42% di antaranya terletak di Papua dan 17% di Sumatera. Meski demikian, dari 6,23 juta penduduk yang tidak memiliki akses ke layanan tingkat primer, 'hanya' 15% tinggal di Papua atau di Papua Barat, sementara 29 dan 27% dari penduduk tanpa akses, ditemukan masing-masing di Jawa dan Sumatera.

Tabel III.13: Akses ke Layanan Kesehatan – Kesenjangan Absolut dan Relatif

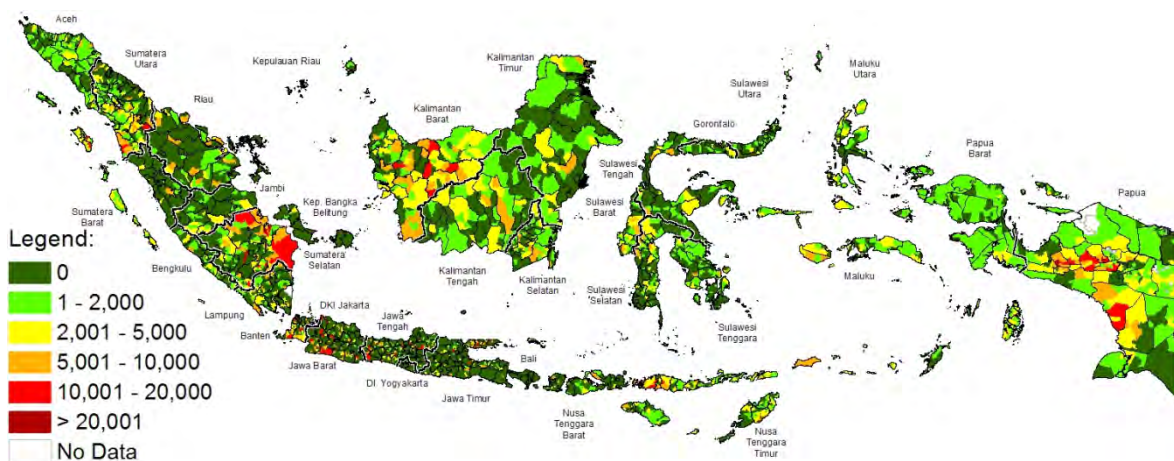
Wilayah	Pelayanan Tingkat Primer		Pelayanan Tingkat Sekunder		Fasilitas Melahirkan	
	Persentase Kecamatan di bawah 0,75	Persentase penduduk	Persentase di Kecamatan di bawah 0,75	Persentase Penduduk	Persentase Kecamatan di bawah 0,75	Persentase Penduduk
Sumatera	16,7	25,6	25,5	28,5	14,4	25,9
Jawa & Bali	5,2	28,5	11,2	29,5	1,8	8,7
NTT & NTB	9,2	7,9	9,3	8,8	8,7	10,5
Kalimantan	10,2	10,4	12,7	11,7	12,8	15,3
Sulawesi	10,8	9,3	16,5	12,3	12,6	16,9
Maluku & Maluku Utara	5,8	3,4	5,4	3,2	6,5	5
Papua & Papua Barat	42,1	14,9	19,5	5,7	40,2	17,7
<i>Angka Absolut</i>	694	6,23 Juta.	2.578	35,97 Juta.	956	6,77Juta.

Persentase Kecamatan di bawah 0,75' menunjukkan distribusi regional dari 694 kecamatan yang memiliki skor indikator di bawah 0,75 (misalnya 16,7% dari 694 kecamatan ditemukan di Sumatera). 'Persentase Penduduk' menunjukkan distribusi regional dalam bentuk jumlah total penduduk yang tidak memiliki akses.

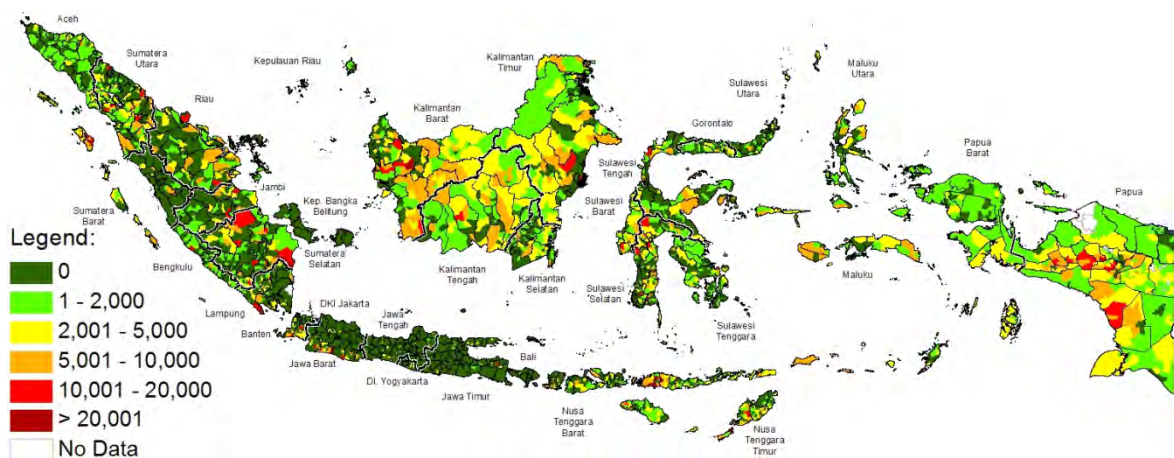
Peta III.11 menjelaskan jumlah absolut penduduk yang tidak memiliki akses ke layanan tingkat primer di kecamatan-kecamatan. Di Papua, sebagai contoh, lebih dari 5.000 penduduk tanpa akses ditemukan di total 42 kecamatan (setara dengan 7% dari total kecamatan di provinsi tersebut). Sebanyak 46 kecamatan yang seperti itu terletak di Jawa Barat, 35 di Jawa Tengah, 29 di Sumatera Utara, 25 di Jawa Timur, 27 di Kalimantan Barat, dan 20 masing-masing di NTT dan Banten.

Perbedaan yang mirip antara kesenjangan relatif dan absolut juga teramati pada dua indikator ketersediaan fisik lain. Khususnya, pola indikator ketersediaan layanan bersalin serupa dengan pola indikator akses ke layanan tingkat primer. Sebanyak 40% dari kecamatan dengan akses di bawah 75% terletak di Papua/Papua Barat, sementara hanya 18% atau 1,20 juta dari 6,77 juta orang tanpa akses tinggal di wilayah ini. Jumlah penduduk tanpa akses yang terbesar ada di Sumatera, yakni satu per empat dari seluruh penduduk yang tidak memiliki akses. Gambar III.12 memperlihatkan distribusi spasial kesenjangan absolut menyangkut akses ke fasilitas kesehatan.

Gambar III.11: Peta – Jumlah Penduduk Tanpa Akses ke Layanan Kesehatan Tingkat Primer



Gambar III.12: Peta – Jumlah Penduduk tanpa Akses ke Fasilitas Bersalin



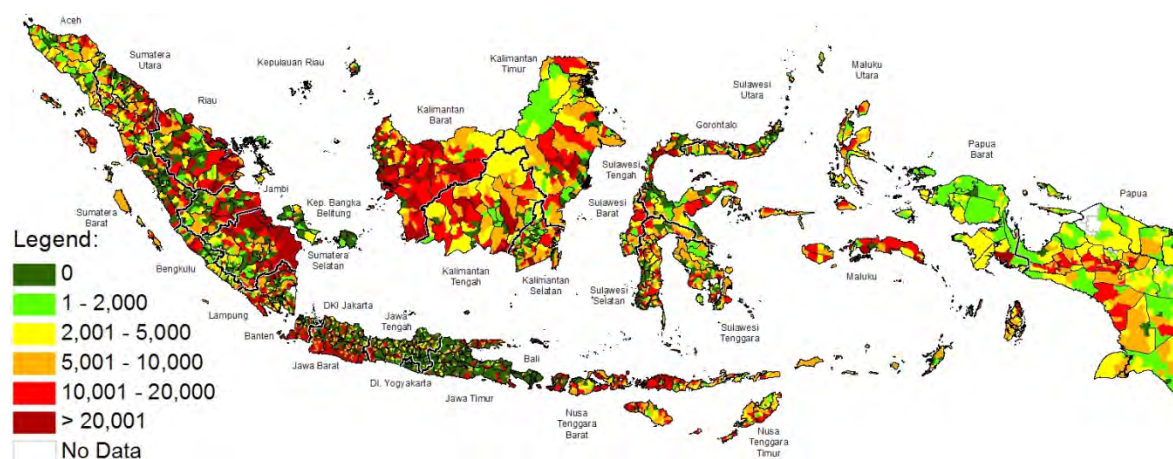
Penduduk yang tak memiliki akses mudah ke layanan rumah sakit ternyata jauh lebih besar. Sebagaimana tertuang dalam Tabel III.13, banyak kecamatan dengan tingkat akses kurang dari 75% ditemukan di semua wilayah di negara ini. Sebanyak 30% dari 36 juta penduduk tanpa akses tinggal di Jawa, 29% di Sumatera. Provinsi dengan kesenjangan absolut paling tinggi adalah Jawa Barat (5,0 juta orang), Jawa Timur (2,6 juta), Sumatera Utara (2,3 juta), NTT (2,2 juta), dan Kalimantan Barat (2,0 juta). Gambar III.13 memberikan sebuah paparan mengenai kesenjangan di tingkat kecamatan, dalam bentuk grafik.

2. Tenaga Kerja Kesehatan

Mengenai indikator tenaga kesehatan, kami menemukan bahwa ada 732 Puskesmas yang tidak memiliki seorang dokter pun. Kebanyakan Puskesmas tanpa dokter tersebut terletak di Papua (109), NTT (67), Papua Barat (55), Maluku (52), dan Sulawesi Tenggara (51). Jika pemerintah hendak menyediakan pusat kesehatan masyarakat di 383 kecamatan yang saat ini tidak memiliki Puskesmas, maka perlu direkrut 1.049 orang dokter untuk memenuhi target satu orang dokter di setiap Puskesmas.

Target Pemerintah Indonesia untuk memiliki satu bidan di setiap desa juga belum terpenuhi di 14.148 desa, atau 27% dari seluruh desa di Indonesia, yang memiliki penduduk sejumlah 11,82 juta orang. Berdasarkan provinsi, yang paling banyak tidak memiliki akses ke bidan, berturut-turut adalah penduduk di desa-desa Papua (1,33 juta orang), NTT (0,99 juta), NAD (0,79 juta), Sumatera Utara (0,72 juta), Jawa Barat (0,65 juta), Kalimantan Barat (0,59 juta), dan Sulawesi Utara (0,59 juta). Gambar III.14 memperlihatkan pola spasial ini.

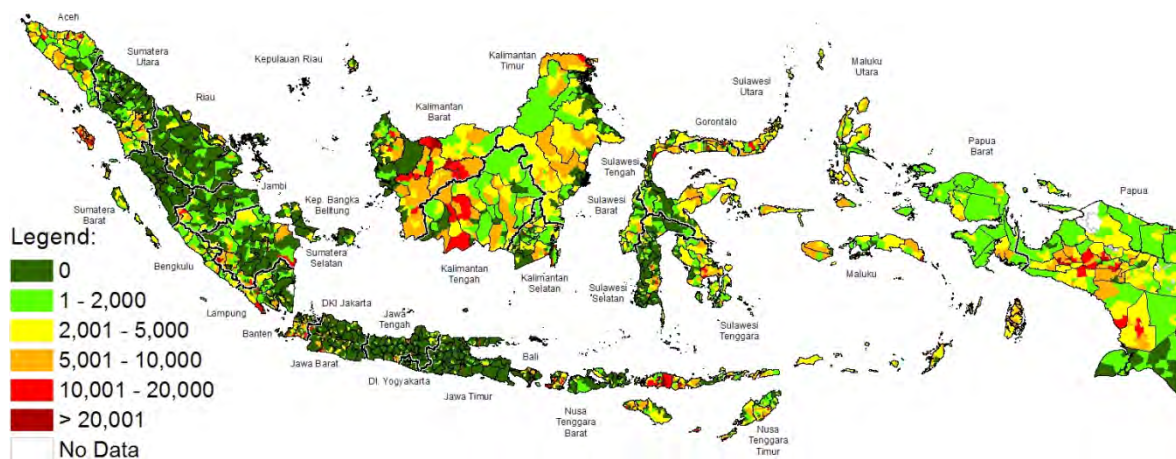
Gambar III.13: Peta – Jumlah Penduduk Tanpa Akses ke Layanan Kesehatan Tingkat Sekunder



3. Karakteristik Bangunan

Penilaian atas kesenjangan karakteristik bangunan lebih mudah. Kami menemukan 852 Puskesmas tidak memiliki suplai air bersih dalam jarak 10 menit berjalan kaki dari fasilitas-fasilitas tersebut. Sementara fasilitas kesehatan yang tidak memiliki aliran listrik ada 10.629 buah.⁹ Dalam kaitan dengan karakteristik bangunan, tindakan yang perlu segera dilakukan adalah menyediakan aliran listrik bagi 305 Puskesmas, 93 di antaranya terletak di Papua, 34 di Sulawesi Tenggara, 27 di NTT, dan 20 di Sumatera Utara.

Gambar III.14: Peta – Jumlah Penduduk yang Tinggal di Desa Tanpa Bidan



⁹ Ini termasuk Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Poskesdes, Polindes.

IV. INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN



IV.1. Seleksi Indikator-indikator Kesiapan Suplai

Mirip dengan analisis kesiapan suplai sektor kesehatan, informasi yang tersedia mengenai infrastruktur pendidikan dikategorikan ke dalam tiga dimensi, lalu tujuh indikator digunakan untuk mengukur berbagai aspek yang berbeda dalam sistem sekolah.

1. Aksesibilitas dan Ketersediaan Fisik

Dua jenis indikator yang tersedia (berdasarkan pada jumlah penduduk dan jarak) memberikan gambaran yang berbeda mengenai ketersediaan fasilitas pendidikan. Sebagaimana telah dibahas sebelumnya, ukuran per kapita cenderung lebih ditentukan oleh faktor jumlah penduduk dan tidak merefleksikan tingkat kepadatan suplai. Karena itu jarak ke fasilitas terdekat merupakan ukuran yang lebih handal untuk menilai aksesibilitas pendidikan, dan kami fokus pada dua indikator:¹⁰ (i) akses ke fasilitas Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dan; (ii) akses ke Sekolah Menengah Pertama (SMP):

1. Akses ke PAUD: Indikator ini terdiri dari dua variabel di tingkat desa: (i) adanya sebuah fasilitas Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di desa; dan (ii) adanya sebuah Taman Kanak-Kanak di desa atau dalam jarak 1 km dari desa. Indikator “Akses ke PAUD” mengukur persentase penduduk kecamatan yang tinggal di sebuah desa, di mana setidaknya satu dari kedua kondisi tersebut terpenuhi.
2. Akses ke SMP: Persentase penduduk kecamatan yang tinggal di desa yang memiliki sebuah SMP dalam jarak 6 km, sesuai target yang telah ditetapkan dalam Standar Pelayanan Minimum (SPM) untuk daerah-daerah pedalaman. Sebagai pembandingan, indikator yang sama dibuat untuk ketersediaan SMP dalam jarak maksimum 3 km dari desa.¹¹

Kami tidak menggunakan jarak ke Sekolah Dasar (SD) terdekat sebagai indikator untuk mengukur kesiapan suplai di tingkat nasional, lantaran data menunjukkan bahwa akses ke pendidikan dasar tersedia di hampir semua wilayah. Bukan berarti data mengenai penduduk yang tidak memiliki akses ke SD dalam jarak 1 km dari desa, misalnya di kecamatan-kecamatan di Aceh (rata-rata 11%), Papua Barat (16%), dan Papua (41%), tidak digunakan. Data-data ini tetap dapat digunakan, khususnya untuk menetapkan sasaran-sasar lokal.

2. Kualitas Pengajaran

Sensus infrastruktur menyediakan data yang detail pada level sekolah, termasuk informasi mengenai jumlah pelajar dan jumlah serta kualifikasi guru. Sebenarnya data-data ini dapat dipakai untuk menghitung indikator yang sering digunakan, seperti rasio guru-murid dan jumlah rata-rata murid per kelas. Tapi kami tidak menyertakan variabel-variabel tersebut dalam indeks karena beberapa alasan berikut. Jumlah rata-rata pelajar per kelas sangat berhubungan dengan kepadatan penduduk dan tidak cukup kuat untuk menggambarkan kualitas pendidikan. Nyatanya, kami menemukan korelasi positif antara rata-rata ukuran kelas dengan semua indikator kesiapan suplai lain yang digunakan untuk indeks. Begitu pula, rasio guru-murid yang rendah khususnya di sekolah-sekolah kecil, lebih sering mengindikasikan jumlah guru yang berlebih, bukan menunjukkan kondisi belajar mengajar yang amat baik (Bank Dunia, 2010). Sebagai contoh, target SPM untuk SD adalah memiliki setidaknya satu guru per 32 murid. Ini terpenuhi di 97% kecamatan. Indikator yang demikian tidak akan bisa memberikan penjelasan yang memadai, dan sama sekali tidak memiliki kekuatan statistik.

¹⁰ Karena informasi mengenai kemudahan menjangkau fasilitas pendidikan tidak tersedia dalam data PODES utama, sementara data menyangkut jarak ke sekolah terdekat tersedia untuk semua kecamatan, maka indikator-indikator jarak digunakan untuk menilai ketersediaan fisik fasilitas-fasilitas pendidikan.

¹¹ Data mengenai jarak ke SMP terdekat tidak tersedia di 84 kecamatan (1 di Sumatera Utara, 7 di Papua Barat, 76 di Papua), karena sama sekali tidak ada SMP di kecamatan-kecamatan tersebut. Untuk kecamatan-kecamatan tersebut, indikator “Akses ke SMP” diberi bobot nol.

Oleh karena itu kami memilih untuk fokus pada kualifikasi guru, diukur dengan menghitung jumlah guru yang memiliki gelar sarjana (S1). Berdasarkan pada SPM untuk sekolah dasar dan sekolah menengah pertama, kami merancang dua indikator berikut:

1. Kualifikasi Guru SD: Menurut MSS, setiap sekolah dasar (SD) harus mempekerjakan setidaknya dua guru dengan kualifikasi S1. Kami menghitung jumlah SD di tingkat kecamatan yang memenuhi kondisi ini.
2. Kualifikasi Guru SMP: Target MSS lainnya menetapkan bahwa 70% guru di sekolah menengah pertama (SMP) harus berijazah S1. Indikator ini mengukur rata-rata persentase guru dengan gelar S1 pada SMP-SMP di kecamatan-kecamatan.

3. Ketersediaan Ruang dan Karakteristik Fasilitas

Sensus sekolah memberikan informasi mengenai ruangan dan fasilitas di setiap sekolah, dan kami memasukan satu indikator mengenai ketersediaan fasilitas sekolah:

- Laboratorium di SMP: Menurut SPM, setiap SMP harus menyediakan sebuah laboratorium ilmu alam untuk para pelajarnya. Kami mengukur target ini dengan cara menghitung jumlah SMP yang memiliki laboratorium di kecamatan-kecamatan.¹²

Akhirnya, karakteristik bangunan sekolah dinilai melalui dua indikator, yakni aliran listrik dan suplai air bersih:

1. Aliran Listrik: Persentase sekolah yang memiliki aliran listrik
2. Suplai Air Bersih: Persentase sekolah yang menyediakan air bersih di kamar mandi murid.

Penting untuk dicatat bahwa indikator kualifikasi guru dan karakteristik fasilitas diperoleh dari sensus infrastruktur, dan karena itu hanya berdasarkan pada informasi dari sekolah negeri. Adapun indikator mengenai aksesibilitas diperoleh dari PODES utama yang menggabungkan data mengenai fasilitas di sekolah negeri dan sekolah swasta. Tabel IV.1 menyajikan sebuah gambaran umum dari tujuh indikator kesiapan suplai pendidikan yang dipilih.

Tabel IV.1: Gambaran Umum Mengenai Indikator-indikator Pendidikan yang Terpilih

Indikator	Deskripsi
Akses ke PAUD	Persentase penduduk yang tinggal di desa yang memiliki fasilitas Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) atau Taman Kanak-Kanak dalam jarak 1 km dari desa
Akses ke SMP	Persentase penduduk yang tinggal di desa yang memiliki SMP dalam jarak 6 (3) km
Kualifikasi Guru SD	Persentase SD yang memiliki setidaknya 2 guru berijazah S1
Kualifikasi Guru SMP	Rata-rata persentase guru SMP yang memiliki ijazah S1
Laboratorium di SMP	Persentase SMP yang memiliki laboratorium
Aliran Listrik	Persentase sekolah yang memiliki aliran listrik
Suplai Air Bersih	Persentase sekolah yang memiliki air bersih di kamar mandi murid

¹² Sebagai alternatif, dapat digunakan persentase SMP yang memiliki setidaknya 70% guru berijazah S1. Mengingat jumlah SMP di setiap kecamatan hanya sedikit, ini akan menjadi indikator yang kuat dengan perbedaan nilai yang hanya sedikit. Persentase guru lulusan S1 di antara guru-guru SMP di kecamatan dengan demikian lebih cocok untuk dijadikan indikator karena bisa mencerminkan seluruh distribusi kualifikasi guru secara lebih baik.

IV.2. Deskripsi Pola Nasional Ketersediaan Infrastruktur

Sama dengan pada indikator-indikator infrastruktur kesehatan (dan transportasi), bobot ketujuh indikator pendidikan juga dibatasi antara 0 dan 1, di mana nilai yang lebih besar menunjukkan kesiapan suplai yang lebih tinggi. Statistik deskriptif pada Tabel IV.2 memperlihatkan bahwa rata-rata satu per lima dari penduduk kecamatan tidak memiliki akses ke fasilitas PAUD terdekat. Rata-rata 89 penduduk kecamatan bisa mengakses sekolah menengah pertama dalam jarak 6 km dari desa, tapi penduduk yang tinggal dalam jarak 3 km dari SMP terdekat hanya sebanyak 79%. Nilai rata-rata indikator kualifikasi guru dan karakteristik bangunan di tingkat kecamatan ternyata serupa (antara 0,73 sampai 0,80). Namun prosentasi rata-rata ketersediaan laboratorium di SMP di setiap kecamatan, hanya 62%.

Ini berarti seluruh indikator berkorelasi positif (Tabel IV.3), dengan nilai korelasi merentang antara 0,44 dan 0,68. Serupa dengan hasil analisis untuk sektor kesehatan, kami menemukan pola kesiapan infrastruktur yang konsisten pada setiap dimensi yang berbeda dari suplai pendidikan: wilayah dengan tingkat kepadatan fasilitas yang tinggi tampaknya bisa menyediakan lebih banyak tenaga pengajar berpendidikan tinggi, dan memiliki perlengkapan yang lebih baik di sekolah-sekolah mereka.

Gambar IV.1 menyajikan sebuah tinjauan grafis mengenai distribusi indikator-indikator pendidikan. Sebanyak 49% kecamatan memiliki akses penuh ke fasilitas PAUD, sementara di 1.057 kecamatan warga yang memiliki akses ke pelayanan ini kurang dari 50%. Di daerah perkotaan, komunitas yang memiliki fasilitas

Tabel IV.2: Indikator-indikator Pendidikan: Statistik Deskriptif

Statistik Deskriptif	Obs.	Nilai Tengah	SD	Min	Maks
Akses ke PAUD	6771	0,81	0,297	0	1
Akses ke SMP (6 km)	6771	0,887	0,216	0	1
Akses ke SMP (3 km)	6771	0,789	0,242	0	1
Kualifikasi Guru SD	6771	0,728	0,333	0	1
Kualifikasi Guru SMP	6771	0,756	0,25	0	1
Laboratorium di SMP	6771	0,621	0,365	0	1
Aliran Listrik	6771	0,795	0,295	0	1
Air di Kamar Mandi	6771	0,751	0,265	0	1

Tabel IV.3: Indikator-indikator Pendidikan: Korelasi-korelasi

Korelasi-korelasi	PAUD	SMP 6km	SMP 3km	S1 SD	S1 SMP	Lab SMP	Listrik
Akses ke SMP (6 km)	0,68	1					
Akses ke SMP (3 km)	0,68	0,87	1				
Kualifikasi Guru SD	0,66	0,57	0,56	1			
Kualifikasi Guru SMP	0,57	0,58	0,52	0,59	1		
Laboratorium di SMP	0,5	0,44	0,42	0,55	0,54	1	
Aliran Listrik	0,65	0,58	0,55	0,68	0,55	0,54	1
Air di Kamar Mandi	0,67	0,57	0,55	0,6	0,53	0,52	0,63

sekolah menengah pertama dalam radius 3 km mencapai 96%, namun di daerah pedesaan hanya 71%. Target SPM bahwa harus ada minimal satu SMP dalam jarak 6 km dari desa di daerah terpencil, terpenuhi pada 86% desa di pedesaan. Meski demikian, masih ada 173 kecamatan yang desa-desanya sama sekali tidak memiliki kemudahan akses ke sekolah menengah pertama.

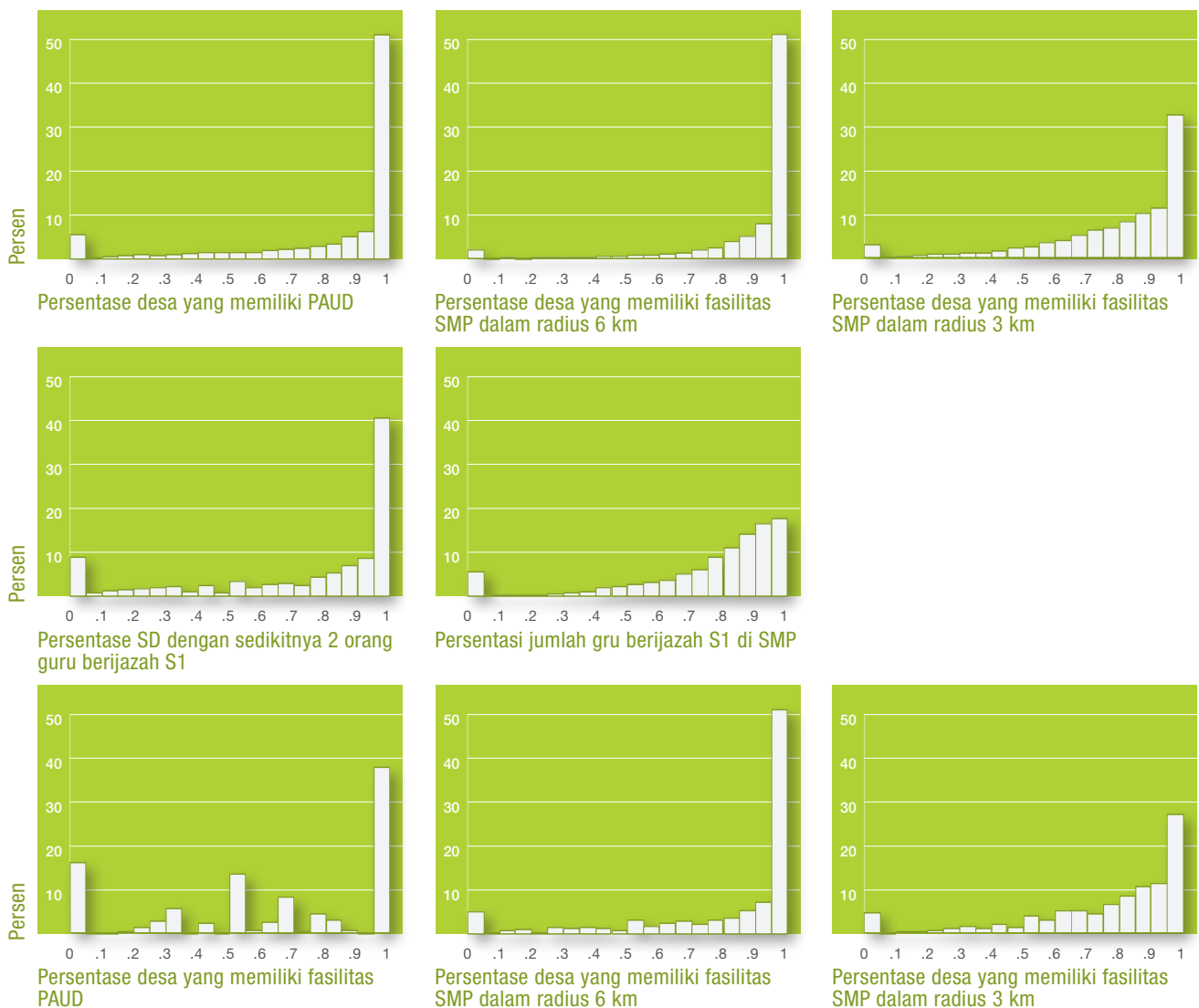
Variasi pada rata-rata tingkat kualifikasi guru memberikan bukti yang malah lebih penting. Di satu sisi, pada 32% kecamatan, setiap SD memenuhi target yakni memiliki sedikitnya 2 orang guru berijazah S1. Tapi di sisi lain, terdapat 577 kecamatan yang sama sekali tidak memiliki sekolah dasar dengan guru lulusan S1. Kesenjangan yang besar juga terlihat pada persentase guru SMP yang memiliki ijazah S1: pada 877 atau 13% dari seluruh kecamatan, rata-rata tenaga pengajar di

sekolah menengah pertama negeri yang memiliki ijazah S1 kurang dari 50%; di sepertiga dari seluruh kecamatan rata-ratanya mencapai lebih dari 90%.

Pada aras yang sama, 16% kecamatan tidak memiliki satu pun SMP yang dilengkapi laboratorium. Sebaliknya ada 37 kecamatan yang seluruh SMP-nya memiliki laboratorium. Ketersediaan aliran listrik dan air di kamar mandi murid pun tersebar tidak merata di seluruh negeri. Pada 44% kecamatan semua sekolah negeri memiliki akses ke aliran listrik; tapi pada saat yang sama, di 998 kecamatan, rata-rata sekolah yang memiliki aliran listrik bahkan tidak mencapai 50%.

Peta ketujuh indikator berikut menyajikan pola regional kesiapan suplai infrastruktur. Demi menyederhanakan perbandingan, klasifikasi yang sama juga digunakan pada indikator kesehatan.

Gambar IV.1: Distribusi Indikator Kesiapan Suplai Pendidikan



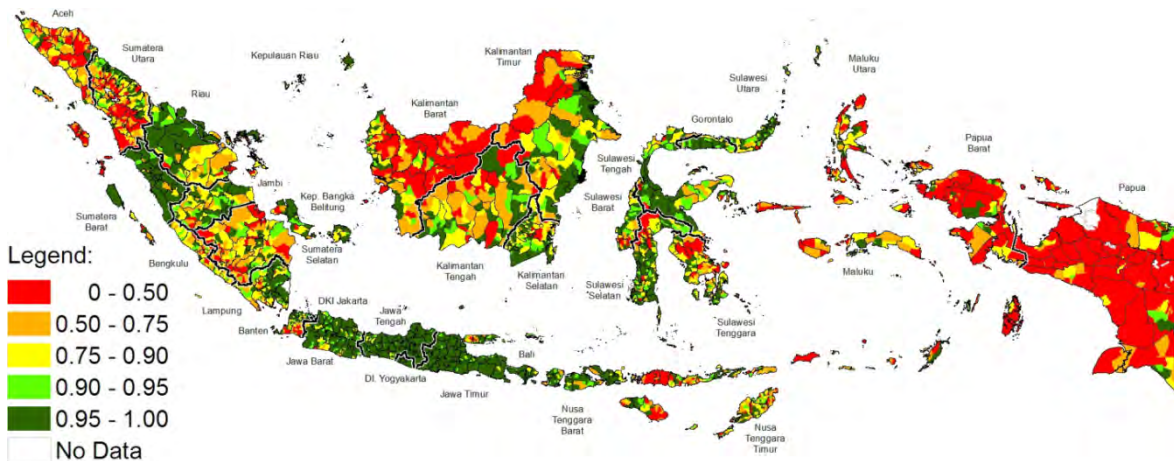
Dimensi 1: Ketersediaan dan Aksesibilitas Fisik

Fasilitas pendidikan usia dini banyak tersedia di daerah-daerah perkotaan (98% lingkungan perkotaan memiliki akses ini), namun fasilitas ini sangat jarang di daerah pedesaan, dengan karakteristik yang jauh berbeda antar wilayah. Tersedia dalam prosentase yang tinggi di Jawa dan Bali (95% di daerah pedesaan), fasilitas ini sangat sedikit di Sumatera (64%), Kalimantan (64%), NTT (63%), Maluku/Maluku Utara (49%), dan Papua/Papua Barat (16%). Variasi yang lebih substansial terjadi di dalam suatu wilayah dan provinsi. Sebagai contoh, perbedaan yang mencolok dalam hal ketersediaan fasilitas PAUD ditemukan antara pemukiman di daerah pedesaan Sumatera Utara (48%) dan Sumatera Barat (96%). Ini juga terjadi di provinsi Sulawesi Selatan. Hanya setengah dari kecamatan di wilayah ini yang semua penduduknya memiliki akses ke fasilitas PAUD. Malah di 13% kecamatannya, penduduk

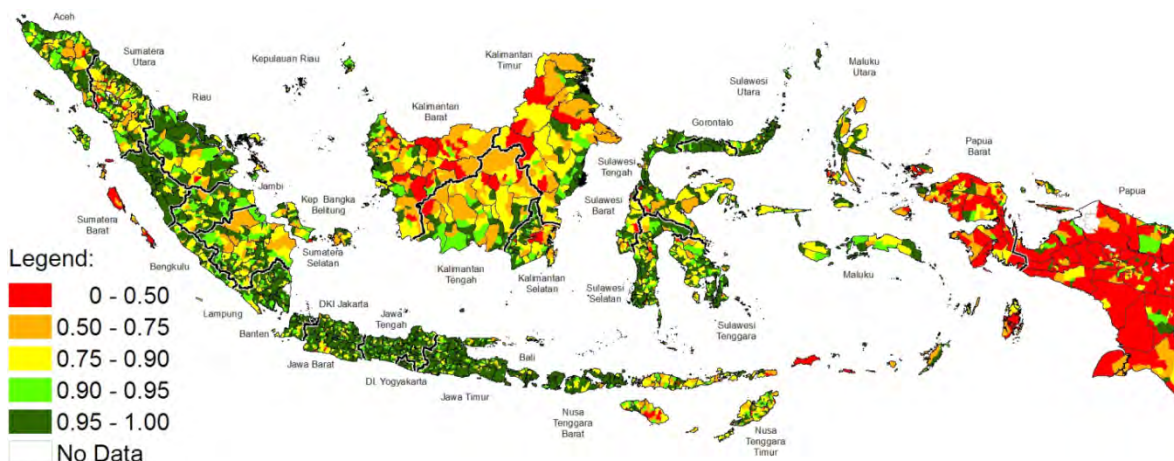
yang memiliki akses mudah ke fasilitas PAUD tidak mencapai 50%.

Sebagaimana pada fasilitas untuk pendidikan anak usia dini, hampir seluruh penduduk di daerah perkotaan juga memiliki akses ke sekolah menengah pertama. Pada 99% dari 13.361 pemukiman di daerah perkotaan Indonesia, sebuah SMP tersedia dalam jarak 6 km, dan 96% pada jarak 3 km. Target SPM satu SMP dalam jarak 6 km bagi penduduk di daerah terpencil tidak terpenuhi di 14% daerah pedesaan Indonesia. Kesenjangan terbesar terjadi di provinsi Maluku (20%), Kalimantan (26%), dan Papua/Papua Barat (52%). Suplai yang cukup merata ditemukan pada daerah pedesaan di Sulawesi (dengan tingkat kesenjangan 9%) dan Sumatera (11%), yang amat jauh berbeda dengan provinsi lain di wilayah-wilayah itu. Rata-rata kesenjangan bahkan lebih kecil untuk wilayah pedesaan di Jawa (4%) dan Bali (5%). Namun gambaran berubah manakala batas 3 km diterapkan: hanya 81% pedesaan di

Gambar IV.2: Peta – Persentase Pendudukan yang Memiliki Akses ke Fasilitas PAUD



Gambar IV.3: Peta – Persentase Penduduk dengan SMP dalam Jarak 6 km dari Desa



Jawa dan 75 di Bali yang menyediakan akses ke fasilitas pendidikan SMP dalam jarak 3 km. Yang menarik, kepadatan suplai yang relatif tinggi terlihat di daerah pedesaan Sumatera Barat (84%), Sulawesi Utara (85%), Gorontalo (86%), dan NTB (92%).

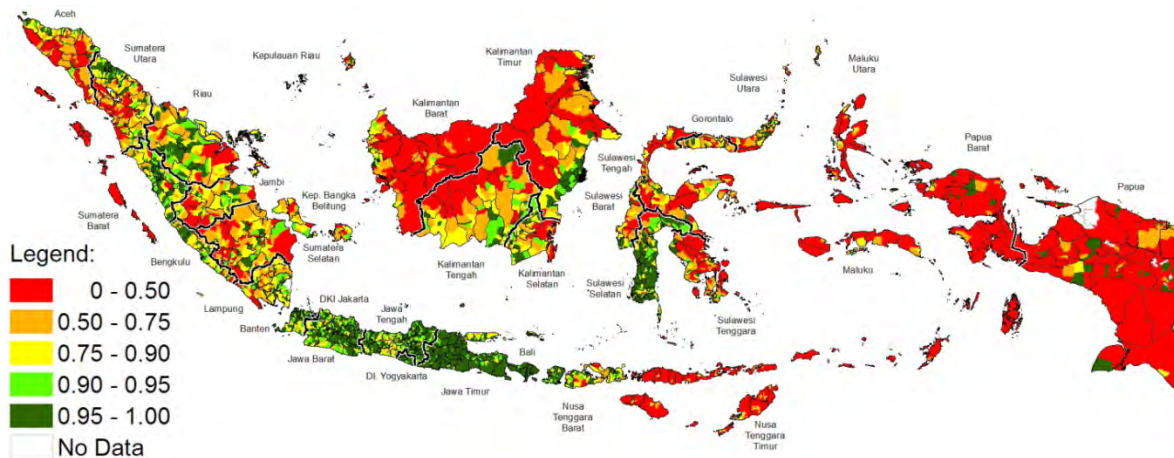
Dimensi 2: Kualifikasi Guru

Secara keseluruhan, 84% dari 134.290 SD Negeri yang terjangkau oleh sensus infrastruktur memiliki sedikitnya dua orang guru berijazah S1. Target SPM ini paling banyak terpenuhi di Bali (99%), provinsi-provinsi di Jawa (96%), Sulawesi Selatan (94%), dan NTB (92%). SD yang tingkat ketersediaan dua guru bergelar sarjana paling rendah ditemukan di Kalimantan Barat (47%), Maluku (41%), NTT (32%), Papua Barat (30%), Maluku Utara (30%), dan Papua (29%). Ini berarti ada perbedaan yang substansial antara daerah pedesaan dan perkotaan: sebanyak 97% SD di

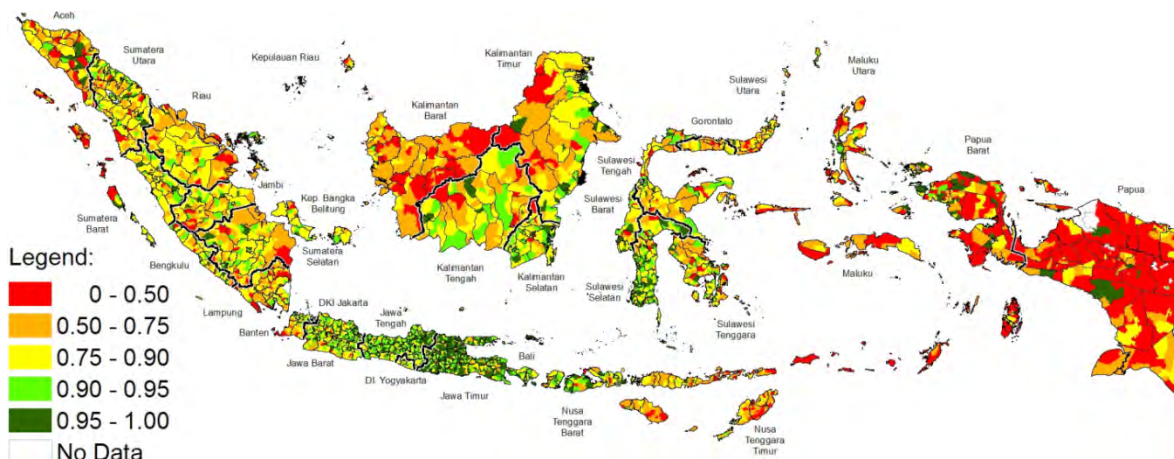
daerah perkotaan memenuhi target MSS, namun di daerah pedesaan SD yang memenuhi target hanya 78%.

Pada tiga dari empat SMP, setidaknya 70% guru memiliki ijazah S1, sesuai target MSS. Manakala informasi ini digabungkan untuk level kecamatan, rata-rata persentase guru SMP yang memiliki ijazah S1 lebih tinggi di kecamatan-kecamatan perkotaan (85% berbanding 61% di daerah pedesaan). Dan meskipun nilai tengah untuk seluruh kecamatan di Jawa mencapai 91%, di Jawa Barat dan Banten rata-rata SMP yang memiliki guru berijazah S1 berturut-turut hanya 86% dan 73%. Rata-rata yang secara komparatif cukup tinggi juga terekam di kecamatan-kecamatan di Kalimantan Selatan (88%) dan Sulawesi Selatan (85%), sedang yang terendah ada di NTT (45%), Papua Barat (40%), Kalimantan Barat (38%), Maluku (24%), dan Papua (16%).

Gambar IV.4: Peta – Persentase SD yang Memiliki Sedikitnya Dua Guru Lulusan S1



Gambar IV.5: Peta –Rata-rata Persentase Guru SMP Berijazah S1

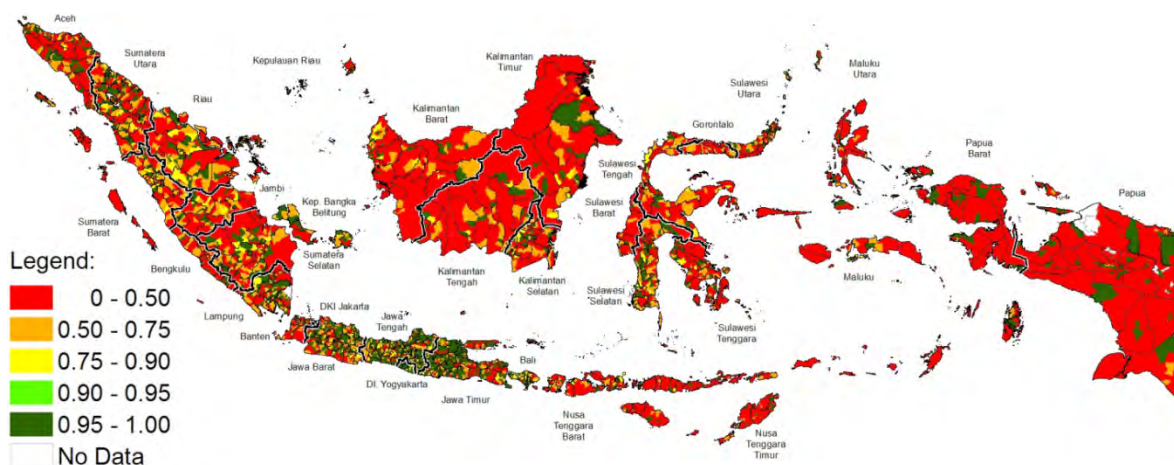


Dimensi 3: Karakteristik Fasilitas

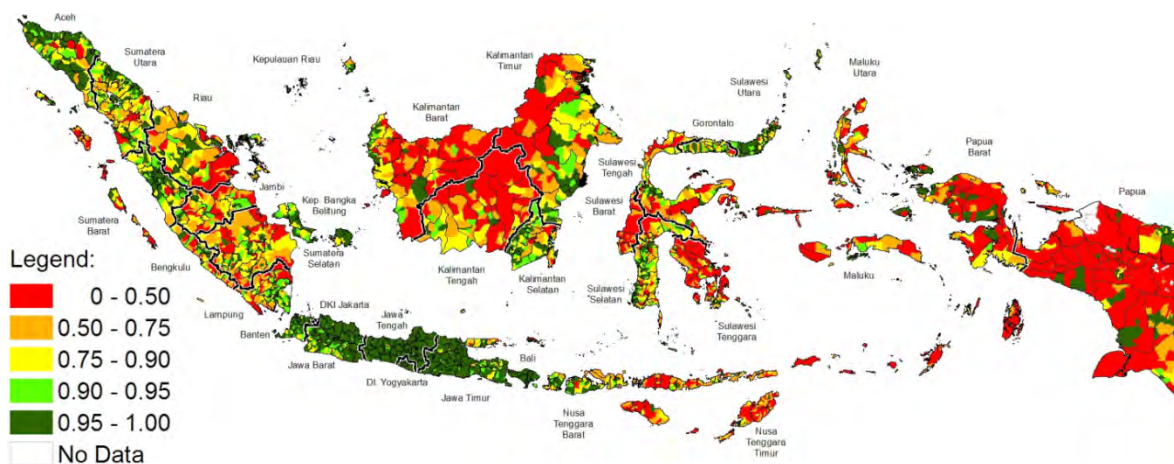
Dari semua indikator kesiapan suplai, yang nilai rata-ratanya paling rendah adalah indikator ketersediaan laboratorium di SMP, yakni hanya 64% dari 21.486 sekolah negeri menyediakan laboratorium bagi para pelajarnya. Sekolah-sekolah SMP di wilayah perkotaan memiliki peralatan belajar yang cukup lengkap (90% di antaranya memiliki laboratorium), sementara fasilitas di sekolah-sekolah pedesaan tertinggal amat jauh (hanya 55% memiliki laboratorium). Variasi di dalam wilayah juga cenderung lebih besar dibandingkan dengan variasi antar kelompok pulau. Di Jawa, misalnya, jumlah SMP yang memiliki laboratorium di Jawa Tengah lumayan banyak (86%), kontras dengan Banten yang hanya 54%.

Tingkat ketersediaan aliran listrik di sekolah-sekolah berbeda jauh antar wilayah, dengan distribusi spasial secara umum mirip pola yang teramati pada indikator kesiapan suplai pendidikan lainnya. Sekolah-sekolah di daerah perkotaan biasanya memiliki akses ke aliran listrik (99%), sedangkan hanya 82% sekolah di daerah pedesaan yang mendapatkan suplai listrik. Di semua wilayah, angka elektrifikasi sekolah dasar merupakan yang terendah, dan sekolah menengah atas yang tertinggi. Tabel IV.4 menyajikan gambaran umum mengenai persentase sekolah yang memiliki aliran listrik dan air bersih di kamar mandi murid, seturut wilayah dan tipe sekolah.

Gambar IV.6: Peta - Persentase SMP yang Memiliki Laboratorium



Gambar IV.7: Peta - Persentase Sekolah yang Memiliki Aliran Listrik



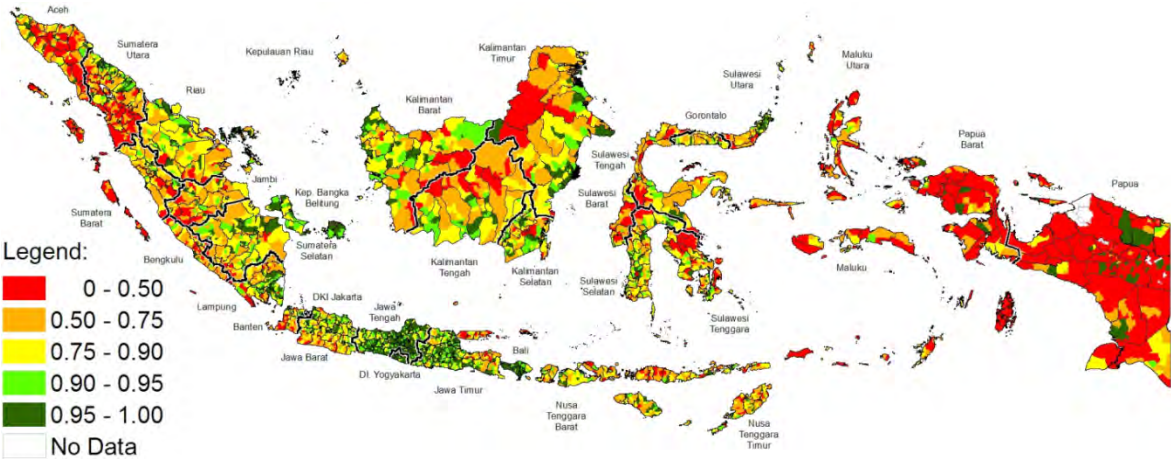
Distribusi serupa terjadi pada indikator kedua dari karakteristik bangunan di seluruh wilayah dan jenis sekolah: Air bersih tersedia di kamar mandi murid pada 82% dari 164.561 sekolah negeri, yang meliputi 95% sekolah negeri di daerah perkotaan dan 76% sekolah negeri di daerah pedesaan. Suplai air bersih secara umum lebih rendah daripada suplai listrik, kecuali pada SD di beberapa wilayah (khususnya di Kalimantan) tren ini terbalik.

Pada tingkat provinsi, suplai air bersih yang rendah ditemukan di sekolah-sekolah negeri di daerah pedesaan Aceh (67%), Sumatera Barat (60%), Banten (66%), Sulawesi Tengah (67%), Sulawesi Barat (63%), dan terutama di Kepulauan Maluku (53%) dan Papua/Papua Barat (38%).

Tabel IV.4: Persentase Sekolah yang Memiliki Aliran Listrik dan Suplai Air Bersih – Menurut Wilayah dan Jenis Sekolah

Wilayah	Aliran Listrik				Air Bersih di Kamar Mandi Murid			
	SD	SMP	SMA	SMK	SD	SMP	SMA	SMK
Sumatera	80,7	86,8	95,1	90,7	73,7	79,6	88,7	84,1
Jawa & Bali	98,3	99,3	100	99,8	87,9	95,3	98,6	96,9
NTT & NTB	70,6	78,4	90,5	92,5	73,9	79,7	86,1	85
Kalimantan	68,7	82,7	92,4	93	80,7	86	92,9	93,8
Sulawesi	71,7	83,5	91,7	91,4	75,3	80,6	84	83,1
Maluku & Maluku Utara	58,7	64,2	77,3	76	56,2	60	59,9	61
Papua & Papua Barat	47,3	64,1	78,9	84	39,7	51,5	61,3	62,7

Gambar IV.8: Peta – Persentase Sekolah yang Memiliki Air Bersih di Kamar Mandi Murid



IV.3. Sebuah Indeks Komposit Kesiapan Suplai Pendidikan

Untuk merangkum informasi dari ketujuh indikator, kami menggabungkan informasi-informasi tersebut ke dalam beberapa sub indeks untuk setiap dimensi, dan indeks-indeks komposit berdasarkan semua indikator. Secara umum, pola suplai layanan pendidikan dasar per wilayah di Indonesia serupa dengan hasil yang ditemukan untuk sektor kesehatan. Pulau Jawa dan Bali merupakan yang terbaik. Dan Papua, lagi-lagi, tertinggal jauh di belakang dengan hanya 25% kecamatan yang berhasil mencapai skor kesiapan suplai 95% atau lebih, sementara 30% kecamatan mendapatkan skor di bawah 75%.¹³ Sebelum membahas indeks komposit kesiapan suplai pendidikan secara lebih detail, berikut deskripsi singkat tentang perhitungan-perhitungan yang dilakukan.

Tabel IV.5 menampilkan nilai tengah dan korelasi *pairwise* dari sub-sub indeks untuk tiga dimensi ketersediaan fisik, kualifikasi guru, dan karakteristik fasilitas. Sub-sub indeks dihitung sebagai rata-rata sederhana dari masing-masing indikator di setiap dimensi. Korelasi yang amat positif di antara sub-sub indeks menegaskan adanya pola yang cukup konsisten dari kesiapan suplai pada berbagai dimensi sistem sekolah.

Mirip dengan indeks komposit kesiapan suplai kesehatan (lihat bagian III.3), kami mengkombinasikan informasi dari ketujuh indikator ke dalam satu indeks global kesiapan

suplai pendidikan. Kami kembali menggunakan tiga metode yang dipakai ketika menganalisis data sektor kesehatan, untuk menentukan bobot ketujuh indikator tersebut dalam penyusunan indeks komposit. Pertama, bobot ditentukan berdasarkan preferensi kebijakan dengan tiga skema pembobotan yang secara prinsip arbitrer: (i) fokus yang khusus pada ketersediaan fasilitas, di mana dua indikator akses mewakili 50% indeks komposit dan lima indikator lainnya masing-masing mewakili 10%; dan (ii) bobot yang seimbang untuk ketiga dimensi yakni aksesibilitas, kualifikasi guru dan karakteristik fasilitas. Sebagai pembanding, digunakan indikator alternatif ketersediaan SMP, namun batas minimal jarak tempuh ke fasilitas ini dikurangi dari 6 km menjadi 3 km.

Kedua, bobot ditentukan menggunakan metode PCA atas ketujuh indikator. Tabel IV.6 menampilkan *eigenvectors* dari komponen prinsipal yang pertama dan bobot yang dihasilkan. Lantaran bobot yang diperoleh masing-masing indikator hampir sama, kami tidak menyertakan indeks komposit tambahan yang bobotnya sama di semua indikator (sebagaimana yang dilakukan pada sektor kesehatan)

Terakhir, kami juga menghubungkan indikator-indikator kesiapan suplai dengan hasil aktual dari sistem pendidikan; di sini kami menggunakan nilai rata-rata Ujian Nasional (UN) SMP 2010 di tingkat kabupaten. Lagi-lagi, dua metode digunakan

Tabel IV.5: Sub Indeks Pendidikan – Nilai Tengah dan Korelasi

Sub-Indeks	Nilai Tengah	Korelasi		
		Ketersediaan	Tenaga Kerja	Bangunan
Ketersediaan Fisik	0,823	1		
Tenaga Kerja Kesehatan	0,742	0,74	1	
Karakteristik Bangunan	0,722	0,73	0,77	1

¹³ Statistik ini berdasarkan pada versi A indeks kesehatan komposit, di mana bobot tertentu diberikan pada indikator-indikator ketersediaan fisik.

untuk mengukur nilai penting relatif indikator-indikator suplai yang berbeda menyangkut prestasi pelajar SMP dalam ujian nasional: (i) regresi OLS ketujuh indikator dilakukan pada nilai ujian rata-rata di level kabupaten, dan koefisien-koefisien yang dihasilkan digunakan sebagai bobot; dan (ii) berbasis pada hasil regresi-

regresi OLS ini, indeks konsentrasi dipakai untuk menghitung kontribusi indikator-indikator pada ketidakseimbangan hasil pendidikan. Tabel IV.7 mempresentasikan hubungan antara hasil ujian dan ketujuh indikator, juga perkiraan regresi OLS dan bobot yang dihasilkan bagi indeks komposit.

Tabel IV.6: Analisis Komponen Prinsipal (Principal Component Analysis/PCA) Indikator-indikator Pendidikan

Indikator	Eigenvector	Bobot
Akses ke PAUD	0,401	0,152
Akses ke SMP (6 km)	0,372	0,141
Kualifikasi Guru SD	0,394	0,149
Kualifikasi Guru SMP	0,365	0,138
Laboratorium di SMP	0,339	0,128
Aliran Listrik	0,391	0,148
Air Bersih di Kamar Mandi	0,381	0,144
	2,824	1

Tabel IV.7: Hasil Regresi OLS: Faktor-faktor Penentu dari Nilai Rata-rata UN (SMP)

Indikator	1. Korelasi	2. OLS I	3. OLS II	4. Bobot
Akses ke PAUD	0,29	-5,58*** (0,001)	-5,86*** (0,000)	
Akses ke SMP (6 km)	0,37	7,66*** (0,000)	7,18*** (0,000)	0,302
Kualifikasi Guru SD	0,47	6,96*** (0,000)	6,53*** (0,000)	0,275
Kualifikasi Guru SMP	0,35	-2,17 (0,267)		
Laboratorium di SMP	0,46	6,29*** (0,000)	6,08*** (0,000)	0,256
Aliran Listrik	0,43	3,98** (0,010)	3,95** (0,011)	0,166
Air Bersih di Kamar Mandi	0,27	-7,61*** (0,000)	-7,74*** (0,000)	
	Observasi:	479	479	
	R ² :	0,320	0,319	
	Nilai-P di dalam kurung. Signifikansi statistik: * pada: 10%; ** pada 5%; *** pada 1%. Termasuk konstanta.			

Kolom 1 menunjukkan korelasi positif yang signifikan antara indikator-indikator kesiapan suplai pendidikan dan nilai rata-rata UN. Ini menunjukkan bahwa indikator-indikator yang dipilih sudah tepat. Dengan maksud menganalisis korelasi positif ini lebih jauh, kami menjalankan regresi OLS sederhana pada nilai rata-rata ujian di tingkat kabupaten dan mendapatkan koefisien regresi yang positif pada empat dari tujuh variabel kontrol/indikator (kolom 2). Pada kolom 3, indikator kualifikasi guru yang tidak signifikan tidak diikutsertakan dan bobot untuk indeks-indeks komposit diturunkan dari koefisien-koefisien terhitung (kolom 4).¹⁴ Selain merupakan cara yang sederhana untuk mencari tahu faktor penentu hasil-hasil pendidikan, hitungan ini bisa digunakan sebagai cara alternatif dalam penetapan bobot.

Alternatif kedua dalam menentukan bobot berdasarkan perkiraan-perkiraan regresi adalah menggunakan konsep indeks konsentrasi untuk menilai kontribusi setiap indikator terhadap ketimpangan dalam hasil ujian (penjelasan yang lebih rinci mengenai metode ini ada pada Apendiks 1). Tabel IV.8 mempresentasikan hasil-hasil yang diperoleh dari pendekatan ini. Kami memulai dengan regresi OLS II dari ketujuh indikator suplai pada nilai rata-rata UN SMP. Indeks konsentrasi untuk tingkat utilisasi oleh pasien rawat jalan setara 0,0064, mengindikasikan sebuah distribusi nilai ujian (yang lebih tinggi) agak pro orang kaya. Penguraian atas indeks konsentrasi semua

kovarian seluruhnya menghasilkan nilai yang positif (kolom 2), di mana kabupaten-kabupaten yang lebih makmur mendapatkan nilai rata-rata yang relatif lebih tinggi.

Karena semua indeks konsentrasi bernilai positif, kontribusi setiap kovarian terhadap ketimpangan hasil ujian secara umum ditentukan oleh tanda koefisien regresi dan elastisitas yang mengikutinya. Komponen residual yang relatif kecil menunjukkan bahwa indeks suplai berhasil menjelaskan sebagian besar ketimpangan dalam hasil pendidikan. Ketika mengkonversi hasil yang diperoleh menjadi bobot, indikator yang bernilai negatif diberi nilai kosong, sedangkan indikator lainnya diskala ulang sehingga jumlah nilai mereka menjadi 1.

Ini memberikan kami enam skema pembobotan alternatif untuk indeks komposit kesiapan suplai infrastruktur pendidikan. Tabel IV.9 menampilkan bobot ketujuh indikator untuk masing-masing dari keenam indeks alternatif tersebut. Jika indeks komposit A sampai C menggunakan ketujuh indikator yang tersedia, versi D dan E yang menggunakan regresi nilai hasil UN mengenyampingkan tiga indikator.

Tabel IV.10 dan IV.11 menampilkan statistik deskriptif dan korelasi *pairwise* keenam indeks komposit, secara berurutan. Seperti pada indikator-indikator utama, nilai indeks komposit dibatasi antara 0 dan 1, di mana nilai yang lebih

Tabel IV.8: Indikator-indikator Pendidikan: Dekomposisi Indeks Konsentrasi

Indikator	1. Koefisien	2. CI	3. Kontribusi	4. Persen	5. Bobot
Akses ke PAUD	-5,86	0,0833	-0,0055	-86,4	
Akses ke SMP (6 km)	7,18	0,0425	0,0038	59,1	0,194
Kualifikasi Guru SD	6,53	0,1088	0,0072	112,3	0,367
Kualifikasi Guru SMP					
Laboratorium di SMP	6,08	0,1026	0,0054	84,4	0,276
Aliran Listrik	3,95	0,0733	0,0032	50,2	0,163
Air Bersih di Kamar Mandi	-7,74	0,0858	-0,007	-109,6	
Sisa			-0,0007	-10	
Total		0,0064		100	1

¹⁴ Mirip dengan pendekatan yang dipakai untuk indeks kesehatan, indikator yang nilai koefisien regresinya negatif mendapat bobot nol, sementara koefisien lain yang tersisa diskala ulang agar jumlah bobot mereka menjadi 1.

tinggi menunjukkan tingkat kesiapan yang lebih tinggi pula. Kebanyakan kecamatan di Indonesia mendapatkan skor 0,77 atau 77%, tergantung skema pembobotan yang digunakan.¹⁵ Menggunakan indeks komposit A sebagai referensi, baik yang berpotensi mendapatkan skor tertinggi 1 (36 kecamatan) dan skor terendah 0 (99 kecamatan) diamati.

Skema-skema pembobotan alternatif berpengaruh sangat kecil terhadap distribusi indeks komposit. Ini dibuktikan oleh korelasi yang amat tinggi antara berbagai indeks komposit

yang berbeda. Versi A sampai C hampir identik, lantaran ketujuh sub indikator memiliki bobot yang hampir sama dan korelasi yang positif. Bahkan bila jumlah indikator utama dikurangi (versi D dan E), koefisien korelasinya tetap di atas 0,92. Terakhir, kemiripan dari indikator-indikator komposit yang berbeda dikuatkan oleh distribusi mereka yang nyaris identik (Gambar IV.9).

Tabel IV.9: Gambaran Umum Mengenai Bobot Indeks-indeks Komposit Pendidikan

Indeks		PAUD	SMP 6km	S1 SD	S1 SMP	Lab SMP	Listrik	Kamar Mandi
A	Fokus pada Akses	0,250	0,250	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100
A1	SMP Berjarak 3 km	0,250	0,250 (3km)	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100
B	Dimensi yang Setara	0,166	0,166	0,166	0,166	0,111	0,111	0,111
C	PCA	0,152	0,141	0,149	0,138	0,128	0,148	0,144
D	Pemanfaatan OLS		0,302	0,275		0,256	0,166	
E	Pemanfaatan CI		0,194	0,367		0,276	0,163	

43 |

Tabel IV.10: Indeks Komposit Pendidikan: Statistik Deskriptif

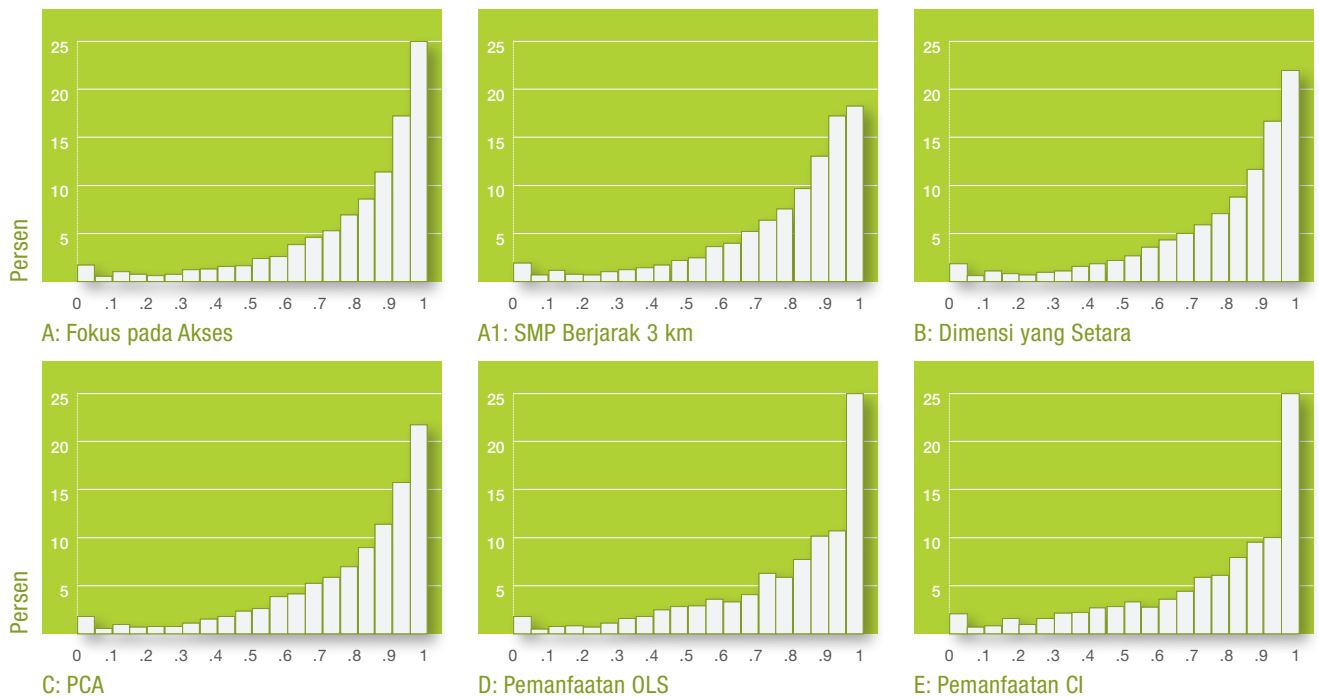
Deskriptif	Obs.	Nilai Tengah	SD	Min	Maks
A: Fokus pada Akses	6771	0,789	0,227	0	1
A1: SMP Berjarak 3 km	6771	0,765	0,231	0	1
B: Dimensi Setara	6771	0,771	0,230	0	1
C: PCA	6771	0,766	0,231	0	1
D: Pemanfaatan OLS	6771	0,759	0,245	0	1,00
E: Pemanfaatan CI	6771	0,740	0,260	0	1

Tabel IV.11: Indeks Komposit Pendidikan: Korelasi-korelasi

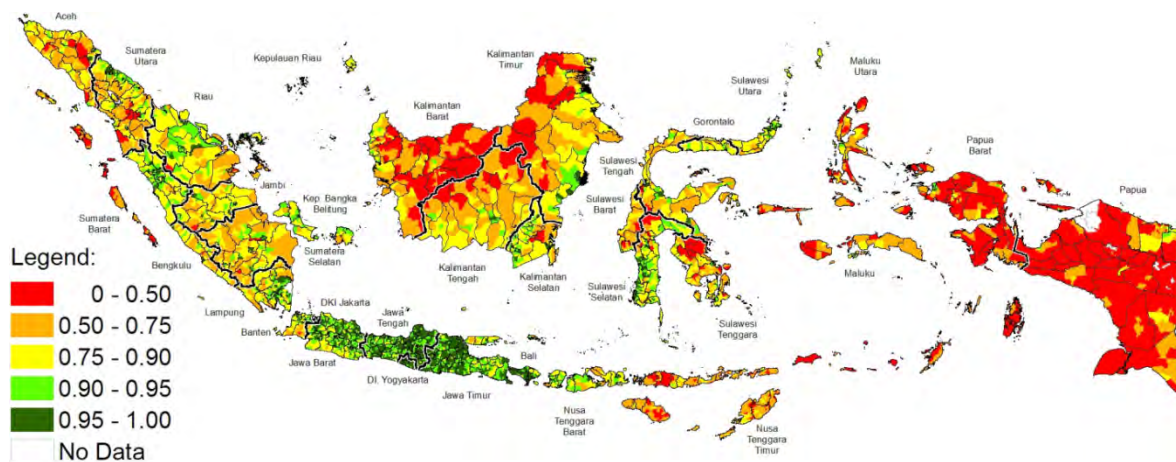
Korelasi-korelasi	A	A1	B	C	D
A1: SMP Berjarak 3 km	0,99	1			
B: Dimensi Seimbang	0,99	0,98	1		
C: PCA	0,99	0,98	1	1	
D: Pemanfaatan OLS	0,95	0,94	0,97	0,97	1
E: Pemanfaatan CI	0,93	0,92	0,96	0,96	1

¹⁵ Skor rata-rata pada indeks E sedikit lebih rendah karena bobot yang relatif lebih besar diberikan pada indeks kualifikasi guru SD dan ketersediaan laboratorium di SMP, padahal nilai rata-rata keduanya relatif rendah.

Gambar IV.9: Distribusi Indeks Komposit: Alternatif Kesiapan Suplai Pendidikan



Gambar IV.10: Peta – Indeks Komposit Kesiapan Suplai Pendidikan (Indeks A)



Kemiripan di antara indeks-indeks komposit menghasilkan pola spasial yang serupa. Gambar IV.10 memetakan distribusi spasial indeks A.

Rata-rata kecamatan di Bali (0,96) dan Jawa (0,94) memiliki level kesiapan suplai pendidikan tertinggi. Setelah itu Sulawesi (0,81), Sumatera (0,80), Kalimantan (0,74) serta NTT & NTB (0,72). Tertinggal jauh di belakang adalah Kepulauan Maluku (0,60) dan Papua/Papua Barat (0,30). Secara umum kesenjangan antara kecamatan di daerah perkotaan (0,93) dan kecamatan di pedesaan (0,70) juga amat tinggi.

IV.4. Menghitung Kebutuhan Investasi

Kami menggunakan ketujuh indikator kesiapan suplai pendidikan untuk memperkirakan kesenjangan yang terjadi dalam suplai pelayanan pendidikan. Selisih antara skor suatu kecamatan dengan nilai maksimum 1 kami interpretasikan sebagai kesenjangan pada sektor pendidikan. Kami juga menghitung tingkat ketimpangan secara nasional setiap indikator.

1. Ketersediaan dan Aksesibilitas Fisik

Untuk kedua indikator ketersediaan fisik, dihitung jumlah penduduk yang tidak memiliki akses mudah ke pelayanan-pelayanan terkait. Karena

informasi tentang jumlah anak per kelompok usia di setiap desa tidak tersedia, tidak dapat dibuat perkiraan jumlah anak-anak yang “berhak” namun tidak memiliki akses. Menggunakan data jumlah total penduduk sebagai pengganti, kami menemukan 16,6 juta penduduk tidak memiliki akses mudah ke fasilitas pendidikan anak usia dini. Dari 19.052 desa yang tidak memiliki fasilitas PAUD, baik di dalam desa itu sendiri maupun dalam jarak 1 kilometer dari desa tersebut, 99% berada di daerah pedesaan. Ketimpangan yang serupa antara daerah perkotaan dan pedesaan juga tampak pada indikator akses ke sekolah menengah pertama, di mana bagi 99% pemukiman di perkotaan setidaknya sebuah SMP tersedia dalam jarak 6 km (3 km).

Tabel IV.12: Gambaran Umum mengenai Kesenjangan dalam Kesiapan Suplai Pendidikan, per Indikator

Indicator	Jenis Kesenjangan	Total Kesenjangan secara Nasional
Akses ke PAUD	Jumlah penduduk tanpa akses Jumlah desa tanpa fasilitas PAUD	16,64 juta 19,052 juta
Akses ke SMP (sekolah dalam jarak 6 km)	Jumlah penduduk tanpa akses Jumlah kecamatan tanpa SMP	9,46 juta 230 (population: 2,39 juta)
Kualifikasi Guru SD	Jumlah tambahan guru 'S1' yang dibutuhkan di SD (untuk mencapai target 2 guru S1 di setiap sekolah)	32.586
Kualifikasi Guru SMP	Jumlah tambahan guru 'S1' yang dibutuhkan di SMP untuk mencapai 70% di setiap sekolah Jumlah tambahan guru tetap berijazah 'S1' yang dibutuhkan di SMP untuk mencapai 70%	26.086 14.675
Laboratorium di SMP	Jumlah SMP yang tidak memiliki laboratorium	7.796 (36%)
Aliran Listrik	Jumlah Sekolah Negeri yang Tidak Memiliki Aliran Listrik SD SMP SMA SMK	21.653 (13%) 18.610 (14%) 2.537 (12%) 338 (5%) 168 (7%)
Air Bersih di Kamar Mandi	Jumlah Sekolah Negeri yang Tidak Memiliki Jaringan Air Bersih di WC Murid SD SMP SMA SMK	30.207 (18%) 25.896 (19%) 3.355 (16%) 642 (10%) 314 (12%)

Kesenjangan relatif di tingkat fasilitas dinyatakan dalam kurung

Tabel IV.13 memberikan sebuah gambaran umum tentang distribusi regional dari (i) kecamatan dengan tingkat akses di bawah 75%; dan (ii) jumlah orang tanpa akses mudah ke fasilitas pendidikan usia dini dan SMP. Kebanyakan kecamatan dengan tingkat akses ke fasilitas

pendidikan usia dini di bawah 75% berada di Sumatera (34% dari 1.770 kecamatan) dan Papua (28%). Tapi gambaran umum ini berubah manakala yang ditelaah adalah jumlah absolut penduduk yang tidak memiliki akses mudah (yang berarti memperhitungkan kepadatan penduduk),

Tabel IV.13: Akses ke Fasilitas Pendidikan – Kesenjangan Absolut dan Relatif

Wilayah	Akses ke PAUD		SMP dalam jarak 6 km	
	Persentase di Kecamatan di Bawah 0,75	Persentase Penduduk	Persentase diKecamatan di Bawah 0,75	Persentase Penduduk
Sumatera	34,2	41,2	16,3	27,7
Java & Bali	3,1	13,7	3,6	26,4
NTT & NTB	7,6	8,4	7,5	6,6
Kalimantan	11,4	12,4	18,8	14,7
Sulawesi	9,6	8,2	6,3	7,6
Maluku & Maluku Utara	6,2	4,1	4,1	2,3
Papua & Papua Barat	28,1	12	43,5	14,6
Angka Absolut	1.770	16,64 juta	978	9,46 juta

‘Persentase Kecamatan di bawah 0,75’ menunjukkan distribusi pada tingkat regional dari 694 kecamatan yang memiliki satu skor indikator di bawah 0,75. ‘Persentase Penduduk’ merujuk kepada distribusi penduduk yang tidak memiliki akses di tingkat regional.

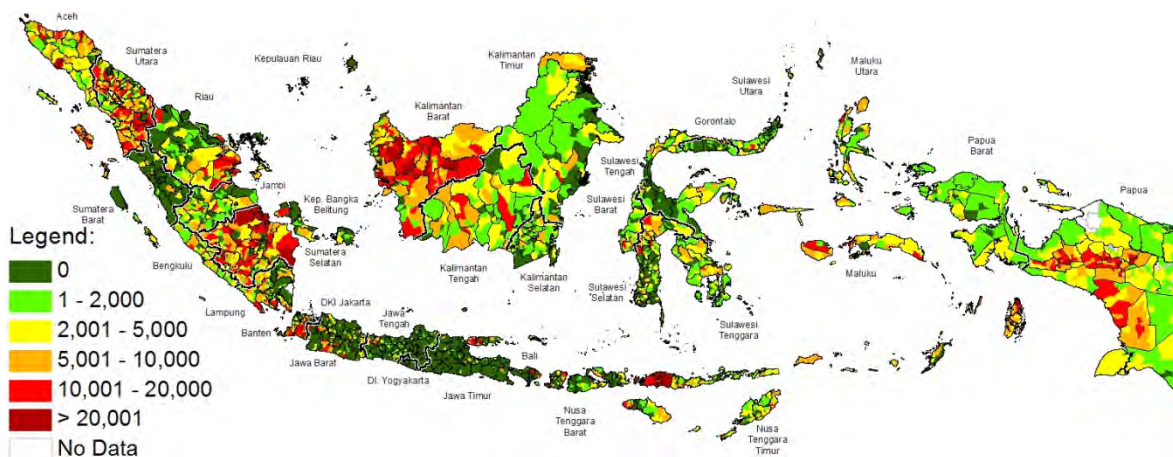


di mana 41% dari mereka tinggal di Sumatera, tapi hanya 12% di provinsi-provinsi di Papua.

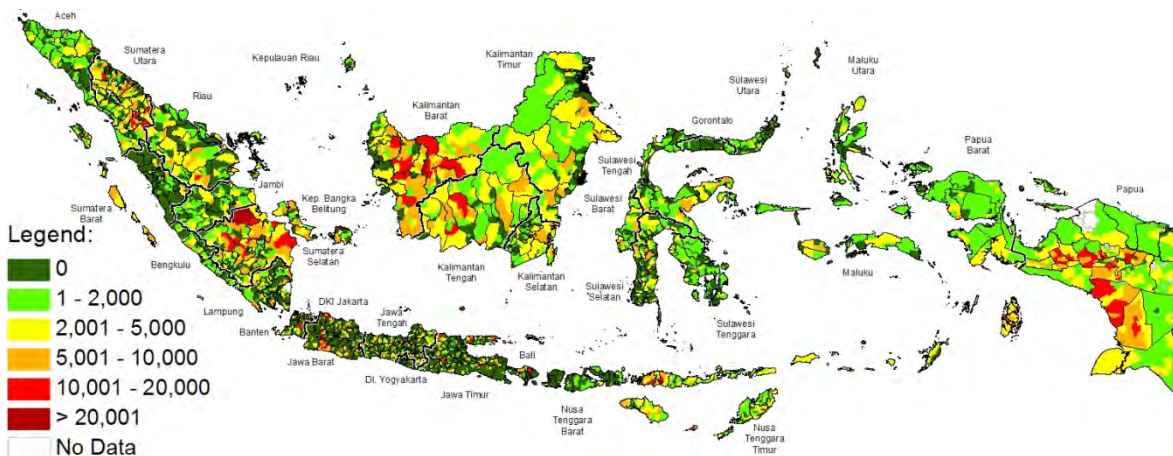
Gambar IV.11 memperlihatkan jumlah penduduk per kecamatan yang tidak memiliki akses ke PAUD. Sebagian besar kecamatan yang lebih dari 10.000 penduduk desanya tidak memiliki akses ke fasilitas PAUD berada di Sumatera Utara (83), Sumatera Selatan (52), Kalimantan Barat (51), Papua (41), Banten (30), juga NAD (28) dan NTT (28). Sekali lagi, kami menemukan perbedaan yang signifikan antara kesenjangan relatif dan absolut di Papua, disebabkan oleh skor relatif yang rendah dan kepadatan penduduk yang juga rendah.

Pola ketersediaan sebuah SMP dalam jarak 6 km dari desa secara umum sama. Di Papua, ada 44% kecamatan di berbagai provinsi yang memiliki tingkat akses kurang dari 75% (Tabel IV.13), tapi dari segi jumlah absolut, prosentase mereka hanya 15% dari 9,46 juta penduduk Indonesia, kebanyakan penduduk yang tidak memiliki akses ke sekolah menengah pertama dalam jarak 6 km, justru tinggal di pulau Jawa dan Sumatera, dengan nilai absolut tertinggi ditemukan di provinsi Papua (1,23 juta), Sumatera Utara (0,84 juta), Jawa Barat (0,77 juta), Jawa Tengah (0,76 juta), Jawa Timur (0,71 juta), Kalimantan Barat (0,68 juta), and Sumatera Selatan (0,60 juta).

Gambar IV.11: Peta – Jumlah Penduduk tanpa Akses ke Fasilitas PAUD



Gambar IV.12: Peta – Jumlah Penduduk Tanpa Akses ke SMP dalam Jarak 6 km



2. Kualifikasi Guru

Beralih ke indikator kualifikasi guru, kami menghitung jumlah guru lulusan S1 yang dibutuhkan untuk mencapai target (i) setidaknya ada dua guru berijazah 'S1' di setiap SD, dan (ii) sedikitnya ada 70% guru lulusan S1 di setiap SMP. Dengan asumsi jumlah tenaga pengajar tidak berubah, maka 32.586 guru SD dan 26.086 guru SMP harus mendapatkan gelar sarjana, atau diganti dengan guru lain yang memiliki kualifikasi tersebut, agar target bisa tercapai. Namun untuk dua alasan, jumlah tersebut bisa dianggap sebagai batas atas. Alasan pertama, di sini kami juga memperhitungkan guru-guru tidak tetap. Sebagai contoh, jika target 70% dibatasi hanya untuk para pengajar tetap, maka tambahan guru lulusan S1 yang dibutuhkan untuk SMP berkurang menjadi hanya 14.675 orang. Kedua, penelitian-penelitian terbaru menemukan adanya kelebihan suplai guru, terutama di sekolah-sekolah kecil di daerah pedesaan (Bank Dunia, 2010). Hal ini menyebabkan asumsi utama bahwa jumlah tenaga pengajar adalah konstan dapat dipertanyakan.

Meski demikian, angka-angka tersebut memberikan gambaran tentang distribusi spasial kualifikasi guru. Dari tambahan 32.856 orang guru SD lulusan S1 yang dibutuhkan, 11,1% harus direkrut di Sumatera Utara, 10,4% di Kalimantan Barat, 9,6% di NTT, 7,5% di Maluku dan 6,4% di provinsi-provinsi di Papua. Pada tingkat SMP, target untuk memiliki sedikitnya 70% guru lulusan S1 akan membutuhkan peningkatan kualifikasi/penggantian 2.180 'guru tanpa ijazah S1' di provinsi Sumatera Utara, 2.094 di NAD, 2.012 di Jawa Barat, 1.832 di Kalimantan Barat, 1.739 di NTT dan 1.713 di Maluku.

3. Karakteristik Bangunan

Kami menemukan 21.653 sekolah negeri tidak memiliki aliran listrik dan 30.207 sekolah tidak menyediakan air bersih di kamar mandi murid. Kebanyakan sekolah tersebut – 86% dari semua sekolah yang tidak beraliran listrik dan tidak menyediakan air di kamar mandi – adalah sekolah dasar. Sebagian besar sekolah tanpa aliran listrik terdapat di Sumatera (7.337), Sulawesi (4.701) dan Kalimantan (4.010). Sedangkan 10.256 sekolah negeri di Sumatera, 8.276 di Jawa, 4.379 di Sulawesi dan 2.574 di Kalimantan tidak menyediakan air bersih di kamar mandi murid.

V. INFRASTRUKTUR TRANSPORTASI



V.1. Seleksi Indikator-indikator Kesiapan Suplai

Analisis infrastruktur transportasi dilakukan atas modul PODES utama, yang memberikan beberapa informasi mengenai ketersediaan fisik dan aksesibilitas infrastruktur tersebut. Pada dimensi ini kami membedakan tiga kategori dan enam indikator.

Karakteristik Jalan-jalan Utama

Informasi mengenai karakteristik jalan merupakan hasil penilaian subjektif atas jenis dan kualitas jalanan utama di sebuah desa.

- Permukaan Jalan Utama: Indikator ini menunjukkan persentase jalan utama di desa-desa yang sudah dikeraskan menggunakan aspal/beton atau kerikil/batu. Jalan utama didefinisikan sebagai jalan terlebar yang mengarah ke jalur bebas hambatan menuju kantor kepala kabupaten terdekat.
- Kondisi Jalan Utama: Persentase desa-desa yang jalan utamanya tergolong “baik”, artinya tidak ada kerusakan sama sekali pada jalan-jalan tersebut atau hanya mengalami sedikit kerusakan (berlawanan dengan kondisi jalan yang rusak di sebagian besar atau seluruh badan jalan)

Karakteristik Jembatan

Sensus pedesaan juga menanyakan kepada kepala desa kondisi jembatan-jembatan di desa saat sensus dilakukan, dan apakah ada kebutuhan akan jembatan-jembatan baru, dengan indikator-indikator berikut:

- Kondisi Jembatan: Persentase desa-desa yang memiliki jembatan dalam keadaan “baik” atau hanya mengalami sedikit kerusakan (berlawanan dengan yang mengalami cukup banyak atau pun banyak kerusakan).¹⁶
- Kebutuhan Jembatan Baru: Persentase desa yang membutuhkan jembatan-jembatan baru.

Ketersediaan Transportasi Publik

Akhirnya, kami menggunakan informasi mengenai ketersediaan transportasi publik dari kantor desa menuju (i) kantor kecamatan; dan (ii) kantor bupati atau wali kota. Kami hanya fokus pada transportasi publik yang memiliki rute tetap.

- Transportasi Publik ke Kantor Kecamatan: Persentase desa-desa yang memiliki angkutan pedesaan dengan rute tetap menuju kantor kecamatan.
- Transportasi Publik ke Kantor Bupati/Wali Kota: Persentase desa-desa yang memiliki angkutan pedesaan dengan rute tetap menuju kantor bupati atau wali kota.

Keenam indikator kesiapan suplai infrastruktur diurutkan pada Tabel V.1 berikut.

¹⁶ Hanya desa-desa yang memiliki setidaknya satu jembatan yang dihitung untuk indikator ini, sehingga indikator ini tidak kami hitung pada 301 kecamatan yang tidak memiliki satu jembatan pun.

Tabel V.1: Informasi tentang Infrastruktur Transportasi dari PODES

Dimensi	Indikator	Deskripsi
1	Karakteristik Jalan Utama	Permukaan Jalan Utama
	Kondisi Jalan Utama	Persentase desa-desa yang jalan utamanya diaspal/dibeton atau dilapisi kerikil/batu
2	Karakteristik Jembatan	Kondisi Jembatan
	Kebutuhan akan Jembatan Baru	Persentase desa-desa yang jembatannya masih baik atau hanya mengalami kerusakan-kerusakan kecil
3	Ketersediaan Transportasi Publik	Transportasi Publik ke Kantor Kecamatan
	Transportasi Publik ke Kantor Bupati/Wali kota	Persentase desa-desa yang memiliki transportasi pedesaan dengan rute tetap menuju kantor kecamatan
		Persentase desa-desa yang memiliki transportasi pedesaan dengan rute tetap menuju kantor bupati/wali kota



V.2. Pola Nasional Ketersediaan Infrastruktur

Dalam statistik deskriptif yang dipaparkan pada Tabel V.2, lagi-lagi semua indikator diberi nilai antara 0 dan 1. Rata-rata, 86% desa di setiap kecamatan mempunyai jalan utama yang sudah dilapisi aspal atau beton, atau pemukaannya dikeraskan menggunakan kerikil/batu. Tapi prosentase desa yang jalan-jalan utamanya dianggap masih dalam kondisi bagus hanya sedikit di atas 50%. Skor rata-rata kondisi jembatan lebih baik. Sebanyak 83% dari semua desa (yang memiliki jembatan) melaporkan bahwa jembatan mereka dalam keadaan bagus, dan paling-paling hanya mengalami kerusakan kecil. Sekitar seperempat dari desa-desa yang disensus menyatakan mereka membutuhkan

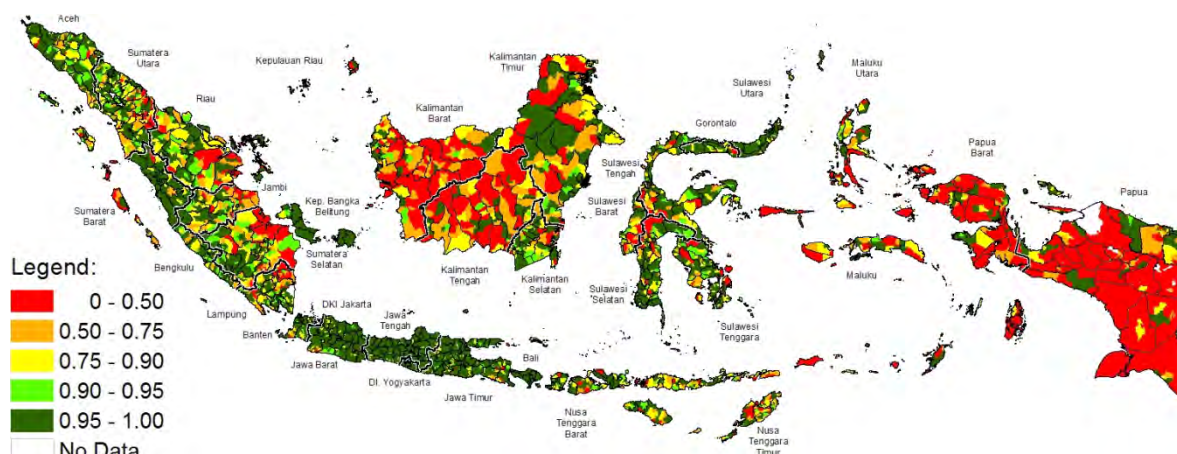
jembatan baru. Sementara prosentase desa dalam kecamatan-kecamatan, yang memiliki transportasi publik pedesaan dengan rute tetap ke kantor kecamatan dan kantor bupati/wali kota terdekat, berturut-turut 34% dan 60%.

Profil geografis karakteristik jalan dan jembatan, dan ketersediaan transportasi publik, digambarkan dalam Gambar V.1 hingga V.3. Gambar V.1 memperlihatkan bahwa pada semua kecamatan di Jawa hampir setiap desa memiliki jalan utama beraspal atau dikeraskan dengan kerikil/batu. Di Sumatera dan Sulawesi skor kecamatan-kecamatan untuk fasilitas ini juga rata-rata di atas 90%. Meski demikian masih ada sejumlah

Tabel V.2: Indikator-indikator Transportasi: Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics	Obs.	Nilai Tengah	SD	Min	Maks
Jalan Utama: Aspal atau Kerikil/ Batu	6703	0,858	0,277	0	1
Kondisi Jalan Utama Baik	6671	0,577	0,318	0	1
Kondisi Jembatan Baik	6470	0,832	0,207	0	1
Tidak Membutuhkan Jembatan Baru	6771	0,226	0,262	0	1
Transportasi Publik ke Kantor Kecamatan	6771	0,344	0,365	0	1
Transportasi Publik ke Kantor Bupati/Wali Kota	6767	0,6	0,402	0	1

Gambar V.1: Peta – Persentase Desa yang Memiliki Jalan Utama Beraspal atau Dikeraskan dengan Kerikil/Batu



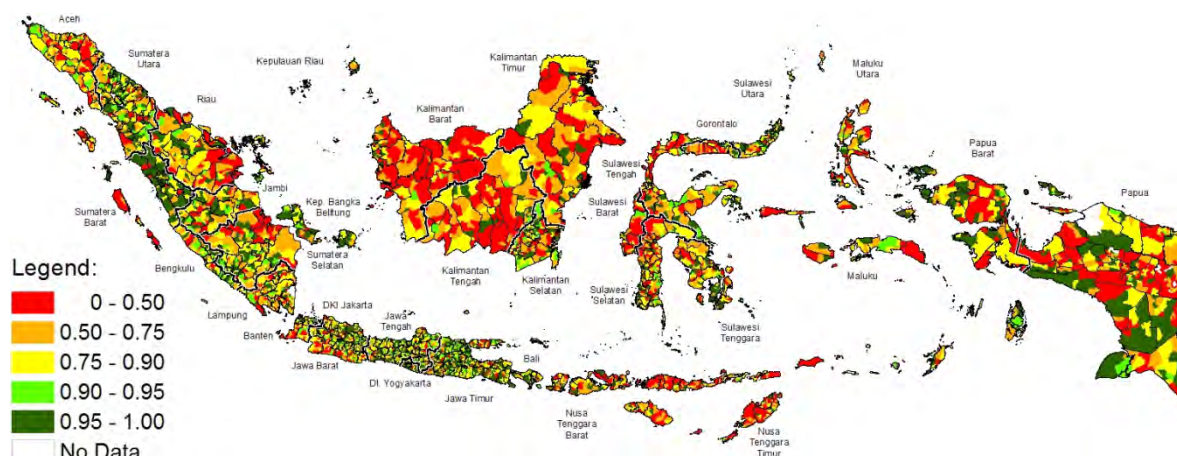
kecil kecamatan yang hanya memiliki nilai antara 0,5 dan 0,9. Bahkan secara kebetulan, kami menemukan kecamatan-kecamatan yang kurang dari setengah desa-desanya memiliki jalan utama dengan permukaan yang sudah dikeraskan. Kami menemukan variasi yang besar antar kecamatan berkaitan dengan fasilitas ini di Kalimantan, NTB dan NTT. Kecamatan-kecamatan di Maluku, dan terutama di Papua, mendapatkan skor amat rendah, kebanyakan di bawah 0,5 dan beberapa bahkan di bawah 0,25.

Persentase desa di kecamatan-kecamatan yang tidak membutuhkan jembatan baru, ditunjukkan dalam Gambar V.2. Di Jawa, sebagian besar desa menyatakan tidak memerlukan jembatan baru, meski terdapat beberapa situasi yang berbeda antar kecamatan. Di Sumatera dan Papua, kami

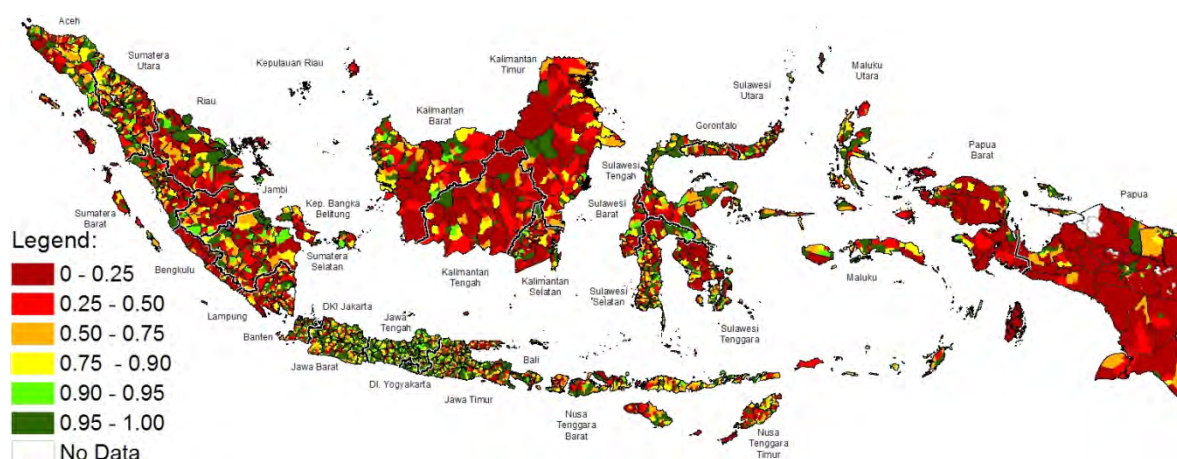
menemukan variasi yang lebih besar dibandingkan di Jawa, namun masih berada pada kisaran skala 0 dan 1. Variasi yang besar juga ditemukan di Kalimantan, NTB, NTT, dan Maluku, namun nilai rata-ratanya lebih rendah, kebanyakan di bawah 0,5.

Gambar V.3 menunjukkan perbedaan yang besar antar wilayah dan antara daerah di dalam sebuah wilayah geografis, menyangkut ketersediaan transportasi publik. Di Jawa ketersediaan transportasi publik dengan rute tetap merupakan norma. Tapi skor transportasi yang diperoleh desa-desa di Kalimantan dan Papua kebanyakan di bawah 0,25. Sumatera, NTB, NTT dan Maluku secara rata-rata juga mendapatkan skor rendah, namun ada beberapa variasi dalam wilayah yang lebih luas.

Gambar V.2: Peta – Persentase Desa yang Tidak Membutuhkan Jembatan Baru



Gambar V.3: Peta – Persentase Desa yang Memiliki Transportasi Publik Menuju Kantor Bupati/ Wali kota



V.3. Menghitung Kebutuhan Investasi

Kesenjangan akses ke infrastruktur transportasi diperlihatkan pada Tabel V.3, yang menunjukkan ketimpangan berdasarkan jumlah desa yang melaporkan adanya kekurangan infrastruktur. Dari 78.600 desa yang disensus, 9.735 menyatakan memiliki jalan utama dengan permukaan yang belum dikeraskan. Tapi ada lebih banyak desa, mencapai 31.309, yang melaporkan adanya kerusakan amat berat pada jalan utama desa

mereka. Sejumlah besar desa yang lain, mencapai 35.048, melaporkan kerusakan berat pada jembatan di sepanjang jalan utama desa, sementara 17.450 desa menyatakan mereka membutuhkan tambahan jembatan. Akses transportasi umum dengan rute menuju kantor kecamatan dan kantor bupati/wali kota tidak ada di masing-masing 51.316 dan 31.026 desa.

Tabel V.3: Kesenjangan Secara Umum dalam Infrastruktur Transportasi

Dimensi	Jenis Kesenjangan	Total Kesenjangan
Karakteristik Jalan Utama Desa	Jumlah desa yang jalan utamanya tidak diaspal atau berlapis kerikil	9.735
	Jumlah desa yang jalan utamanya rusak berat	31.309
Karakteristik Jembatan	Jembatan yang rusak berat	35.048
	Jumlah desa yang membutuhkan tambahan jembatan	17.450
Ketersediaan Transportasi Publik	Jumlah desa tanpa transportasi publik dengan rute tetap ke kantor kecamatan	51.316
	Jumlah penduduk tanpa transportasi publik dengan jalur tetap menuju kantor bupati/wali kota	31.026

V.4. Perbandingan dengan Kesiapan Suplai Kesehatan dan Pendidikan

Terdapat korelasi positif yang jelas antara transportasi dengan indikator-indikator ketersediaan kesehatan dan pendidikan, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel V.4. Ini mengindikasikan ada faktor penentu yang sama untuk investasi pada infrastruktur-infrastruktur lokal di semua sektor. Korelasi ini terutama kuat untuk jalan yang mengalami pengerasan, dengan koefisien korelasi antara 0,54 hingga 0,63. Untuk

kualitas jalan dan jembatan, dan ketersediaan jembatan yang cukup, koefisien korelasi juga bernilai positif meski sedikit lebih rendah, berkisar dari 0,20 hingga 0,41. Rentang nilai korelasi positif yang hampir sama dengan indikator-indikator kesehatan dan pendidikan juga terlihat pada indikator ketersediaan transportasi publik lokal.

Tabel V.4: Korelasi Antara Transportasi dengan Indikator-indikator Ketersediaan Layanan Kesehatan dan Pendidikan

Indikator-indikator Ketersediaan Fisik: Kesehatan dan Pendidikan	Jalan Utama		Jembatan		Transportasi Publik	
	Aspal atau Kerikil/ Batu	Dalam Kondisi Baik	Dalam Kondisi Baik	Tidak Membutuhkan Jembatan Tambahan	Menuju Kantor Kecamatan	Menuju Kantor Bupati/ Wali kota
Akses ke Layanan Tingkat Primer	0,55	0,2	0,32	0,21	0,22	0,29
Akses ke Layanan Tingkat Sekunder	0,54	0,41	0,38	0,36	0,42	0,3
Akses ke Fasilitas Bersalin	0,63	0,31	0,36	0,29	0,3	0,33
Akses ke PAUD	0,61	0,29	0,37	0,27	0,33	0,34
Akses ke SMP	0,61	0,25	0,34	0,24	0,27	0,33



VI. RANGKUMAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN

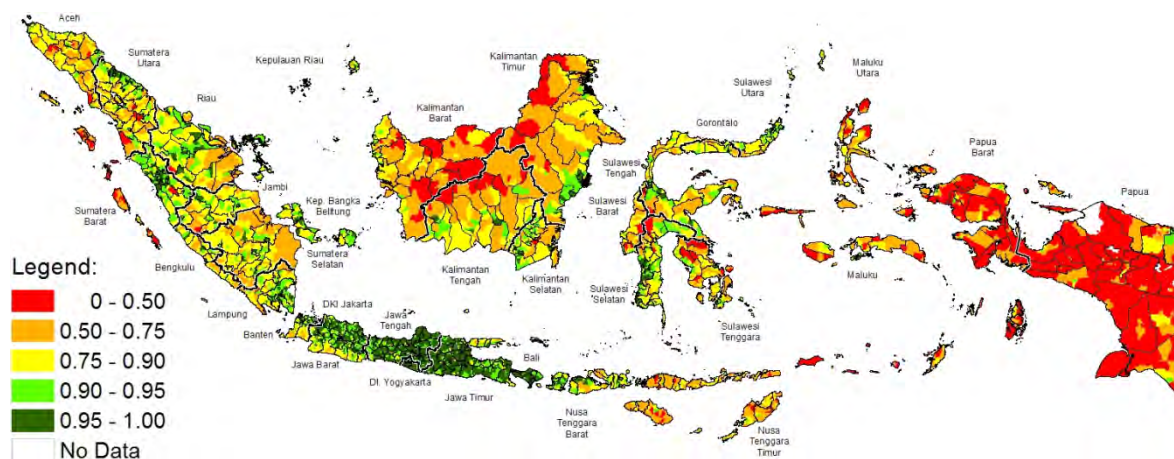


VI.1. Pola Nasional Kesiapan Suplai Infrastruktur

Analisis atas data sensus PODES 2011 menghasilkan gambaran yang konsisten mengenai suplai layanan-layanan dasar di Indonesia. Pola regional yang sama terungkap untuk indikator-indikator infrastruktur kesehatan, pendidikan dan transportasi. Sebagai contoh, indeks komposit untuk kesehatan dan pendidikan menunjukkan korelasi yang tinggi – antara 0,80 hingga 0,85, tergantung pada skema pembobotan yang digunakan. Gambar VI.1 menggabungkan indeks komposit kesehatan dan pendidikan menjadi sebuah “meta indeks”¹⁷, dengan maksud untuk menggambarkan distribusi spasial secara umum dari (kesenjangan dalam) penyelenggaraan layanan sosial.

Meski interpretasi atas nilai-nilai absolut “meta-indeks” yang mengkombinasikan 14 sub-indikator tidak sederhana, peta yang dihasilkan merangkum hasil-hasil utama dari analisa yang dilakukan, yang merefleksikan ketimpangan relatif secara geografis dalam hal kesiapan suplai infrastruktur secara keseluruhan. Pada umumnya, pulau Jawa dan provinsi Bali memiliki performa paling baik dalam hal kuantitas dan kualitas infrastruktur. Meski demikian, dan di luar hasil rata-rata yang bagus tersebut, tetap ada kebutuhan lokal untuk investasi, terutama di provinsi Jawa Barat dan Banten. Kesenjangan terbesar dalam kesiapan suplai infrastruktur ditemukan di wilayah Papua, kepulauan Maluku, NTT dan pedalaman Kalimantan.

Gambar VI.1: Peta – Gabungan Indeks Kesehatan dan Pendidikan



¹⁷ Kami menggunakan indeks-indeks komposit untuk kesehatan dan pendidikan dengan fokus khusus pada ketersediaan fisik (versi A), dan menghitung rata-rata kedua indeks ini untuk ‘meta-indeks’.

Untuk sektor kesehatan, nilai rata-rata terendah ditemukan di provinsi Kalimantan Barat (75%)¹⁸, NTT (71%), Maluku Utara (69%) Maluku (66%), Papua Barat (50%) dan Papua (39%). Adapun rata-rata tertinggi untuk tingkat kesiapan suplai kesehatan ditemukan di semua provinsi di Jawa (mulai dari 99% di DI Yogyakarta sampai 92% di Banten), kemudian Bali (99%), Bangka Belitung (95%), Sumatera Barat (92%), dan NTB (90%).

Pola yang mirip ditemukan pada peringkat rata-rata kesiapan suplai layanan pendidikan, di mana DKI Jakarta (98%), DI Yogyakarta (97%), Jawa Tengah (96%) dan Bali (96%) merupakan yang

terbaik. Sebaliknya Kalimantan Barat (64%), Maluku Utara (61%), Maluku (60%), Papua Barat (40%) dan Papua (26%) memiliki skor rata-rata di tingkat kecamatan yang paling rendah. Sampai batas tertentu, pola semacam ini juga ditemukan pada indikator-indikator infrastruktur transportasi. Namun, lepas dari tren umum yang konsisten tersebut, kami menemukan variasi yang substansial antar daerah di dalam wilayah dan di dalam provinsi. Salah satu penjelasan untuk ketimpangan di level lokal ini adalah perbedaan yang sangat besar antara wilayah perkotaan dan perdesaaan, bukan hanya pada aksesibilitas, namun juga pada kualitas layanan yang tersedia.



18 Skor-skor yang dilaporkan merepresentasikan rata-rata skor kecamatan per provinsi (berdasarkan pada indeks-indeks komposit dengan fokus khusus pada ketersediaan fisik). Tabel A.3 dan A.4 menampilkan skor alternatif yang dihitung pada tingkat provinsi.

VI.2. Rekomendasi Kebijakan

Sensus infrastruktur PODES 2011 memberikan informasi yang terperinci dan terbaru tentang ketersediaan dan kualitas infrastruktur dasar di Indonesia. Oleh karena itu berbagai indikator yang dikembangkan dalam analisis ini, dapat menjadi perangkat yang berguna bagi pemerintah lokal dan nasional, organisasi-organisasi internasional, lembaga swadaya masyarakat dan organisasi nirlaba lainnya, untuk memahami kebutuhan investasi infrastruktur yang berbeda-beda di setiap wilayah. Data-data ini antara lain dapat digunakan untuk:

- **Meningkatkan sasaran PNPM dan program-program pemerintah yang lain:** Karena memiliki gambaran yang lengkap dan komprehensif mengenai defisit dalam ketersediaan infrastruktur dasar, indikator-indikator tersebut dapat membantu perbaikan target PNPM dan program-program pemerintah yang lain.
- **Membantu penyediaan, penilaian, dan perbaikan pelayanan sosial di Indonesia:** Penyebaran data-data tersebut secara aktif dapat mempercepat pemanfaatannya oleh berbagai kelompok masyarakat, dan pihak swasta pemangku kepentingan yang terlibat dalam penyediaan layanan sosial di Indonesia. Tersedianya data ini menghindarkan penggunaan data-data sejenis yang memerlukan biaya mahal.
- **Mendukung usaha-usaha memperbaiki transparansi dan akuntabilitas di tingkat lokal:** Kesenjangan di tingkat lokal dan regional dapat diidentifikasi dengan adanya analisis pada level kecamatan. Penyebaran indikator-indikator tersebut kepada publik bisa membantu meningkatkan transparansi, dan dengan demikian juga meningkatkan akuntabilitas politik di tingkat lokal.

- **Memberikan dasar untuk analisis lanjutan dan pengawasan yang terus-menerus terhadap kesiapan suplai infrastruktur:**

Penilaian atas suplai lokal layanan-layanan dasar ini memberikan beragam peluang untuk analisis-analisis lanjutan.

- Hasil-hasil dari data PODES harus diperbandingkan dengan sensus lain menyangkut infrastruktur kesehatan dan pendidikan di tingkat lokal, untuk menguji lebih jauh reliabilitas dari data tersebut, dan bila mungkin menggabungkan semua informasi yang tersedia. Penilaian atas kualitas indikator-indikator mungkin dapat dilengkapi dengan penelitian kualitatif di lapangan.
- Bila data tentang besaran biaya tersedia, maka hasil-hasil yang diperoleh juga dapat digunakan untuk memperkirakan kesenjangan pembiayaan dalam upaya mengatasi defisit infrastruktur di tingkat nasional, regional dan lokal.
- Mengkombinasikan indikator-indikator PODES dengan data sosial-ekonomi, akan menunjang penelitian yang bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penentu suplai layanan lokal, permintaan dan hasilnya.
- Untuk tujuan ini, bukan cuma sensus PODES utama yang perlu dilakukan secara regular, tapi sensus infrastruktur juga harus diulang di kemudian hari, sehingga memungkinkan pengawasan yang berkesinambungan atas kuantitas dan kualitas infrastruktur desa. Mengikuti perubahan-perubahan yang terjadi seiring berjalannya waktu, memungkinkan evaluasi yang lebih teliti atas program-program sosial.

Seandainya sensus infrastruktur akan kembali dilakukan, kami mengusulkan beberapa perubahan dan amandemen sebagai berikut:

- Sensus kesehatan mencakup seluruh jenis fasilitas kesehatan. Dengan memperhatikan ketersediaan dana, fasilitas publik dan swasta lain seperti rumah sakit dan poliklinik sebaiknya disertakan dalam sensus agar diperoleh data yang lebih lengkap.
- Informasi mengenai layanan yang disediakan oleh fasilitas-fasilitas kesehatan bisa dikembangkan dan, sebagian, dibuat secara

lebih terperinci. Secara khusus, informasi lebih lanjut tentang peralatan, suplai dan perawatan medis akan menjadi pelengkap yang penting dalam menilai kualitas pelayanan.

- Sensus pendidikan hanya dibatasi pada fasilitas-fasilitas publik. Lagi-lagi tergantung dana, mengikutkan fasilitas swasta dalam sensus akan bermanfaat, khususnya yang menyangkut sekolah menengah karena di level ini jumlah sekolah swasta cukup banyak. Juga, tidak ada informasi menyangkut fasilitas untuk pendidikan usia dini.



REFERENSI

- Olken B., J. Onishi dan S. Wong (2011), "Indonesia's PNPM Generasi Program: Final Impact Evaluation Report", Draf yang belum diterbitkan.
- Bank Dunia (2011), "Program Keluarga Harapan: Impact Evaluation Report of Indonesia's Household Conditional Cash Transfer Program", Kantor Bank Dunia Jakarta, Draf yang belum diterbitkan.
- Bank Dunia (2010), "Transforming Indonesia's Teaching Force, Volume 1: Executive Summary", Laporan No. 53732-ID, Kantor Bank Dunia Jakarta
- World Health Organization (2011), "Measuring Service Availability and Readiness: Service Availability Indicators", Jenewa.

LAMPIRAN

Lampiran 1: Dekomposisi Indeks- indeks Konsentrasi

Salah satu metode alternatif untuk menentukan bobot adalah menilai prioritas kebijakan berbagai indeks berkaitan dengan kontribusi mereka terhadap ketidaksetaraan akses ke layanan kesehatan dan pendidikan. Selanjutnya kami akan menjelaskan metode untuk menentukan bobot bagi indeks komposit kesehatan. Mengikuti metode tersebut, indeks komposit pendidikan ditentukan menggunakan skor ujian nasional, bukan tingkat utilisasi sebagai variabel hasil. Ketidaksetaraan dalam pemanfaatan layanan kesehatan dapat dinyatakan sebagai sebuah indeks konsentrasi:

$$CI = \frac{2}{\mu} \text{cov}(h, r)$$

Di mana h adalah pemanfaatan layanan kesehatan, μ nilai tengah dari h , dan r merupakan peringkat kabupaten secara nasional dalam hal distribusi beberapa ukuran kesejahteraan.

Faktor-faktor penentu pemanfaatan layanan kesehatan dapat dinilai menggunakan sebuah regresi linear:

$$h = \alpha + \sum_k \beta_k x_k + \varepsilon$$

Ketidaksetaraan dalam pemanfaatan layanan kesehatan dengan demikian dapat terurai menjadi kontribusi satu per satu faktor penentu tersebut:

$$CI = \sum_k \frac{\beta_k \bar{x}_k}{\mu} CI_k + \frac{CG_\varepsilon}{\mu}$$

Sementara koefisien regresi menjelaskan faktor-faktor yang menentukan rata-rata tingkat pemanfaatan layanan kesehatan, CI yang telah terurai menerangkan seberapa besar faktor-faktor penentu ini berkontribusi terhadap ketimpangan dalam pemanfaatan layanan kesehatan di setiap kabupaten. Kontribusi ini merupakan produk dari (1) kemampuan merespon (atau elastisitas) pemanfaatan layanan kesehatan, dengan mempertimbangkan berbagai jenis suplai pelayanan kesehatan, dan (2) ketimpangan dalam distribusi suplai pelayanan kesehatan ini di semua kabupaten. Sebagai contoh, variabel x mungkin merupakan sebuah alat prediksi yang baik dalam pemanfaatan layanan kesehatan, namun x hanya akan berpengaruh terhadap ketimpangan pemanfaatan pelayanan kesehatan jika dia tidak terdistribusi secara merata. Jadi, jika x terdistribusi secara merata di semua kabupaten, efek dari perubahan x akan serupa di setiap kabupaten.

Lampiran 2: Indikator-indikator Alternatif Tenaga Kesehatan

Sebagai perbandingan, berikut dijelaskan secara singkat empat indikator tenaga kerja kesehatan yang berbasis jumlah penduduk:

1. Jumlah dokter per 10.000 penduduk [Target: 1 dokter per 10.000]
2. Jumlah bidan per 10.000 penduduk
3. Jumlah perawat per 10.000 penduduk
4. Jumlah tenaga profesional medis yang utama (dokter, bidan, perawat) per 10.000 penduduk [Target WHO: 23]

Tabel A.1 menampilkan statistik deskriptif untuk keenam indikator. Umumnya kecamatan-kecamatan memiliki 1,6 dokter, 7,2 bidan, 9,5 perawat per 10.000 penduduk, yang berarti ada 18,3 tenaga profesional kesehatan utama untuk setiap 10.000 penduduk. Kami menghitung skor indikator-indikator untuk ketersediaan dokter dan tenaga profesional kesehatan yang utama, menggunakan 1 dokter dan 23 tenaga profesional kesehatan yang utama per 10.000 penduduk sebagai target. Tabel A.2 melaporkan korelasi antara indikator-indikator berbasis jumlah penduduk dengan ketujuh indikator utama yang dipilih untuk indeks. Korelasi negatif atau yang tidak signifikan memperlihatkan sebuah gambaran mengenai layanan suplai kesehatan yang diperoleh dari indikator-indikator berbasis penduduk, yang secara struktural berbeda dengan hasil dari ketujuh indikator utama tentang kesiapan suplai kesehatan.

Kesan yang demikian dikuatkan oleh tampilan grafis dari indikator-indikator berbasis jumlah penduduk. Gambar A.1 dan A.2 menjelaskan distribusi spasial dari dua indikator utama tentang tenaga kesehatan. Peta-peta tersebut memperlihatkan bahwa indikator-indikator berbasis penduduk sangat dipengaruhi oleh jumlah penduduk sebagai denominator, sehingga daerah dengan jumlah penduduk yang lebih sedikit seperti Papua dan Kalimantan mendapatkan nilai yang tinggi, sementara daerah-daerah padat penduduk di Jawa mendapatkan nilai yang secara relatif lebih buruk. Pola geografis yang serupa secara umum juga terjadi pada indikator-indikator berbasis perhitungan per kapita. Karena itu kami tidak menggunakan indikator jenis ini demi menghindari terjadinya bias dalam penilaian atas infrastruktur dasar yang tersedia.

Tabel A.1: Indikator-indikator Tenaga Kesehatan Alternatif: Statistik Deskripsi

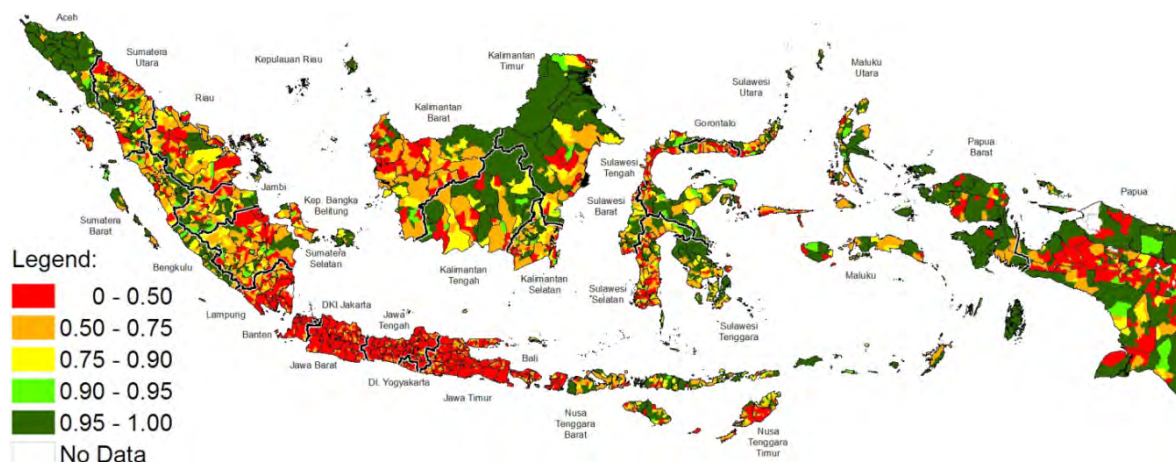
Deskriptif	n	Nilai Tengah	SD	Min	Maks
Dokter per 10.000 Penduduk	6771	1,6	2,7	0	52,1
Bidan per 10.000 Penduduk	6771	7,2	7	0	208,5
Perawat per 10.000 Penduduk	6771	9,5	13,1	0	300,8
Tenaga Kesehatan Utama per 10.000 Penduduk	6771	18,3	17,9	0	433,2
Skor Tenaga Kesehatan Utama (23=100)	6771	0,621	0,289	0	1
Skor Dokter (maks=1)*	6771	0,637	0,415	0	1

Skor dokter bernilai 1 untuk kecamatan-kecamatan yang memenuhi target 1 dokter per 10.000 penduduk. Dalam kasus yang khusus ini, indikator tersebut merepresentasikan sebuah versi yang tidak lengkap (truncated) dari indikator dokter per 10.000 penduduk.

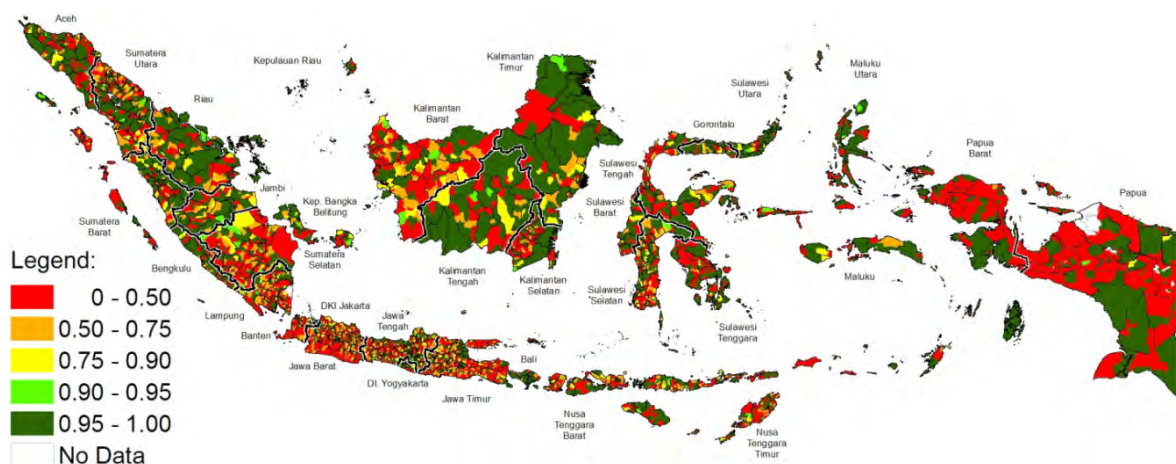
Tabel A.2: Indikator-indikator Tenaga Kesehatan Alternatif: Korelasi dengan Indikator Utama

Korelasi dengan Variabel-variabel Indeks yang Lain	Primer	Sekunder	Melahirkan	Dokter	Bidan	Air	Listrik
Dokter per 10.000 Penduduk	0,07	0,11	0,07	0,16	0,02	0,08	0,1
Bidan per 10.000 Penduduk	0,03	-0,13	-0,04	-0,03	0,05	-0,05	-0,04
Perawat per 10.000 Penduduk	-0,08	-0,31	-0,21	-0,13	-0,3	-0,09	-0,17
Tenaga Profesional Kesehatan Utama per 10.000 penduduk	-0,04	-0,26	-0,16	-0,09	-0,2	-0,08	-0,12
Skor Tenaga Profesional Kesehatan Utama	0,06	-0,23	-0,08	-0,02	-0,16	-0,02	-0,12
Skor Dokter	0,26	0,24	0,27	0,42	0,24	0,27	0,24

Gambar A.1: Peta – Tenaga Profesional Medis Utama per 10.000 Penduduk – Skor (Target: 23)



Gambar A.2: Peta – Dokter per 10.000 Penduduk – Skor (Target: 1)



Apendiks 3: Gambaran Umum Tingkat Provinsi dan Kabupaten

Tabel A.3: Indikator-indikator Kesehatan dan Indeks-indeks Komposit – Skor Tingkat Provinsi¹⁹

Provinsi	Ketersediaan Fisik			Tenaga Kesehatan			Karakteristik Bangunan				Indeks-Indeks Komposit				
	Primer	Sekunder	Melahirkan	Sub Indeks	G/P Pusk,	Bidan	Sub Indeks	Air	Listrik	Sub Indeks	Akses	Setara D	Setara I	PCA	OLS
Nangroe Aceh Darussalam	0,97	0,74	0,96	0,89	0,97	0,83	0,90	0,85	0,91	0,88	0,89	0,89	0,89	0,89	0,88
Sumatera Utara	0,96	0,83	0,95	0,91	0,92	0,95	0,93	0,89	0,85	0,87	0,91	0,90	0,91	0,91	0,88
Sumatera Barat	0,99	0,87	0,99	0,95	0,98	0,99	0,99	0,91	0,90	0,90	0,95	0,95	0,95	0,95	0,92
Riau	0,98	0,77	0,96	0,90	0,98	0,98	0,98	0,86	0,80	0,83	0,90	0,90	0,90	0,91	0,86
Jambi	0,98	0,77	0,97	0,91	0,94	0,95	0,94	0,87	0,80	0,83	0,90	0,89	0,90	0,90	0,86
Sumatera Selatan	0,95	0,78	0,96	0,90	0,89	0,96	0,92	0,90	0,82	0,86	0,89	0,89	0,89	0,90	0,87
Bengkulu	0,97	0,82	0,97	0,92	0,92	0,88	0,90	0,78	0,82	0,80	0,89	0,87	0,88	0,89	0,87
Lampung	0,97	0,77	0,98	0,91	0,97	0,97	0,97	0,92	0,77	0,84	0,91	0,91	0,91	0,91	0,86
Kepulauan Bangka Belitung	1,00	0,92	1,00	0,97	1,00	0,97	0,99	0,95	0,93	0,94	0,97	0,97	0,97	0,97	0,95
Kepulauan Riau	1,00	0,89	0,99	0,96	0,97	0,98	0,98	0,96	0,88	0,92	0,95	0,95	0,95	0,95	0,93
DKI Jakarta	1,00	1,00	1,00	1,00	0,98	0,99	0,99	0,98	1,00	0,99	1,00	0,99	0,99	0,99	1,00
Jawa Barat	0,99	0,88	0,99	0,96	0,98	0,99	0,98	0,94	0,96	0,95	0,96	0,96	0,96	0,96	0,95
Jawa Tengah	0,98	0,95	1,00	0,98	0,99	0,99	0,99	0,98	0,95	0,96	0,98	0,98	0,98	0,98	0,97
DI Yogyakarta	1,00	0,99	1,00	1,00	1,00	0,97	0,99	0,96	0,98	0,97	0,99	0,98	0,99	0,99	0,99
Jawa Timur	0,99	0,93	1,00	0,97	0,98	1,00	0,99	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,97
Banten	0,98	0,88	0,98	0,95	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,96	0,96	0,96	0,96	0,95
Bali	1,00	0,98	1,00	0,99	0,99	0,99	0,99	0,97	0,96	0,97	0,99	0,98	0,99	0,99	0,98
Nusa Tenggara Barat	0,99	0,80	0,97	0,92	0,97	0,92	0,95	0,97	0,92	0,94	0,93	0,94	0,94	0,94	0,91
Nusa Tenggara Timur	0,91	0,53	0,88	0,77	0,80	0,79	0,80	0,83	0,59	0,71	0,76	0,76	0,76	0,76	0,71
Kalimantan Barat	0,92	0,58	0,90	0,80	0,83	0,87	0,85	0,87	0,67	0,77	0,80	0,81	0,81	0,81	0,75
Kalimantan Tengah	0,96	0,64	0,89	0,83	0,86	0,86	0,86	0,88	0,73	0,80	0,83	0,83	0,83	0,83	0,78
Kalimantan Selatan	0,97	0,81	0,97	0,92	0,98	0,92	0,95	0,87	0,91	0,89	0,92	0,92	0,92	0,92	0,90
Kalimantan Timur	0,98	0,80	0,94	0,90	0,96	0,90	0,93	0,95	0,83	0,89	0,91	0,91	0,91	0,91	0,87
Sulawesi Utara	0,98	0,83	0,96	0,92	0,95	0,75	0,85	0,95	0,87	0,91	0,91	0,90	0,90	0,90	0,90
Sulawesi Tengah	0,96	0,66	0,92	0,85	0,81	0,86	0,83	0,91	0,73	0,82	0,84	0,83	0,84	0,84	0,80
Sulawesi Selatan	0,97	0,81	0,94	0,91	0,94	0,95	0,94	0,93	0,84	0,88	0,91	0,91	0,91	0,91	0,87
Sulawesi Tenggara	0,96	0,62	0,94	0,84	0,79	0,80	0,79	0,86	0,59	0,72	0,81	0,79	0,79	0,80	0,76
Gorontalo	0,97	0,75	0,95	0,89	0,96	0,79	0,88	0,84	0,82	0,83	0,88	0,87	0,87	0,87	0,85
Sulawesi Barat	0,92	0,66	0,87	0,81	0,89	0,90	0,90	0,75	0,75	0,75	0,82	0,82	0,82	0,82	0,77
Maluku	0,93	0,57	0,87	0,79	0,68	0,83	0,76	0,74	0,63	0,68	0,76	0,74	0,75	0,76	0,72
Maluku Utara	0,90	0,55	0,87	0,77	0,72	0,68	0,70	0,87	0,71	0,79	0,76	0,75	0,76	0,76	0,74
Papua Barat	0,91	0,62	0,85	0,79	0,56	0,69	0,62	0,77	0,69	0,73	0,75	0,72	0,73	0,73	0,74
Papua	0,71	0,40	0,63	0,58	0,60	0,54	0,57	0,68	0,45	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,53

19 Skor-skor indikator yang dilaporkan dihitung pada level provinsi, misalnya menghitung persentase penduduk provinsi yang memiliki akses mudah ke layanan kesehatan tingkat pertama. Skor-skor ini berbeda dengan skor rata-rata kecamatan per provinsi, di mana bobot yang sama diberikan kepada setiap kecamatan tanpa memperhitungkan jumlah penduduk.

Tabel A.4: Indikator-indikator Pendidikan dan Indeks-indeks Komposit – Skor Tingkat Provinsi²⁰

Provinsi	Ketersediaan Fisik			Tenaga Kesehatan			Karakteristik Bangunan			Indeks-Indeks Komposit						
	Primer	Sekunder	Melahirkan	Sub Indeks	GP Pusk,	Bidan	Sub Indeks	Air	Listrik	Sub Indeks	Akses	Setara D	Setara I	PCA	OLS	CI
Nangroe Aceh Darussalam	0,73	0,96	0,85	0,74	0,72	0,73	0,62	0,96	0,71	0,76	0,80	0,77	0,78	0,78	0,81	0,78
Sumatera Utara	0,82	0,94	0,88	0,72	0,75	0,73	0,59	0,82	0,69	0,70	0,79	0,77	0,77	0,76	0,77	0,74
Sumatera Barat	0,99	0,98	0,98	0,89	0,83	0,86	0,65	0,93	0,77	0,78	0,90	0,89	0,88	0,87	0,86	0,85
Riau	0,92	0,95	0,94	0,80	0,73	0,76	0,59	0,72	0,79	0,70	0,83	0,82	0,80	0,79	0,78	0,76
Jambi	0,93	0,96	0,94	0,76	0,78	0,77	0,61	0,74	0,73	0,69	0,83	0,82	0,80	0,79	0,78	0,75
Sumatera Selatan	0,82	0,92	0,87	0,71	0,78	0,75	0,63	0,75	0,82	0,73	0,80	0,78	0,78	0,78	0,76	0,74
Bengkulu	0,82	0,95	0,88	0,86	0,80	0,83	0,56	0,79	0,70	0,69	0,81	0,78	0,80	0,79	0,80	0,78
Lampung	0,93	0,97	0,95	0,81	0,72	0,77	0,67	0,79	0,81	0,76	0,85	0,83	0,82	0,82	0,82	0,80
Kepulauan Bangka Belitung	0,94	0,92	0,93	0,73	0,81	0,77	0,72	0,95	0,94	0,87	0,88	0,85	0,86	0,86	0,82	0,80
Kepulauan Riau	0,96	0,98	0,97	0,72	0,74	0,73	0,56	0,92	0,87	0,78	0,87	0,85	0,83	0,83	0,79	0,76
DKI Jakarta	1,00	1,00	1,00	1,00	0,90	0,95	0,96	1,00	0,99	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,99	0,99
Jawa Barat	0,98	0,98	0,98	0,96	0,86	0,91	0,76	0,98	0,84	0,86	0,93	0,92	0,92	0,91	0,92	0,91
Jawa Tengah	0,99	0,98	0,99	0,94	0,91	0,93	0,86	1,00	0,96	0,94	0,96	0,94	0,95	0,95	0,94	0,94
DI Yogyakarta	1,00	1,00	1,00	0,99	0,86	0,92	0,97	1,00	0,99	0,99	0,98	0,97	0,97	0,97	0,99	0,99
Jawa Timur	0,99	0,98	0,98	0,98	0,93	0,96	0,82	0,97	0,87	0,89	0,95	0,93	0,94	0,94	0,94	0,93
Banten	0,93	0,99	0,96	0,96	0,79	0,87	0,54	0,98	0,76	0,76	0,88	0,87	0,86	0,86	0,86	0,85
Bali	0,99	0,97	0,98	0,99	0,89	0,94	0,81	1,00	0,96	0,92	0,95	0,93	0,95	0,95	0,94	0,94
Nusa Tenggara Barat	0,96	0,99	0,98	0,92	0,85	0,89	0,58	0,90	0,78	0,75	0,89	0,89	0,87	0,86	0,85	0,84
Nusa Tenggara Timur	0,74	0,88	0,81	0,32	0,66	0,49	0,36	0,57	0,73	0,55	0,67	0,64	0,62	0,61	0,54	0,48
Kalimantan Barat	0,71	0,85	0,78	0,47	0,60	0,53	0,46	0,62	0,82	0,63	0,69	0,67	0,65	0,65	0,61	0,57
Kalimantan Tengah	0,86	0,87	0,86	0,73	0,78	0,76	0,48	0,58	0,75	0,61	0,76	0,75	0,74	0,73	0,68	0,66
Kalimantan Selatan	0,95	0,95	0,95	0,81	0,86	0,84	0,68	0,91	0,87	0,82	0,89	0,86	0,87	0,87	0,83	0,82
Kalimantan Timur	0,95	0,94	0,94	0,73	0,80	0,77	0,49	0,83	0,85	0,72	0,84	0,83	0,81	0,80	0,75	0,72
Sulawesi Utara	0,96	0,98	0,97	0,69	0,72	0,71	0,62	0,92	0,81	0,78	0,86	0,85	0,82	0,82	0,80	0,76
Sulawesi Tengah	0,92	0,93	0,93	0,57	0,76	0,67	0,50	0,70	0,69	0,63	0,79	0,77	0,74	0,73	0,68	0,64
Sulawesi Selatan	0,93	0,96	0,95	0,94	0,88	0,91	0,65	0,85	0,81	0,77	0,89	0,86	0,88	0,86	0,86	0,85
Sulawesi Tenggara	0,86	0,96	0,91	0,58	0,77	0,68	0,52	0,53	0,74	0,60	0,77	0,75	0,73	0,71	0,67	0,63
Gorontalo	0,97	0,99	0,98	0,75	0,68	0,72	0,49	0,88	0,84	0,73	0,85	0,84	0,81	0,80	0,77	0,74
Sulawesi Barat	0,88	0,93	0,90	0,73	0,83	0,78	0,44	0,51	0,66	0,54	0,77	0,75	0,74	0,72	0,68	0,66
Maluku	0,76	0,92	0,84	0,41	0,48	0,45	0,37	0,64	0,59	0,53	0,67	0,66	0,61	0,60	0,59	0,54
Maluku Utara	0,72	0,91	0,81	0,30	0,65	0,47	0,37	0,60	0,56	0,51	0,65	0,64	0,60	0,59	0,55	0,48
Papua Barat	0,72	0,81	0,76	0,29	0,70	0,50	0,43	0,65	0,51	0,53	0,64	0,62	0,60	0,59	0,54	0,49
Papua	0,39	0,58	0,48	0,30	0,55	0,42	0,35	0,48	0,41	0,41	0,45	0,43	0,44	0,44	0,43	0,40

20 Skor-skor indikator yang dilaporkan dihitung pada level provinsi, misalnya menghitung persentase penduduk provinsi yang memiliki akses mudah ke layanan kesehatan tingkat pertama (fasilitas pendidikan). Skor-skor ini berbeda dengan skor rata-rata kecamatan per provinsi, di mana bobot yang sama diberikan kepada setiap kecamatan tanpa memperhitungkan jumlah penduduk.

Tabel A.5: Indikator-indikator Kesehatan dan Indeks-indeks Komposit – Skor Tingkat Kabupaten²¹

Provinsi	Kode BPS	Ketersediaan Fisik			Tenaga Kesehatan			Karakteristik Bangunan			Indeks-Indeks Komposit						
		Primer	Sekunder	Melahirkan	Sub Indeks	GP Puskk,	Bidan	Sub Indeks	Air	Listrik	Sub Indeks	Akses	Setara D	Setara I	PCA	OLS	CI
Nanggroe Aceh Derussalam		0,97	0,74	0,96	0,89	0,97	0,83	0,90	0,85	0,91	0,88	0,89	0,89	0,78	0,78	0,74	0,88
Simeulue	1101	0,99	0,53	0,74	0,75	0,75	0,80	0,78	0,75	0,88	0,81	0,77	0,78	0,78	0,74	0,72	0,72
Aceh Singkil	1102	0,96	0,56	0,91	0,81	0,91	0,86	0,88	0,82	0,80	0,81	0,82	0,83	0,83	0,81	0,77	0,77
Aceh Selatan	1103	0,97	0,71	0,95	0,88	0,95	0,77	0,86	0,67	0,74	0,71	0,84	0,81	0,82	0,83	0,82	0,80
Aceh Tenggara	1104	0,98	0,75	0,98	0,91	0,89	0,74	0,82	0,79	0,86	0,83	0,87	0,85	0,86	0,89	0,87	0,87
Aceh Timur	1105	0,93	0,53	0,94	0,80	0,92	0,86	0,89	0,85	0,95	0,90	0,84	0,86	0,85	0,86	0,86	0,81
Aceh Tengah	1106	0,93	0,62	0,98	0,84	1,00	0,88	0,94	0,79	0,92	0,85	0,86	0,88	0,87	0,87	0,84	0,84
Aceh Barat	1107	0,95	0,74	0,93	0,87	1,00	0,72	0,86	0,77	0,77	0,77	0,85	0,83	0,84	0,84	0,82	0,82
Aceh Besar	1108	0,99	0,85	0,99	0,94	1,00	0,86	0,93	0,92	0,96	0,94	0,94	0,94	0,94	0,95	0,94	0,94
Pidie	1109	0,99	0,85	0,99	0,94	1,00	0,67	0,83	0,88	0,97	0,93	0,92	0,90	0,91	0,90	0,94	0,93
Bireuen	1110	0,95	0,77	0,97	0,90	1,00	0,90	0,95	0,94	0,98	0,96	0,92	0,93	0,93	0,93	0,93	0,91
Aceh Utara	1111	0,97	0,46	0,95	0,80	1,00	0,69	0,84	0,79	0,91	0,85	0,82	0,83	0,82	0,83	0,83	0,78
Aceh Barat Daya	1112	1,00	0,86	0,99	0,95	0,92	0,88	0,90	0,77	0,94	0,85	0,92	0,90	0,91	0,91	0,92	0,92
Gayo Lues	1113	0,94	0,57	0,90	0,80	1,00	0,93	0,97	1,00	0,89	0,94	0,86	0,90	0,89	0,86	0,86	0,81
Aceh Tamiang	1114	0,96	0,91	0,99	0,95	1,00	0,97	0,99	1,00	0,98	0,99	0,97	0,98	0,97	0,98	0,98	0,96
Nagan Raya	1115	0,97	0,79	0,98	0,91	1,00	0,73	0,86	0,85	0,94	0,89	0,90	0,89	0,89	0,92	0,92	0,90
Aceh Jaya	1116	0,98	0,78	0,99	0,92	1,00	0,84	0,92	0,88	0,65	0,76	0,89	0,87	0,87	0,88	0,87	0,84
Bener Meriah	1117	0,95	0,68	0,96	0,86	1,00	0,88	0,94	0,90	0,97	0,93	0,89	0,91	0,90	0,91	0,90	0,87
Pidie Jaya	1118	0,99	0,94	0,99	0,97	1,00	0,86	0,93	0,90	0,95	0,93	0,96	0,94	0,95	0,95	0,96	0,96
Banda Aceh	1171	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,97	0,98	0,91	1,00	0,95	0,99	0,98	0,98	0,99	0,99	0,99
Sabang	1172	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Langsa	1173	1,00	0,98	1,00	0,99	1,00	0,96	0,98	1,00	1,00	1,00	0,99	0,99	0,99	1,00	0,99	0,99
Lhokseumawe	1174	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,98	0,99	0,83	0,99	0,91	0,98	0,97	0,97	0,98	0,97	0,98
Subulussalam	1175	0,88	0,39	0,89	0,72	1,00	0,97	0,98	0,80	0,82	0,81	0,79	0,84	0,82	0,83	0,78	0,72
Sumatera Utara		0,96	0,83	0,95	0,91	0,92	0,95	0,93	0,89	0,85	0,87	0,91	0,90	0,91	0,90	0,90	0,88
Nias	1201	0,69	0,31	0,53	0,51	0,63	0,36	0,49	0,63	0,39	0,51	0,51	0,50	0,50	0,48	0,45	0,45
Mandailing natal	1202	0,88	0,68	0,94	0,83	0,88	0,93	0,90	0,85	0,90	0,87	0,85	0,87	0,86	0,87	0,87	0,84
Tapanuli Selatan	1203	0,89	0,67	0,95	0,84	0,88	0,93	0,90	0,88	0,89	0,88	0,86	0,87	0,87	0,87	0,88	0,85
Tapanuli Tengah	1204	0,96	0,73	0,98	0,89	0,90	0,97	0,94	0,81	0,87	0,84	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,86
Tapanuli Utara	1205	0,90	0,63	0,92	0,82	1,00	0,96	0,98	0,89	0,94	0,92	0,87	0,91	0,89	0,87	0,84	0,84
Toba Samosir	1206	0,87	0,74	0,90	0,84	1,00	0,98	0,99	0,89	0,97	0,93	0,89	0,92	0,91	0,88	0,87	0,87
Labuhan Batu	1207	0,98	0,82	0,97	0,92	0,92	0,99	0,96	0,85	0,52	0,68	0,88	0,85	0,86	0,87	0,83	0,81
Asahan	1208	0,97	0,87	0,94	0,93	1,00	0,99	0,99	1,00	0,90	0,95	0,95	0,96	0,95	0,93	0,92	0,92
Simalungun	1209	0,98	0,87	0,98	0,94	1,00	0,99	0,99	0,91	0,81	0,86	0,94	0,93	0,93	0,92	0,90	0,90
Dairi	1210	0,97	0,64	0,91	0,84	0,89	0,97	0,93	0,83	0,76	0,80	0,85	0,86	0,85	0,82	0,79	0,79

21 Skor-skor indikator yang dilaporkan dihitung pada tingkat kabupaten, misalnya menghitung persentase penduduk kabupaten yang memiliki akses mudah ke layanan kesehatan tingkat pertama. Skor-skor ini berbeda dengan skor rata-rata kecamatan per kabupaten, di mana bobot yang sama diberikan kepada setiap kecamatan tanpa memperhitungkan jumlah penduduk

Provinsi	Kode BPS	Ketersediaan Fisik			Tenaga Kesehatan			Karakteristik Bangunan			Indeks-Indeks Komposit						
		Primer	Sekunder	Melahirkan	Sub Indeks	GP Pusk.	Bidan	Sub Indeks	Air	Listrik	Sub Indeks	Akses	Setara D	Setara I	PCA	OLS	CI
Karo	1211	0,99	0,92	0,97	0,96	0,95	1,00	0,97	0,95	0,98	0,96	0,96	0,97	0,96	0,97	0,96	0,96
Deli Serdang	1212	1,00	0,97	1,00	0,99	1,00	1,00	1,00	0,97	0,92	0,94	0,98	0,98	0,98	0,98	0,97	0,97
Langkat	1213	0,98	0,86	0,97	0,94	1,00	0,99	1,00	0,93	0,88	0,91	0,94	0,95	0,95	0,95	0,93	0,92
Nias Selatan	1214	0,75	0,33	0,64	0,57	0,28	0,34	0,31	0,52	0,24	0,38	0,48	0,42	0,44	0,45	0,49	0,44
Humbang Hasundutan	1215	0,86	0,46	0,76	0,69	1,00	1,00	1,00	0,83	0,97	0,90	0,80	0,86	0,84	0,84	0,77	0,73
Pakpak Bharat	1216	0,96	0,63	0,84	0,81	0,88	0,96	0,92	1,00	0,77	0,89	0,85	0,87	0,86	0,86	0,82	0,78
Samosir	1217	0,79	0,50	0,83	0,71	1,00	0,98	0,99	0,75	0,98	0,86	0,80	0,85	0,83	0,84	0,79	0,76
Serdang Bedagai	1218	1,00	0,90	0,99	0,96	1,00	0,99	0,99	0,85	0,93	0,89	0,96	0,95	0,95	0,96	0,94	0,94
Batu Bara	1219	1,00	0,73	0,99	0,91	1,00	1,00	1,00	1,00	0,88	0,94	0,93	0,95	0,94	0,95	0,93	0,89
Padang Lawas Utara	1220	0,79	0,43	0,82	0,68	0,93	0,82	0,88	0,87	0,72	0,79	0,74	0,78	0,77	0,77	0,74	0,69
Padang Lawas	1221	0,94	0,78	0,94	0,89	0,91	0,80	0,86	0,82	0,93	0,87	0,88	0,87	0,87	0,88	0,89	0,88
Labuhan Batu Selatan	1222	0,97	0,74	0,98	0,90	1,00	0,99	0,99	1,00	0,63	0,82	0,90	0,90	0,90	0,90	0,87	0,83
Labuhan Batu Utara	1223	0,99	0,65	0,96	0,86	1,00	1,00	1,00	0,94	0,56	0,75	0,87	0,87	0,87	0,87	0,82	0,77
Nias Utara	1224	0,86	0,20	0,70	0,59	0,82	0,48	0,65	0,82	0,45	0,63	0,61	0,62	0,62	0,62	0,59	0,51
Nias Barat	1225	0,66	0,13	0,49	0,43	0,83	0,31	0,57	0,67	0,56	0,61	0,49	0,54	0,52	0,51	0,48	0,42
Sibolga	1271	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Tanjung Balai	1272	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,99	0,99	0,88	0,84	0,86	0,97	0,95	0,96	0,96	0,95	0,95
Pematang Siantar	1273	1,00	0,98	1,00	0,99	1,00	1,00	1,00	1,00	0,98	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99
Tebing Tinggi	1274	1,00	1,00	1,00	1,00	0,89	1,00	0,94	1,00	0,98	0,99	0,99	0,98	0,98	0,98	1,00	0,99
Medan	1275	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,99	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Binjai	1276	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,97	0,99	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Padangsidempuan	1277	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,90	0,95	0,99	0,98	0,98	0,99	0,98	0,97
Gunungsitoli	1278	0,83	0,76	0,79	0,80	0,25	0,69	0,47	0,75	0,42	0,59	0,69	0,62	0,64	0,65	0,71	0,69
Sumatera Barat		0,99	0,87	0,99	0,95	0,98	0,99	0,99	0,91	0,90	0,90	0,95	0,95	0,95	0,95	0,94	0,92
Kepulauan Mentawai	1301	0,72	0,10	0,61	0,48	0,57	0,81	0,69	0,86	0,67	0,76	0,58	0,64	0,62	0,62	0,58	0,50
Pesisir Selatan	1302	0,99	0,63	1,00	0,88	1,00	1,00	1,00	1,00	0,88	0,94	0,91	0,94	0,93	0,93	0,91	0,87
Solok	1303	0,98	0,90	0,97	0,95	1,00	1,00	1,00	0,83	0,88	0,85	0,94	0,93	0,94	0,94	0,92	0,91
Stijunjung	1304	0,99	0,76	0,98	0,91	1,00	1,00	1,00	0,92	0,90	0,91	0,93	0,94	0,94	0,94	0,92	0,89
Tanah Datar	1305	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,83	0,95	0,89	0,98	0,96	0,97	0,97	0,96	0,97
Padang Pariaman	1306	0,99	0,95	1,00	0,98	1,00	1,00	1,00	0,83	0,97	0,90	0,97	0,96	0,96	0,97	0,96	0,96
Agam	1307	1,00	0,88	0,98	0,95	1,00	1,00	1,00	0,95	0,96	0,96	0,96	0,97	0,97	0,97	0,95	0,94
Lima Puluh Kota	1308	1,00	0,85	1,00	0,95	0,95	1,00	0,98	0,95	0,82	0,89	0,94	0,94	0,94	0,94	0,93	0,91
Pasaman	1309	1,00	0,83	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00	0,81	0,85	0,83	0,93	0,93	0,93	0,93	0,91	0,90
Solok Selatan	1310	1,00	0,74	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00	1,00	0,90	0,95	0,94	0,95	0,95	0,95	0,93	0,90
Dharmasraya	1311	0,98	0,80	0,95	0,91	1,00	1,00	1,00	0,92	0,93	0,92	0,93	0,94	0,94	0,94	0,92	0,90

Provinsi	Kode BPS	Ketersediaan Fisik			Tenaga Kesehatan			Karakteristik Bangunan			Indeks-Indeks Komposit						
		Primer	Sekunder	Melahirkan	Sub Indeks	GP Pusk.	Bidan	Sub Indeks	Air	Listrik	Sub Indeks	Akses	Setara D	Setara I	PCA	OLS	CI
Pasaman Barat	1312	0,99	0,85	0,99	0,94	0,94	1,00	0,97	0,88	0,86	0,87	0,93	0,93	0,93	0,94	0,92	0,91
Padang	1371	1,00	0,99	1,00	1,00	1,00	0,99	1,00	0,95	0,91	0,93	0,98	0,97	0,98	0,98	0,97	0,97
Solok	1372	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,75	0,94	0,85	0,97	0,95	0,96	0,96	0,95	0,96
Sawah Lunto	1373	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,98	0,99	1,00	0,95	0,97	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99
Padang Panjang	1374	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,93	0,96	0,99	0,99	0,99	0,99	0,98	0,98
Bukittinggi	1375	1,00	1,00	1,00	1,00	0,88	1,00	0,94	1,00	0,85	0,92	0,97	0,95	0,96	0,96	0,97	0,96
Payakumbuh	1376	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,96	0,98	1,00	0,90	0,95	0,99	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98
Pariaman	1377	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Riau		0,98	0,77	0,96	0,90	0,98	0,98	0,98	0,86	0,80	0,83	0,90	0,90	0,90	0,91	0,88	0,86
Kuantan Singingi	1401	0,99	0,78	0,96	0,91	0,91	0,97	0,94	0,91	0,79	0,85	0,90	0,90	0,90	0,91	0,89	0,87
Indragiri Hulu	1402	0,96	0,67	0,96	0,86	1,00	0,97	0,99	0,79	0,84	0,81	0,88	0,89	0,88	0,89	0,86	0,83
Indragiri Hilir	1403	0,97	0,47	0,88	0,78	0,92	0,98	0,95	0,80	0,75	0,77	0,81	0,83	0,83	0,83	0,78	0,73
Pelalawan	1404	0,96	0,72	0,92	0,87	1,00	0,99	1,00	0,83	0,70	0,77	0,87	0,88	0,88	0,88	0,83	0,80
Siak	1405	0,98	0,92	0,98	0,96	1,00	0,99	0,99	0,93	0,92	0,93	0,96	0,96	0,96	0,96	0,95	0,95
Kampar	1406	0,99	0,80	0,98	0,92	1,00	0,98	0,99	0,89	0,73	0,81	0,91	0,91	0,91	0,91	0,88	0,86
Rokan Hulu	1407	0,99	0,91	0,98	0,96	1,00	0,99	1,00	0,90	0,79	0,85	0,94	0,93	0,94	0,94	0,92	0,91
Bengkalis	1408	0,99	0,84	0,96	0,93	1,00	0,97	0,99	0,91	0,82	0,87	0,93	0,93	0,93	0,93	0,90	0,89
Rokan Hilir	1409	0,98	0,62	0,99	0,86	0,94	0,98	0,96	0,88	0,86	0,87	0,88	0,90	0,89	0,90	0,88	0,84
Kepulauan Meranti	1410	0,89	0,38	0,89	0,72	1,00	0,94	0,97	0,63	0,72	0,67	0,76	0,79	0,78	0,79	0,73	0,68
Pekanbaru	1471	1,00	0,98	1,00	0,99	1,00	1,00	1,00	1,00	0,88	0,94	0,98	0,98	0,98	0,98	0,97	0,96
Dumai	1473	0,99	0,99	0,99	0,99	1,00	1,00	1,00	0,67	0,92	0,79	0,95	0,93	0,94	0,95	0,93	0,94
Jambi		0,98	0,77	0,97	0,91	0,94	0,95	0,94	0,87	0,80	0,83	0,90	0,89	0,90	0,90	0,89	0,86
Kerinci	1501	0,98	0,80	0,98	0,92	1,00	0,71	0,86	1,00	0,84	0,92	0,91	0,90	0,90	0,90	0,92	0,90
Merangin	1502	0,96	0,74	0,98	0,89	0,95	0,97	0,96	0,79	0,80	0,80	0,89	0,88	0,88	0,89	0,87	0,85
Sarolangun	1503	0,92	0,63	0,97	0,84	0,92	0,95	0,93	0,92	0,76	0,84	0,86	0,87	0,87	0,87	0,86	0,82
Batang Hari	1504	1,00	0,64	0,94	0,86	1,00	0,99	0,99	1,00	0,71	0,86	0,89	0,90	0,90	0,90	0,85	0,81
Muaro Jambi	1505	0,98	0,76	0,97	0,90	1,00	0,97	0,99	1,00	0,94	0,97	0,93	0,95	0,94	0,94	0,93	0,90
Tanjung Jabung Timur	1506	0,98	0,44	0,91	0,78	0,71	0,99	0,85	0,65	0,65	0,65	0,76	0,76	0,76	0,77	0,74	0,69
Tanjung Jabung Barat	1507	1,00	0,57	0,92	0,83	0,94	0,99	0,97	0,75	0,66	0,70	0,83	0,83	0,83	0,84	0,78	0,74
Tebo	1508	0,99	0,76	0,99	0,91	0,93	1,00	0,96	0,86	0,91	0,88	0,92	0,92	0,92	0,92	0,91	0,89
Bungo	1509	1,00	0,98	0,99	0,99	0,94	0,97	0,96	0,78	0,75	0,76	0,94	0,90	0,92	0,92	0,91	0,91
Jambi	1571	1,00	1,00	1,00	1,00	0,95	0,98	0,97	0,95	1,00	0,98	0,99	0,98	0,98	0,98	0,99	0,99
Sungai Penuh	1572	0,99	0,98	0,99	0,99	1,00	0,62	0,81	0,83	0,93	0,88	0,93	0,89	0,91	0,91	0,95	0,96
Sumatera Selatan		0,95	0,78	0,96	0,90	0,89	0,96	0,92	0,90	0,82	0,86	0,89	0,89	0,89	0,90	0,89	0,87
Ogan Komering Ulu	1601	0,99	0,81	0,96	0,92	0,87	1,00	0,93	0,93	0,85	0,89	0,92	0,91	0,92	0,92	0,91	0,89

Provinsi	Kode BPS	Ketersediaan Fisik			Tenaga Kesehatan			Karakteristik Bangunan			Indeks-Indeks Komposit							
		Primer	Sekunder	Melahirkan	Sub Indeks	GP Pusk.	Bidan	Sub Indeks	Air	Listrik	Sub Indeks	Akses	Setara D	Setara I	PCA	OLS	CI	
Ogan Komerling Ilir	1602	0,83	0,56	0,87	0,75	0,84	0,95	0,90	0,96	0,78	0,87	0,81	0,84	0,83	0,83	0,81	0,77	
	1603	0,95	0,84	0,98	0,92	0,91	0,98	0,94	0,77	0,91	0,84	0,91	0,90	0,91	0,91	0,91	0,90	
	1604	0,97	0,88	0,98	0,94	0,84	0,81	0,83	0,84	0,81	0,82	0,90	0,86	0,88	0,88	0,90	0,90	
	1605	0,97	0,78	0,97	0,91	0,96	0,97	0,97	0,89	0,83	0,86	0,91	0,91	0,91	0,91	0,90	0,87	
	1606	0,95	0,79	0,94	0,89	1,00	0,98	0,99	0,80	0,83	0,81	0,90	0,90	0,90	0,90	0,87	0,85	
	1607	0,92	0,60	0,94	0,82	0,97	0,99	0,98	0,97	0,85	0,91	0,87	0,90	0,89	0,89	0,87	0,82	
	1608	0,86	0,47	0,88	0,74	0,33	0,82	0,58	0,87	0,70	0,78	0,71	0,70	0,71	0,71	0,77	0,72	
	1609	0,93	0,63	0,97	0,85	0,86	1,00	0,93	1,00	0,78	0,89	0,87	0,89	0,88	0,88	0,88	0,83	
	1610	0,93	0,77	0,98	0,89	0,83	0,96	0,90	1,00	0,87	0,93	0,90	0,91	0,91	0,91	0,92	0,89	
	1611	0,99	0,78	0,99	0,92	1,00	0,65	0,83	0,75	0,57	0,66	0,85	0,80	0,82	0,82	0,83	0,81	
	1671	1,00	0,99	1,00	1,00	1,00	0,99	0,99	0,85	0,95	0,90	0,98	0,96	0,97	0,97	0,96	0,97	
	1672	1,00	1,00	1,00	1,00	0,86	1,00	0,93	0,86	0,85	0,85	0,96	0,93	0,94	0,94	0,94	0,95	
	1673	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,96	0,98	1,00	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	
	1674	1,00	0,99	1,00	1,00	1,00	0,97	0,98	1,00	0,89	0,94	0,98	0,97	0,98	0,98	0,98	0,97	
	Bengkulu																	
	Bengkulu Selatan	1701	1,00	0,82	0,98	0,93	0,93	0,96	0,95	1,00	0,80	0,90	0,93	0,93	0,93	0,93	0,92	0,89
1702		0,99	0,98	0,99	0,99	1,00	0,93	0,96	0,76	0,92	0,84	0,95	0,93	0,94	0,94	0,94	0,95	
Bengkulu Utara	1703	0,96	0,68	0,92	0,86	0,90	0,88	0,89	0,76	0,70	0,73	0,84	0,83	0,83	0,84	0,81	0,79	
	1704	0,97	0,68	0,95	0,87	0,94	0,64	0,79	0,63	0,77	0,70	0,82	0,78	0,80	0,80	0,82	0,80	
Seluma	1705	0,93	0,69	0,95	0,86	0,90	0,78	0,84	0,95	0,68	0,82	0,85	0,84	0,84	0,85	0,85	0,81	
Mukomuko	1706	0,97	0,60	0,98	0,85	1,00	0,93	0,96	0,88	0,87	0,87	0,87	0,89	0,89	0,89	0,87	0,83	
	1707	0,95	0,91	0,95	0,93	0,71	0,77	0,74	0,79	0,98	0,88	0,88	0,85	0,86	0,87	0,92	0,93	
Kepahiang	1708	0,94	0,92	0,95	0,94	0,86	0,82	0,84	0,71	0,90	0,81	0,89	0,86	0,87	0,88	0,90	0,90	
Bengkulu Tengah	1709	0,94	0,79	0,98	0,90	0,95	0,91	0,93	0,60	0,81	0,71	0,87	0,85	0,85	0,86	0,85	0,84	
	1771	1,00	1,00	1,00	1,00	0,95	0,99	0,97	0,76	0,95	0,86	0,97	0,94	0,95	0,96	0,95	0,96	
Lampung																		
Lampung Barat	1801	0,91	0,47	0,90	0,76	0,89	0,79	0,84	0,79	0,70	0,74	0,77	0,78	0,78	0,78	0,77	0,72	
	1802	0,96	0,77	0,95	0,89	1,00	0,93	0,96	0,86	0,72	0,79	0,89	0,88	0,88	0,89	0,86	0,83	
Tanggamus	1803	0,99	0,83	0,99	0,94	0,96	0,99	0,97	1,00	0,92	0,96	0,95	0,96	0,95	0,96	0,95	0,93	
	1804	0,99	0,79	1,00	0,93	0,97	0,99	0,98	0,81	0,79	0,80	0,91	0,90	0,90	0,91	0,89	0,87	
Lampung Timur	1805	0,98	0,77	1,00	0,91	0,97	0,99	0,98	1,00	0,86	0,93	0,93	0,94	0,94	0,94	0,93	0,90	
	1806	0,95	0,74	0,95	0,88	0,96	0,97	0,97	0,92	0,72	0,82	0,89	0,89	0,89	0,89	0,86	0,83	
Lampung Tengah	1807	0,95	0,64	0,95	0,85	1,00	0,93	0,97	1,00	0,70	0,85	0,87	0,89	0,88	0,88	0,86	0,81	
	1808	0,98	0,64	0,98	0,87	1,00	0,98	0,99	0,94	0,74	0,84	0,89	0,90	0,90	0,90	0,87	0,82	
Tulangbawang	1809	0,97	0,82	0,98	0,92	1,00	0,94	0,97	0,83	0,80	0,81	0,91	0,90	0,91	0,91	0,89	0,88	
	Pesawaran																	

Provinsi	Kode BPS	Ketersediaan Fisik			Tenaga Kesehatan			Karakteristik Bangunan			Indeks-Indeks Komposit						
		Primer	Sekunder	Melahirkan	Sub Indeks	GP Pusk.	Bidan	Sub Indeks	Air	Listrik	Sub Indeks	Akses	Setara D	Setara I	PCA	OLS	CI
Pringsewu	1810	1,00	0,97	1,00	0,99	1,00	0,98	0,99	1,00	0,66	0,83	0,96	0,94	0,94	0,95	0,92	0,91
	1811	0,92	0,25	0,98	0,72	1,00	0,98	0,99	0,56	0,71	0,63	0,75	0,78	0,77	0,79	0,73	0,66
Mesuji	1812	0,96	0,67	0,99	0,87	0,80	0,99	0,90	1,00	0,65	0,83	0,87	0,86	0,87	0,87	0,87	0,82
	1871	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,96	0,87	0,91	0,98	0,97	0,98	0,98	0,97	0,96
Bandar Lampung	1872	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,90	0,95	0,99	0,98	0,99	0,99	0,98	0,97
Kepulauan Bangka Belitung		1,00	0,92	1,00	0,97	1,00	0,97	0,99	0,95	0,93	0,94	0,97	0,97	0,97	0,97	0,96	0,95
	1901	0,99	0,94	1,00	0,98	1,00	0,99	1,00	1,00	0,93	0,97	0,98	0,98	0,98	0,98	0,97	0,96
Bangka	1902	1,00	0,95	1,00	0,98	1,00	1,00	1,00	0,89	0,94	0,91	0,97	0,97	0,97	0,97	0,96	0,96
	1903	0,99	0,70	0,99	0,89	1,00	0,95	0,97	1,00	0,95	0,97	0,92	0,95	0,94	0,94	0,93	0,90
Bangka Barat	1904	1,00	0,98	1,00	0,99	1,00	1,00	1,00	1,00	0,91	0,96	0,99	0,98	0,99	0,99	0,98	0,97
	1905	1,00	0,89	1,00	0,96	1,00	0,97	0,99	0,88	0,95	0,91	0,96	0,95	0,95	0,96	0,95	0,94
Bangka Selatan	1906	1,00	0,99	1,00	1,00	1,00	0,94	0,97	1,00	0,91	0,96	0,98	0,97	0,98	0,98	0,98	0,98
Belitung Timur	1971	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,94	0,97	0,89	0,90	0,89	0,97	0,95	0,96	0,96	0,96	0,96
Pangkal Pinang		1,00	0,89	0,99	0,96	0,97	0,98	0,98	0,96	0,88	0,92	0,95	0,95	0,95	0,95	0,94	0,93
	2101	1,00	0,84	0,98	0,94	1,00	1,00	1,00	1,00	0,83	0,91	0,95	0,95	0,95	0,95	0,93	0,91
Karimun	2102	0,99	0,88	1,00	0,96	1,00	0,99	0,99	1,00	0,88	0,94	0,96	0,96	0,96	0,96	0,95	0,94
	2103	0,98	0,44	0,95	0,79	0,92	0,78	0,85	0,85	0,84	0,84	0,81	0,83	0,82	0,83	0,83	0,77
Natuna	2104	1,00	0,58	0,99	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,87	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,87	0,83
	2105	0,97	0,24	0,88	0,70	1,00	0,93	0,97	1,00	0,88	0,94	0,80	0,87	0,84	0,84	0,79	0,71
Lingga	2171	1,00	0,97	1,00	0,99	1,00	1,00	1,00	1,00	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99
	2172	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,81	0,91	0,98	0,97	0,97	0,97	0,96	0,95
Kepulauan Anambas		1,00	1,00	1,00	1,00	0,98	0,99	0,99	0,98	1,00	0,99	1,00	0,99	0,99	0,99	1,00	1,00
	3101	1,00	0,24	1,00	0,75	1,00	1,00	1,00	0,83	1,00	0,92	0,83	0,89	0,87	0,88	0,85	0,77
Batam	3171	1,00	1,00	1,00	1,00	0,99	1,00	0,99	0,99	1,00	0,99	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	3172	1,00	1,00	1,00	1,00	0,98	1,00	0,99	0,98	1,00	0,99	1,00	0,99	0,99	0,99	1,00	1,00
Tanjung Pinang	3173	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,96	0,98	1,00	1,00	1,00	1,00	0,99	0,99	0,99	1,00	1,00
	3174	1,00	1,00	1,00	1,00	0,95	0,99	0,97	1,00	1,00	1,00	0,99	0,99	0,99	0,99	1,00	1,00
DKI Jakarta	3175	1,00	1,00	1,00	1,00	0,98	1,00	0,99	0,96	1,00	0,98	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	1,00
		0,99	0,88	0,99	0,96	0,98	0,99	0,98	0,94	0,96	0,95	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,95
Jawa Barat		0,99	0,91	1,00	0,97	1,00	0,99	0,99	0,93	0,98	0,95	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,96
	3201	0,99	0,74	0,98	0,89	0,93	0,98	0,96	0,97	0,91	0,94	0,91	0,93	0,92	0,93	0,92	0,89
Bogor	3202	0,96	0,67	0,97	0,86	0,98	0,97	0,98	0,98	0,93	0,95	0,90	0,93	0,92	0,92	0,91	0,87
	3203	0,95	0,95	0,99	0,98	0,98	0,98	0,98	0,92	0,96	0,94	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97
Sukabumi	3204	1,00	0,68	0,99	0,89	0,78	0,97	0,87	0,91	0,92	0,91	0,89	0,89	0,90	0,91	0,91	0,88
	3205	0,98	0,73	0,99	0,90	1,00	1,00	1,00	0,90	0,98	0,94	0,93	0,95	0,94	0,94	0,93	0,90
Cianjur	3206	0,98	0,99	1,00	0,97	1,00	1,00	1,00	0,93	0,98	0,95	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,96

Provinsi	Kode BPS	Ketersediaan Fisik			Tenaga Kesehatan			Karakteristik Bangunan			Indeks-Indeks Komposit						
		Primer	Sekunder	Melahirkan	Sub Indeks	GP Pusk.	Bidan	Sub Indeks	Air	Listrik	Sub Indeks	Akses	Setara D	Setara I	PCA	OLS	CI
Ciamis	3207	0,99	0,78	0,99	0,92	0,98	1,00	0,99	0,90	0,98	0,94	0,94	0,95	0,95	0,97	0,94	0,92
	3208	0,99	0,93	0,99	0,97	0,95	1,00	0,97	0,97	0,96	0,96	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,96
	3209	1,00	0,96	1,00	0,99	0,98	0,99	0,99	0,96	0,99	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98
Majalengka	3210	0,99	0,95	1,00	0,98	1,00	1,00	1,00	0,97	0,97	0,97	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,97
	3211	0,99	0,94	1,00	0,98	1,00	1,00	1,00	0,94	0,92	0,93	0,97	0,97	0,97	0,97	0,96	0,96
Indramayu	3212	1,00	0,92	1,00	0,97	0,98	0,99	0,98	0,94	0,91	0,93	0,97	0,96	0,96	0,97	0,96	0,95
	3213	0,98	0,85	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00	0,98	0,98	0,98	0,96	0,97	0,97	0,97	0,96	0,95
Purwakarta	3214	0,97	0,85	0,98	0,94	1,00	0,98	0,99	0,95	0,96	0,96	0,95	0,96	0,96	0,96	0,95	0,94
	3215	0,99	0,97	1,00	0,99	1,00	1,00	1,00	1,00	0,99	1,00	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99
Karawang	3216	0,98	0,93	1,00	0,97	1,00	0,99	1,00	0,92	0,98	0,95	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,96
	3217	0,97	0,78	1,00	0,92	1,00	0,99	1,00	0,81	0,95	0,88	0,92	0,93	0,93	0,93	0,92	0,90
Bandung Barat	3271	1,00	0,99	1,00	1,00	1,00	0,91	0,95	1,00	1,00	1,00	0,99	0,98	0,99	0,98	1,00	1,00
	3272	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,96	0,98	1,00	1,00	1,00	1,00	0,99	0,99	0,99	1,00	1,00
Sukabumi	3273	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,94	0,97	0,89	1,00	0,94	0,98	0,97	0,98	0,98	0,98	0,99
	3274	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Cirebon	3275	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	3276	1,00	0,99	1,00	1,00	1,00	0,99	0,99	0,97	1,00	0,98	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99
Depok	3277	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,94	0,97	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99
	3278	1,00	0,94	1,00	0,98	1,00	1,00	1,00	0,90	0,96	0,93	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,96
Tasikmalaya	3279	1,00	1,00	1,00	1,00	0,90	1,00	0,95	1,00	1,00	1,00	0,99	0,98	0,99	1,00	1,00	1,00
Banjar	3301	0,98	0,95	1,00	0,98	0,99	0,99	0,99	0,98	0,95	0,96	0,98	0,98	0,98	0,98	0,97	0,97
	3302	0,97	0,87	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00	1,00	0,97	0,99	0,96	0,98	0,97	0,97	0,97	0,95
Cilacap	3303	0,98	0,98	1,00	0,99	1,00	0,99	0,99	0,92	0,97	0,95	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98
	3304	0,99	0,93	1,00	0,97	0,95	1,00	0,98	1,00	0,97	0,99	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,97
Purbalingga	3305	0,98	0,94	1,00	0,97	1,00	1,00	1,00	0,91	0,97	0,94	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,96
	3306	0,96	0,94	0,98	0,96	1,00	0,99	0,99	0,97	0,95	0,96	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,96
Kebumen	3307	0,96	0,90	1,00	0,95	1,00	0,89	0,95	0,96	0,94	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,96	0,95
	3308	0,96	0,81	0,98	0,92	1,00	1,00	1,00	1,00	0,92	0,96	0,94	0,96	0,95	0,95	0,94	0,92
Purworejo	3309	0,99	0,99	1,00	0,99	0,97	0,99	0,98	1,00	0,97	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99
	3310	0,97	0,91	0,99	0,96	1,00	0,99	0,99	0,97	0,94	0,95	0,96	0,97	0,97	0,97	0,96	0,95
Wonosobo	3311	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,97	0,94	0,95	0,99	0,98	0,99	0,99	0,98	0,98
	3312	1,00	0,98	1,00	0,99	1,00	1,00	1,00	1,00	0,97	0,98	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,98
Magelang	3313	1,00	0,94	0,99	0,98	0,97	1,00	0,99	0,94	0,90	0,92	0,97	0,96	0,96	0,96	0,95	0,95
	3314	0,99	0,97	0,99	0,98	1,00	1,00	1,00	1,00	0,95	0,98	0,98	0,99	0,99	0,99	0,98	0,98
Karanganyar	3315	0,99	0,97	1,00	0,99	1,00	1,00	1,00	1,00	0,95	0,98	0,98	0,99	0,99	0,99	0,98	0,98
Sragen	3316	1,00	0,98	1,00	0,99	1,00	1,00	1,00	1,00	0,97	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99
	3317	1,00	0,98	1,00	0,99	1,00	1,00	1,00	1,00	0,97	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99

Provinsi	Kode BPS	Ketersediaan Fisik			Tenaga Kesehatan			Karakteristik Bangunan			Indeks-Indeks Komposit						
		Primer	Sekunder	Melahirkan	Sub Indeks	GP Pusk.	Bidan	Sub Indeks	Air	Listrik	Sub Indeks	Akses	Setara D	Setara I	PCA	OLS	CI
Grobogan	3315	0,97	0,92	1,00	0,96	1,00	1,00	1,00	1,00	0,91	0,96	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,95
Blora	3316	0,97	0,89	0,99	0,95	1,00	0,98	0,99	0,96	1,00	0,98	0,96	0,97	0,97	0,97	0,97	0,96
Rembang	3317	0,98	0,93	0,97	0,96	1,00	0,96	0,98	0,94	0,99	0,96	0,96	0,97	0,97	0,97	0,96	0,96
Pati	3318	0,99	0,98	1,00	0,99	1,00	1,00	1,00	0,97	0,96	0,96	0,99	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98
Kudus	3319	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Jepara	3320	1,00	0,98	1,00	0,99	1,00	1,00	1,00	1,00	0,91	0,95	0,99	0,98	0,98	0,98	0,98	0,97
Demak	3321	0,97	0,92	1,00	0,96	1,00	1,00	1,00	1,00	0,87	0,93	0,97	0,97	0,97	0,97	0,96	0,94
Semarang	3322	1,00	0,97	1,00	0,99	1,00	1,00	1,00	1,00	0,98	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99
Temanggung	3323	0,98	0,93	1,00	0,97	0,91	0,99	0,95	1,00	0,98	0,99	0,97	0,97	0,97	0,97	0,98	0,97
Kendal	3324	0,98	0,90	1,00	0,96	0,97	0,99	0,98	1,00	0,95	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,96
Batang	3325	0,99	0,97	1,00	0,99	1,00	1,00	1,00	1,00	0,93	0,97	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,97
Pekalongan	3326	0,96	0,91	1,00	0,96	1,00	0,99	0,99	0,96	0,94	0,95	0,96	0,97	0,97	0,97	0,96	0,95
Pemalang	3327	0,99	0,94	1,00	0,98	1,00	0,99	1,00	1,00	0,95	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,97
Tegal	3328	0,99	0,98	1,00	0,99	0,93	1,00	0,96	0,93	0,95	0,94	0,97	0,96	0,97	0,97	0,97	0,97
Brebes	3329	0,98	0,92	1,00	0,97	0,97	1,00	0,99	1,00	0,86	0,93	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,94
Magelang	3371	1,00	0,97	1,00	0,99	1,00	0,95	0,98	1,00	0,94	0,97	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98
Surakarta	3372	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,91	0,95	1,00	1,00	1,00	0,99	0,98	0,99	0,99	1,00	1,00
Salatiga	3373	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Semarang	3374	1,00	0,99	1,00	1,00	1,00	0,87	0,93	0,97	1,00	0,99	0,98	0,97	0,98	0,98	0,99	0,99
Pekalongan	3375	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,95	0,98	1,00	1,00	1,00	1,00	0,99	0,99	0,99	1,00	1,00
Tegal	3376	1,00	1,00	1,00	1,00	0,86	1,00	0,93	1,00	1,00	1,00	0,99	0,98	0,98	0,98	1,00	1,00
DI Yogyakarta		1,00	0,99	1,00	1,00	1,00	0,97	0,99	0,96	0,98	0,97	0,99	0,98	0,99	0,99	0,99	0,99
Kulon Progo	3401	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,86	0,98	0,92	0,98	0,97	0,98	0,98	0,97	0,98
Bantul	3402	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,96	0,99	0,98	1,00	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99
Gunung Kidul	3403	1,00	0,97	0,99	0,99	1,00	0,98	0,99	1,00	0,95	0,98	0,99	0,99	0,99	0,99	0,98	0,98
Slaman	3404	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Yogyakarta	3471	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,78	0,89	0,94	1,00	0,97	0,97	0,95	0,96	0,96	0,99	0,99
Jawa Timur		0,99	0,93	1,00	0,97	0,98	1,00	0,99	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,97
Pacitan	3501	0,97	0,77	1,00	0,91	1,00	0,98	0,99	1,00	0,99	1,00	0,95	0,97	0,96	0,96	0,96	0,93
Ponorogo	3502	0,99	0,96	1,00	0,99	1,00	0,99	1,00	1,00	0,98	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,98
Trenggalek	3503	0,97	0,78	0,99	0,92	1,00	1,00	1,00	1,00	0,97	0,99	0,95	0,97	0,96	0,96	0,95	0,93
Tulungagung	3504	1,00	0,99	1,00	0,99	1,00	0,99	1,00	1,00	0,98	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99
Blitar	3505	1,00	0,96	1,00	0,99	0,92	1,00	0,96	0,96	0,99	0,97	0,98	0,97	0,97	0,98	0,98	0,98
Kediri	3506	1,00	0,99	1,00	0,99	1,00	1,00	1,00	0,89	0,97	0,93	0,98	0,97	0,98	0,98	0,97	0,98
Malang	3507	0,99	0,94	1,00	0,98	0,95	0,99	0,97	1,00	0,97	0,99	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,97

Provinsi	Kode BPS	Ketersediaan Fisik			Tenaga Kesehatan			Karakteristik Bangunan			Indeks-Indeks Komposit						
		Primer	Sekunder	Melahirkan	Sub Indeks	GP Pusk.	Bidan	Sub Indeks	Air	Listrik	Sub Indeks	Akses	Setara D	Setara I	PCA	OLS	CI
Lumajang	3508	1,00	0,98	1,00	0,99	1,00	1,00	1,00	1,00	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99
Jember	3509	1,00	0,99	1,00	1,00	0,98	1,00	0,99	0,98	0,96	0,97	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,98
Banyuwangi	3510	1,00	0,94	1,00	0,98	1,00	1,00	1,00	1,00	0,96	0,98	0,98	0,99	0,98	0,99	0,98	0,97
Bondowoso	3511	0,99	0,94	0,97	0,97	0,92	1,00	0,96	1,00	0,99	0,99	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97
Situbondo	3512	0,98	0,93	1,00	0,97	1,00	1,00	1,00	1,00	0,98	0,99	0,98	0,99	0,98	0,98	0,98	0,97
Probolinggo	3513	0,98	0,94	1,00	0,97	0,91	0,98	0,94	0,94	0,99	0,96	0,97	0,96	0,96	0,96	0,98	0,97
Pasuruan	3514	0,99	0,95	1,00	0,98	1,00	1,00	1,00	1,00	0,98	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,98
Sidoarjo	3515	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Mojokerto	3516	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Jombang	3517	1,00	0,98	1,00	0,99	0,97	0,99	0,98	0,97	0,98	0,98	0,99	0,98	0,99	0,99	0,99	0,99
Nganjuk	3518	1,00	0,97	1,00	0,99	1,00	1,00	1,00	0,95	0,99	0,97	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,98
Madiun	3519	1,00	0,97	1,00	0,99	1,00	1,00	1,00	0,92	0,98	0,95	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98
Magetan	3520	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,99	1,00	1,00	0,98	0,99	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Ngawi	3521	1,00	0,97	1,00	0,99	0,96	1,00	0,98	1,00	0,98	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99
Bojonegoro	3522	0,99	0,92	1,00	0,97	1,00	1,00	1,00	1,00	0,98	0,99	0,98	0,99	0,98	0,98	0,98	0,97
Tuban	3523	1,00	0,98	1,00	0,99	0,88	0,99	0,93	0,97	0,99	0,98	0,98	0,97	0,97	0,97	0,99	0,99
Lamongan	3524	0,98	0,90	0,99	0,96	0,97	1,00	0,98	1,00	0,99	0,99	0,97	0,98	0,98	0,98	0,98	0,96
Gresik	3525	1,00	0,85	1,00	0,95	0,97	0,99	0,98	0,97	1,00	0,98	0,96	0,97	0,97	0,97	0,97	0,95
Bangkalan	3526	0,96	0,76	0,99	0,91	0,95	0,99	0,97	0,91	0,96	0,93	0,93	0,94	0,93	0,94	0,93	0,91
Sampang	3527	0,90	0,59	0,99	0,83	0,95	0,99	0,97	0,95	0,98	0,97	0,88	0,92	0,91	0,91	0,91	0,87
Pamekasan	3528	0,96	0,84	1,00	0,93	0,95	0,99	0,97	0,95	0,99	0,97	0,95	0,96	0,95	0,96	0,96	0,95
Sumenep	3529	0,95	0,58	0,98	0,84	1,00	1,00	1,00	0,97	0,92	0,94	0,89	0,93	0,91	0,91	0,90	0,85
Kediri	3571	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,99	1,00	1,00	0,98	0,99	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,99
Blitar	3572	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Malang	3573	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,99	0,99	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Probolinggo	3574	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,99	0,99	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Pasuruan	3575	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,99	0,99	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Mojokerto	3576	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,97	0,99	1,00	1,00	1,00	1,00	0,99	0,99
Madiun	3577	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,99	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Surabaya	3578	1,00	1,00	1,00	1,00	0,98	1,00	0,99	0,96	0,99	0,98	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99
Batu	3579	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Banten		0,98	0,88	0,98	0,95	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,95
Pandeglang	3601	0,90	0,55	0,94	0,79	0,92	0,91	0,91	0,94	0,98	0,96	0,85	0,89	0,88	0,88	0,88	0,84
Lebak	3602	0,92	0,64	0,93	0,83	1,00	0,90	0,95	0,93	0,99	0,96	0,88	0,91	0,90	0,90	0,89	0,86
Tangerang	3603	0,99	0,95	1,00	0,98	0,98	0,99	0,98	0,98	0,94	0,96	0,98	0,97	0,98	0,98	0,98	0,97

Provinsi	Kode BPS	Ketersediaan Fisik			Tenaga Kesehatan			Karakteristik Bangunan			Indeks-Indeks Komposit						
		Primer	Sekunder	Melahirkan	Sub Indeks	GP Pusk.	Bidan	Sub Indeks	Air	Listrik	Sub Indeks	Akses	Setara D	Setara I	PCA	OLS	CI
Serang	3604	0,98	0,90	1,00	0,96	0,97	0,95	0,96	1,00	0,94	0,97	0,96	0,96	0,96	0,96	0,97	0,95
Tangerang	3671	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,99	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Cilegon	3672	1,00	1,00	1,00	1,00	0,88	1,00	0,94	1,00	0,92	0,96	0,98	0,97	0,97	0,97	0,98	0,98
Serang	3673	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,96	0,98	1,00	1,00	1,00	1,00	0,99	0,99	0,99	1,00	1,00
Tangerang Selatan	3674	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Bali		1,00	0,98	1,00	0,99	0,99	0,99	0,99	0,97	0,96	0,97	0,99	0,98	0,99	0,99	0,99	0,98
Jembrana	5101	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,98	0,99	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Tabanan	5102	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,99	1,00	0,95	1,00	0,98	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99
Badung	5103	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,99	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Gianyar	5104	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,99	0,99	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Klungkung	5105	1,00	0,76	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00	1,00	0,92	0,96	0,94	0,96	0,95	0,95	0,94	0,91
Bangli	5106	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,96	0,98	0,91	0,95	0,93	0,98	0,97	0,98	0,98	0,98	0,98
Karang Asem	5107	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,84	0,92	0,98	0,97	0,98	0,98	0,97	0,96
Buleleng	5108	1,00	0,96	1,00	0,98	1,00	0,97	0,98	0,95	0,98	0,97	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98
Denpasar	5171	1,00	1,00	1,00	1,00	0,91	0,99	0,95	1,00	1,00	1,00	0,99	0,98	0,99	0,99	1,00	1,00
Nusa Tenggara Barat		0,99	0,80	0,97	0,92	0,97	0,92	0,95	0,97	0,92	0,94	0,93	0,94	0,94	0,94	0,93	0,91
Lombok Barat	5201	1,00	0,91	0,99	0,96	1,00	0,90	0,95	0,93	0,92	0,93	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,94
Lombok Tengah	5202	0,99	0,77	0,97	0,91	1,00	0,95	0,97	1,00	0,94	0,97	0,94	0,95	0,95	0,95	0,93	0,91
Lombok Timur	5203	0,99	0,92	0,98	0,97	1,00	0,84	0,92	1,00	0,97	0,98	0,96	0,96	0,96	0,96	0,97	0,96
Sumbawa	5204	0,98	0,69	0,93	0,87	0,88	0,96	0,92	0,92	0,91	0,91	0,89	0,90	0,89	0,90	0,88	0,85
Dompu	5205	0,97	0,70	0,95	0,87	1,00	0,97	0,98	0,89	0,84	0,87	0,89	0,91	0,90	0,91	0,88	0,85
Bima	5206	0,99	0,59	0,94	0,84	0,95	0,98	0,97	1,00	0,87	0,93	0,88	0,91	0,90	0,90	0,88	0,83
Sumbawa Barat	5207	0,98	0,28	0,95	0,74	1,00	0,97	0,98	0,89	0,93	0,91	0,82	0,88	0,86	0,86	0,83	0,75
Lombok Utara	5208	0,97	0,57	1,00	0,85	1,00	0,99	0,99	1,00	0,98	0,99	0,91	0,94	0,93	0,93	0,92	0,87
Mataram	5271	1,00	0,98	1,00	0,99	1,00	0,95	0,97	1,00	0,98	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99
Bima	5272	1,00	0,91	0,95	0,95	1,00	1,00	1,00	1,00	0,98	0,99	0,97	0,98	0,98	0,98	0,96	0,95
Nusa Tenggara Timur		0,91	0,53	0,88	0,77	0,80	0,79	0,80	0,83	0,59	0,71	0,76	0,76	0,76	0,76	0,75	0,71
Sumba Barat	5301	0,87	0,61	0,92	0,80	1,00	0,75	0,87	1,00	0,52	0,76	0,81	0,81	0,81	0,81	0,80	0,74
Sumba Timur	5302	0,91	0,43	0,85	0,73	0,80	0,82	0,81	0,85	0,57	0,71	0,74	0,75	0,75	0,75	0,73	0,67
Kupang	5303	0,96	0,47	0,77	0,73	0,70	0,83	0,76	0,78	0,46	0,62	0,72	0,70	0,71	0,71	0,66	0,61
Timor Tengah Selatan	5304	0,81	0,33	0,84	0,66	0,67	0,70	0,68	0,74	0,47	0,60	0,65	0,65	0,65	0,66	0,66	0,60
Timor Tengah Utara	5305	0,93	0,73	0,98	0,88	0,52	0,89	0,71	0,80	0,66	0,73	0,82	0,77	0,79	0,80	0,84	0,81
Belu	5306	0,91	0,56	0,94	0,80	0,48	0,89	0,69	0,78	0,54	0,66	0,75	0,72	0,73	0,74	0,77	0,72
Alor	5307	0,83	0,46	0,77	0,69	0,73	0,65	0,69	0,82	0,43	0,62	0,67	0,67	0,67	0,67	0,66	0,61
Lembata	5308	0,92	0,74	0,91	0,86	1,00	0,82	0,91	0,89	0,77	0,83	0,86	0,87	0,86	0,86	0,85	0,83

Provinsi	Kode BPS	Ketersediaan Fisik			Tenaga Kesehatan			Karakteristik Bangunan			Indeks-Indeks Komposit							
		Primer	Sekunder	Melahirkan	Sub Indeks	GP Pusk.	Bidan	Sub Indeks	Air	Listrik	Sub Indeks	Akses	Setara D	Setara I	PCA	OLS	CI	
Flores Timur	5309	0,96	0,52	0,98	0,82	0,89	0,68	0,79	0,79	0,69	0,74	0,80	0,78	0,79	0,88	0,85	0,82	
	5310	0,94	0,72	0,96	0,87	0,95	0,98	0,97	0,86	0,68	0,77	0,87	0,87	0,87	0,88	0,85	0,82	
	5311	0,87	0,62	0,90	0,80	0,96	0,65	0,81	1,00	0,46	0,73	0,79	0,78	0,78	0,78	0,78	0,72	
	5312	0,94	0,80	0,95	0,90	0,80	0,77	0,78	0,80	0,77	0,79	0,85	0,82	0,83	0,84	0,86	0,85	
	5313	0,93	0,62	0,87	0,80	1,00	0,86	0,93	0,82	0,58	0,70	0,81	0,81	0,81	0,81	0,76	0,72	
	5314	0,94	0,31	0,67	0,64	0,92	0,69	0,80	0,92	0,89	0,90	0,72	0,78	0,76	0,76	0,70	0,65	
	5315	0,78	0,19	0,69	0,55	0,83	0,77	0,80	0,83	0,48	0,66	0,62	0,67	0,65	0,65	0,59	0,51	
	5316	0,94	0,30	0,95	0,73	0,83	0,66	0,75	0,67	0,60	0,63	0,71	0,70	0,71	0,72	0,72	0,65	
	5317	0,92	0,38	0,89	0,73	0,80	0,86	0,83	0,60	0,51	0,56	0,72	0,71	0,71	0,72	0,68	0,63	
	5318	0,97	0,48	0,95	0,80	1,00	0,79	0,89	1,00	0,85	0,93	0,84	0,87	0,86	0,86	0,86	0,80	
	5319	0,86	0,32	0,82	0,67	0,90	0,59	0,75	0,85	0,47	0,66	0,68	0,69	0,69	0,69	0,67	0,60	
	5320	0,89	0,29	0,82	0,67	0,83	0,57	0,70	0,67	0,30	0,48	0,64	0,62	0,63	0,63	0,60	0,53	
	5371	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,97	0,99	0,90	0,98	0,94	0,99	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	
	Kalimantan Barat		0,92	0,58	0,90	0,80	0,83	0,87	0,85	0,87	0,67	0,77	0,80	0,81	0,81	0,81	0,79	0,75
	Sambas	6101	0,98	0,53	0,97	0,83	0,89	0,96	0,93	0,96	0,89	0,93	0,87	0,89	0,88	0,89	0,88	0,83
	Bengkayang	6102	0,91	0,71	0,89	0,84	0,53	0,86	0,70	0,71	0,56	0,63	0,77	0,72	0,74	0,75	0,77	0,74
	Landak	6103	0,93	0,54	0,92	0,79	0,81	0,84	0,83	0,81	0,47	0,64	0,77	0,75	0,76	0,77	0,75	0,69
Pontianak	6104	0,99	0,81	0,99	0,93	0,86	0,98	0,92	0,71	0,87	0,79	0,90	0,88	0,89	0,90	0,89	0,88	
Sanggau	6105	0,92	0,50	0,86	0,76	1,00	1,00	1,00	0,94	0,57	0,76	0,81	0,84	0,83	0,83	0,76	0,70	
Ketapang	6106	0,88	0,37	0,82	0,69	0,77	0,77	0,77	0,81	0,73	0,77	0,72	0,74	0,74	0,74	0,73	0,67	
Sintang	6107	0,78	0,34	0,84	0,65	0,81	0,61	0,71	0,76	0,63	0,69	0,67	0,68	0,68	0,68	0,70	0,63	
Kapuas Hulu	6108	0,82	0,36	0,77	0,65	0,74	0,70	0,72	1,00	0,56	0,78	0,69	0,72	0,71	0,70	0,70	0,63	
Sekadau	6109	0,93	0,39	0,90	0,74	0,92	0,82	0,87	0,83	0,59	0,71	0,76	0,77	0,77	0,77	0,74	0,67	
Melawi	6110	0,72	0,30	0,68	0,57	1,00	0,58	0,79	0,70	0,58	0,64	0,63	0,67	0,65	0,65	0,60	0,55	
Kayong Utara	6111	0,92	0,43	0,94	0,77	0,86	0,93	0,89	0,86	0,76	0,81	0,80	0,82	0,81	0,82	0,80	0,74	
Kubu Raya	6112	0,96	0,59	0,91	0,82	0,80	0,99	0,89	0,90	0,80	0,85	0,84	0,85	0,85	0,85	0,83	0,79	
Pontianak	6171	1,00	1,00	1,00	1,00	0,91	0,98	0,95	1,00	0,97	0,99	0,99	0,98	0,98	0,98	0,99	0,99	
Singkawang	6172	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,92	0,96	1,00	0,64	0,82	0,96	0,93	0,94	0,94	0,93	0,91	
Kalimantan Tengah		0,96	0,64	0,89	0,83	0,86	0,86	0,86	0,88	0,73	0,80	0,83	0,83	0,83	0,83	0,82	0,78	
Kotawaringin Barat	6201	0,98	0,74	0,96	0,90	1,00	0,97	0,99	0,93	0,91	0,92	0,92	0,93	0,93	0,93	0,91	0,88	
Kotawaringin Timur	6202	0,96	0,69	0,90	0,85	0,85	0,81	0,83	1,00	0,77	0,88	0,85	0,85	0,85	0,85	0,86	0,82	
Kapuas	6203	0,91	0,58	0,85	0,78	0,83	0,84	0,83	0,74	0,76	0,75	0,79	0,79	0,79	0,79	0,77	0,74	
Barito Selatan	6204	0,97	0,69	0,92	0,86	0,80	0,90	0,85	0,80	0,60	0,70	0,83	0,80	0,81	0,82	0,80	0,77	
Barito Utara	6205	0,99	0,56	0,87	0,81	0,67	0,96	0,81	1,00	0,76	0,88	0,82	0,83	0,83	0,83	0,82	0,77	
Sukamara	6206	1,00	0,60	0,97	0,86	1,00	0,89	0,95	1,00	0,80	0,90	0,88	0,90	0,90	0,90	0,88	0,83	

Provinsi	Kode BPS	Ketersediaan Fisik			Tenaga Kesehatan			Karakteristik Bangunan			Indeks-Indeks Komposit						
		Primer	Sekunder	Melahirkan	Sub Indeks	GP Pusk.	Bidan	Sub Indeks	Air	Listrik	Sub Indeks	Akses	Setara D	Setara I	PCA	OLS	CI
Lamandau	6207	1,00	0,63	0,92	0,85	0,89	0,87	0,88	0,78	0,79	0,78	0,84	0,84	0,80	0,81	0,82	0,79
Seruyan	6208	0,95	0,71	0,90	0,85	0,91	0,73	0,82	0,73	0,71	0,72	0,82	0,80	0,80	0,81	0,80	0,78
Katingan	6209	0,98	0,30	0,87	0,71	0,80	0,83	0,81	0,80	0,67	0,74	0,74	0,75	0,75	0,76	0,72	0,65
Pulang Pisau	6210	0,93	0,32	0,87	0,71	0,82	0,87	0,84	0,91	0,84	0,87	0,77	0,81	0,79	0,80	0,78	0,71
Gunung Mas	6211	0,87	0,50	0,75	0,71	0,92	0,74	0,83	0,92	0,53	0,73	0,74	0,75	0,75	0,74	0,69	0,64
Barito Timur	6212	0,99	0,85	0,94	0,93	1,00	0,82	0,91	0,91	0,63	0,77	0,89	0,87	0,88	0,88	0,86	0,84
Murung raya	6213	0,97	0,50	0,68	0,72	0,75	0,81	0,78	0,83	0,57	0,70	0,73	0,73	0,73	0,73	0,66	0,62
Palangka Raya	6271	1,00	0,99	1,00	0,99	0,90	0,99	0,95	1,00	0,90	0,95	0,98	0,96	0,97	0,97	0,98	0,97
Kalimantan Selatan		0,97	0,81	0,97	0,92	0,98	0,92	0,95	0,87	0,91	0,89	0,92	0,92	0,92	0,92	0,91	0,90
Tanah Laut	6301	1,00	0,71	0,99	0,90	1,00	0,99	1,00	1,00	0,95	0,97	0,93	0,96	0,95	0,95	0,94	0,90
Kota Baru	6302	0,94	0,45	0,92	0,77	1,00	0,79	0,89	0,77	0,80	0,78	0,80	0,82	0,81	0,81	0,79	0,74
Banjar	6303	0,95	0,83	0,96	0,91	1,00	0,90	0,95	0,96	0,85	0,90	0,92	0,92	0,92	0,92	0,91	0,90
Barito Kuala	6304	0,96	0,57	0,96	0,83	1,00	0,92	0,96	0,84	0,92	0,88	0,87	0,89	0,88	0,89	0,87	0,83
Tapin	6305	0,91	0,87	0,93	0,90	1,00	0,94	0,97	0,54	0,90	0,72	0,88	0,86	0,87	0,88	0,85	0,86
Hulu Sungai Selatan	6306	0,99	0,92	0,98	0,96	1,00	0,95	0,98	0,85	0,89	0,87	0,95	0,94	0,94	0,94	0,93	0,93
Hulu Sungai Tengah	6307	0,99	0,96	0,99	0,98	0,74	0,96	0,85	0,79	0,94	0,87	0,93	0,90	0,91	0,92	0,95	0,95
Hulu Sungai Utara	6308	0,99	0,78	0,98	0,92	1,00	0,72	0,86	0,92	0,97	0,94	0,91	0,91	0,91	0,91	0,93	0,91
Tabalong	6309	0,97	0,76	0,99	0,91	1,00	0,95	0,98	0,87	0,92	0,89	0,92	0,93	0,93	0,93	0,92	0,90
Tanah Bumbu	6310	0,92	0,71	0,95	0,86	1,00	0,86	0,93	0,86	0,85	0,86	0,87	0,88	0,88	0,88	0,87	0,85
Balangan	6311	0,95	0,83	0,98	0,92	1,00	0,77	0,89	0,91	0,97	0,94	0,92	0,92	0,92	0,92	0,94	0,93
Banjarmasin	6371	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,98	0,99	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,99
Banjar Baru	6372	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,88	0,92	0,90	0,98	0,97	0,97	0,97	0,96	0,97
Kalimantan Timur		0,98	0,80	0,94	0,90	0,96	0,90	0,93	0,95	0,83	0,89	0,91	0,91	0,91	0,91	0,89	0,87
Paser	6401	0,94	0,66	0,91	0,84	1,00	0,91	0,95	0,88	0,83	0,86	0,87	0,88	0,88	0,88	0,85	0,82
Kutai Barat	6402	0,94	0,52	0,77	0,74	0,83	0,55	0,69	0,88	0,66	0,77	0,74	0,73	0,74	0,73	0,73	0,69
Kutai Kartanegara	6403	0,98	0,70	0,90	0,86	1,00	0,91	0,95	1,00	0,90	0,95	0,90	0,92	0,91	0,91	0,89	0,85
Kutai Timur	6404	0,95	0,45	0,84	0,74	0,95	0,72	0,83	0,89	0,87	0,88	0,79	0,82	0,81	0,81	0,79	0,74
Berau	6405	1,00	0,67	0,87	0,84	1,00	0,95	0,98	0,94	0,81	0,88	0,88	0,90	0,89	0,89	0,84	0,80
Malinau	6406	0,93	0,64	0,80	0,79	0,77	0,64	0,70	1,00	0,81	0,91	0,80	0,80	0,80	0,79	0,81	0,78
Bulungan	6407	0,99	0,65	0,97	0,87	1,00	0,92	0,96	1,00	0,72	0,86	0,89	0,90	0,89	0,89	0,87	0,82
Nunukan	6408	0,93	0,48	0,86	0,75	1,00	0,61	0,81	0,92	0,70	0,81	0,78	0,79	0,78	0,78	0,77	0,72
Penajam Paser Utara	6409	1,00	0,99	0,99	1,00	1,00	0,97	0,99	0,91	0,89	0,90	0,97	0,96	0,96	0,97	0,96	0,96
Tana Tidung	6410	1,00	0,00	0,76	0,59	1,00	0,89	0,94	0,67	0,90	0,78	0,70	0,77	0,75	0,75	0,65	0,57
Balikpapan	6471	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,98	0,99	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,99
Samarinda	6472	1,00	0,99	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,92	0,96	0,99	0,99	0,99	0,99	0,98	0,98

Provinsi	Kode BPS	Ketersediaan Fisik			Tenaga Kesehatan			Karakteristik Bangunan			Indeks-Indeks Komposit						
		Primer	Sekunder	Melahirkan	Sub Indeks	GP Pusk.	Bidan	Sub Indeks	Air	Listrik	Sub Indeks	Akses	Setara D	Setara I	PCA	OLS	CI
Tarakan	6473	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Bontang	6474	1,00	1,00	1,00	1,00	0,67	0,86	0,77	1,00	1,00	1,00	0,95	0,92	0,93	0,94	1,00	1,00
Sulawesi Utara		0,98	0,83	0,96	0,92	0,95	0,75	0,85	0,95	0,87	0,91	0,91	0,90	0,90	0,90	0,92	0,90
Bolaang Mongondow	7101	0,98	0,76	0,97	0,90	1,00	0,72	0,86	1,00	0,91	0,96	0,91	0,91	0,91	0,90	0,93	0,90
Minahasa	7102	0,98	0,94	0,98	0,97	1,00	0,70	0,85	1,00	0,85	0,93	0,94	0,91	0,92	0,92	0,95	0,94
Kepulauan Sangihe	7103	0,93	0,59	0,89	0,80	0,94	0,57	0,75	1,00	0,86	0,93	0,82	0,83	0,82	0,82	0,85	0,81
Kepulauan Talaud	7104	0,94	0,67	0,86	0,82	0,68	0,62	0,65	0,84	0,79	0,82	0,79	0,76	0,77	0,77	0,81	0,79
Minahasa Selatan	7105	0,99	0,91	1,00	0,97	1,00	0,73	0,87	1,00	0,85	0,93	0,94	0,92	0,93	0,92	0,95	0,94
Minahasa Utara	7106	0,97	0,81	0,95	0,91	1,00	0,84	0,92	0,90	0,82	0,86	0,90	0,89	0,90	0,90	0,89	0,87
Bolaang Mong, Utara	7107	0,98	0,54	0,98	0,83	1,00	0,70	0,85	0,88	0,89	0,88	0,84	0,85	0,85	0,85	0,87	0,82
Siau Tagulandang Biaro	7108	0,92	0,49	0,87	0,76	1,00	0,62	0,81	0,75	0,92	0,83	0,78	0,80	0,80	0,80	0,80	0,76
Minahasa Tenggara	7109	0,99	0,88	0,96	0,94	1,00	0,57	0,78	1,00	0,92	0,96	0,92	0,90	0,90	0,90	0,95	0,93
Bolaang Mong, Selatan	7110	0,96	0,28	0,91	0,72	0,80	0,64	0,72	1,00	0,95	0,98	0,77	0,80	0,79	0,79	0,83	0,75
Bolaang Mong, Timur	7111	0,98	0,66	0,96	0,87	1,00	0,56	0,78	1,00	0,97	0,98	0,87	0,88	0,88	0,87	0,92	0,88
Manado	7171	1,00	0,99	1,00	0,99	1,00	0,83	0,91	1,00	0,85	0,92	0,96	0,94	0,95	0,95	0,97	0,96
Bitung	7172	0,96	0,83	0,95	0,91	1,00	0,85	0,92	1,00	0,86	0,93	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,90
Tomohon	7173	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,96	0,98	1,00	0,93	0,96	0,99	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98
Kotamobagu	7174	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,99	0,99	1,00	0,93	0,96	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,98
Sulawesi Tengah		0,96	0,66	0,92	0,85	0,81	0,86	0,83	0,91	0,73	0,82	0,84	0,83	0,84	0,84	0,84	0,80
Banggai Kepulauan	7201	0,90	0,27	0,77	0,65	0,80	0,55	0,68	0,87	0,56	0,71	0,67	0,68	0,67	0,67	0,66	0,59
Banggai	7202	0,99	0,74	0,98	0,90	0,71	0,81	0,76	0,86	0,64	0,75	0,84	0,80	0,82	0,83	0,85	0,82
Morowali	7203	0,95	0,56	0,84	0,78	0,65	0,84	0,74	0,88	0,63	0,76	0,77	0,76	0,76	0,77	0,76	0,72
Poso	7204	1,00	0,85	0,98	0,94	0,85	0,98	0,91	0,95	0,80	0,87	0,92	0,91	0,92	0,92	0,92	0,90
Donggala	7205	0,97	0,61	0,88	0,82	0,86	0,90	0,88	1,00	0,85	0,93	0,85	0,87	0,87	0,86	0,85	0,81
Toli-Toli	7206	0,98	0,68	0,96	0,87	0,86	0,90	0,88	0,79	0,63	0,71	0,84	0,82	0,83	0,84	0,82	0,79
Buol	7207	0,97	0,80	0,95	0,91	0,82	0,77	0,79	0,73	0,69	0,71	0,85	0,81	0,82	0,83	0,84	0,83
Parigi Moutong	7208	0,95	0,36	0,95	0,76	0,79	0,87	0,83	1,00	0,86	0,93	0,80	0,84	0,83	0,83	0,84	0,76
Tojo Una-Una	7209	0,88	0,60	0,72	0,73	0,69	0,69	0,69	1,00	0,72	0,86	0,75	0,76	0,76	0,75	0,75	0,71
Sigi	7210	0,94	0,82	0,94	0,90	0,93	0,89	0,91	0,93	0,81	0,87	0,90	0,89	0,90	0,90	0,89	0,87
Palu	7271	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,88	0,94	0,99	0,98	0,98	0,98	0,98	0,97

Provinsi	Kode BPS	Ketersediaan Fisik			Tenaga Kesehatan			Karakteristik Bangunan			Indeks-Indeks Komposit						
		Primer	Sekunder	Melahirkan	Sub Indeks	GP Pusk.	Bidan	Sub Indeks	Air	Listrik	Sub Indeks	Akses	Setara D	Setara I	PCA	OLS	CI
Sulawesi Selatan		0,97	0,81	0,94	0,91	0,94	0,95	0,94	0,93	0,84	0,88	0,91	0,91	0,91	0,91	0,89	0,87
Selayar	7301	0,99	0,50	0,81	0,76	0,77	0,83	0,80	1,00	0,74	0,87	0,79	0,81	0,80	0,80	0,78	0,72
Bulukumba	7302	1,00	0,71	0,98	0,89	0,94	0,99	0,97	0,83	0,78	0,81	0,89	0,89	0,89	0,90	0,87	0,84
Bantaeng	7303	0,98	0,87	0,98	0,94	1,00	0,98	0,99	0,75	0,93	0,84	0,93	0,93	0,93	0,93	0,92	0,92
Jeneponto	7304	1,00	0,90	0,99	0,96	0,83	0,97	0,90	0,94	0,76	0,85	0,93	0,91	0,91	0,92	0,92	0,90
Takalar	7305	1,00	0,97	0,97	0,98	1,00	0,97	0,99	1,00	0,91	0,95	0,98	0,97	0,98	0,98	0,97	0,96
Gowa	7306	1,00	0,81	0,97	0,93	0,91	0,98	0,95	0,91	0,73	0,82	0,91	0,90	0,90	0,91	0,89	0,86
Sinjai	7307	1,00	0,76	0,92	0,89	0,80	1,00	0,90	0,93	0,73	0,83	0,88	0,88	0,88	0,88	0,86	0,83
Maros	7308	0,97	0,82	0,90	0,90	1,00	0,98	0,99	0,79	0,77	0,78	0,89	0,89	0,89	0,90	0,85	0,84
Pangkajene Dan Kep.	7309	0,95	0,70	0,86	0,83	0,95	0,98	0,97	1,00	0,93	0,97	0,89	0,92	0,91	0,91	0,87	0,84
Barru	7310	1,00	0,86	0,99	0,95	0,90	0,98	0,94	1,00	0,84	0,92	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,92
Bone	7311	0,96	0,67	0,90	0,84	0,83	0,86	0,85	0,92	0,72	0,82	0,84	0,84	0,84	0,84	0,83	0,79
Soppeng	7312	1,00	0,94	0,99	0,98	1,00	1,00	1,00	0,94	0,93	0,93	0,97	0,97	0,97	0,97	0,96	0,96
Wajo	7313	0,98	0,78	0,95	0,90	0,96	0,92	0,94	0,96	0,95	0,95	0,92	0,93	0,93	0,93	0,92	0,90
Sidenreng Rappang	7314	0,99	0,87	0,99	0,95	1,00	1,00	1,00	1,00	0,95	0,97	0,96	0,97	0,97	0,97	0,96	0,95
Pinrang	7315	0,97	0,88	0,95	0,93	1,00	0,99	0,99	1,00	0,93	0,96	0,95	0,96	0,96	0,96	0,94	0,93
Enrekang	7316	0,99	0,49	0,87	0,78	1,00	0,93	0,96	0,92	0,96	0,94	0,85	0,90	0,88	0,88	0,83	0,79
Luwu	7317	0,90	0,67	0,82	0,80	0,95	0,99	0,97	0,90	0,80	0,85	0,84	0,87	0,86	0,86	0,81	0,78
Tana Toraja	7318	0,83	0,58	0,80	0,74	0,84	0,85	0,85	0,89	0,73	0,81	0,77	0,80	0,79	0,79	0,76	0,73
Luwu Utara	7322	0,94	0,76	0,91	0,87	1,00	0,95	0,98	0,92	0,84	0,88	0,89	0,91	0,90	0,90	0,87	0,85
Luwu Timur	7325	1,00	0,78	0,95	0,91	1,00	0,99	1,00	1,00	0,83	0,91	0,93	0,94	0,94	0,94	0,91	0,88
Toraja Utara	7326	0,85	0,55	0,79	0,73	0,91	0,86	0,89	0,91	0,83	0,87	0,79	0,83	0,81	0,81	0,78	0,74
Makassar	7371	1,00	0,98	0,99	0,99	1,00	0,93	0,96	0,97	0,92	0,95	0,98	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97
Pare-Pare	7372	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,92	0,96	0,99	0,99	0,99	0,99	0,98	0,98
Palopo	7373	0,99	0,97	0,99	0,98	1,00	0,97	0,99	0,90	0,89	0,89	0,97	0,95	0,96	0,96	0,95	0,95
Sulawesi Tenggara		0,96	0,62	0,94	0,84	0,79	0,80	0,79	0,86	0,59	0,72	0,81	0,79	0,79	0,80	0,80	0,76
Buton	7401	0,99	0,46	0,95	0,80	0,97	0,86	0,91	0,94	0,55	0,74	0,81	0,82	0,82	0,82	0,78	0,71
Muna	7402	0,96	0,59	0,90	0,81	0,59	0,79	0,69	0,71	0,59	0,65	0,76	0,72	0,73	0,74	0,75	0,72
Konawe	7403	0,93	0,68	0,92	0,85	0,80	0,62	0,71	0,80	0,62	0,71	0,79	0,75	0,77	0,77	0,80	0,77
Kolaka	7404	0,98	0,67	0,95	0,87	0,86	0,92	0,89	1,00	0,62	0,81	0,86	0,85	0,86	0,86	0,85	0,80
Konawe Selatan	7405	0,96	0,63	0,95	0,85	0,82	0,52	0,67	0,86	0,67	0,77	0,79	0,76	0,77	0,77	0,82	0,78
Bombana	7406	0,85	0,21	0,83	0,63	0,81	0,70	0,76	0,81	0,49	0,65	0,66	0,68	0,67	0,67	0,65	0,57
Wakatobi	7407	1,00	0,52	0,98	0,83	0,53	0,96	0,74	0,88	0,35	0,62	0,77	0,73	0,75	0,76	0,76	0,69
Kolaka Utara	7408	0,96	0,33	0,93	0,74	0,75	0,92	0,84	1,00	0,82	0,91	0,79	0,83	0,82	0,82	0,82	0,74
Buton Utara	7409	0,93	0,00	0,87	0,60	0,78	0,69	0,73	0,78	0,35	0,57	0,62	0,63	0,63	0,64	0,60	0,49

Provinsi	Kode BPS	Ketersediaan Fisik			Tenaga Kesehatan			Karakteristik Bangunan			Indeks-Indeks Komposit						
		Primer	Sekunder	Melahirkan	Sub Indeks	GP Pusk.	Bidan	Sub Indeks	Air	Listrik	Sub Indeks	Akses	Setara D	Setara I	PCA	OLS	CI
Konawe Utara	7410	0,89	0,43	0,89	0,74	1,00	0,46	0,73	0,83	0,60	0,72	0,73	0,73	0,73	0,73	0,74	0,68
Kendari	7471	1,00	0,99	1,00	1,00	1,00	0,98	0,99	0,93	0,66	0,79	0,96	0,93	0,94	0,94	0,92	0,91
Bau-Bau	7472	1,00	1,00	1,00	1,00	0,69	0,97	0,83	0,81	0,60	0,71	0,91	0,85	0,87	0,88	0,89	0,89
Gorontalo		0,97	0,75	0,95	0,89	0,96	0,79	0,88	0,84	0,82	0,83	0,88	0,87	0,87	0,87	0,88	0,85
Boalemo	7501	0,99	0,50	0,94	0,81	1,00	0,80	0,90	0,90	0,79	0,85	0,83	0,85	0,85	0,85	0,83	0,77
Gorontalo	7502	0,97	0,78	0,93	0,89	1,00	0,85	0,92	0,90	0,83	0,87	0,89	0,89	0,89	0,89	0,88	0,86
Pohuwato	7503	0,97	0,72	0,97	0,88	0,94	0,71	0,82	0,69	0,78	0,73	0,84	0,81	0,82	0,83	0,84	0,82
Bone Bolango	7504	0,94	0,80	0,96	0,90	0,94	0,71	0,83	0,72	0,73	0,73	0,85	0,82	0,83	0,83	0,85	0,83
Gorontalo Utara	7505	0,98	0,56	0,96	0,83	0,92	0,51	0,72	1,00	0,83	0,92	0,83	0,82	0,82	0,82	0,87	0,82
Gorontalo	7571	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,95	0,98	1,00	0,97	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99
Sulawesi Barat		0,92	0,66	0,87	0,81	0,89	0,90	0,90	0,75	0,75	0,75	0,82	0,82	0,82	0,82	0,79	0,77
Majene	7601	0,97	0,93	0,96	0,96	0,78	0,94	0,86	1,00	0,83	0,92	0,93	0,91	0,92	0,92	0,94	0,93
Polewali Mandar	7602	0,91	0,81	0,87	0,86	0,95	0,94	0,95	0,80	0,80	0,80	0,87	0,87	0,87	0,87	0,83	0,83
Mamasa	7603	0,85	0,26	0,61	0,57	0,88	0,68	0,78	0,69	0,74	0,71	0,64	0,69	0,67	0,67	0,60	0,55
Mamuju	7604	0,90	0,58	0,91	0,80	0,86	0,90	0,88	0,72	0,67	0,69	0,79	0,79	0,79	0,80	0,78	0,74
Mamuju Utara	7605	0,99	0,51	0,92	0,81	1,00	0,93	0,96	0,64	0,76	0,70	0,82	0,82	0,82	0,83	0,78	0,74
Maluku		0,93	0,57	0,87	0,79	0,68	0,83	0,76	0,74	0,63	0,68	0,76	0,74	0,75	0,76	0,75	0,72
Maluku Tenggara Barat	8101	0,94	0,59	0,82	0,78	0,45	0,70	0,58	0,91	0,43	0,67	0,72	0,68	0,69	0,70	0,72	0,67
Maluku Tenggara	8102	0,96	0,52	0,86	0,78	0,69	0,89	0,79	0,69	0,44	0,56	0,74	0,71	0,72	0,73	0,70	0,65
Maluku Tengah	8103	0,97	0,59	0,93	0,83	0,78	0,93	0,86	0,72	0,74	0,73	0,82	0,81	0,81	0,82	0,80	0,77
Buru	8104	0,94	0,67	0,88	0,83	0,89	0,84	0,87	1,00	0,85	0,93	0,86	0,87	0,87	0,87	0,86	0,83
Kepulauan Aru	8105	0,87	0,46	0,78	0,70	0,70	0,59	0,65	0,45	0,47	0,46	0,64	0,60	0,62	0,63	0,61	0,58
Seram Bagian Barat	8106	0,97	0,27	0,96	0,73	0,50	0,93	0,71	0,88	0,66	0,77	0,74	0,74	0,74	0,75	0,77	0,68
Seram Bagian Timur	8107	0,83	0,14	0,66	0,54	0,36	0,51	0,43	0,64	0,57	0,61	0,53	0,53	0,53	0,54	0,56	0,49
Maluku Barat Daya	8108	0,68	0,04	0,50	0,40	0,78	0,58	0,68	0,67	0,35	0,51	0,48	0,53	0,51	0,51	0,42	0,35
Buru Selatan	8109	0,66	0,22	0,53	0,47	0,75	0,41	0,58	0,63	0,40	0,51	0,50	0,52	0,51	0,51	0,47	0,42
Ambon	8171	1,00	1,00	1,00	1,00	0,82	0,97	0,89	0,91	0,92	0,92	0,96	0,94	0,95	0,95	0,97	0,97
Tual	8172	0,99	0,82	0,94	0,91	0,60	0,91	0,76	0,80	0,46	0,63	0,83	0,77	0,79	0,80	0,80	0,78

Provinsi	Kode BPS	Ketersediaan Fisik			Tenaga Kesehatan			Karakteristik Bangunan			Indeks-Indeks Komposit						
		Primer	Sekunder	Melahirkan	Sub Indeks	GP Pusk.	Bidan	Sub Indeks	Air	Listrik	Sub Indeks	Akses	Setara D	Setara I	PCA	OLS	CI
Maluku Utara		0.90	0.55	0.87	0.77	0.72	0.68	0.70	0.87	0.71	0.79	0.76	0.75	0.76	0.76	0.78	0.74
Halmahera Barat	8201	0.92	0.58	0.93	0.81	1.00	0.70	0.85	0.90	0.65	0.77	0.81	0.81	0.81	0.81	0.81	0.76
Halmahera Tengah	8202	1.00	0.21	0.78	0.66	0.88	0.92	0.90	1.00	0.79	0.89	0.76	0.82	0.80	0.80	0.73	0.64
Kepulauan Sula	8203	0.81	0.32	0.69	0.60	0.62	0.53	0.57	0.77	0.60	0.68	0.61	0.62	0.62	0.62	0.62	0.57
Halmahera Selatan	8204	0.81	0.42	0.89	0.71	0.30	0.51	0.40	0.83	0.51	0.67	0.64	0.59	0.61	0.62	0.72	0.66
Halmahera Utara	8205	0.92	0.73	0.86	0.84	1.00	0.68	0.84	0.82	0.75	0.79	0.83	0.82	0.82	0.82	0.81	0.79
Halmahera Timur	8206	0.88	0.09	0.81	0.60	0.86	0.67	0.77	1.00	0.75	0.87	0.69	0.74	0.72	0.72	0.71	0.61
Pulau Morotai	8207	0.82	0.32	0.67	0.60	1.00	0.62	0.81	0.80	0.85	0.82	0.69	0.75	0.73	0.72	0.67	0.63
Ternate	8271	0.99	0.95	0.99	0.98	1.00	0.79	0.90	0.88	0.95	0.91	0.95	0.93	0.93	0.93	0.96	0.96
Tidore Kepulauan	8272	1.00	0.64	1.00	0.88	0.71	0.87	0.79	0.86	0.94	0.90	0.87	0.86	0.86	0.87	0.90	0.87
Papua Barat		0.91	0.62	0.85	0.79	0.56	0.69	0.62	0.77	0.69	0.73	0.75	0.72	0.73	0.73	0.77	0.74
Fakfak	9101	0.95	0.73	0.87	0.85	0.89	0.79	0.84	0.89	0.62	0.75	0.83	0.81	0.82	0.82	0.80	0.77
Kaimana	9102	0.81	0.07	0.63	0.50	0.57	0.64	0.60	0.86	0.79	0.83	0.59	0.64	0.62	0.62	0.61	0.53
Teluk Wondama	9103	0.97	0.02	0.84	0.61	0.67	0.44	0.55	0.83	0.68	0.76	0.63	0.64	0.64	0.64	0.67	0.57
Teluk Bintuni	9104	0.90	0.19	0.79	0.63	0.61	0.65	0.63	0.83	0.65	0.74	0.65	0.67	0.66	0.66	0.67	0.59
Manokwari	9105	0.90	0.78	0.88	0.86	0.59	0.71	0.65	0.77	0.59	0.68	0.78	0.73	0.75	0.76	0.79	0.78
Sorong Selatan	9106	0.84	0.46	0.80	0.70	0.27	0.35	0.31	0.55	0.46	0.50	0.58	0.50	0.53	0.54	0.63	0.59
Sorong	9107	0.92	0.67	0.85	0.81	0.35	0.75	0.55	0.76	0.73	0.75	0.75	0.70	0.72	0.73	0.78	0.76
Raja Ampat	9108	0.83	0.25	0.66	0.58	0.50	0.45	0.48	0.72	0.79	0.76	0.60	0.61	0.60	0.60	0.64	0.58
Tambrauw	9109	0.55	0.00	0.51	0.35	0.50	0.28	0.39	0.75	0.63	0.69	0.43	0.48	0.46	0.45	0.49	0.41
Maybrat	9110	0.75	0.08	0.58	0.47	0.50	0.21	0.36	0.50	0.67	0.58	0.47	0.47	0.47	0.47	0.51	0.45
Sorong	9171	1.00	0.99	0.99	0.99	1.00	0.91	0.96	1.00	0.97	0.99	0.98	0.98	0.98	0.98	0.99	0.98
Papua		0.71	0.40	0.63	0.58	0.60	0.54	0.57	0.68	0.45	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.56	0.53
Merauke	9401	0.98	0.68	0.80	0.82	0.75	0.97	0.86	0.88	0.54	0.71	0.81	0.80	0.80	0.80	0.74	0.71
Jayawijaya	9402	0.72	0.44	0.73	0.63	1.00	0.43	0.72	0.83	0.17	0.50	0.62	0.62	0.62	0.61	0.58	0.52
Jayapura	9403	0.93	0.56	0.90	0.80	0.70	0.66	0.68	0.75	0.86	0.81	0.78	0.76	0.77	0.77	0.81	0.78
Nabire	9404	0.95	0.82	0.88	0.88	0.44	0.87	0.66	0.89	0.56	0.72	0.81	0.76	0.77	0.78	0.81	0.79
Kepulauan Yapen	9408	0.93	0.57	0.82	0.77	0.75	0.66	0.70	0.63	0.26	0.44	0.69	0.64	0.66	0.67	0.64	0.60
Biak Numfor	9409	0.92	0.71	0.87	0.83	0.59	0.75	0.67	0.76	0.82	0.79	0.79	0.76	0.77	0.78	0.82	0.80
Paniai	9410	0.37	0.22	0.44	0.34	0.40	0.29	0.34	0.50	0.18	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.36	0.32
Puncak Jaya	9411	0.29	0.14	0.27	0.23	0.38	0.23	0.30	0.38	0.20	0.29	0.26	0.28	0.27	0.27	0.25	0.23
Mimika	9412	0.91	0.85	0.89	0.88	0.54	0.77	0.65	0.92	0.53	0.73	0.81	0.75	0.77	0.78	0.81	0.79
Boven Digoel	9413	0.78	0.18	0.75	0.57	0.38	0.65	0.52	0.54	0.59	0.56	0.56	0.55	0.55	0.57	0.59	0.53
Mappi	9414	0.59	0.29	0.47	0.45	0.60	0.34	0.47	1.00	0.65	0.83	0.53	0.58	0.56	0.55	0.56	0.51
Asmat	9415	0.46	0.13	0.33	0.31	1.00	0.62	0.81	0.89	0.71	0.80	0.51	0.64	0.59	0.57	0.47	0.42

Provinsi	Kode BPS	Ketersediaan Fisik				Tenaga Kesehatan			Karakteristik Bangunan			Indeks-Indeks Komposit					
		Primer	Sekunder	Melahirkan	Sub Indeks	GP Pusk.	Bidan	Sub Indeks	Air	Listrik	Sub Indeks	Akses	Setara D	Setara I	PCA	OLS	CI
Yahukimo	9416	0,53	0,01	0,24	0,26	0,27	0,12	0,19	0,45	0,09	0,27	0,25	0,24	0,24	0,24	0,21	0,16
	9417	0,18	0,09	0,15	0,14	0,75	0,10	0,43	0,50	0,19	0,35	0,24	0,30	0,28	0,26	0,20	0,18
	9418	0,48	0,21	0,41	0,37	0,44	0,18	0,31	0,22	0,19	0,21	0,32	0,30	0,31	0,31	0,30	0,28
Tolikara	9419	0,85	0,12	0,78	0,58	0,57	0,47	0,52	0,71	0,71	0,71	0,60	0,61	0,60	0,61	0,64	0,57
Sarmi	9420	0,94	0,75	0,88	0,86	0,88	0,79	0,83	1,00	0,88	0,94	0,87	0,88	0,88	0,87	0,88	0,86
Keerom	9426	0,69	0,02	0,60	0,44	0,25	0,39	0,32	0,50	0,65	0,57	0,44	0,44	0,44	0,45	0,50	0,44
Waropen	9427	0,95	0,70	0,91	0,85	0,60	0,39	0,50	1,00	0,72	0,86	0,78	0,74	0,75	0,75	0,85	0,81
Supiori	9428	0,59	0,00	0,30	0,30	0,50	0,20	0,35	0,75	0,20	0,47	0,34	0,37	0,36	0,35	0,31	0,24
Mamberamo Raya	9429	0,90	0,00	0,51	0,47	0,50	0,21	0,36	0,63	0,22	0,42	0,44	0,42	0,42	0,43	0,39	0,31
Nduga	9430	0,50	0,01	0,39	0,30	0,40	0,53	0,47	0,30	0,24	0,27	0,33	0,35	0,34	0,35	0,29	0,24
Lanny Jaya	9431	0,54	0,00	0,66	0,40	1,00	0,71	0,86	0,60	0,07	0,34	0,48	0,53	0,51	0,51	0,41	0,32
Mamberamo Tengah	9432	0,89	0,20	0,48	0,52	1,00	0,67	0,83	0,67	0,35	0,51	0,58	0,62	0,61	0,61	0,45	0,39
Yalimo	9433	0,24	0,03	0,23	0,17	0,57	0,41	0,49	0,29	0,25	0,27	0,25	0,31	0,29	0,29	0,21	0,18
Puncak	9434	0,65	0,00	0,53	0,39	0,29	0,27	0,28	0,57	0,21	0,39	0,37	0,35	0,36	0,36	0,39	0,31
Dogiyai	9435	0,20	0,00	0,19	0,13	0,60	0,18	0,39	0,40	0,33	0,37	0,23	0,30	0,27	0,26	0,22	0,19
Intan Jaya	9436	0,79	0,00	0,81	0,53	0,57	0,78	0,68	0,71	0,14	0,43	0,54	0,55	0,54	0,56	0,52	0,41
Deiyai	9471	1,00	1,00	1,00	1,00	0,92	0,85	0,89	1,00	0,86	0,93	0,96	0,94	0,95	0,95	0,97	0,97
Jayapura																	

Tabel A.6: Indikator-indikator Pendidikan dan Indeks-indeks Komposit - Skor Tingkat Kabupaten²²

Kabupaten	Kode BPS	KETERSEDIAAN FISIK			KUALIFIKASI GURU			KARAKTERISTIK FASILITAS				Indeks-Indeks Komposit					
		PAUD	SMP (6)	Sub Indeks	SD S1	SMP S1	Sub Indeks	Lab SMP	Listrik	Air	Sub Indeks	Akses	SMP 3 km	Setara D _i	PCA	OLS	CI
Nangroe Aceh Derussalam		0,73	0,96	0,85	0,74	0,72	0,73	0,82	0,96	0,71	0,76	0,80	0,77	0,78	0,78	0,81	0,78
Simeulue	1101	0,72	0,96	0,84	0,16	0,55	0,36	0,73	0,85	0,56	0,71	0,71	0,68	0,64	0,65	0,66	0,59
Aceh Singkil	1102	0,75	0,91	0,83	0,65	0,80	0,73	0,68	0,89	0,58	0,72	0,78	0,75	0,76	0,75	0,78	0,75
Aceh Selatan	1103	0,75	0,97	0,86	0,62	0,61	0,61	0,55	0,95	0,69	0,73	0,77	0,74	0,73	0,74	0,76	0,72
Aceh Tenggara	1104	0,68	0,97	0,82	0,74	0,83	0,79	0,64	0,91	0,47	0,67	0,77	0,74	0,76	0,75	0,81	0,79
Aceh Timur	1105	0,50	0,90	0,70	0,69	0,68	0,69	0,59	0,92	0,59	0,70	0,70	0,65	0,70	0,70	0,77	0,74
Aceh Tengah	1106	0,85	0,91	0,88	0,65	0,73	0,69	0,52	0,91	0,67	0,70	0,79	0,76	0,76	0,76	0,74	0,71
Aceh Barat	1107	0,74	0,94	0,84	0,55	0,74	0,64	0,55	0,94	0,71	0,73	0,77	0,73	0,74	0,74	0,73	0,69
Aceh Besar	1108	0,83	0,98	0,90	0,88	0,72	0,80	0,76	0,98	0,86	0,87	0,87	0,85	0,86	0,86	0,90	0,88
Pidie	1109	0,59	0,98	0,78	0,87	0,73	0,80	0,73	0,99	0,63	0,78	0,79	0,75	0,79	0,79	0,89	0,87
Bireuen	1110	0,63	0,99	0,81	0,88	0,73	0,80	0,55	0,99	0,80	0,78	0,80	0,77	0,80	0,80	0,85	0,83
Aceh Utara	1111	0,70	0,96	0,83	0,85	0,66	0,76	0,51	0,99	0,73	0,75	0,79	0,74	0,78	0,78	0,82	0,80
Aceh Barat Daya	1112	0,70	0,99	0,84	0,74	0,70	0,72	0,68	1,00	0,73	0,80	0,81	0,79	0,79	0,79	0,84	0,82
Gayo Lues	1113	0,45	0,88	0,67	0,52	0,79	0,65	0,71	0,91	0,52	0,71	0,68	0,65	0,68	0,68	0,74	0,71
Aceh Tamiang	1114	0,91	0,99	0,95	0,85	0,79	0,82	0,61	0,98	0,90	0,83	0,89	0,86	0,87	0,87	0,85	0,83
Nagan Raya	1115	0,63	0,94	0,78	0,49	0,59	0,54	0,71	0,96	0,70	0,79	0,74	0,69	0,70	0,72	0,76	0,71
Aceh Jaya	1116	0,86	0,94	0,90	0,29	0,79	0,54	0,43	0,91	0,78	0,71	0,77	0,74	0,72	0,72	0,62	0,56
Bener Meriah	1117	0,81	0,97	0,89	0,64	0,76	0,70	0,58	0,95	0,74	0,75	0,81	0,77	0,78	0,78	0,77	0,74
Pidie Jaya	1118	0,70	0,99	0,85	0,93	0,74	0,83	0,50	1,00	0,61	0,70	0,80	0,78	0,80	0,79	0,85	0,83
Banda Aceh	1171	0,95	1,00	0,98	0,99	0,84	0,91	0,91	1,00	0,98	0,96	0,96	0,96	0,95	0,95	0,97	0,97
Sabang	1172	0,80	0,94	0,87	0,97	0,89	0,93	0,67	1,00	0,93	0,87	0,88	0,83	0,89	0,89	0,89	0,88
Langsa	1173	0,95	0,98	0,97	1,00	0,77	0,88	0,93	1,00	0,93	0,96	0,95	0,94	0,94	0,94	0,98	0,98
Lhokseumawe	1174	1,00	0,99	0,99	0,98	0,72	0,85	0,71	0,97	0,84	0,84	0,92	0,91	0,89	0,89	0,91	0,90
Subulussalam	1175	0,81	0,89	0,85	0,77	0,66	0,71	0,46	0,87	0,54	0,62	0,75	0,73	0,73	0,72	0,74	0,72
Sumatera Utara		0,82	0,94	0,88	0,72	0,75	0,73	0,59	0,82	0,69	0,70	0,79	0,77	0,77	0,76	0,77	0,74
Nias	1201	0,48	0,93	0,70	0,22	0,51	0,37	0,16	0,41	0,45	0,34	0,53	0,48	0,47	0,45	0,45	0,37
Mandailing natal	1202	0,58	0,90	0,74	0,80	0,74	0,77	0,66	0,83	0,40	0,63	0,71	0,67	0,71	0,70	0,80	0,78
Tapanuli Selatan	1203	0,61	0,84	0,72	0,59	0,81	0,70	0,62	0,72	0,53	0,63	0,69	0,66	0,68	0,67	0,70	0,67
Tapanuli Tengah	1204	0,80	0,95	0,87	0,57	0,82	0,70	0,59	0,77	0,53	0,63	0,77	0,73	0,73	0,72	0,72	0,68
Tapanuli Utara	1205	0,39	0,90	0,64	0,46	0,80	0,63	0,52	0,72	0,57	0,60	0,63	0,60	0,62	0,62	0,65	0,60
Toba Samosir	1206	0,67	0,88	0,77	0,43	0,74	0,59	0,58	0,87	0,64	0,70	0,71	0,67	0,69	0,69	0,68	0,63
Labuhan Batu	1207	0,85	0,96	0,91	0,84	0,82	0,83	0,65	0,81	0,75	0,74	0,84	0,81	0,83	0,82	0,82	0,81
Asahan	1208	0,88	0,93	0,90	0,77	0,86	0,82	0,68	0,97	0,96	0,87	0,88	0,84	0,86	0,87	0,83	0,81
Simalungun	1209	0,71	0,85	0,78	0,77	0,73	0,75	0,73	0,84	0,68	0,75	0,76	0,73	0,76	0,76	0,79	0,78
Dairi	1210	0,64	0,91	0,77	0,33	0,75	0,54	0,67	0,90	0,67	0,75	0,72	0,68	0,69	0,69	0,68	0,63

²² Skor-skor indikator yang dilaporkan dihitung pada tingkat kabupaten, misalnya menghitung persentase penduduk kabupaten yang memiliki akses mudah ke layanan kesehatan tingkat pertama. Skor-skor ini berbeda dengan skor rata-rata kecamatan per kabupaten, di mana bobot yang sama diberikan kepada setiap kecamatan tanpa memperhitungkan jumlah penduduk.

Kabupaten	Kode BPS	KETERSEDIAAN FISIK			KUALIFIKASI GURU				KARAKTERISTIK FASILITAS				Indeks-Indeks Komposit				
		PAUD	SMP (6)	Sub Indeks	SD S1	SMP S1	Sub Indeks	Lab SMP	Listrik	Air	Sub Indeks	Akses	SMP 3 km	Setara D,	PCA	OLS	CI
Karo	1211	0,66	0,83	0,75	0,77	0,70	0,74	0,77	0,78	0,60	0,72	0,74	0,70	0,73	0,73	0,79	0,78
Deli Serdang	1212	0,94	0,98	0,96	0,98	0,88	0,93	0,79	0,97	0,92	0,89	0,93	0,92	0,93	0,93	0,93	0,93
Langkat	1213	0,87	0,91	0,89	0,91	0,85	0,88	0,66	0,89	0,79	0,78	0,86	0,83	0,85	0,84	0,84	0,84
Nias Selatan	1214	0,19	0,88	0,54	0,16	0,34	0,25	0,20	0,35	0,36	0,31	0,41	0,37	0,36	0,35	0,42	0,34
Humbang Hasundutan	1215	0,91	0,93	0,92	0,65	0,78	0,72	0,77	0,86	0,86	0,83	0,85	0,79	0,82	0,82	0,80	0,77
Pakpak Bharat	1216	0,88	0,47	0,67	0,38	0,86	0,62	0,53	0,83	0,69	0,68	0,67	0,67	0,66	0,66	0,52	0,51
Samosir	1217	0,47	0,91	0,69	0,70	0,88	0,79	0,76	0,94	0,56	0,75	0,73	0,68	0,74	0,74	0,82	0,80
Serdang Bedagai	1218	0,94	0,97	0,95	0,93	0,87	0,90	0,76	0,88	0,86	0,83	0,91	0,87	0,90	0,89	0,89	0,88
Batu Bara	1219	0,99	0,97	0,98	0,81	0,91	0,86	0,73	0,97	0,87	0,86	0,92	0,89	0,90	0,89	0,86	0,84
Padang Lawas Utara	1220	0,35	0,76	0,55	0,66	0,78	0,72	0,42	0,71	0,40	0,51	0,57	0,55	0,59	0,58	0,63	0,62
Padang Lawas	1221	0,53	0,90	0,72	0,83	0,75	0,79	0,33	0,88	0,44	0,55	0,68	0,64	0,68	0,67	0,73	0,71
Labuhan Batu Selatan	1222	0,93	0,91	0,92	0,88	0,88	0,88	0,42	0,80	0,51	0,58	0,81	0,80	0,79	0,77	0,76	0,75
Labuhan Batu Utara	1223	0,91	0,91	0,91	0,75	0,71	0,73	0,63	0,74	0,61	0,66	0,80	0,78	0,77	0,76	0,77	0,75
Nias Utara	1224	0,32	0,92	0,62	0,14	0,47	0,31	0,10	0,36	0,46	0,31	0,46	0,41	0,41	0,40	0,40	0,32
Nias Barat	1225	0,30	0,95	0,63	0,22	0,57	0,39	0,20	0,50	0,44	0,38	0,51	0,46	0,47	0,45	0,48	0,40
Sibolga	1271	1,00	1,00	1,00	1,00	0,84	0,92	0,75	1,00	0,98	0,91	0,96	0,96	0,94	0,94	0,94	0,93
Tanjung Balai	1272	1,00	1,00	1,00	0,79	0,90	0,84	0,92	0,98	1,00	0,97	0,96	0,96	0,94	0,94	0,92	0,90
Pematang Siantar	1273	0,96	1,00	0,98	0,98	0,84	0,91	1,00	0,99	0,97	0,98	0,97	0,97	0,96	0,96	0,99	0,99
Tebing Tinggi	1274	1,00	1,00	1,00	1,00	0,94	0,97	0,92	1,00	0,99	0,97	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98
Medan	1275	1,00	1,00	1,00	0,98	0,87	0,92	0,79	1,00	0,98	0,92	0,96	0,96	0,95	0,95	0,94	0,93
Binjai	1276	0,98	1,00	0,99	0,97	0,87	0,92	1,00	1,00	0,99	1,00	0,98	0,98	0,97	0,97	0,99	0,99
Padangsidempuan	1277	0,89	0,99	0,94	0,99	0,81	0,90	0,85	1,00	0,83	0,89	0,92	0,90	0,91	0,91	0,95	0,95
Gunungsitoli	1278	0,63	0,94	0,78	0,52	0,67	0,59	0,20	0,76	0,55	0,50	0,66	0,63	0,63	0,61	0,60	0,55
Sumatera Barat		0,99	0,98	0,98	0,89	0,83	0,86	0,65	0,93	0,77	0,78	0,90	0,89	0,88	0,87	0,86	0,85
Kepulauan Mentawai	1301	0,87	0,45	0,66	0,28	0,82	0,55	0,21	0,50	0,39	0,37	0,55	0,54	0,53	0,51	0,35	0,33
Pesisir Selatan	1302	1,00	1,00	1,00	0,94	0,82	0,88	0,52	0,85	0,65	0,67	0,88	0,87	0,85	0,83	0,84	0,82
Solok	1303	0,98	0,99	0,99	0,90	0,82	0,86	0,84	0,90	0,69	0,74	0,89	0,88	0,86	0,85	0,86	0,85
Sijunjung	1304	0,99	0,95	0,97	0,85	0,87	0,86	0,56	0,96	0,73	0,75	0,88	0,87	0,86	0,85	0,82	0,80
Tanah Datar	1305	1,00	0,99	1,00	0,96	0,82	0,89	0,76	0,99	0,85	0,87	0,94	0,93	0,92	0,91	0,93	0,92
Padang Pariaman	1306	0,99	1,00	1,00	0,84	0,83	0,83	0,63	0,95	0,68	0,75	0,89	0,88	0,86	0,85	0,85	0,83
Agam	1307	0,99	0,99	0,99	0,91	0,82	0,87	0,81	0,96	0,78	0,85	0,92	0,92	0,90	0,90	0,92	0,91
Lima Puluh Kota	1308	0,99	0,96	0,98	0,95	0,83	0,89	0,73	0,98	0,80	0,84	0,92	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90
Pasaman	1309	0,97	0,99	0,98	0,82	0,85	0,84	0,68	0,86	0,77	0,77	0,89	0,88	0,86	0,85	0,84	0,82
Solok Selatan	1310	0,98	1,00	0,99	0,86	0,84	0,85	0,45	0,89	0,63	0,66	0,86	0,86	0,83	0,81	0,80	0,78
Dharmasraya	1311	0,99	0,89	0,94	0,96	0,85	0,91	0,66	0,95	0,91	0,84	0,90	0,87	0,89	0,89	0,86	0,86

Kabupaten	Kode BPS	KETERSEDIAAN FISIK			KUALIFIKASI GURU				KARAKTERISTIK FASILITAS				Indeks-Indeks Komposit				
		PAUD	SMP (6)	Sub Indeks	SD S1	SMP S1	Sub Indeks	Lab SMP	Listrik	Air	Sub Indeks	Akses	SMP 3 km	Setara D,	PCA	OLS	CI
Pasaman Barat	1312	0,99	1,00	0,99	0,79	0,86	0,82	0,42	0,87	0,77	0,69	0,87	0,87	0,83	0,82	0,77	0,74
Padang	1371	0,99	1,00	1,00	0,95	0,79	0,87	0,81	1,00	0,91	0,91	0,94	0,94	0,93	0,93	0,94	0,93
Solok	1372	1,00	1,00	1,00	0,98	0,85	0,91	1,00	0,98	0,96	0,98	0,98	0,98	0,96	0,97	0,99	0,99
Sawah Lunto	1373	1,00	0,95	0,98	1,00	0,92	0,96	0,80	1,00	1,00	0,93	0,96	0,94	0,96	0,96	0,93	0,94
Padang Panjang	1374	1,00	1,00	1,00	1,00	0,85	0,92	1,00	1,00	1,00	1,00	0,98	0,98	0,97	0,98	1,00	1,00
Bukittinggi	1375	0,95	1,00	0,98	1,00	0,87	0,94	0,80	1,00	1,00	0,93	0,96	0,96	0,95	0,95	0,95	0,94
Payakumbuh	1376	0,99	1,00	1,00	1,00	0,81	0,90	1,00	1,00	1,00	1,00	0,98	0,97	0,97	0,97	1,00	1,00
Pariaman	1377	0,95	0,99	0,97	0,99	0,82	0,91	0,92	1,00	0,75	0,89	0,93	0,90	0,92	0,92	0,97	0,97
Riau		0,92	0,95	0,94	0,80	0,73	0,76	0,59	0,72	0,79	0,70	0,83	0,82	0,80	0,79	0,78	0,76
Kuantan Singingi	1401	0,91	0,96	0,94	0,87	0,75	0,81	0,74	0,87	0,86	0,82	0,88	0,86	0,86	0,85	0,86	0,85
Indragiri Hulu	1402	0,80	0,86	0,83	0,81	0,77	0,79	0,75	0,67	0,70	0,71	0,79	0,76	0,78	0,77	0,79	0,78
Indragiri Hilir	1403	0,73	0,96	0,84	0,60	0,61	0,61	0,46	0,34	0,65	0,48	0,69	0,68	0,64	0,62	0,63	0,59
Pelalawan	1404	0,85	0,88	0,86	0,70	0,77	0,73	0,48	0,69	0,79	0,65	0,77	0,76	0,75	0,74	0,69	0,67
Siak	1405	0,99	0,95	0,97	0,92	0,82	0,87	0,89	0,90	0,86	0,81	0,90	0,89	0,88	0,88	0,86	0,86
Kampar	1406	0,96	0,93	0,95	0,92	0,80	0,86	0,65	0,83	0,81	0,77	0,88	0,86	0,86	0,85	0,84	0,83
Rokan Hulu	1407	1,00	0,94	0,97	0,68	0,69	0,69	0,43	0,67	0,78	0,63	0,81	0,79	0,76	0,75	0,69	0,66
Bengkalis	1408	0,99	0,98	0,99	0,86	0,74	0,80	0,58	0,79	0,85	0,74	0,88	0,87	0,84	0,83	0,81	0,80
Rokan Hilir	1409	0,94	0,97	0,95	0,75	0,70	0,73	0,47	0,74	0,74	0,65	0,82	0,81	0,78	0,76	0,74	0,72
Kepulauan Meranti	1410	0,88	0,95	0,92	0,75	0,55	0,65	0,49	0,62	0,74	0,62	0,77	0,76	0,73	0,72	0,72	0,70
Pekanbaru	1471	0,99	1,00	1,00	0,99	0,79	0,89	0,85	0,99	0,97	0,94	0,96	0,95	0,94	0,94	0,96	0,96
Dumai	1473	0,99	0,99	0,99	0,94	0,74	0,84	0,63	0,94	0,96	0,84	0,92	0,91	0,89	0,89	0,88	0,86
Jambi		0,93	0,96	0,94	0,76	0,78	0,77	0,61	0,74	0,73	0,69	0,83	0,82	0,80	0,79	0,78	0,75
Kerinci	1501	0,89	0,98	0,93	0,80	0,74	0,77	0,67	0,89	0,70	0,75	0,85	0,83	0,82	0,81	0,83	0,81
Merangin	1502	0,85	0,90	0,87	0,62	0,67	0,65	0,57	0,75	0,60	0,64	0,76	0,73	0,72	0,71	0,71	0,68
Sarolangun	1503	0,96	0,97	0,97	0,58	0,77	0,67	0,48	0,61	0,67	0,59	0,80	0,76	0,74	0,72	0,68	0,64
Batang Hari	1504	0,91	0,96	0,94	0,88	0,77	0,83	0,60	0,70	0,76	0,69	0,84	0,81	0,82	0,80	0,80	0,79
Muaro Jambi	1505	0,91	0,96	0,93	0,87	0,85	0,86	0,57	0,88	0,78	0,74	0,86	0,83	0,85	0,84	0,82	0,80
Tanjung Jabung Timur	1506	0,99	0,90	0,95	0,83	0,84	0,84	0,53	0,54	0,80	0,62	0,83	0,81	0,80	0,78	0,73	0,71
Tanjung Jabung Barat	1507	0,92	0,96	0,94	0,72	0,75	0,74	0,43	0,43	0,71	0,52	0,77	0,77	0,73	0,71	0,67	0,64
Tebo	1508	0,93	0,94	0,93	0,76	0,79	0,77	0,70	0,79	0,75	0,75	0,85	0,82	0,82	0,81	0,80	0,78
Bungo	1509	0,89	0,95	0,92	0,64	0,85	0,74	0,63	0,74	0,68	0,68	0,81	0,80	0,78	0,77	0,75	0,71
Jambi	1571	0,99	1,00	1,00	0,96	0,83	0,90	1,00	0,99	0,97	0,98	0,97	0,97	0,96	0,96	0,99	0,98
Sungai Penuh	1572	0,95	0,99	0,97	0,91	0,71	0,81	1,00	0,98	0,65	0,88	0,91	0,90	0,89	0,88	0,97	0,96
Sumatera Selatan		0,82	0,92	0,87	0,71	0,78	0,75	0,63	0,75	0,82	0,73	0,80	0,78	0,78	0,78	0,76	0,74
Ogan Komering Ulu	1601	0,79	0,93	0,86	0,95	0,85	0,90	0,62	0,86	0,84	0,78	0,84	0,82	0,85	0,84	0,85	0,84
Ogan Komering Ilir	1602	0,73	0,89	0,81	0,69	0,67	0,68	0,50	0,73	0,83	0,69	0,75	0,72	0,73	0,72	0,71	0,68
Muara Enim	1603	0,72	0,86	0,79	0,74	0,83	0,79	0,62	0,86	0,81	0,76	0,78	0,75	0,78	0,78	0,76	0,75

Kabupaten	Kode BPS	KETERSEDIAAN FISIK			KUALIFIKASI GURU				KARAKTERISTIK FASILITAS				Indeks-Indeks Komposit				
		PAUD	SMP (6)	Sub Indeks	SD S1	SMP S1	Sub Indeks	Lab SMP	Listrik	Air	Sub Indeks	Akses	SMP 3 km	Setara D,	PCA	OLS	CI
Lahat	1604	0,72	0,95	0,84	0,62	0,82	0,72	0,49	0,81	0,75	0,68	0,77	0,73	0,75	0,74	0,72	0,68
Musi Rawas	1605	0,79	0,90	0,84	0,59	0,75	0,67	0,58	0,65	0,82	0,68	0,76	0,72	0,73	0,73	0,69	0,66
Musi Banyuasin	1606	0,78	0,82	0,80	0,66	0,80	0,73	0,71	0,73	0,88	0,77	0,78	0,74	0,77	0,77	0,73	0,71
Banyu Asin	1607	0,72	0,87	0,80	0,70	0,80	0,75	0,57	0,60	0,87	0,68	0,75	0,71	0,74	0,73	0,70	0,68
Ogan Komerang Ulu Selatan	1608	0,64	0,89	0,77	0,47	0,62	0,54	0,47	0,50	0,63	0,53	0,65	0,61	0,61	0,60	0,60	0,56
Ogan Komerang Ulu Timur	1609	0,92	0,93	0,93	0,72	0,83	0,77	0,83	0,75	0,82	0,80	0,86	0,81	0,83	0,83	0,82	0,80
Ogan Ilir	1610	0,95	0,98	0,97	0,77	0,80	0,78	0,48	0,67	0,81	0,65	0,84	0,81	0,80	0,78	0,74	0,71
Empat Lawang	1611	0,52	0,95	0,73	0,46	0,67	0,56	0,66	0,70	0,61	0,66	0,68	0,65	0,65	0,65	0,70	0,65
Palembang	1671	0,99	1,00	0,99	0,99	0,82	0,90	0,98	0,98	0,97	0,98	0,97	0,97	0,96	0,96	0,99	0,99
Prabumulih	1672	1,00	0,96	0,98	0,99	0,95	0,97	0,92	0,99	0,92	0,94	0,97	0,95	0,96	0,96	0,96	0,96
Pagar Alam	1673	0,89	0,92	0,90	0,96	0,92	0,94	1,00	0,91	0,79	0,90	0,91	0,88	0,92	0,91	0,95	0,96
Lubuklinggau	1674	0,91	0,99	0,95	0,97	0,92	0,95	0,93	0,94	0,97	0,95	0,95	0,93	0,95	0,95	0,96	0,96
Bengkulu		0,82	0,95	0,88	0,86	0,80	0,83	0,56	0,79	0,70	0,69	0,81	0,78	0,80	0,79	0,80	0,78
Bengkulu Selatan	1701	0,93	0,97	0,95	0,94	0,81	0,87	0,61	0,82	0,75	0,73	0,87	0,83	0,85	0,84	0,84	0,84
Rejang Lebong	1702	0,70	0,98	0,84	0,84	0,82	0,83	0,59	0,89	0,76	0,75	0,81	0,80	0,81	0,80	0,83	0,81
Bengkulu Utara	1703	0,84	0,92	0,88	0,83	0,73	0,78	0,54	0,70	0,70	0,65	0,79	0,75	0,77	0,76	0,76	0,75
Kaur	1704	0,82	0,95	0,88	0,77	0,74	0,75	0,53	0,63	0,57	0,58	0,77	0,74	0,74	0,72	0,74	0,72
Seluma	1705	0,72	0,94	0,83	0,89	0,77	0,83	0,43	0,70	0,66	0,60	0,76	0,71	0,75	0,74	0,76	0,74
Mukomuko	1706	0,87	0,92	0,90	0,89	0,86	0,88	0,52	0,82	0,67	0,67	0,83	0,78	0,82	0,80	0,79	0,78
Lebong	1707	0,62	0,98	0,80	0,75	0,85	0,80	0,56	0,86	0,68	0,70	0,77	0,75	0,77	0,76	0,79	0,76
Kepahiang	1708	0,76	0,94	0,85	0,85	0,83	0,84	0,61	0,93	0,72	0,75	0,82	0,79	0,82	0,81	0,83	0,81
Bengkulu Tengah	1709	0,69	0,89	0,79	0,86	0,86	0,86	0,42	0,73	0,58	0,58	0,74	0,70	0,74	0,72	0,73	0,72
Bengkulu	1771	1,00	1,00	1,00	0,98	0,82	0,90	0,93	0,98	0,99	0,97	0,97	0,96	0,95	0,96	0,97	0,97
Lampung		0,93	0,97	0,95	0,81	0,72	0,77	0,67	0,79	0,81	0,76	0,85	0,83	0,82	0,82	0,82	0,80
Lampung Barat	1801	0,73	0,93	0,83	0,70	0,67	0,69	0,48	0,68	0,68	0,61	0,74	0,71	0,71	0,70	0,71	0,68
Tanggamus	1802	0,81	0,94	0,88	0,71	0,64	0,68	0,60	0,69	0,71	0,67	0,78	0,75	0,74	0,73	0,75	0,73
Lampung Selatan	1803	0,93	0,98	0,96	0,87	0,77	0,82	0,69	0,93	0,89	0,84	0,89	0,88	0,87	0,87	0,87	0,85
Lampung Timur	1804	1,00	0,98	0,99	0,93	0,82	0,87	0,77	0,92	0,94	0,87	0,93	0,91	0,91	0,91	0,90	0,89
Lampung Tengah	1805	0,98	0,98	0,98	0,81	0,76	0,78	0,77	0,95	0,94	0,89	0,91	0,89	0,88	0,89	0,87	0,85
Lampung Utara	1806	0,82	0,94	0,88	0,71	0,70	0,70	0,68	0,66	0,68	0,67	0,78	0,74	0,75	0,74	0,76	0,74
Way Kanan	1807	0,88	0,90	0,89	0,82	0,83	0,82	0,84	0,62	0,73	0,73	0,83	0,79	0,82	0,80	0,82	0,81
Tulangbawang	1808	0,92	0,94	0,93	0,82	0,61	0,71	0,40	0,59	0,67	0,56	0,77	0,75	0,73	0,71	0,71	0,69
Pesawaran	1809	0,91	0,97	0,94	0,82	0,68	0,75	0,56	0,73	0,63	0,64	0,81	0,80	0,78	0,76	0,78	0,76
Pringsewu	1810	0,97	0,98	0,98	0,80	0,76	0,78	0,88	0,89	0,90	0,89	0,91	0,90	0,88	0,89	0,89	0,87
Mesuji	1811	0,95	0,95	0,95	0,72	0,54	0,63	0,37	0,35	0,70	0,47	0,74	0,72	0,69	0,66	0,64	0,61

Kabupaten	Kode BPS	KETERSEDIAAN FISIK			KUALIFIKASI GURU				KARAKTERISTIK FASILITAS				Indeks-Indeks Komposit				
		PAUD	SMP (6)	Sub Indeks	SD S1	SMP S1	Sub Indeks	Lab SMP	Listrik	Air	Sub Indeks	Akses	SMP 3 km	Setara D,	PCA	OLS	CI
Tulang Bawang Barat	1812	1,00	0,98	0,99	0,74	0,68	0,71	0,70	0,74	0,74	0,73	0,86	0,84	0,81	0,80	0,80	0,78
Bandar Lampung	1871	1,00	1,00	1,00	0,98	0,80	0,89	0,97	1,00	0,96	0,98	0,97	0,97	0,96	0,96	0,99	0,99
Metro	1872	1,00	1,00	1,00	0,98	0,81	0,90	1,00	1,00	0,97	0,99	0,98	0,97	0,96	0,97	0,99	0,99
Kepulauan Bangka Belitung		0,94	0,92	0,93	0,73	0,81	0,77	0,72	0,95	0,94	0,87	0,88	0,85	0,86	0,86	0,82	0,80
Bangka	1901	1,00	0,94	0,97	0,65	0,75	0,70	0,83	0,96	0,94	0,91	0,90	0,85	0,86	0,87	0,83	0,80
Belitung	1902	0,94	0,91	0,93	0,68	0,83	0,76	0,77	0,94	0,97	0,89	0,88	0,87	0,86	0,86	0,82	0,79
Bangka Barat	1903	0,81	0,90	0,86	0,77	0,83	0,80	0,69	0,92	0,92	0,84	0,84	0,81	0,83	0,84	0,82	0,80
Bangka Tengah	1904	0,94	0,87	0,91	0,71	0,86	0,78	0,79	0,95	0,91	0,88	0,88	0,83	0,86	0,86	0,82	0,80
Bangka Selatan	1905	0,88	0,86	0,87	0,88	0,83	0,86	0,44	0,95	0,92	0,77	0,84	0,81	0,83	0,83	0,77	0,77
Belitung Timur	1906	0,97	0,88	0,93	0,75	0,82	0,78	0,71	0,97	0,96	0,88	0,88	0,84	0,86	0,87	0,81	0,80
Pangkal Pinang	1971	0,99	1,00	0,99	0,76	0,77	0,77	1,00	0,99	0,98	0,99	0,95	0,95	0,92	0,93	0,93	0,91
Kepulauan Riau		0,96	0,98	0,97	0,72	0,74	0,73	0,56	0,92	0,87	0,78	0,87	0,85	0,83	0,83	0,79	0,76
Karimun	2101	0,93	1,00	0,97	0,84	0,66	0,75	0,57	0,91	0,95	0,81	0,88	0,85	0,84	0,85	0,83	0,81
Bintan	2102	0,98	0,94	0,96	0,81	0,83	0,82	0,50	0,85	0,83	0,72	0,86	0,84	0,84	0,83	0,77	0,75
Natuna	2103	0,95	0,90	0,93	0,59	0,84	0,62	0,59	0,94	0,82	0,78	0,82	0,80	0,78	0,78	0,74	0,71
Lingga	2104	0,81	0,91	0,86	0,54	0,67	0,61	0,36	0,78	0,73	0,63	0,74	0,70	0,70	0,69	0,65	0,60
Kepulauan Anambas	2105	0,81	0,91	0,86	0,41	0,81	0,61	0,33	0,97	0,74	0,68	0,76	0,74	0,72	0,72	0,63	0,58
Batam	2171	0,98	1,00	0,99	0,87	0,86	0,87	0,69	1,00	0,95	0,88	0,93	0,92	0,91	0,91	0,88	0,87
Tanjung Pinang	2172	1,00	1,00	1,00	0,92	0,68	0,80	0,87	1,00	0,99	0,95	0,95	0,95	0,92	0,93	0,94	0,93
DKI Jakarta		1,00	1,00	1,00	1,00	0,90	0,95	0,96	1,00	0,99	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,99	0,99
Kepulauan Seribu	3101	1,00	1,00	1,00	1,00	0,86	0,93	0,80	1,00	0,83	0,88	0,95	0,95	0,94	0,93	0,95	0,94
Jakarta Selatan	3171	1,00	1,00	1,00	1,00	0,89	0,94	0,96	1,00	0,99	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,99	0,99
Jakarta Timur	3172	1,00	1,00	1,00	1,00	0,88	0,94	0,95	1,00	1,00	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,99	0,99
Jakarta Pusat	3173	1,00	1,00	1,00	1,00	0,90	0,95	0,95	1,00	0,95	0,97	0,98	0,98	0,97	0,97	0,99	0,99
Jakarta Barat	3174	1,00	0,99	0,99	1,00	0,92	0,96	0,98	1,00	1,00	0,99	0,99	0,99	0,98	0,98	0,99	0,99
Jakarta Utara	3175	1,00	1,00	1,00	1,00	0,92	0,96	1,00	1,00	1,00	1,00	0,99	0,99	0,99	0,99	1,00	1,00
Jawa Barat		0,98	0,98	0,98	0,96	0,86	0,91	0,76	0,98	0,84	0,86	0,93	0,92	0,92	0,91	0,92	0,91
Bogor	3201	0,97	0,99	0,98	0,90	0,85	0,88	0,79	0,97	0,83	0,86	0,92	0,91	0,91	0,90	0,91	0,90
Sukabumi	3202	1,00	0,99	0,99	0,96	0,81	0,89	0,63	0,95	0,77	0,78	0,91	0,89	0,89	0,88	0,88	0,87
Cianjur	3203	0,93	0,90	0,92	0,91	0,83	0,87	0,73	0,97	0,75	0,82	0,88	0,85	0,87	0,86	0,87	0,87
Bandung	3204	0,99	0,99	0,99	0,99	0,88	0,93	0,77	0,98	0,82	0,85	0,94	0,93	0,93	0,92	0,93	0,93
Garut	3205	0,99	0,98	0,99	0,95	0,85	0,90	0,73	0,94	0,73	0,80	0,91	0,90	0,90	0,89	0,90	0,90
Tasikmalaya	3206	0,99	0,98	0,98	0,98	0,83	0,91	0,60	0,99	0,79	0,79	0,91	0,90	0,89	0,89	0,88	0,88
Ciamis	3207	0,99	0,97	0,98	0,97	0,87	0,92	0,82	1,00	0,86	0,89	0,94	0,92	0,93	0,93	0,94	0,93
Kuningan	3208	0,96	0,98	0,97	0,97	0,89	0,93	0,76	0,99	0,91	0,88	0,94	0,92	0,93	0,93	0,92	0,92
Cirebon	3209	0,94	0,99	0,97	0,98	0,91	0,95	0,86	1,00	0,86	0,90	0,94	0,93	0,94	0,94	0,95	0,95
Majalengka	3210	0,98	0,99	0,98	0,99	0,93	0,96	0,81	0,99	0,78	0,86	0,94	0,92	0,93	0,93	0,94	0,94

Kabupaten	Kode BPS	KETERSEDIAAN FISIK			KUALIFIKASI GURU				KARAKTERISTIK FASILITAS				Indeks-Indeks Komposit				
		PAUD	SMP (6)	Sub Indeks	SD S1	SMP S1	Sub Indeks	Lab SMP	Listrik	Air	Sub Indeks	Akses	SMP 3 km	Setara D,	PCA	OLS	CI
Sumedang	3211	0,97	0,95	0,96	0,97	0,90	0,93	0,87	0,99	0,94	0,93	0,95	0,92	0,94	0,94	0,94	0,94
Indramayu	3212	1,00	0,98	0,99	0,95	0,87	0,91	0,78	1,00	0,91	0,90	0,95	0,92	0,93	0,93	0,93	0,92
Subang	3213	1,00	0,98	0,99	0,95	0,88	0,91	0,87	0,99	0,88	0,91	0,95	0,92	0,94	0,94	0,95	0,94
Purwakarta	3214	0,97	0,99	0,98	0,96	0,75	0,86	0,52	0,99	0,87	0,79	0,90	0,88	0,88	0,87	0,86	0,85
Karawang	3215	0,97	0,97	0,97	0,92	0,85	0,88	0,77	0,99	0,77	0,84	0,92	0,89	0,90	0,90	0,91	0,90
Bekasi	3216	1,00	0,98	0,99	0,95	0,89	0,92	0,74	1,00	0,93	0,89	0,95	0,94	0,93	0,93	0,91	0,90
Bandung Barat	3217	0,99	1,00	0,99	0,97	0,80	0,89	0,59	0,98	0,80	0,79	0,91	0,90	0,89	0,88	0,88	0,87
Bogor	3271	1,00	0,98	0,99	0,99	0,90	0,94	1,00	0,99	0,98	0,99	0,98	0,98	0,97	0,98	0,99	0,99
Sukabumi	3272	1,00	1,00	1,00	1,00	0,88	0,94	0,88	1,00	0,97	0,95	0,97	0,97	0,96	0,96	0,97	0,97
Bandung	3273	1,00	1,00	1,00	0,97	0,88	0,93	1,00	1,00	0,98	0,99	0,98	0,98	0,97	0,98	0,99	0,99
Cirebon	3274	1,00	1,00	1,00	0,99	0,91	0,95	0,92	1,00	0,96	0,96	0,98	0,98	0,97	0,97	0,98	0,97
Bekasi	3275	1,00	1,00	1,00	1,00	0,93	0,96	0,88	1,00	0,98	0,95	0,98	0,98	0,97	0,97	0,97	0,97
Depok	3276	1,00	1,00	1,00	1,00	0,88	0,94	0,83	1,00	1,00	0,94	0,97	0,97	0,96	0,96	0,96	0,95
Cimahi	3277	1,00	1,00	1,00	1,00	0,91	0,96	0,92	1,00	0,98	0,96	0,98	0,98	0,97	0,97	0,98	0,98
Tasikmalaya	3278	1,00	1,00	1,00	1,00	0,91	0,95	0,92	1,00	0,99	0,97	0,98	0,98	0,97	0,98	0,98	0,98
Banjar	3279	1,00	1,00	1,00	0,99	0,91	0,95	0,83	1,00	1,00	0,94	0,97	0,97	0,96	0,96	0,95	0,95
Jawa Tengah		0,99	0,98	0,99	0,94	0,91	0,93	0,86	1,00	0,96	0,94	0,96	0,94	0,95	0,95	0,94	0,94
Cilacap	3301	0,99	0,97	0,98	0,94	0,91	0,93	0,79	0,99	0,95	0,91	0,95	0,93	0,94	0,94	0,92	0,92
Banyumas	3302	1,00	0,99	0,99	0,99	0,94	0,96	0,88	1,00	0,97	0,95	0,97	0,95	0,97	0,97	0,96	0,96
Purbalingga	3303	1,00	0,99	1,00	0,96	0,92	0,94	0,90	1,00	0,97	0,96	0,97	0,95	0,96	0,96	0,96	0,96
Banjarnegara	3304	0,99	0,99	0,99	0,93	0,93	0,93	0,77	0,98	0,95	0,90	0,95	0,92	0,94	0,94	0,91	0,91
Kebumen	3305	1,00	0,97	0,99	0,83	0,88	0,85	0,88	1,00	0,98	0,95	0,95	0,92	0,93	0,94	0,91	0,90
Purworejo	3306	0,95	0,94	0,94	0,87	0,87	0,87	0,93	1,00	0,96	0,97	0,94	0,89	0,93	0,93	0,93	0,92
Wonosobo	3307	1,00	0,98	0,99	0,83	0,91	0,87	0,70	1,00	0,91	0,87	0,93	0,90	0,91	0,91	0,87	0,85
Magelang	3308	0,99	0,99	0,99	0,90	0,89	0,89	0,84	1,00	0,98	0,94	0,96	0,93	0,94	0,94	0,93	0,92
Boyolali	3309	1,00	0,97	0,99	0,98	0,88	0,93	0,85	0,99	0,98	0,94	0,96	0,93	0,95	0,95	0,95	0,94
Klaten	3310	1,00	0,91	0,95	0,94	0,89	0,91	0,88	1,00	0,97	0,95	0,94	0,91	0,94	0,94	0,92	0,93
Sukoharjo	3311	1,00	1,00	1,00	0,99	0,89	0,94	0,91	1,00	0,99	0,97	0,98	0,95	0,97	0,97	0,97	0,97
Wonogiri	3312	1,00	0,95	0,97	0,96	0,92	0,94	0,90	0,99	0,97	0,96	0,96	0,92	0,96	0,96	0,95	0,95
Karanganyar	3313	1,00	0,98	0,99	0,99	0,93	0,96	0,95	1,00	0,99	0,98	0,98	0,94	0,98	0,98	0,98	0,98
Sragen	3314	1,00	0,99	0,99	0,97	0,92	0,94	0,91	1,00	0,98	0,96	0,97	0,93	0,97	0,97	0,96	0,96
Grobogan	3315	1,00	0,99	1,00	0,95	0,93	0,94	0,71	1,00	0,93	0,88	0,95	0,93	0,94	0,94	0,91	0,90
Blora	3316	0,99	0,95	0,97	0,97	0,93	0,95	0,86	1,00	0,91	0,92	0,95	0,92	0,95	0,95	0,94	0,94
Rembang	3317	0,99	0,96	0,98	0,98	0,95	0,97	0,84	1,00	0,96	0,94	0,96	0,92	0,96	0,96	0,94	0,94
Pati	3318	0,99	0,97	0,98	0,97	0,93	0,95	0,96	1,00	0,96	0,97	0,97	0,94	0,97	0,97	0,97	0,97

Kabupaten	Kode BPS	KETERSEDIAAN FISIK			KUALIFIKASI GURU			KARAKTERISTIK FASILITAS				Indeks-Indeks Komposit					
		PAUD	SMP (6)	Sub Indeks	SD S1	SMP S1	Sub Indeks	Lab SMP	Listrik	Air	Sub Indeks	Akses	SMP 3 km	Setara D _i	PCA	OLS	CI
Kudus	3319	1,00	0,99	0,99	0,98	0,91	0,94	0,93	1,00	0,98	0,97	0,98	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97
	3320	0,99	1,00	0,99	0,96	0,91	0,94	0,85	0,98	0,96	0,93	0,96	0,96	0,95	0,95	0,95	0,94
Demak	3321	1,00	0,99	0,99	0,97	0,94	0,95	0,90	1,00	0,97	0,96	0,97	0,96	0,97	0,97	0,97	0,96
	3322	1,00	0,99	0,99	0,96	0,91	0,94	0,90	1,00	0,99	0,96	0,97	0,95	0,96	0,97	0,96	0,95
Semarang	3323	1,00	1,00	1,00	0,92	0,91	0,91	0,91	1,00	0,99	0,96	0,97	0,93	0,96	0,96	0,95	0,94
	3324	1,00	0,97	0,98	0,91	0,92	0,92	0,90	1,00	0,97	0,96	0,96	0,94	0,95	0,95	0,94	0,93
Batang	3325	1,00	0,97	0,98	0,89	0,89	0,89	0,94	1,00	0,96	0,97	0,96	0,93	0,95	0,95	0,94	0,94
	3326	0,98	0,97	0,98	0,85	0,93	0,89	0,71	0,97	0,88	0,86	0,92	0,90	0,91	0,90	0,87	0,85
Pekalongan	3327	1,00	0,98	0,99	0,86	0,90	0,88	0,88	1,00	0,93	0,94	0,95	0,94	0,94	0,94	0,93	0,91
	3328	0,92	0,98	0,95	0,97	0,90	0,94	0,90	0,99	0,92	0,94	0,94	0,93	0,94	0,94	0,96	0,96
Brebes	3329	0,98	0,99	0,99	0,97	0,92	0,94	0,81	0,99	0,88	0,90	0,95	0,93	0,94	0,94	0,94	0,93
	3371	1,00	1,00	1,00	1,00	0,92	0,96	1,00	1,00	1,00	1,00	0,99	0,98	0,99	1,00	1,00	1,00
Magelang	3372	1,00	1,00	1,00	1,00	0,89	0,95	0,97	1,00	0,99	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,99	0,99
	3373	1,00	1,00	1,00	1,00	0,85	0,93	1,00	1,00	1,00	1,00	0,99	0,99	0,98	0,98	1,00	1,00
Salatiga	3374	1,00	1,00	1,00	1,00	0,91	0,96	0,91	1,00	1,00	0,97	0,98	0,98	0,97	0,98	0,98	0,97
	3375	1,00	1,00	1,00	1,00	0,92	0,96	1,00	1,00	0,99	1,00	0,99	0,99	0,99	0,99	1,00	1,00
Pekalongan	3376	1,00	1,00	1,00	1,00	0,93	0,96	1,00	1,00	1,00	1,00	0,99	0,99	0,99	0,99	1,00	1,00
DI Yogyakarta		1,00	1,00	1,00	0,99	0,86	0,92	0,97	1,00	0,99	0,99	0,98	0,97	0,97	0,97	0,99	0,99
Kulon Progo	3401	1,00	1,00	1,00	0,98	0,83	0,91	1,00	1,00	1,00	1,00	0,98	0,98	0,97	0,97	0,99	0,99
	3402	1,00	1,00	1,00	1,00	0,87	0,94	1,00	1,00	0,99	1,00	0,99	0,99	0,98	0,98	1,00	1,00
Bantul	3403	1,00	0,99	0,99	0,98	0,88	0,93	0,90	1,00	0,98	0,96	0,97	0,95	0,96	0,96	0,96	0,96
	3404	1,00	1,00	1,00	1,00	0,84	0,92	1,00	1,00	0,99	1,00	0,98	0,98	0,97	0,98	1,00	1,00
Sleman	3471	1,00	0,98	0,99	1,00	0,86	0,93	1,00	1,00	1,00	1,00	0,98	0,98	0,97	0,98	0,99	1,00
Jawa Timur		0,99	0,98	0,98	0,98	0,93	0,96	0,82	0,97	0,87	0,89	0,95	0,93	0,94	0,94	0,94	0,93
Pacitan	3501	1,00	0,97	0,99	1,00	0,97	0,98	0,84	0,99	0,94	0,92	0,97	0,93	0,96	0,96	0,95	0,95
	3502	1,00	1,00	1,00	0,99	0,92	0,95	0,89	1,00	0,95	0,94	0,97	0,95	0,97	0,96	0,97	0,96
Ponorogo	3503	1,00	0,98	0,99	1,00	0,96	0,98	0,80	0,99	0,83	0,87	0,95	0,92	0,95	0,94	0,94	0,94
	3504	1,00	0,98	0,99	1,00	0,93	0,96	0,90	0,99	0,94	0,94	0,97	0,93	0,96	0,96	0,96	0,96
Tulungagung	3505	1,00	0,97	0,98	0,97	0,93	0,95	0,89	1,00	0,94	0,95	0,97	0,93	0,96	0,96	0,96	0,96
	3506	1,00	0,96	0,98	1,00	0,94	0,97	0,98	1,00	0,96	0,98	0,98	0,95	0,98	0,98	0,98	0,99
Kediri	3507	1,00	0,99	0,99	1,00	0,92	0,96	0,74	0,99	0,94	0,89	0,96	0,95	0,95	0,94	0,93	0,92
	3508	1,00	0,97	0,99	0,99	0,90	0,95	0,64	0,98	0,92	0,85	0,94	0,92	0,93	0,92	0,89	0,89
Lumajang	3509	1,00	0,98	0,99	0,98	0,90	0,94	0,75	0,97	0,85	0,86	0,94	0,93	0,93	0,92	0,92	0,91
	3510	1,00	1,00	1,00	1,00	0,95	0,97	0,76	0,98	0,84	0,86	0,95	0,93	0,94	0,94	0,93	0,93
Banyuwangi	3511	1,00	0,96	0,98	0,97	0,91	0,94	0,62	0,96	0,69	0,76	0,90	0,89	0,89	0,88	0,87	0,87
	3512	0,99	0,98	0,99	0,97	0,95	0,96	0,73	0,97	0,71	0,81	0,93	0,91	0,92	0,91	0,91	0,91
Situbondo	3513	0,99	0,98	0,99	0,97	0,87	0,92	0,65	0,93	0,72	0,77	0,91	0,89	0,89	0,88	0,88	0,88
	Probolinggo																

Kabupaten	Kode BPS	KETERSEDIAAN FISIK			KUALIFIKASI GURU				KARAKTERISTIK FASILITAS				Indeks-Indeks Komposit				
		PAUD	SMP (6)	Sub Indeks	SD S1	SMP S1	Sub Indeks	Lab SMP	Listrik	Air	Sub Indeks	Akses	SMP 3 km	Setara D,	PCA	OLS	CI
Pasuruan	3514	0,99	0,98	0,99	0,99	0,93	0,96	0,77	1,00	0,92	0,89	0,95	0,94	0,95	0,94	0,93	0,93
Sidoarjo	3515	1,00	0,99	1,00	1,00	0,94	0,97	0,92	1,00	0,97	0,96	0,98	0,97	0,98	0,98	0,98	0,98
Mojokerto	3516	1,00	0,99	0,99	1,00	0,96	0,98	0,95	1,00	0,97	0,97	0,99	0,97	0,98	0,98	0,98	0,99
Jombang	3517	1,00	0,98	0,99	1,00	0,97	0,98	0,88	1,00	0,95	0,94	0,97	0,96	0,97	0,97	0,96	0,96
Nganjuk	3518	1,00	0,99	0,99	1,00	0,94	0,97	0,93	0,99	0,96	0,96	0,98	0,95	0,97	0,97	0,98	0,98
Madiun	3519	1,00	0,97	0,98	1,00	0,95	0,97	0,92	1,00	0,92	0,95	0,97	0,94	0,97	0,97	0,97	0,97
Magetan	3520	1,00	0,99	1,00	1,00	0,93	0,96	0,94	1,00	0,96	0,97	0,98	0,95	0,98	0,98	0,98	0,98
Ngawi	3521	1,00	0,95	0,98	0,94	0,90	0,92	0,89	1,00	0,92	0,94	0,95	0,92	0,94	0,94	0,94	0,94
Bojonegoro	3522	1,00	0,97	0,98	0,99	0,95	0,97	0,82	0,97	0,83	0,87	0,95	0,91	0,94	0,93	0,93	0,93
Tuban	3523	1,00	0,96	0,98	1,00	0,96	0,98	0,83	1,00	0,89	0,91	0,96	0,92	0,95	0,95	0,94	0,94
Lamongan	3524	1,00	0,99	1,00	1,00	0,97	0,98	1,00	1,00	0,89	0,96	0,98	0,95	0,98	0,98	0,99	1,00
Gresik	3525	1,00	0,99	1,00	0,99	0,98	0,98	0,97	0,97	0,90	0,95	0,98	0,96	0,98	0,97	0,98	0,98
Bangkalan	3526	0,78	0,91	0,85	0,91	0,87	0,89	0,65	0,82	0,48	0,65	0,80	0,77	0,80	0,78	0,83	0,83
Sampang	3527	0,82	0,99	0,90	0,91	0,91	0,91	0,56	0,87	0,73	0,72	0,85	0,84	0,85	0,83	0,84	0,82
Pamekasan	3528	0,97	0,99	0,98	0,95	0,95	0,95	0,68	0,98	0,69	0,79	0,92	0,90	0,90	0,89	0,90	0,89
Sumenep	3529	0,97	0,93	0,95	0,85	0,95	0,90	0,78	0,75	0,54	0,69	0,86	0,83	0,85	0,83	0,84	0,83
Kediri	3571	1,00	1,00	1,00	1,00	0,96	0,98	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,99	0,99	0,99	1,00	1,00
Blitar	3572	1,00	1,00	1,00	1,00	0,94	0,97	0,80	1,00	0,99	0,93	0,97	0,97	0,97	0,96	0,95	0,94
Malang	3573	1,00	0,98	0,99	1,00	0,97	0,98	0,90	1,00	1,00	0,97	0,98	0,98	0,98	0,98	0,97	0,97
Probolinggo	3574	1,00	1,00	1,00	0,97	0,97	0,97	1,00	1,00	0,99	1,00	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99
Pasuruan	3575	1,00	1,00	1,00	1,00	0,96	0,98	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,99	1,00	1,00	1,00
Mojokerto	3576	1,00	1,00	1,00	1,00	0,96	0,98	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,99	0,99	1,00	1,00
Madiun	3577	1,00	1,00	1,00	1,00	0,98	0,99	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,99	1,00	1,00	1,00	1,00
Surabaya	3578	1,00	1,00	1,00	1,00	0,93	0,97	1,00	1,00	0,99	1,00	0,99	0,98	0,99	0,99	1,00	1,00
Batu	3579	1,00	1,00	1,00	1,00	0,97	0,98	0,63	1,00	1,00	0,88	0,96	0,96	0,95	0,95	0,90	0,90
Banten		0,93	0,99	0,96	0,96	0,79	0,87	0,54	0,98	0,76	0,76	0,88	0,87	0,86	0,86	0,86	0,85
Pandeglang	3601	0,85	0,98	0,92	0,93	0,68	0,80	0,47	0,96	0,52	0,65	0,81	0,79	0,79	0,78	0,83	0,82
Lebak	3602	0,72	0,96	0,84	0,92	0,75	0,84	0,32	0,96	0,72	0,67	0,79	0,77	0,78	0,77	0,78	0,77
Tangerang	3603	0,96	0,99	0,98	0,99	0,87	0,93	0,73	1,00	0,88	0,87	0,93	0,93	0,93	0,92	0,93	0,92
Serang	3604	0,94	0,98	0,96	0,97	0,80	0,88	0,56	0,98	0,75	0,76	0,89	0,87	0,87	0,86	0,87	0,86
Tangerang	3671	1,00	1,00	1,00	1,00	0,94	0,97	0,89	1,00	0,97	0,96	0,98	0,98	0,97	0,97	0,97	0,97
Cilegon	3672	1,00	1,00	1,00	0,98	0,93	0,96	0,93	0,99	0,98	0,97	0,98	0,98	0,97	0,97	0,97	0,97
Serang	3673	0,98	1,00	0,99	0,99	0,89	0,94	0,68	0,99	0,87	0,85	0,94	0,93	0,92	0,92	0,91	0,90
Tangerang Selatan	3674	1,00	1,00	1,00	0,99	0,96	0,98	1,00	1,00	0,97	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	1,00	1,00

Kabupaten	Kode BPS	KETERSEDIAAN FISIK			KUALIFIKASI GURU				KARAKTERISTIK FASILITAS				Indeks-Indeks Komposit				
		PAUD	SMP (6)	Sub Indeks	SD S1	SMP S1	Sub Indeks	Lab SMP	Listrik	Air	Sub Indeks	Akses	SMP 3 km	Setara D,	PCA	OLS	CI
Bali		0,99	0,97	0,98	0,99	0,89	0,94	0,81	1,00	0,96	0,92	0,95	0,93	0,95	0,95	0,94	0,94
Jembrana	5101	1,00	0,98	0,99	0,99	0,94	0,97	0,91	1,00	1,00	0,97	0,98	0,96	0,97	0,97	0,97	0,97
Tabanan	5102	1,00	0,98	0,99	1,00	0,91	0,96	0,86	1,00	0,99	0,95	0,97	0,93	0,97	0,97	0,96	0,96
Badung	5103	1,00	0,99	1,00	1,00	0,86	0,93	0,89	1,00	0,99	0,96	0,97	0,96	0,96	0,96	0,97	0,97
Gianyar	5104	1,00	1,00	1,00	0,99	0,85	0,92	0,90	1,00	0,98	0,96	0,97	0,95	0,96	0,96	0,97	0,97
Klungkung	5105	0,99	1,00	1,00	0,99	0,94	0,97	0,70	0,98	0,81	0,83	0,94	0,93	0,93	0,92	0,92	0,91
Bangli	5106	0,89	0,92	0,90	0,99	0,92	0,95	0,70	1,00	0,93	0,88	0,91	0,88	0,91	0,91	0,89	0,90
Karang Asem	5107	0,94	1,00	0,97	0,99	0,85	0,92	0,66	0,99	0,90	0,85	0,92	0,90	0,91	0,91	0,91	0,90
Buleleng	5108	0,99	0,95	0,97	0,98	0,88	0,93	0,86	1,00	0,97	0,94	0,95	0,91	0,95	0,95	0,94	0,94
Denpasar	5171	1,00	0,96	0,98	1,00	0,89	0,95	1,00	1,00	1,00	1,00	0,98	0,97	0,98	0,98	0,99	0,99
Nusa Tenggara Barat		0,96	0,99	0,98	0,92	0,85	0,89	0,58	0,90	0,78	0,75	0,89	0,89	0,87	0,86	0,85	0,84
Lombok Barat	5201	0,91	0,99	0,95	0,93	0,78	0,86	0,84	0,93	0,85	0,80	0,89	0,88	0,87	0,87	0,87	0,86
Lombok Tengah	5202	0,99	1,00	1,00	0,97	0,89	0,93	0,84	0,90	0,73	0,76	0,91	0,91	0,89	0,88	0,88	0,87
Lombok Timur	5203	0,94	1,00	0,97	0,99	0,91	0,95	0,56	0,95	0,76	0,75	0,90	0,90	0,89	0,88	0,87	0,86
Sumbawa	5204	0,96	0,96	0,96	0,84	0,84	0,84	0,55	0,88	0,85	0,76	0,88	0,86	0,85	0,85	0,81	0,79
Dompu	5205	0,96	1,00	0,98	0,78	0,82	0,80	0,52	0,75	0,65	0,64	0,84	0,84	0,81	0,79	0,77	0,75
Bima	5206	0,96	0,98	0,97	0,86	0,82	0,84	0,52	0,81	0,72	0,68	0,86	0,85	0,83	0,82	0,80	0,78
Sumbawa Barat	5207	0,99	0,95	0,97	0,93	0,95	0,94	0,43	0,95	0,88	0,75	0,90	0,87	0,89	0,88	0,81	0,80
Lombok Utara	5208	0,98	1,00	0,99	0,92	0,79	0,86	0,45	0,90	0,79	0,71	0,88	0,88	0,85	0,84	0,82	0,80
Mataram	5271	1,00	1,00	1,00	1,00	0,93	0,97	0,89	1,00	0,98	0,96	0,98	0,98	0,97	0,97	0,97	0,97
Bima	5272	0,99	1,00	1,00	0,99	0,81	0,90	0,75	0,98	0,90	0,88	0,94	0,94	0,92	0,92	0,93	0,92
Nusa Tenggara Timur		0,74	0,88	0,81	0,32	0,66	0,49	0,36	0,57	0,73	0,55	0,67	0,64	0,62	0,61	0,54	0,48
Sumba Barat	5301	1,00	0,91	0,95	0,29	0,72	0,50	0,38	0,47	0,87	0,57	0,75	0,73	0,68	0,66	0,53	0,46
Sumba Timur	5302	0,67	0,78	0,73	0,24	0,58	0,41	0,31	0,64	0,84	0,60	0,63	0,59	0,58	0,58	0,49	0,43
Kupang	5303	0,88	0,89	0,89	0,47	0,67	0,57	0,36	0,56	0,66	0,53	0,72	0,69	0,66	0,65	0,58	0,54
Timor Tengah Selatan	5304	0,82	0,86	0,84	0,34	0,50	0,42	0,23	0,47	0,78	0,49	0,65	0,63	0,58	0,58	0,49	0,43
Timor Tengah Utara	5305	0,86	0,91	0,88	0,36	0,72	0,54	0,26	0,59	0,73	0,52	0,71	0,68	0,65	0,64	0,54	0,48
Belu	5306	0,66	0,87	0,77	0,24	0,61	0,43	0,46	0,41	0,67	0,51	0,62	0,59	0,57	0,56	0,52	0,45
Alor	5307	0,79	0,85	0,82	0,25	0,63	0,44	0,38	0,63	0,69	0,57	0,67	0,64	0,61	0,61	0,53	0,47
Lembata	5308	0,95	0,93	0,94	0,23	0,60	0,42	0,30	0,72	0,84	0,62	0,74	0,71	0,66	0,66	0,54	0,47
Flores Timur	5309	0,93	0,90	0,91	0,27	0,58	0,43	0,40	0,72	0,75	0,62	0,73	0,70	0,65	0,65	0,57	0,50
Sikka	5310	0,82	0,91	0,87	0,37	0,68	0,53	0,36	0,73	0,81	0,63	0,73	0,69	0,67	0,67	0,59	0,53
Ende	5311	0,78	0,86	0,82	0,35	0,75	0,55	0,35	0,70	0,83	0,63	0,71	0,68	0,67	0,66	0,56	0,51
Ngada	5312	0,84	0,93	0,88	0,22	0,71	0,47	0,60	0,84	0,77	0,74	0,76	0,73	0,69	0,70	0,63	0,56
Manggarai	5313	0,47	0,89	0,68	0,36	0,69	0,53	0,30	0,43	0,60	0,44	0,58	0,53	0,55	0,54	0,52	0,46
Rote Ndao	5314	0,78	0,88	0,83	0,39	0,77	0,58	0,43	0,67	0,79	0,63	0,72	0,68	0,68	0,68	0,60	0,55
Manggarai Barat	5315	0,37	0,79	0,58	0,16	0,73	0,44	0,35	0,37	0,53	0,42	0,51	0,47	0,48	0,47	0,44	0,37

Kabupaten	Kode BPS	KETERSEDIAAN FISIK			KUALIFIKASI GURU				KARAKTERISTIK FASILITAS				Indeks-Indeks Komposit				
		PAUD	SMP (6)	Sub Indeks	SD S1	SMP S1	Sub Indeks	Lab SMP	Listrik	Air	Sub Indeks	Akses	SMP 3 km	Setara D,	PCA	OLS	CI
Sumba Tengah	5316	0,99	0,87	0,93	0,28	0,69	0,48	0,30	0,49	0,76	0,52	0,72	0,69	0,64	0,63	0,50	0,43
Sumba Barat Daya	5317	0,68	0,88	0,78	0,20	0,61	0,41	0,50	0,47	0,67	0,55	0,64	0,60	0,58	0,57	0,53	0,46
Nagekeo	5318	0,75	0,92	0,84	0,23	0,80	0,51	0,43	0,76	0,78	0,65	0,72	0,69	0,67	0,67	0,58	0,51
Manggarai Timur	5319	0,22	0,78	0,50	0,12	0,64	0,38	0,24	0,27	0,55	0,36	0,43	0,38	0,41	0,40	0,37	0,30
Sabu Raijua	5320	0,77	0,77	0,77	0,34	0,65	0,50	0,40	0,45	0,76	0,54	0,65	0,58	0,60	0,60	0,50	0,46
Kupang	5371	1,00	1,00	1,00	1,00	0,78	0,89	0,80	1,00	0,96	0,92	0,95	0,95	0,94	0,94	0,95	0,94
Kalimantan Barat		0,71	0,85	0,78	0,47	0,60	0,53	0,46	0,62	0,82	0,63	0,69	0,67	0,65	0,65	0,61	0,57
Sambas	6101	0,91	0,97	0,94	0,80	0,66	0,73	0,70	0,93	0,96	0,86	0,87	0,83	0,84	0,85	0,84	0,82
Bengkayang	6102	0,58	0,78	0,68	0,51	0,59	0,55	0,37	0,71	0,77	0,62	0,64	0,61	0,62	0,62	0,59	0,56
Landak	6103	0,27	0,77	0,52	0,34	0,53	0,43	0,48	0,47	0,83	0,59	0,52	0,49	0,51	0,52	0,52	0,48
Pontianak	6104	0,94	0,98	0,96	0,84	0,77	0,80	0,59	0,93	0,93	0,81	0,88	0,88	0,86	0,86	0,83	0,81
Sanggau	6105	0,56	0,80	0,68	0,29	0,65	0,47	0,47	0,49	0,85	0,61	0,61	0,60	0,58	0,59	0,52	0,47
Ketapang	6106	0,77	0,76	0,76	0,30	0,53	0,41	0,28	0,54	0,72	0,51	0,62	0,60	0,56	0,56	0,47	0,42
Sintang	6107	0,45	0,60	0,52	0,40	0,64	0,52	0,44	0,49	0,68	0,54	0,53	0,50	0,53	0,53	0,49	0,46
Kapuas Hulu	6108	0,43	0,68	0,56	0,28	0,56	0,42	0,43	0,47	0,82	0,57	0,53	0,51	0,52	0,52	0,47	0,43
Sekadau	6109	0,64	0,86	0,75	0,36	0,65	0,50	0,40	0,40	0,90	0,57	0,64	0,63	0,61	0,60	0,53	0,47
Melawi	6110	0,42	0,71	0,56	0,34	0,41	0,38	0,26	0,45	0,65	0,45	0,49	0,47	0,46	0,47	0,45	0,41
Kayong Utara	6111	0,78	0,95	0,86	0,52	0,64	0,58	0,28	0,62	0,79	0,56	0,72	0,70	0,67	0,66	0,60	0,55
Kubu Raya	6112	0,85	0,98	0,91	0,65	0,58	0,61	0,39	0,81	0,84	0,68	0,79	0,78	0,74	0,74	0,71	0,67
Pontianak	6171	1,00	1,00	1,00	1,00	0,68	0,84	1,00	1,00	0,98	0,99	0,97	0,96	0,94	0,95	1,00	1,00
Singkawang	6172	0,92	1,00	0,96	0,88	0,73	0,81	0,75	0,97	0,99	0,90	0,91	0,91	0,89	0,90	0,90	0,88
Kalimantan Tengah		0,86	0,87	0,86	0,73	0,78	0,76	0,48	0,58	0,75	0,61	0,76	0,75	0,74	0,73	0,68	0,66
Kotawaringin Barat	6201	0,92	0,90	0,91	0,81	0,86	0,84	0,46	0,87	0,92	0,75	0,85	0,84	0,83	0,83	0,76	0,74
Kotawaringin Timur	6202	0,77	0,86	0,81	0,69	0,72	0,71	0,54	0,71	0,79	0,68	0,75	0,74	0,73	0,73	0,71	0,68
Kapuas	6203	0,80	0,88	0,84	0,79	0,82	0,81	0,41	0,46	0,70	0,52	0,74	0,72	0,72	0,70	0,67	0,65
Barito Selatan	6204	0,97	0,94	0,96	0,76	0,61	0,69	0,48	0,52	0,80	0,60	0,80	0,78	0,75	0,73	0,70	0,68
Barito Utara	6205	0,85	0,81	0,83	0,68	0,80	0,74	0,84	0,55	0,74	0,64	0,76	0,74	0,74	0,72	0,69	0,67
Sukamara	6206	0,90	0,73	0,81	0,85	0,87	0,86	0,50	0,81	0,81	0,71	0,79	0,77	0,79	0,79	0,72	0,72
Lamandau	6207	0,88	0,81	0,85	0,60	0,85	0,73	0,42	0,64	0,80	0,62	0,75	0,73	0,73	0,72	0,63	0,60
Seruyan	6208	0,85	0,81	0,83	0,52	0,75	0,63	0,27	0,58	0,64	0,50	0,69	0,68	0,65	0,64	0,55	0,52
Katingan	6209	0,81	0,83	0,82	0,52	0,85	0,69	0,40	0,61	0,73	0,58	0,72	0,70	0,70	0,68	0,60	0,56
Pulang Pisau	6210	0,89	0,93	0,91	0,93	0,79	0,86	0,63	0,61	0,81	0,68	0,83	0,81	0,82	0,80	0,80	0,79
Gunung Mas	6211	0,71	0,82	0,77	0,68	0,78	0,73	0,46	0,32	0,61	0,46	0,67	0,65	0,65	0,63	0,61	0,59
Barito Timur	6212	0,93	0,84	0,89	0,90	0,78	0,84	0,68	0,49	0,84	0,67	0,81	0,76	0,80	0,78	0,76	0,76
Murung raya	6213	0,92	0,78	0,85	0,55	0,71	0,63	0,46	0,31	0,56	0,44	0,68	0,67	0,64	0,61	0,55	0,53
Palangka Raya	6271	0,98	0,99	0,99	0,98	0,92	0,95	0,62	0,92	0,91	0,81	0,93	0,93	0,92	0,91	0,88	0,87

Kabupaten	Kode BPS	KETERSEDIAAN FISIK			KUALIFIKASI GURU			KARAKTERISTIK FASILITAS				Indeks-Indeks Komposit					
		PAUD	SMP (6)	Sub Indeks	SD S1	SMP S1	Sub Indeks	Lab SMP	Listrik	Air	Sub Indeks	Akses	SMP 3 km	Setara D _i	PCA	OLS	CI
Kalimantan Selatan		0,95	0,95	0,95	0,81	0,86	0,84	0,68	0,91	0,87	0,82	0,89	0,86	0,87	0,87	0,83	0,82
Tanah Laut	6301	1,00	0,96	0,98	0,91	0,93	0,92	0,58	0,95	0,89	0,80	0,91	0,86	0,90	0,89	0,85	0,83
Kota Baru	6302	0,89	0,77	0,83	0,51	0,87	0,69	0,64	0,75	0,71	0,70	0,76	0,73	0,74	0,73	0,66	0,63
Banjär	6303	0,93	0,95	0,94	0,77	0,87	0,82	0,57	0,88	0,81	0,75	0,86	0,82	0,84	0,83	0,79	0,77
Barito Kuala	6304	0,96	0,93	0,95	0,90	0,92	0,91	0,72	0,97	0,89	0,86	0,91	0,88	0,90	0,90	0,88	0,87
Tapin	6305	0,86	0,93	0,89	0,81	0,87	0,84	0,82	0,90	0,74	0,82	0,86	0,81	0,85	0,85	0,86	0,85
Hulu Sungai Selatan	6306	0,95	0,95	0,95	0,68	0,84	0,76	0,88	0,94	0,89	0,90	0,90	0,87	0,87	0,88	0,85	0,83
Hulu Sungai Tengah	6307	0,94	0,95	0,94	0,72	0,86	0,79	0,72	0,92	0,94	0,86	0,89	0,84	0,86	0,87	0,82	0,80
Hulu Sungai Utara	6308	0,93	1,00	0,96	0,96	0,86	0,91	0,73	0,96	0,93	0,87	0,92	0,91	0,91	0,91	0,91	0,90
Tabalong	6309	0,95	0,98	0,97	0,86	0,81	0,83	0,58	0,84	0,82	0,75	0,88	0,86	0,85	0,84	0,82	0,81
Tanah Bumbu	6310	0,96	0,93	0,95	0,80	0,79	0,79	0,50	0,95	0,93	0,79	0,87	0,83	0,84	0,84	0,78	0,77
Balangan	6311	0,87	0,94	0,91	0,88	0,81	0,85	0,65	0,88	0,84	0,79	0,86	0,81	0,85	0,84	0,84	0,83
Banjarmasin	6371	1,00	1,00	1,00	0,97	0,93	0,95	0,98	1,00	0,98	0,98	0,99	0,99	0,98	0,98	0,98	0,98
Banjär Baru	6372	1,00	1,00	1,00	1,00	0,93	0,97	0,79	1,00	1,00	0,93	0,97	0,97	0,96	0,96	0,94	0,94
Kalimantan Timur		0,95	0,94	0,94	0,73	0,80	0,77	0,49	0,83	0,85	0,72	0,84	0,83	0,81	0,80	0,75	0,72
Paser	6401	0,94	0,88	0,91	0,88	0,88	0,88	0,46	0,88	0,85	0,73	0,85	0,81	0,84	0,83	0,77	0,76
Kutai Barat	6402	0,76	0,72	0,74	0,27	0,54	0,40	0,30	0,64	0,74	0,56	0,62	0,60	0,57	0,57	0,47	0,42
Kutai Kartanegara	6403	0,95	0,95	0,95	0,89	0,74	0,81	0,51	0,85	0,90	0,75	0,86	0,84	0,84	0,83	0,80	0,79
Kutai Timur	6404	0,93	0,89	0,91	0,73	0,77	0,75	0,31	0,79	0,84	0,65	0,80	0,77	0,77	0,76	0,68	0,66
Berau	6405	0,96	0,80	0,88	0,52	0,88	0,70	0,80	0,86	0,82	0,83	0,83	0,82	0,80	0,81	0,73	0,71
Malinau	6406	0,71	0,85	0,78	0,53	0,74	0,63	0,30	0,69	0,63	0,54	0,68	0,67	0,65	0,64	0,59	0,55
Bulungan	6407	0,90	0,97	0,93	0,51	0,85	0,68	0,39	0,71	0,85	0,65	0,80	0,79	0,76	0,74	0,65	0,60
Nunukan	6408	0,74	0,87	0,80	0,42	0,78	0,60	0,24	0,68	0,70	0,54	0,68	0,67	0,65	0,64	0,55	0,50
Penajam Paser Utara	6409	0,99	0,92	0,96	0,96	0,93	0,94	0,63	0,92	0,92	0,82	0,91	0,88	0,91	0,90	0,86	0,85
Tana Tidung	6410	0,86	0,81	0,84	0,84	0,80	0,82	0,13	0,53	0,75	0,47	0,72	0,72	0,71	0,68	0,60	0,59
Balikpapan	6471	1,00	1,00	1,00	0,99	0,96	0,98	0,88	0,99	0,99	0,95	0,98	0,98	0,98	0,98	0,97	0,96
Samarinda	6472	1,00	1,00	1,00	0,98	0,92	0,95	0,77	0,99	0,95	0,91	0,96	0,96	0,95	0,95	0,93	0,93
Tarakan	6473	0,97	1,00	0,98	0,98	0,95	0,96	0,90	1,00	1,00	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,96
Bontang	6474	1,00	1,00	1,00	0,90	0,96	0,93	0,44	0,96	1,00	0,80	0,93	0,93	0,91	0,90	0,82	0,80
Sulawesi Utara		0,96	0,98	0,97	0,69	0,72	0,71	0,62	0,92	0,81	0,78	0,86	0,85	0,82	0,82	0,80	0,76
Bolaang Mongondow	7101	0,85	0,93	0,89	0,51	0,66	0,59	0,56	0,98	0,70	0,75	0,79	0,78	0,74	0,75	0,73	0,68
Minahasa	7102	0,98	1,00	0,99	0,72	0,73	0,73	0,71	0,79	0,93	0,81	0,88	0,87	0,84	0,84	0,81	0,78
Kepulauan Sangihe	7103	0,91	0,96	0,93	0,53	0,71	0,62	0,68	0,86	0,85	0,80	0,83	0,80	0,78	0,79	0,75	0,71
Kepulauan Talaud	7104	0,97	0,97	0,97	0,73	0,70	0,71	0,61	0,94	0,74	0,76	0,86	0,83	0,82	0,81	0,81	0,78
Minahasa Selatan	7105	0,99	0,96	0,97	0,85	0,77	0,81	0,55	0,92	0,81	0,76	0,88	0,87	0,85	0,84	0,82	0,80
Minahasa Utara	7106	0,99	0,99	0,99	0,75	0,82	0,79	0,50	0,89	0,93	0,77	0,88	0,88	0,85	0,84	0,78	0,75
Bolaang Mongondow Utara	7107	0,89	0,93	0,91	0,51	0,74	0,62	0,70	0,93	0,62	0,75	0,80	0,77	0,76	0,76	0,75	0,71

Kabupaten	Kode BPS	KETERSEDIAAN FISIK			KUALIFIKASI GURU				KARAKTERISTIK FASILITAS				Indeks-Indeks Komposit				
		PAUD	SMP (6)	Sub Indeks	SD S1	SMP S1	Sub Indeks	Lab SMP	Listrik	Air	Sub Indeks	Akses	SMP 3 km	Setara D,	PCA	OLS	CI
Siau Tagulandang Biaro	7108	0,99	0,99	0,99	0,39	0,66	0,52	0,52	0,99	0,78	0,76	0,83	0,80	0,76	0,76	0,70	0,64
	7109	0,98	0,99	0,99	0,89	0,74	0,82	0,82	0,92	0,86	0,79	0,89	0,89	0,87	0,86	0,85	0,84
	7110	0,79	0,98	0,88	0,32	0,54	0,43	0,39	0,99	0,58	0,65	0,72	0,68	0,66	0,66	0,65	0,58
	7111	0,84	0,96	0,90	0,77	0,57	0,67	0,53	0,95	0,45	0,64	0,78	0,77	0,74	0,73	0,79	0,77
Manado	7171	0,99	1,00	1,00	0,95	0,81	0,88	0,93	0,98	0,90	0,94	0,96	0,95	0,94	0,94	0,96	0,96
	7172	1,00	0,99	0,99	0,83	0,76	0,79	0,89	0,90	0,99	0,86	0,91	0,91	0,88	0,88	0,85	0,83
Tomohon	7173	1,00	1,00	1,00	0,95	0,90	0,93	1,00	1,00	1,00	1,00	0,99	0,99	0,98	0,98	0,99	0,98
	7174	1,00	1,00	1,00	0,83	0,77	0,80	0,83	1,00	0,91	0,91	0,93	0,93	0,90	0,91	0,91	0,89
Sulawesi Tengah		0,92	0,93	0,93	0,57	0,76	0,67	0,50	0,70	0,69	0,63	0,79	0,77	0,74	0,73	0,68	0,64
Banggai Kepulauan	7201	0,83	0,90	0,87	0,59	0,65	0,62	0,34	0,50	0,75	0,53	0,72	0,69	0,67	0,66	0,61	0,57
	7202	0,86	0,88	0,87	0,64	0,81	0,72	0,42	0,67	0,75	0,61	0,76	0,74	0,74	0,72	0,66	0,63
Morowali	7203	0,89	0,84	0,87	0,49	0,77	0,63	0,49	0,59	0,70	0,59	0,74	0,70	0,70	0,68	0,61	0,57
	7204	0,99	0,94	0,97	0,69	0,74	0,71	0,61	0,70	0,84	0,72	0,84	0,81	0,80	0,79	0,75	0,72
Donggala	7205	0,91	0,93	0,92	0,59	0,83	0,71	0,54	0,74	0,65	0,64	0,79	0,78	0,76	0,74	0,70	0,67
	7206	0,84	0,96	0,90	0,56	0,77	0,67	0,54	0,60	0,76	0,63	0,77	0,77	0,73	0,72	0,68	0,64
Bul	7207	0,87	0,96	0,91	0,25	0,81	0,53	0,46	0,67	0,64	0,59	0,74	0,72	0,68	0,66	0,59	0,51
	7208	0,97	0,97	0,97	0,54	0,72	0,63	0,42	0,79	0,61	0,61	0,79	0,77	0,74	0,72	0,68	0,63
Parigi Moutong		0,89	0,92	0,91	0,39	0,71	0,55	0,50	0,74	0,58	0,61	0,75	0,72	0,69	0,68	0,64	0,58
Tojo Una-Una	7210	0,92	0,93	0,93	0,64	0,77	0,70	0,50	0,81	0,51	0,61	0,79	0,76	0,75	0,73	0,72	0,69
	7271	1,00	1,00	1,00	0,96	0,89	0,92	0,89	0,99	0,91	0,93	0,96	0,96	0,95	0,95	0,96	0,95
Sulawesi Selatan		0,93	0,96	0,95	0,94	0,88	0,91	0,65	0,85	0,81	0,77	0,89	0,86	0,88	0,86	0,86	0,85
Selayar	7301	0,99	0,97	0,98	0,75	0,80	0,77	0,56	0,71	0,80	0,69	0,85	0,82	0,81	0,80	0,76	0,73
	7302	0,99	0,97	0,98	0,94	0,85	0,90	0,62	0,80	0,83	0,75	0,89	0,87	0,88	0,86	0,84	0,83
Bantaeng	7303	0,89	0,85	0,87	1,00	0,91	0,96	0,89	0,88	0,80	0,85	0,88	0,85	0,89	0,89	0,91	0,92
	7304	0,98	0,98	0,98	0,96	0,96	0,96	0,84	0,72	0,65	0,67	0,88	0,87	0,87	0,84	0,84	0,84
Takalar	7305	0,93	0,98	0,95	0,93	0,87	0,90	0,74	0,94	0,78	0,82	0,90	0,87	0,89	0,89	0,90	0,89
	7306	0,95	0,99	0,97	0,92	0,87	0,90	0,55	0,85	0,81	0,73	0,88	0,86	0,87	0,85	0,83	0,82
Gowa	7307	1,00	0,97	0,98	0,95	0,92	0,93	0,57	0,80	0,73	0,70	0,89	0,87	0,87	0,85	0,83	0,83
	7308	0,90	0,97	0,93	0,98	0,92	0,95	0,74	0,87	0,79	0,80	0,90	0,88	0,90	0,89	0,90	0,90
Pangkajene Dan Kepulauan		0,90	0,94	0,92	0,90	0,85	0,88	0,59	0,94	0,80	0,78	0,87	0,84	0,86	0,85	0,84	0,83
Baru	7310	0,98	0,99	0,99	0,98	0,91	0,94	0,73	0,77	0,81	0,77	0,91	0,89	0,90	0,89	0,88	0,88
	7311	0,94	0,95	0,95	0,98	0,90	0,94	0,65	0,78	0,80	0,74	0,88	0,85	0,88	0,86	0,85	0,85
Soppeng	7312	0,98	0,95	0,97	0,96	0,89	0,92	0,84	0,94	0,95	0,91	0,94	0,92	0,93	0,93	0,92	0,92
	7313	0,96	0,96	0,96	0,97	0,88	0,93	0,59	0,86	0,81	0,75	0,89	0,86	0,88	0,87	0,85	0,85
Sidenreng Rappang		0,97	0,95	0,96	0,98	0,93	0,96	0,87	0,93	0,87	0,89	0,94	0,91	0,93	0,93	0,93	0,94

Kabupaten	Kode BPS	KETERSEDIAAN FISIK			KUALIFIKASI GURU			KARAKTERISTIK FASILITAS				Indeks-Indeks Komposit						
		PAUD	SMP (6)	Sub Indeks	SD S1	SMP S1	Sub Indeks	Lab SMP	Listrik	Air	Sub Indeks	Akses	SMP 3 km	Setara D _i	PCA	OLS	CI	
Pinrang	7315	0,95	0,96	0,95	0,98	0,92	0,95	0,72	0,89	0,85	0,82	0,91	0,89	0,91	0,90	0,89	0,89	
	7316	0,94	0,91	0,93	0,98	0,89	0,93	0,82	0,95	0,81	0,86	0,91	0,85	0,91	0,90	0,91	0,92	
	7317	0,83	0,95	0,89	0,93	0,81	0,87	0,52	0,82	0,76	0,70	0,83	0,80	0,82	0,81	0,81	0,80	
	7318	0,72	0,92	0,82	0,91	0,77	0,84	0,45	0,78	0,75	0,66	0,77	0,73	0,77	0,76	0,77	0,76	
	7322	0,83	0,97	0,90	0,79	0,81	0,80	0,55	0,66	0,78	0,66	0,81	0,77	0,79	0,77	0,76	0,74	
	7325	0,96	0,91	0,93	0,91	0,90	0,91	0,69	0,87	0,88	0,81	0,89	0,86	0,88	0,88	0,85	0,84	
	7326	0,62	0,92	0,77	0,93	0,86	0,90	0,59	0,83	0,71	0,71	0,78	0,74	0,79	0,78	0,82	0,82	
	7371	1,00	1,00	1,00	0,97	0,87	0,92	0,91	0,99	0,92	0,94	0,96	0,96	0,95	0,95	0,97	0,96	
	7372	1,00	1,00	1,00	1,00	0,90	0,95	0,80	1,00	0,96	0,92	0,97	0,97	0,96	0,96	0,95	0,94	
Palopo	7373	0,89	0,96	0,93	0,98	0,94	0,96	0,79	0,92	0,95	0,89	0,92	0,90	0,92	0,92	0,91	0,91	
Sulawesi Tenggara		0,86	0,96	0,91	0,58	0,77	0,68	0,52	0,53	0,74	0,60	0,77	0,75	0,73	0,71	0,67	0,63	
	Buton	7401	0,95	0,96	0,95	0,64	0,77	0,70	0,39	0,66	0,76	0,61	0,80	0,78	0,75	0,74	0,68	0,64
	Muna	7402	0,84	0,98	0,91	0,65	0,84	0,74	0,52	0,52	0,73	0,59	0,78	0,76	0,74	0,72	0,69	0,65
	Konawe	7403	0,75	0,96	0,86	0,42	0,79	0,61	0,60	0,48	0,66	0,58	0,72	0,69	0,68	0,66	0,64	0,59
	Kolaka	7404	0,92	0,94	0,93	0,71	0,74	0,72	0,51	0,47	0,82	0,60	0,79	0,77	0,75	0,73	0,69	0,66
	Konawe Selatan	7405	0,63	0,94	0,79	0,40	0,74	0,57	0,58	0,49	0,69	0,59	0,68	0,64	0,65	0,64	0,62	0,57
	Bombana	7406	0,89	0,89	0,89	0,61	0,77	0,69	0,49	0,38	0,77	0,55	0,75	0,71	0,71	0,69	0,62	0,59
	Wakatobi	7407	0,97	1,00	0,99	0,53	0,74	0,63	0,40	0,57	0,87	0,62	0,80	0,80	0,75	0,73	0,65	0,59
	Kolaka Utara	7408	0,88	0,87	0,87	0,84	0,77	0,80	0,70	0,62	0,80	0,71	0,81	0,77	0,79	0,78	0,78	0,77
Buton Utara	7409	0,91	0,98	0,94	0,32	0,65	0,49	0,30	0,15	0,43	0,29	0,66	0,65	0,57	0,54	0,49	0,42	
	7410	0,45	0,92	0,68	0,26	0,70	0,48	0,34	0,14	0,53	0,34	0,54	0,50	0,50	0,47	0,46	0,39	
	7471	0,96	1,00	0,98	0,91	0,93	0,92	0,91	0,97	0,93	0,94	0,96	0,95	0,95	0,95	0,95	0,94	
	Bau-Bau	7472	0,99	1,00	1,00	0,96	0,91	0,93	0,72	0,99	0,97	0,89	0,95	0,95	0,94	0,94	0,91	0,91
	Gorontalo		0,97	0,99	0,98	0,75	0,68	0,72	0,49	0,88	0,84	0,73	0,85	0,84	0,81	0,80	0,77	0,74
	Boalemo	7501	0,99	1,00	1,00	0,75	0,67	0,71	0,51	0,81	0,77	0,70	0,85	0,84	0,80	0,79	0,77	0,74
	Gorontalo	7502	0,98	0,99	0,99	0,70	0,60	0,65	0,45	0,89	0,86	0,73	0,84	0,83	0,79	0,79	0,76	0,72
	Pohuwato	7503	0,98	0,98	0,98	0,74	0,80	0,77	0,63	0,91	0,86	0,80	0,89	0,86	0,85	0,85	0,81	0,78
	Bone Bolango	7504	0,95	0,95	0,95	0,75	0,80	0,78	0,53	0,89	0,84	0,75	0,86	0,83	0,83	0,82	0,78	0,75
Gorontalo Utara	7505	0,84	0,98	0,91	0,65	0,69	0,67	0,29	0,76	0,70	0,58	0,76	0,74	0,72	0,71	0,68	0,63	
	Gorontalo	7571	1,00	1,00	1,00	0,98	0,79	0,89	0,78	1,00	0,93	0,96	0,94	0,94	0,94	0,94	0,93	0,93
	Sulawesi Barat		0,88	0,93	0,90	0,73	0,83	0,78	0,44	0,51	0,66	0,54	0,77	0,75	0,74	0,72	0,68	0,66
	Majene	7601	0,92	0,95	0,94	0,90	0,88	0,89	0,73	0,84	0,83	0,80	0,89	0,87	0,87	0,86	0,85	0,85
	Polewali Mandar	7602	0,86	0,95	0,90	0,91	0,88	0,90	0,45	0,67	0,75	0,62	0,82	0,80	0,81	0,79	0,76	0,75
	Mamasa	7603	0,69	0,94	0,82	0,59	0,69	0,64	0,37	0,35	0,64	0,45	0,67	0,64	0,64	0,61	0,60	0,56
	Mamuju	7604	0,95	0,90	0,93	0,60	0,85	0,72	0,39	0,36	0,51	0,42	0,73	0,72	0,69	0,65	0,60	0,56
	Mamuju Utara	7605	0,88	0,91	0,90	0,75	0,85	0,80	0,32	0,42	0,71	0,48	0,75	0,73	0,70	0,63	0,63	0,61

Kabupaten	Kode BPS	KETERSEDIAAN FISIK			KUALIFIKASI GURU			KARAKTERISTIK FASILITAS				Indeks-Indeks Komposit					
		PAUD	SMP (6)	Sub Indeks	SD S1	SMP S1	Sub Indeks	Lab SMP	Listrik	Air	Sub Indeks	Akses	SMP 3 km	Setara D _i	PCA	OLS	CI
Maluku		0,76	0,92	0,84	0,41	0,48	0,45	0,37	0,64	0,59	0,53	0,67	0,66	0,61	0,60	0,59	0,54
Maluku Tenggara Barat	8101	0,92	0,89	0,91	0,17	0,28	0,22	0,27	0,53	0,62	0,47	0,64	0,63	0,53	0,53	0,47	0,39
Maluku Tenggara	8102	0,76	0,81	0,78	0,26	0,55	0,41	0,32	0,58	0,52	0,47	0,62	0,60	0,56	0,55	0,50	0,44
Maluku Tengah	8103	0,87	0,96	0,91	0,52	0,45	0,49	0,56	0,84	0,68	0,69	0,76	0,75	0,70	0,70	0,71	0,67
Buru	8104	0,77	0,92	0,84	0,28	0,63	0,46	0,29	0,59	0,68	0,52	0,67	0,64	0,61	0,60	0,52	0,46
Kepulauan Aru	8105	0,39	0,70	0,55	0,26	0,42	0,34	0,21	0,32	0,25	0,26	0,42	0,40	0,38	0,37	0,39	0,34
Seram Bagian Barat	8106	0,52	0,96	0,74	0,35	0,55	0,45	0,45	0,63	0,60	0,56	0,63	0,62	0,58	0,58	0,61	0,54
Seram Bagian Timur	8107	0,37	0,95	0,66	0,33	0,68	0,51	0,23	0,42	0,39	0,35	0,54	0,50	0,50	0,48	0,51	0,44
Maluku Barat Daya	8108	0,65	0,70	0,68	0,06	0,30	0,18	0,10	0,31	0,44	0,28	0,46	0,44	0,38	0,37	0,30	0,24
Buru Selatan	8109	0,50	0,93	0,71	0,18	0,34	0,26	0,10	0,36	0,30	0,25	0,48	0,45	0,41	0,39	0,41	0,33
Ambon	8171	0,99	1,00	0,99	0,92	0,61	0,76	0,88	1,00	0,90	0,92	0,93	0,93	0,89	0,90	0,94	0,93
Tual	8172	0,86	0,99	0,93	0,33	0,54	0,44	0,60	0,71	0,54	0,62	0,74	0,72	0,66	0,65	0,66	0,60
Maluku Utara		0,72	0,91	0,81	0,30	0,65	0,47	0,37	0,60	0,56	0,51	0,65	0,64	0,60	0,59	0,55	0,48
Halmahera Barat	8201	0,72	0,96	0,84	0,18	0,51	0,34	0,29	0,71	0,39	0,46	0,63	0,61	0,55	0,54	0,53	0,45
Halmahera Tengah	8202	0,85	0,93	0,89	0,23	0,81	0,52	0,42	0,52	0,46	0,47	0,69	0,68	0,63	0,60	0,54	0,47
Kepulauan Sula	8203	0,53	0,92	0,73	0,09	0,48	0,29	0,38	0,43	0,61	0,47	0,56	0,55	0,50	0,49	0,47	0,39
Halmahera Selatan	8204	0,53	0,84	0,68	0,18	0,61	0,40	0,32	0,46	0,44	0,41	0,54	0,53	0,49	0,48	0,46	0,39
Halmahera Utara	8205	0,72	0,85	0,78	0,28	0,66	0,47	0,35	0,61	0,57	0,51	0,64	0,61	0,59	0,58	0,52	0,46
Halmahera Timur	8206	0,77	0,93	0,85	0,26	0,69	0,47	0,25	0,60	0,71	0,52	0,68	0,66	0,61	0,60	0,51	0,44
Pulau Morotai	8207	0,42	0,75	0,59	0,25	0,56	0,41	0,20	0,55	0,34	0,37	0,48	0,45	0,45	0,44	0,44	0,38
Ternate	8271	0,99	1,00	0,99	0,86	0,91	0,89	0,73	0,96	0,89	0,86	0,93	0,93	0,91	0,91	0,88	0,87
Tidore Kepulauan	8272	0,90	0,99	0,94	0,71	0,95	0,83	0,52	0,87	0,72	0,70	0,85	0,84	0,82	0,81	0,77	0,74
Papua Barat		0,72	0,81	0,76	0,29	0,70	0,50	0,43	0,65	0,51	0,53	0,64	0,62	0,60	0,59	0,54	0,49
Fakfak	9101	0,70	0,82	0,76	0,28	0,63	0,46	0,75	0,62	0,46	0,61	0,66	0,63	0,61	0,61	0,62	0,57
Kaimana	9102	0,64	0,63	0,64	0,16	0,61	0,39	0,36	0,69	0,53	0,53	0,55	0,55	0,52	0,52	0,44	0,39
Teluk Wondama	9103	0,52	0,63	0,58	0,15	0,70	0,43	0,33	0,47	0,21	0,34	0,47	0,43	0,45	0,43	0,40	0,35
Teluk Bintuni	9104	0,79	0,78	0,79	0,25	0,50	0,37	0,19	0,72	0,53	0,48	0,61	0,60	0,55	0,54	0,47	0,41
Manokwari	9105	0,77	0,82	0,80	0,33	0,79	0,56	0,57	0,54	0,57	0,56	0,68	0,65	0,64	0,63	0,58	0,53
Sorong Selatan	9106	0,38	0,57	0,47	0,21	0,85	0,53	0,18	0,45	0,37	0,33	0,44	0,42	0,45	0,43	0,35	0,31
Sorong	9107	0,73	0,83	0,78	0,39	0,74	0,56	0,63	0,79	0,59	0,67	0,70	0,68	0,67	0,67	0,65	0,60
Raja Ampat	9108	0,42	0,68	0,55	0,12	0,76	0,44	0,18	0,62	0,39	0,40	0,48	0,45	0,46	0,45	0,39	0,33
Tambrauw	9109	0,23	0,49	0,36	0,18	0,89	0,54	0,00	0,38	0,38	0,25	0,36	0,36	0,38	0,36	0,26	0,22
Maybrat	9110	0,21	0,57	0,39	0,08	0,72	0,40	0,75	0,48	0,09	0,44	0,41	0,37	0,41	0,40	0,47	0,43
Sorong	9171	0,94	0,99	0,97	0,70	0,69	0,69	0,88	0,97	0,85	0,90	0,89	0,89	0,85	0,86	0,88	0,85

Kabupaten	Kode BPS	KETERSEDIAAN FISIK			KUALIFIKASI GURU			KARAKTERISTIK FASILITAS				Indeks-Indeks Komposit						
		PAUD	SMP (6)	Sub Indeks	SD S1	SMP S1	Sub Indeks	Lab SMP	Listrik	Air	Sub Indeks	Akses	SMP 3 km	Setara D _i	PCA	OLS	CI	
Papua		0,39	0,58	0,48	0,30	0,55	0,42	0,35	0,48	0,41	0,41	0,45	0,43	0,44	0,44	0,43	0,40	
Merauke	9401	0,82	0,76	0,79	0,30	0,69	0,50	0,36	0,67	0,72	0,58	0,67	0,65	0,62	0,62	0,52	0,47	
Jayawijaya	9402	0,26	0,58	0,42	0,22	0,50	0,36	0,29	0,13	0,23	0,22	0,35	0,31	0,33	0,31	0,33	0,30	
Jayapura	9403	0,87	0,86	0,86	0,51	0,73	0,62	0,61	0,80	0,51	0,64	0,75	0,73	0,71	0,70	0,69	0,65	
Nabire	9404	0,83	0,85	0,84	0,38	0,60	0,49	0,62	0,65	0,64	0,63	0,71	0,70	0,65	0,65	0,63	0,58	
Kepulauan Yapen	9408	0,47	0,79	0,63	0,40	0,57	0,48	0,37	0,35	0,43	0,38	0,53	0,50	0,50	0,48	0,50	0,46	
Biak Numfor	9409	0,65	0,93	0,79	0,35	0,51	0,43	0,29	0,74	0,48	0,51	0,63	0,61	0,58	0,57	0,57	0,51	
Paniai	9410	0,08	0,46	0,27	0,19	0,52	0,36	0,00	0,17	0,07	0,08	0,23	0,19	0,23	0,21	0,22	0,19	
Puncak Jaya	9411	0,05	0,22	0,14	0,24	0,37	0,30	0,00	0,45	0,38	0,28	0,21	0,19	0,24	0,25	0,21	0,20	
Mimika	9412	0,80	0,86	0,83	0,55	0,72	0,63	0,24	0,63	0,45	0,44	0,67	0,67	0,63	0,61	0,57	0,53	
Boven Digoel	9413	0,59	0,63	0,61	0,06	0,67	0,37	0,38	0,62	0,29	0,43	0,51	0,50	0,47	0,46	0,41	0,35	
Mappi	9414	0,17	0,23	0,20	0,03	0,57	0,30	0,25	0,55	0,30	0,36	0,27	0,27	0,29	0,30	0,23	0,21	
Asmat	9415	0,25	0,32	0,29	0,06	0,67	0,37	0,25	0,34	0,40	0,33	0,32	0,30	0,33	0,33	0,23	0,21	
Yahukimo	9416	0,03	0,37	0,20	0,06	0,34	0,20	0,11	0,11	0,37	0,19	0,20	0,15	0,20	0,19	0,17	0,14	
Pegunungan Bintang	9417	0,01	0,09	0,05	0,28	0,45	0,37	0,50	0,11	0,13	0,25	0,17	0,17	0,22	0,22	0,25	0,28	
Tolikara	9418	0,01	0,18	0,09	0,15	0,18	0,17	0,14	0,26	0,04	0,15	0,12	0,11	0,14	0,14	0,18	0,17	
Sarmi	9419	0,50	0,63	0,57	0,19	0,60	0,40	0,45	0,49	0,38	0,44	0,49	0,48	0,47	0,46	0,44	0,40	
Keerom	9420	0,77	0,73	0,75	0,52	0,68	0,60	0,89	0,78	0,66	0,77	0,73	0,68	0,71	0,71	0,72	0,70	
Waropen	9426	0,31	0,66	0,49	0,22	0,52	0,37	0,30	0,61	0,30	0,40	0,44	0,41	0,42	0,42	0,44	0,39	
Supiori	9427	0,63	0,73	0,68	0,38	0,53	0,45	0,44	0,73	0,35	0,51	0,58	0,53	0,55	0,54	0,56	0,52	
Mamberamo Raya	9428	0,11	0,30	0,20	0,09	0,37	0,23	0,00	0,07	0,03	0,03	0,16	0,16	0,15	0,14	0,13	0,10	
Nduga	9429	0,11	0,17	0,14	0,22	0,08	0,15	0,50	0,18	0,55	0,41	0,22	0,22	0,23	0,25	0,27	0,28	
Lanny Jaya	9430	0,00	0,55	0,27	0,13	0,36	0,24	0,46	0,11	0,14	0,24	0,26	0,20	0,25	0,24	0,34	0,30	
Mamberamo Tengah	9431	0,00	0,36	0,18	0,20	0,57	0,39	0,20	0,04	0,15	0,13	0,21	0,16	0,23	0,21	0,22	0,20	
Yalimo	9432	0,00	0,39	0,19	0,22	0,57	0,40	0,00	0,15	0,19	0,12	0,21	0,19	0,23	0,22	0,20	0,18	
Puncak	9433	0,00	0,12	0,06	0,29	0,53	0,41	0,33	0,23	0,00	0,19	0,17	0,16	0,22	0,21	0,24	0,26	
Dogiyai	9434	0,13	0,45	0,29	0,18	0,34	0,26	0,10	0,21	0,21	0,17	0,25	0,21	0,24	0,23	0,24	0,21	
Intan Jaya	9435	0,05	0,20	0,12	0,64	0,25	0,44	0,25	0,25	0,06	0,19	0,21	0,21	0,25	0,24	0,34	0,38	
Deiyai	9436	0,00	0,64	0,32	0,14	0,61	0,38	0,50	0,17	0,00	0,22	0,30	0,21	0,31	0,28	0,39	0,34	
Jayapura	9471	0,98	1,00	0,99	0,91	0,74	0,82	0,64	0,96	0,88	0,83	0,91	0,91	0,88	0,88	0,88	0,86	

Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat

Jl. Medan Merdeka Barat No. 3
Jakarta Pusat 10110 Indonesia
Phone (62-21) 3459077
Fax (62-21) 3459077

PNPM Support Facility

Jl. Diponegoro No. 72 Menteng
Jakarta Pusat 10310 Indonesia
Phone (62-21) 3148175
Fax (62-21) 3190209

